# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
# (RPJMD)
## KABUPATEN TOJO UNA-UNA
## TAHUN 2021 - 2026






**PEMERINTAH DAERAH**
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**
**TAHUN 2021**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeral Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021-2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah.

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una
16. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

## BAB II
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

### Pasal 2

(1) RPJMD merupakan Penjabaran dari Visi dan Misi dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rincian Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen RPJMD pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan,
b. Bab II Gambaran Umum Daerah,
c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah
d. Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
e. Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran,
f. Bab VI Strategi arah kebijakan dan Program Pembangunan,
g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah,
h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
i. Bab IX Penutup

### Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaklanjuti dalam Renstra-PD, RKPD dan Renja-PD.

### Pasal 5

RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

(1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
   c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan maka harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing yang berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 29 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

MOH. SYARIF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 91,05/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

PD menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra-PD dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan secara teknis disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan 5 (lima) tahapan yaitu:
(1) Persiapan Penyusunan RPJMD
(2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
(3) Penyusunan Rancangan RPJMD
(4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
(5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD dan
(6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 306

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... DI-i
**DAFTAR TABEL** ..... DT-i
**DAFTAR GAMBAR** ..... DG-i

**BAB I PENDAHULUAN**
1.1. Latar Belakang ..... I-2
1.2. Dasar Hukum ..... I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-8
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-15
1.5. Sistematika ..... I-17

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi ..... II-2
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah ..... II-2
2.1.2. Iklim Wilayah Kabupaten Tojo Una-una ..... II-4
2.1.3. Demografi Kabupaten Tojo Una-una ..... II-5
2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II-6
2.1.5. Potensi Sumber Daya Alam ..... II-16
2.1.6. Wilayah Rawan Bencana ..... II-18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-21
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi ..... II-21
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-27
2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-37
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar ..... II-37
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II-56
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan ..... II-80
2.3.4. Penunjang Urusan ..... II-84
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-88
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II-88
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II-91
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-98
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II-104
2.5. Evaluasi Capaian Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-123

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III-3
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III-4
3.1.2. Neraca Daerah ..... III-17

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III-27
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III-27
3.2.2. Analisis Pembiayaan ..... III-30
3.3. Kerangka Pendanaan ..... III-31
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III-33
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... III-39

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tojo una-una ..... IV-2
4.1.1 Aspek Kesejateraan masyarakat ..... IV-14
4.1.2 Aspek Pelayanan Umum ..... IV-19
4.2 Isu-isu Strategis ..... IV-39
4.2.1 Isu Strategis di Tingkat Global ..... IV-39
4.2.2 Telaahan Kebijakan Nasional ..... IV-49
4.2.3 Isu Regional Sulawesi ..... IV-60
4.2.4 Isu Provinsi Sulawesi Tengah ..... IV-64
4.2.5 Isu Strategis daerah Lainnya ..... IV-74
4.2.6 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's) ..... IV-75
4.2.7 Penelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-una ..... IV-77
4.2.8 Penelaah Kajian lingkungan Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tojo Una-una ..... IV-78
4.2.9 Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-una ..... IV-84
4.3 Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-una ..... IV-97

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
5.1 Visi ..... V-2
5.2 Misi ..... V-6
5.3 Tujuan dan Sasaran ..... V-12
5.4 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan Dokumen perencanaan Terkait. ..... V-19
5.4.1 Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... V-19
5.4.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS) ..... V-20
5.4.3 Keselarasan SDGs Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... V-24

5.4.4 Keselarasan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... V-27
5.4.5 Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan RPJMNasional tahun 2020-2024. ..... V-29

**BAB VI STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

6.1 Strategi ..... VI-2
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan ..... VI-4
6.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Terkait Penanggulangan Kemiskinan ..... VI-19
6.3.1 Pendekatan Spasial didalam Pengentasan Kemiskinan..... VI-19
6.4 Tema Pembangunan ..... VI-23
6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-25

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH**

8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... VIII-2

**BAB IX PENUTUP**

9.1. Kaidah Pelaksanaan ..... IX-2
9.2. Pedoman Transisi ..... IX-3

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... | I-8 |
| Gambar 2.1 | Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 ..... | II-3 |
| Gambar 2.2. | Peta Administrasi Kabupaten Tojo Una-Una ..... | II-4 |
| Gambar 2.3 | KSN dan KSP dalam Kabupaten Tojo Una Una ..... | II-15 |
| Gambar 2.4 | KSK Ekonomi dan Sosial Budaya ..... | II-15 |
| Gambar 2.5 | KSK Pendayagunaan SDA dan Lingkungan ..... | II-16 |
| Gambar 2.6 | Laju Inflasi Tahun 2016-2020 ..... | II-24 |
| Gambar 2.7 | PDRB per Kapita Tahun 2016-2020 (Rp.Juta) ..... | II-25 |
| Gambar 2.8 | Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-26 |
| Gambar 2.9 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-27 |
| Gambar 2.10 | Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... | II-28 |
| Gambar 2.11 | Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... | II-29 |
| Gambar 2.12 | Umur Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... | II-30 |
| Gambar 2.13 | Balita Gizi Kurang (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... | II-31 |
| Gambar 2.14 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... | II-32 |
| Gambar 2.15 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-33 |
| Gambar 2.16 | Rasio Penduduk yang Bekerja (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-34 |
| Gambar 2.17 | Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-34 |
| Gambar 2.18 | Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-35 |
| Gambar 2.19 | Opini BPK Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020..... | II-37 |
| Gambar 2.20 | Jumlah Murid TK/RA (orang) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... | II-38 |
| Gambar 2.21 | Rumah Tinggal Bersanitasi Layak (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-46 |

Gambar 2.22 Rumah Tinggal Berakses Air Minum Layak (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-47
Gambar 2.23 PMKS yang Memperoleh Bantuan (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 ..... II-54
Gambar 2.24 PMKS yang Mendapatkan KUBE (orang) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... II-54
Gambar 2.25 Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-55
Gambar 2.26 Penyandang Catat Fisik dan Mental, serta Lansia tidak Potensial yang Menerima Bantuan Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019 ..... II-56
Gambar 2.27 Cakupan Wilayah Akses Layanan Internet dan Telepon Seluler (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 ..... II-74
Gambar 2.28 Jumlah Kantor Pos Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-75
Gambar 2.29 Koperasi Aktif Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-76
Gambar 2.30 Rumah Tangga Pengguna Listrik (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-81
Gambar 2.31 Ekspor Bersih Perdagangan (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019 ..... II-82
Gambar 2.32 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-83
Gambar 2.33 Jumlah Penempatan Transmigrasi (KK) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-83
Gambar 2.34 Distribusi Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non-Pangan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 ..... II-90
Gambar 2.35 Kondisi Banjir Bandang di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 ..... II-94
Gambar 2.36 Luas Kawasan Terpandu Mandiri (Ha) Kabupaten Tojo Una-Una ..... II-95
Gambar 2.37 Luas Kawasan Industri Kecil (Ha) Kabupaten Tojo Una-Una ..... II-96
Gambar 2.38 Jumlah Restoran/Rumah Makan (unit) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019 ..... II-100
Gambar 2.39 Akses Masyarakat Terhadap Air Minum Layak (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-101
Gambar 2.40 Akses Rumah Tangga Terhadap Listrik (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-102
Gambar 2.41 Rasio Ekspor-Impor terhadap PDB Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-103

Gambar 2.42 Rekap Capaian Indikator Setiap Misi RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-124

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-5
Gambar 3.2 Proporsi Struktur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-6
Gambar 3.3 Proporsi Pendapatan Terhadap PAD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-8
Gambar 3.4 Proporsi Pendapatan Terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-10
Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-11
Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... III-12

Gambar 4.1 Permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una ..... IV-3
Gambar 4.2 Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2020 ..... IV15
Gambar 4.3 Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 ..... IV-50
Gambar 4.4 Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi ..... IV-51
Gambar 4.5 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2024 ..... IV-52
Gambar 4.6 Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2020 ..... IV-65
Gambar 4.7 Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional Tahun 2010-2020 ..... IV-66
Gambar 4.8 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020 (Y on Y) ..... IV-67
Gambar 4.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan antar Provinsi Kuartal-3 tahun 2020 ..... IV-68
Gambar 4.10 Komposisi Capaian TPB Kabupaten Tojo Una-Una ..... IV-80
Gambar 4.11 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tojo Una-Una ..... IV-81
Gambar 4.12 Peta Kawasan Sekitar Bandara ..... IV-97
Gambar 4.13 Keterkaitan Isu-Isu Strategis Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... IV-108

Gambar 5.1 Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2021-2026 ..... V-7
Gambar 5.2. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan RPJMNasional Tahun 2020-2024 ..... V-30
Gambar 6.1 Peta Sebaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 ..... VI-22
Gambar 6.2 Tema/Tahapan Pembangunan Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2021-2026 ..... VI-24

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 ..... | II-2 |
| Tabel 2.2 | Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Tojo Una-Una dengan Ibu Kota Kecamatan ..... | II-3 |
| Tabel 2.3 | Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 ..... | II-5 |
| Tabel 2.4 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 ..... | II-6 |
| Tabel 2.5 | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 ..... | II-22 |
| Tabel 2.6 | Kontribusi PDRB Kabupaten Tojo Una-Una Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 | II-23 |
| Tabel 2.7 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Tahun 2016-2020 36 | |
| Tabel 2.8 | Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-36 |
| Tabel 2.9 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... | II-39 |
| Tabel 2.10 | Angka Partisipasi Kasar (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... | II-40 |
| Tabel 2.11 | Angka Partisipasi Murni (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... | II-40 |
| Tabel 2.12 | Angka Partisipasi Sekolah (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... | II-41 |
| Tabel 2.13 | Jumlah Sekolah (unit) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... | II-41 |
| Tabel 2.14 | Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-42 |
| Tabel 2.15 | Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-42 |
| Tabel 2.16 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar (per 1.000) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-43 |
| Tabel 2.17 | Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah (per 1.000) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-44 |
| Tabel 2.18 | Angka Kematian Bayi (per 1.000) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... | II-44 |

Tabel 2.19 Kondisi Jalan Baik (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-45
Tabel 2.20 Panjang Jalan per Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-45
Tabel 2.21 Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-48
Tabel 2.22 Tempat Ibadah per Penduduk (per 1.000) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-48
Tabel 2.23 Jenis Dinding Rumah Tinggal (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel 2.24 Jenis Lantai Rumah Tinggal (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel 2.25 Jenis Atap Rumah Tinggal (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-50
Tabel 2.26 Jenis Tempat Tinja Masyarakat (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-50
Tabel 2.27 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Orang per Desa) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-51
Tabel 2.28 Pelanggaran K3 (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-51
Tabel 2.29 Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-52
Tabel 2.30 Tingkat Waktu Tanggap Layanan Kebakaran (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... II-52
Tabel 2.31 Penegakan Perda (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-53
Tabel 2.32 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... II-56
Tabel 2.33 Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... II-57
Tabel 2.34 Pencari Kerja yang Mendaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-58
Tabel 2.35 Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... II-59
Tabel 2.36 Buruh/Pekerja yang Menjadi Program Jamsostek Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-59
Tabel 2.37 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-60
Tabel 2.38 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-61
Tabel 2.39 Persentase Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-62

Tabel 2.40 Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas yang Status Pekerjaan Utama Berusaha Sendiri Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-62
Tabel 2.41 Pencari Kerja Perempuan Yang Terdaftar Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-63
Tabel 2.42 Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019 ..... II-63
Tabel 2.23 Tenaga Kerja Perempuan di Luar Sektor Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019 ..... II-64
Tabel 2.44 Cakupan Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-65
Tabel 2.45 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-65
Tabel 2.46 Ketersediaan Pangan Utama dan Pengawasan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel 2.47 Tanah Bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-67
Tabel 2.48 Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020. II-68
Tabel 2.49 Penduduk ber KTP Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 II-68
Tabel 2.50 Bayi berAkte Kelahiran Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-69
Tabel 2.51 Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2020 ..... II-69
Tabel 2.52 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-70
Tabel 2.53 Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-70
Tabel 2.54 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.55 Perhubungan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.56 Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 ..... II-76
Tabel 2.77 Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-77
Tabel 2.58 Statistik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-78
Tabel 2.59 Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-78
Tabel 2.60 Perpustakaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-79
Tabel 2.61 Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.62 Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-80
Tabel 2.63 Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-81
Tabel 2.64 Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-84

Tabel 2.65 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.66 Keuangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2.67 Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-86
Tabel 2.68 Pengawasan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2.69 Sekretariat Dewan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 II-87
Tabel 2.70 Angka Konsumsi RT Tahun 2016-2020 Kabupaten Tojo Una-Una ..... II-89
Tabel 2.71 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Tojo Una-Una ..... II-90
Tabel 2.72 Luas Wilayah Produktif Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018 s/d 2020 ..... II-91
Tabel 2.73 Panjang Jalan (Meter) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 s/d 2019 ..... II-92
Tabel 2.74 Jumlah penumpang Melalui Bandara/Pelabuhan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-93
Tabel 2.75 Jumlah Barang Melalui Bandara/Pelabuhan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-93
Tabel 2.76 Luas Wilayah Rawan Kebanjiran Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... II-94
Tabel 2.77 Jumlah Koperasi (unit) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-99
Tabel 2.78 Jumlah Sarana dan Prasarana perbankan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-99
Tabel 2.79 Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020 ..... II-100
Tabel 2.80 Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler (% Desa) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2020 ..... II-102
Tabel 2.81 Persentase Penyelesaian Kejahatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-103
Tabel 2.82 Kualitas Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-104
Tabel 2.83 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-105
Tabel 2.84 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... II-106
Tabel 2.85 Rangkuman Hasil Evaluasi Indikator Setiap Misi RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-123
Tabel 2.86 Evaluasi Indikator Misi 1 RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-125

Tabel 2.87 Evaluasi Indikator Misi 2 RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-129
Tabel 2.88 Evaluasi Indikator Misi 3 RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-130
Tabel 2.89 Evaluasi Indikator Misi 4 RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-132
Tabel 2.90 Evaluasi Indikator Misi 5 RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 ..... II-134

Tabel 3. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-7
Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Klasifikasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020..... III-13
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-14
Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayan Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-16
Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Daerah (Rp juta) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-19
Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-21
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-28
Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-28
Tabel 3.9 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020 ..... III-29
Tabel 3.10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... III-31
Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020 ..... III-31
Tabel 3.12 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 s/d Tahun 2026 ..... III-36
Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... III-40
Tabel 3.14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026..... III-41

Tabel 4.1 Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan Daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Tojo Una-Una..... IV-4

Tabel 4.2 Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah Kabupaten Tojo Una-Una..... IV-6
Tabel 4.3 Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah Kabupaten Tojo Una-Una..... IV-7
Tabel 4.4 Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian) Kabupaten Tojo Una-Una ..... IV-8
Tabel 4.5 Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Kemampuan Fiskal Yang Rendah Dalam Membiayai Upaya Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Tojo Una-Una..... IV-10
Tabel 4.6 Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya resiko bencana alam dan non alam Di Kabupaten Tojo Una-Una ..... IV-11
Tabel 4.7 Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik Di Kabupaten Tojo Una-Una..... IV-13
Tabel 4.8 Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Menurut Urusan..... IV-20
Tabel 4.9 Identifikasi RPJMD Daerah Lain ..... IV-75
Tabel 4.10 Capaian TPB Kabupaten Tojo Una-Una terhadap Target Nasional IV-79
Tabel 4.11 Hasil Penapisan dan Pemilihan Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-Una..... IV-99

Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2021-2026..... V-3
Tabel 5.2 Uraian Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2021-2026 ..... V-12
Tabel 5.3 Visi Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Dan Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 .. V-15
Tabel 5.4 Keselarasan Misi RPJMD Periode 2021–2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2005–2025 ..... V-19
Tabel 5.5 Keselarasan Misi RPJMD Tojo Una-Una 2021–2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ..... V-20
Tabel 5.6 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021–2026 dan Pencapaian Tujuan SDGs Desa ..... V-24
Tabel 5.7 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021–2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 ..... V-28
Tabel 5.8 Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMNasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026..... V-31

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... VI-2
Tabel 6.2 Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan Disertai Perangkat Daerah Penanggungjawab ..... VI-4
Tabel 6.3 Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026..... VI-10
Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tojo Una-Una ..... VI-24

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Tojo Una-Una ..... VII-3
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... VII-4

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ..... VIII- 5



# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah *(regional development planning)* memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan daerah *(regional growht)*. Adanya perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif *(effective)* dan efisien *(efficient)*, serta mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi dasar atau referensi dalam penyelenggaraan pembangunan pada waktu mendatang. Perencanaan pembangunan daerah menjadi pondasi utama dalam meletakan rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan perencanaan pembangunan *(development planning)* bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pemba-ngunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan *(linkage)* dan konsistensi *(consistency)* antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhir masa jabatan kepala daerah. RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pembangunan daerah dimaknai sebagai proses mengubah kondisi daerah menjadi lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan, dengan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *(people welfare)*. Dimana, pembangunan daerah merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada pasal 258 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah *(regional competitiveness)*.

Langkah strategis dan penting dalam pembangunan daerah diawali dengan menyiapkan perencanaan yang baik dan berkualitas. Merujuk pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan *(integrated)* dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan RPJPD untuk pembangunan 20 tahun, RPJMD untuk pembangunan

5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025, dimana RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) pada RPJPD. Dimana pada tahap keempat ini, untuk *Mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang aman bertumpu pada masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.* Prioritas tahap ke-4 ini akan diwujudkan oleh Bupati **Muhammad Lahay,SE.,MM** dan Wakil Bupati **Ilham,SH** melalui implementasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas program percepatan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik, tahapan penyusunan RPJMD dalam menyempurnakan dokumen teknokratik, maka disusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 yang tahapan telah diatur secara sistimatis, kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD. Seluruh tahapan tersebut dirumuskan menjadi dokumen RPJMD secara komprehensif dan holistik melalui penetapan peraturan daerah.

Periodisasi RPJMD hasil pemilihan langsung Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dimana sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020, dan menjalankan amanat pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan Daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada poin ke-3, diuraikan bahwa periodesasi RPJMD, bukan berdasarkan waktu menjabat Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2024, namun periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Rumusan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan tahapan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang telah dirumuskan sebelum Bupati dan Wakil Bupati dilantik, sebagai penyempurnaan

rancangan awal, rancangan RPJMD dan rancangan akhir berdasarkan Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD dan konsultasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda dan DPRD kabupaten Tojo UnaUna, juga memperhatikan kondisi global, nasional, dan provinsi yang tidak terpisahkan dari dinamika tersebut, sekaligus menjadi peluang *(opportunity)* dan tantangan *(threat)* bagi pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una ke depan. Aspek-aspek penting yang tidak dapat terhindarkan antara lain, pemulihan krisis kesehatan *(health crisis)*, perekonomian global, dan nasional akibat pandemi Covid-19 yang diprediksikan sulit balik pada kondisi awal sebelum pendemi *(rebound)* dan memerlukan waktu panjang, stabilitas politik global yang dinamis, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), bencana alam dan non alam, perubahan iklim *(climage change),* serta perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital yang sangat cepat. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain, krisis ekonomi, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama, terorisme dan radikalisme, percepatan pengentasan kemiskinan, serta kebijakan pembangunan nasional di wilayah Sulawesi dan arah visi misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, agar sinergi, selaras, dan sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 disusun pada masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya menyentuh permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh dan berdampak buruk terhadap pembangunan sektor-sektor lain, antara lain yakni pendidikan, ekonomi dan keuangan, khususnya menurun pendapatan dari dana transfer, akibat *refocusing* anggaran, juga terjadinya penurunan pendapatan asli daerah karena turunnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, infrastruktur, Industri, UMKM termasuk sektor unggulan daerah (trisula) Kabupaten Tojo Una-Una yaitu Pariwisata, Kelautan Perikanan, dan Pertanian.

Adanya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, secara beruntun pada Juli-Agustus Tahun 2021, akibat deformasi sesar lokal (tanpa nama) di Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Palu, serta adanya perubahan iklim yang berdampak pada naiknya temperatur, curah hujan, atau angin mengakibatkan perubahan pola tanam, serta terjadi peningkatan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah setempat. Kondisi-kondisi tersebut menjadi bagian penting dan urgen untuk dipehatikan, sehingga perencanaan daerah yang harus lebih sensitif bencana dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una periode ini mendapatkan tantangan *(challenges)* yang cukup besar dan mendasar, untuk dapat menyusun skenario-skenario pembangunan daerah yang adaptif *(adaptive)* dan akomodatif *(acomodative)* dalam membangkitkan dan menggerakan perekonomian daerah, untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, dan Sejahtera.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

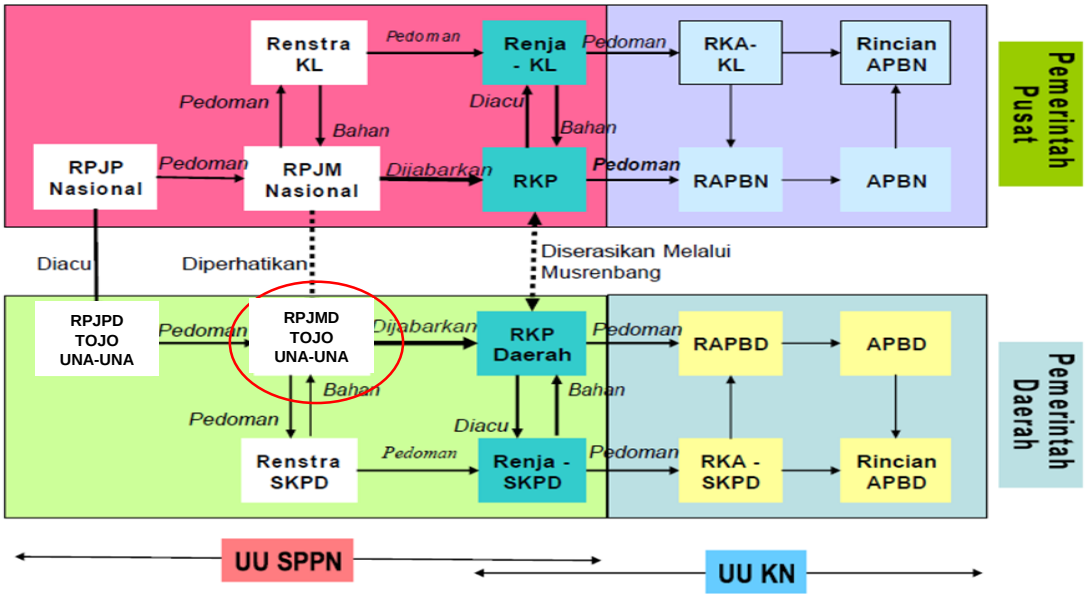
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
25. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
27. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tataruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2).

## 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan *as one unit* dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 wajib disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan terdapat pada gambar berikut.




**Gambar 1.1**
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

1. **Hubungan RPJMD dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)**

   Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi, misi, dan 7 (tujuh) prioritas nasional yang dijabarkan dalam RPJMN yang berlaku saat ini. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**" yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

   1. *Peningkatan kualitas manusia Indonesia;*

2. *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;*
3. *Pembangunan yang merata dan berkeadilan;*
4. *Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;*
5. *Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;*
6. *Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya;*
7. *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;*
8. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;*
9. *Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.*

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong", yaitu:

1. *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;*
2. *Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;*
3. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;*
4. *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;*
5. *Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;*
6. *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;*
7. *Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.*

## 2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 harus selaras dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Dimana penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una bersamaan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

RPJMD Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 juga menjadi bagian dari pencapaian indikator RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, sehingga antara perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dengan perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 terjadi keselarasan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 dengan mengedepankan penyelarasan Visi Misi, prioritas-prioritas; sasaran program yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya Visi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

**"*Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju*"**

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;*
2. *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;*
3. *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;*
4. *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;*
5. *Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;*
6. *Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;*
7. *Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga;*
8. *Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital;*
9. *Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.*

### 3. Hubungan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una dengan RPJPD Kabupaten (Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025)

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una. RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap ke-4 (2020-2025) pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una (Tahun 2005-2025). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025, dalam mewujudkan visi yaitu: ***"Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Yang Sejahtera Dan Berbudaya, Didukung Oleh Sumber Daya Serta Mampu Bersaing ".*** Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu:

1. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan;*
2. *Membangun komunitas wilayah melalui pengembangan kota, kecamatan, kelurahan dan desa.*

3. *Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya melalui pelayanan prima yang berkeadilan.*
4. *Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.*
5. *Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan*

Adapun Amanat skala prioritas pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut: *Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukkan untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang aman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan* ***terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.***

*Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum,* ***terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat****. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan,* ***terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.***

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan, semakin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan semakin efisien dan efektif manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagamaan, bergotong royong, dinamis, dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada Tahun 2025 mencapai kesejahteraan, serta tingkat pengangguran, dan penduduk miskin semakin rendah.

4. **Hubungan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tojo Una-Una (Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031)**

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek *spasial* menjadi penting dilakukan, agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat yang berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan merujuk dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una terkait pemanfaatan ruang, rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan kawasan strategis kabupaten, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program berbasis spasial sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. **Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Startegis RPJMD (KLHS-RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)**

Harmonisasi dan integrasi antara RPJMD dan KLHS RPJMD dilakukan untuk memastikan, bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una periode 2021-2026 termasuk kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, memberikan panduan di dalam menerjemahkan pembangunan berkelanjutan dengan mengevaluasi dokumen Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya dianalisis keterkaitan dengan perencanaan di daerah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup, serta memperhatikan tekanan-tekanan lingkungan hidup dari luar maupun dari dalam yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan daerah ke arah lebih baik. Selain itu, juga isu-isu stategis prioritas dan proyeksi alternatif mengacu pada TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang termaktub dalam dokumen SDG's.

6. **Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) (Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota)**

Sesuai amanat Permendagri 53 tahun 2020 pasal 5 bahwa TKPKD Kabupaten/

Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, danpemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya dan fungsi salah satunya menyusun dokumen RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Dokumen ***Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) berjangka waktu 5 (lima) Tahun,*** sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, pasal 20 ayat 3 dimana RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD, sehingga idealnya disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Untuk Kelembagaan di tingkat Kabupaten/Kota, telah dibentuk TKPK Kabupaten Tojo Una-Una, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati, Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tojo Una-Una dan Keanggotaan TKPK Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una kedepan lebih sistematis dan terarah sejalan dengan perencanaan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan *(stakeholders)* untuk mewujudkan sinergi antara target indikator pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026 dan Target SDGs Kabupaten Tojo Una-Una terkait penangulangan kemiskinan daerah, diperlukan dokumen lebih rinci yang memberikan arah program dan kegiatan, serta lokasi prioritas penangganan penanggulangan kemiskinan yang dimuat di dalam RPKD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026. RPJMD adalah dokumen yang bersifat makro sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut (lebih detail) dalam RPKD. Dokumen ini memberikan arah dan memperkuat keseluruhan proses pengentasan kemiskinan yang lebih fokus pada penyelesaian akar masalah kemiskinan *(roots of poverty problem)*. Tujuan Pembangunan tidak hanya sebatas pada pertumbuhan ekonomi *(economy growth)* semata, namun juga berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan *(poverty reduction)*, sehingga bermuara pada terjadinya pertumbuhan kesejahteraan setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu, target dan indikator penurunan kemiskinan di dalam kerangka waktu periodesiasi RPJMD juga ditetapkan sebagai target pencapaian pengentasan kemiskinan dalam RPKD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

### 7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerinatah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una akan dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah; analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; analisis kapasitas riil keuangan Daerah; penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

### 6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD Kabupaten Tojo Una-Una dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan, serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/ atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tojo Una-Una.

Perangkat Daerah merupakan numenklatur pengganti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Renstra-PD atau sebelumnya disebut dengan Renstra-PD sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, memuat antara lain: analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam

RPJMD, Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri 86 tahun 2017, Renstra-PD tidak memuat Visi, misi, Perangkat Daerah (PD) akan tetapi mengacu pada Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

**7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 serta rekomendasi konsultasi publik, konsultasi tematik sektor unggulan daerah, Musrenbang RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain: Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (RAN-SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah, dan RAD-TPB (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara khusus beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat Kabupaten Tojo Una-Una yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una (Riparda/Riparkab), Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tojo Una-Una (RPIK), Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tojo Una-Una, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tojo Una-Una, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Tojo Una-Una.

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan data target dan kinerja *(performance)* pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu dan menetapkan gamba-ran pengelolaan keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis pemba-ngunan jangka menengah daerah, visi misi, tujuan disertai indikator kinerja utama (IKU) daerah, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program yang disertai pendanaan indikatif pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang Tangguh, Maju, dan Sejahtera sesuai visi Misi. Secara khusus, maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-

Una Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**1. Maksud**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, sehingga pembangunan daerah yang bersifat holistik, integral, tematik dan spasial dapat dilaksanakan secara sinergi, koordinatif, dan kolaboratif serta inklusif dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

**2. Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran umum daerah *(regional existing)* tentang kondisi daerah Kabu-paten Tojo Una-Una yang selaras dan mendukung penyelesaian isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah;
2. Untuk menjelaskan tentang kinerja keuangan *(financial performance)* di masa lalu yakni kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan penghitungan kerangka penda-naan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penganggaran dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026;
3. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan dae-rah *(problems of regional development)* yang terkait dengan penyelengga-raan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis *(strategic issues)* yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah;
4. Untuk menerjemahkan visi misi *(implementation of vision-mission)* Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una periode 2021-2026 secara jelas, terarah dan fokus kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pemba-ngunan daerah tahun 2021-2026;
5. Untuk menetapkan *key performance indicators* atau indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026.
6. Untuk menjabarkan program prioritas daerah *(regional priority program)* yang disertai pendanaan indikatif pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una 5 (lima) tahunan yang disertai indicator program yang terukur.
7. Sebagai dasar rujukan *(base of reference)* perangkat daerah di dalam menyusun Rencana Strategis Perengkat daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026.

## 1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (Sembilan) Bab sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 pada paragraf 5, RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat 5. Dimana perumusan RPJMD, disajikan paling sedikit memuat 9 (Sembilan) Bab, sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD sebelumnya.

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

**BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut, termasuk arah kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan tataruang daerah serta rangkuman hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD Sebelumnya.

**BAB V VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2021-2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan serta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.

**BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, tema pembangunan tahunan serta program pembangunan daerah yang mendukung visi misi.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

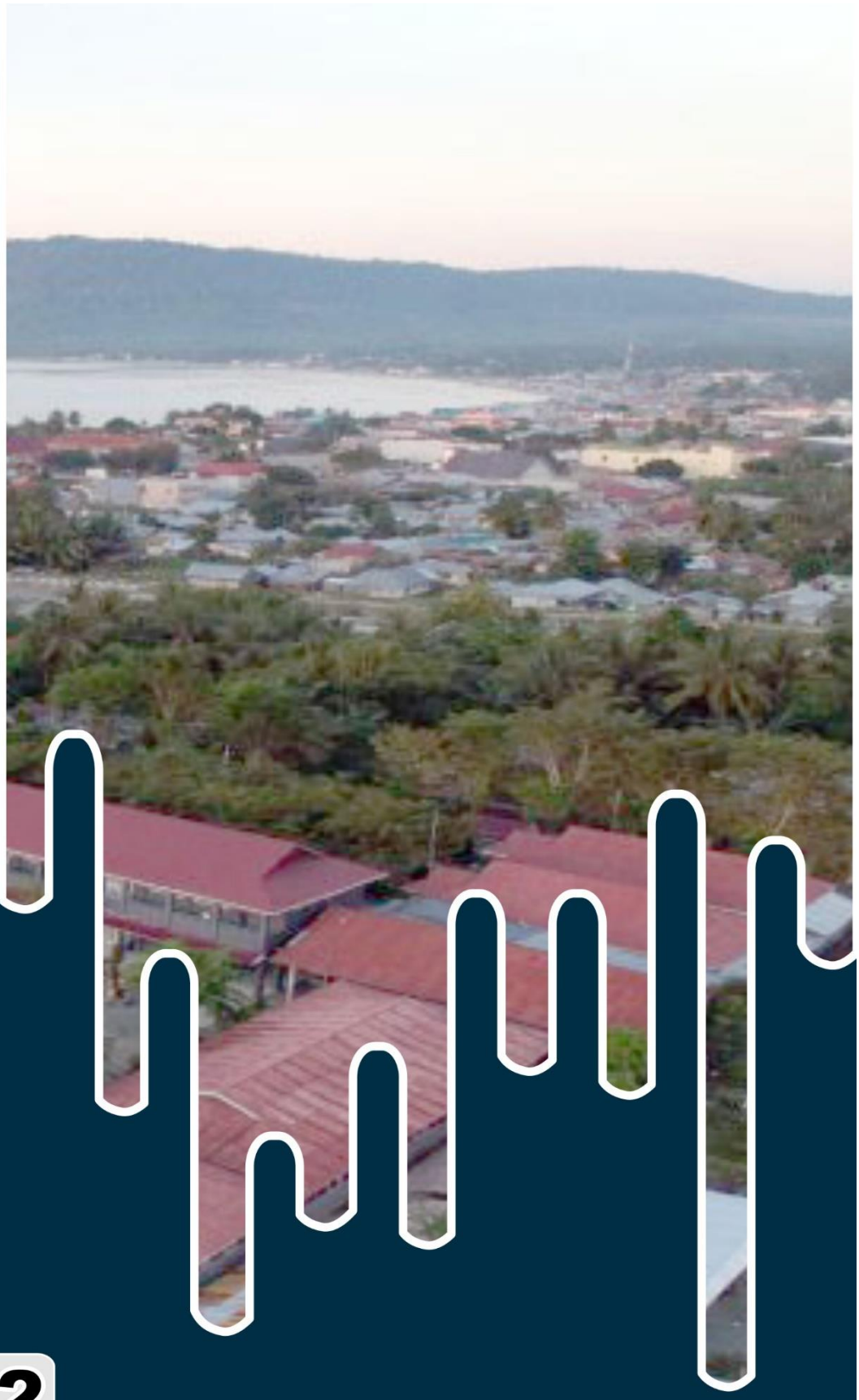
Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program unggulan, program prioritas, maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati pada Akhir periode masa jabatan, indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sampai dengan tahun 2026.

**BAB IX PENUTUP**

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan.



# BAB 2

# GAMBARAN UMUM DAERAH

## 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

### 2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

#### 2.1.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas 5.721,51 km2 terdiri atas 12 kecamatan pada tahun 2021. Wilayah Tojo Una-Una terbagi menjadi dua kategori yaitu wilayah daratan 6 kecamatan dan kepulauan 6 kecamatan. Bagian Utara dari Kabupaten Tojo Una-Una berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara, bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Poso, dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai. Secara geografis, Kabupaten Tojo Una-Una terletak di 00 06’ 56” Lintang Utara sampai 020 01’ 41” Lintang Selatan dan 1210 05’ 25” Bujur Timur sampai 1230 06’ 17” Bujur Timur.

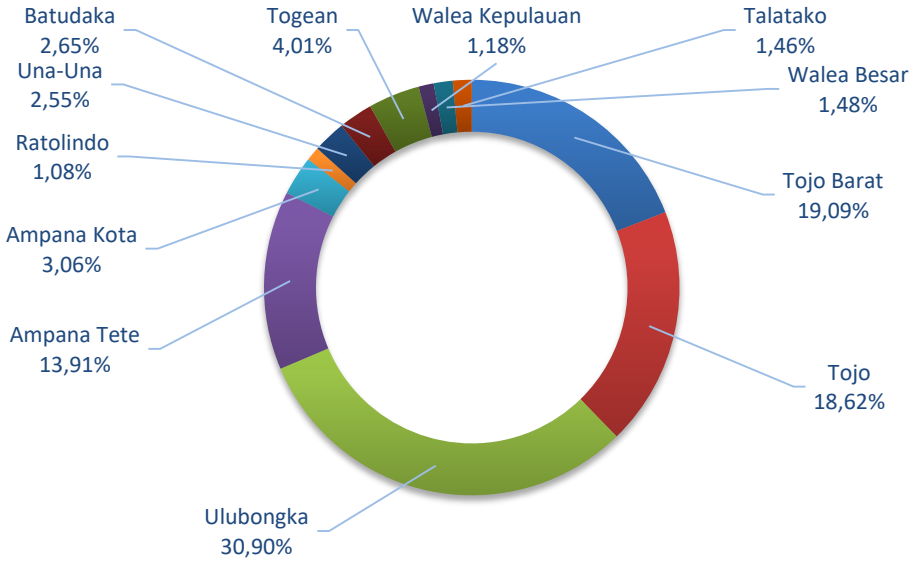
Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una–una umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya berada diantara 1-800 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng Kabupaten Tojo Una–Una bervariasi mulai dari kemiringan 0-20$^0$ (Datar-landai), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Ampana Kota. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman. Topografi kemiringan 3-150$^0$ (landai agak miring), tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, tetapi diperlukan usaha konser-vasi tanah dan air. Tanah dengan kemiringan 16-400$^0$ (miring agak curam), tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian, cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian. Namun, perlu dikelola dengan baik pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi. Terakhir kemiringan di atas 40$^0$, merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Kondisi tanah ini sangat potensial terkena, erosi sehingga perlu upaya pelestarian kawasan hutan lindung.

**Tabel 2.1**
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan**
**di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021**

| No. | Kecamatan | Luas (Km²) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Tojo Barat | 1.092,27 | 19,09 |
| 2 | Tojo | 1.065,48 | 18,62 |
| 3 | Ulubongka | 1.767,11 | 30,89 |
| 4 | Ampana Tete | 796,02 | 13,91 |
| 5 | Ampana Kota | 178,47 | 4,15 |
| 6 | Ratolindo | 58,83 | 1,08 |
| 7 | Una-Una | 146,16 | 2,55 |
| 8 | Batudaka | 151,91 | 2,66 |
| 9 | Togean | 229,51 | 4,01 |
| 10 | Walea Kepulauan | 67,6 | 1,18 |
| 11 | Talatako | 83,64 | 1,46 |
| 12 | Walea Besar | 84,51 | 1,48 |
| Kabupaten Tojo Una-Una | | **5.721,51** | **100** |

Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka Tahun 2021

Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una diuraikan dalam gambar di bawah ini.




Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka 2021

**Gambar 2.1**
**Persentase Luas Kecamatan**
**di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021**

Berdasakan uraian dalam gambar di atas, diketahui 3 (tiga) kecamatan dengan wilayah terluas yaitu: Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Ulubongka, sedangkan kecamatan dengan luas relatif kecil adalah Kecamatan Ratolindo, Kecamatan Talatako, Kecamatan Walea Besar, dan Kecamatan Walea Kepulauan.

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5.721,51 km$^2$ dan luas laut 3.566,21 km$^2$, dengan panjang pantai ± 951,115 km. Wilayah daratan meliputi 6 kecamatan yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir pantai. Sedangkan wilayah kepulauan yang terdiri dari 6 kecamatan merupakan gugusan pulau-pulau yang berjumlah sekitar 81 pulau yang sudah memiliki nama, dan 41 pulau di antaranya sudah berpenghuni.

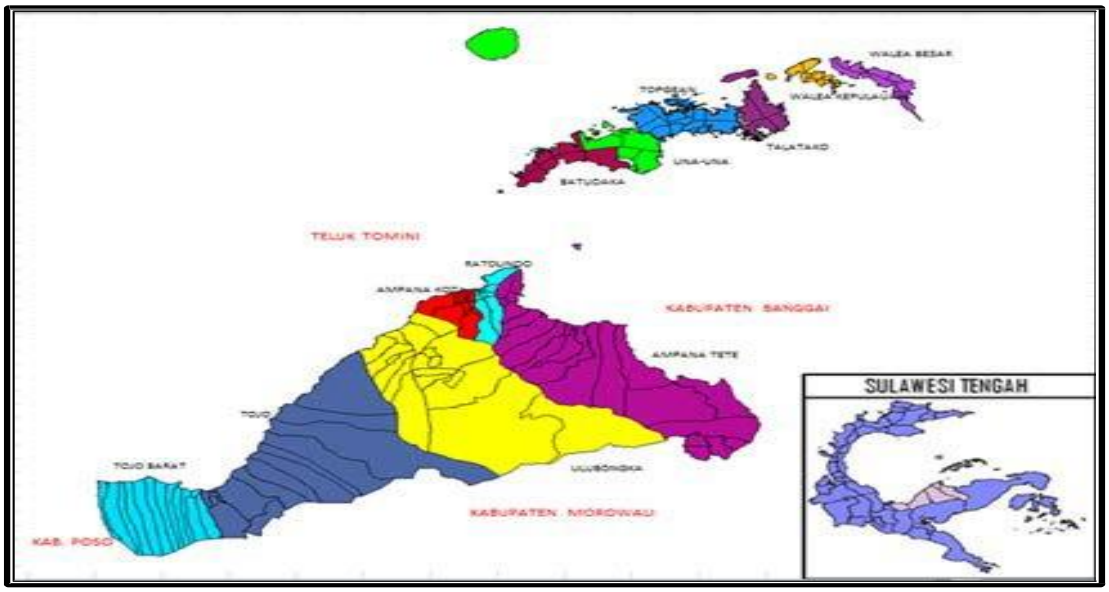
**Tabel 2.2**
**Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Tojo Una-Una**
**dengan Ibu Kota Kecamatan**

| No. | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Jarak Ke Ampana | | Jalur Transportasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Darat (Km) | Laut (Mil) | |
| 1 | Tojo Barat | Tombiano | 115 | - | Darat |
| 2 | Tojo | Uekuli | 104 | - | Darat |
| 3 | Ulubongka | Marowo | 22 | - | Darat |
| 4 | Ampana Tete | Tete A | 10 | - | Darat |
| 5 | Ampana Kota | Ampana | 7 | - | Darat |
| 6 | Ratolindo | Sumoli | 8 | - | Darat |

| No. | Kecamatan | Ibu Kota | Jarak Ke Ampana | | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Una-una | Wakai | - | 51 | Laut |
| 8 | Batudaka | Molowagu | - | 71 | Laut |
| 9 | Togean | Lebiti | - | 91 | Laut |
| 10 | Walea Kepulauan | Popoli'i | - | 125 | Laut |
| 11 | Talatako | Kalia | - | 102 | Laut |
| 12 | Walea Besar | Pasokan | - | 151 | Laut |

Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka, 2019 dan 2021

Merujuk data pada tabel di atas, terdapat 6 (enam) ibu kota kecamatan menggunakan jalur transportasi laut untuk mencapai Ibukota Kabupaten Tojo Una-Una. Wilayah kecamatan tersebut yakni: Kecamatan Una-Una, Kecamatan Batu-daka, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Talatako, dan Kecamatan Walea Besar. Ibukota Kecamatan Walea Besar (Pasokan) memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten Tojo Una-Una yaitu 151 mil. Batas wilayah administrasi antar Kecataman Kabupaten Tojo Una-Una seperti diuraikan secara rinci dalam gambar sebagai berikut.




Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka 2021

**Gambar 2.2.**
**Peta Administrasi Kabupaten Tojo Una-Una**

### 2.1.2. Iklim Wilayah Kabupaten Tojo Una-una

Kabupaten Tojo Una-Una dipengaruhi oleh dua musim yakni: Musim Barat dan Musim Timur dengan iklim tropis, curah hujan berkisar 63-407,60 mm/tahun dan temperatur berkisar 20,20-35,00ºC, sedangkan kelembaban udara antara 39,00-100 persen, dan kecepatan angin berkisar 5,14-10,29 knot. Curah hujan dipengaruhi keadaan geografis, dan siklus angin serta perputaran arus udara, oleh sebab itu setiap bulan curah hujan di Kabupaten Tojo Una-Una sangat

bervariasi (Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Kasiguncu, 2020).

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dikelilingi sungai, wilayah sungai lintas kabupaten, yaitu wilayah Sungai Bongka–Mantawa; wilayah Sungai Laa-Tambalako, serta wilayah sungai strategis nasional Parigi–Poso. Tercatat beberapa sungai besar yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

1. Sungai Balingara di Kecamatan Ampana Tete. Sungai ini terletak di perbatasan dengan Kabupaten Banggai;
2. Sungai Malei terletak di perbatasan dengan Kabupaten Poso;
3. Sungai Tojo di Kecamatan Tojo;
4. Sungai Bongka di Kecamatan Ulubongka;
5. Sungai Ampana di Kecamatan Ampana Kota;
6. Sungai Sabo di Kecamatan Ampana Tete.

Panjang sungai berkisar antara 1-122 km, di mana sungai terpanjang di Kecamatan Ulubongka yakni Sungai Bongka sepanjang 122 km, dan sungai terpendek Sungai Nggawia sepanjang 1 km terdapat di Kecamatan Tojo Barat.

### 2.1.3. Demografi Kabupaten Tojo Una-una

Penduduk Kabupaten Tojo UnaUna berdasarkan penduduk Tahun 2020 sebanyak 163.829 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun dari tahun 2010 hingga 2020 sebesar 1,69. Rasio jenis kelamin Tahun 2020, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 mencapai 29 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan bervariasi dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ratolindo sebesar 464 jiwa/ km2, dan kepadatan terendah di Kecamatan Ulubongka sebesar 10 jiwa/km2.

**Tabel 2.3**
**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 (%) | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk (L/P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tojo Barat | 12.992 | 1,31 | 7,93 | 12 | 107,4 |
| 2 | Tojo | 13.928 | 1,08 | 8,5 | 13 | 108,1 |
| 3 | Ulubongka | 18.272 | 1,51 | 11,15 | 10 | 110,4 |
| 4 | Ampana Tete | 27.614 | 2,06 | 16,86 | 35 | 108,6 |
| 5 | Ampana Kota | 20.854 | 2,62 | 12,73 | 119 | 104,6 |
| 6 | Ratolindo | 28.735 | 1,62 | 17,54 | 464 | 98,50 |
| 7 | Una-Una | 8.236 | 1,13 | 5,03 | 56 | 105,1 |
| 8 | Batudaka | 5.796 | 1,24 | 3,54 | 38 | 107,0 |
| 9 | Togean | 10.734 | 1,61 | 6,55 | 47 | 106,6 |

| No | Kecamatan | Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 (%) | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk (L/P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Walea Kepulauan | 5.568 | 0,89 | 3,4 | 82 | 107,5 |
| 11 | Walea Besar | 4.629 | 1,81 | 2,83 | 55 | 111,9 |
| 12 | Talatako | 6.471 | 2,12 | 3,95 | 77 | 102,5 |
| **Tojo Una-Una** | | **163.829** | **1,69** | **100,01** | **29** | **105,8** |

Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka 2021

Kelompok usia penduduk di Kabupaten Tojop Una-Una paling banyak pada kelompok usia kerja (15-64) sebesar 65,87 persen, selebihnya kelompok usia muda (0-14) sebesar 28,36 persen, dan kelompok usia lanjut (>65) sebesar 4,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una didomoinasi oleh usia produktif.

**Tabel 2.4**
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020**

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 0-4 | 8.563 | 8.228 | 16.791 |
| 5-9 | 8.174 | 7.843 | 16.017 |
| 10-14 | 7.807 | 7.488 | 15.295 |
| 15-19 | 7.732 | 7.362 | 15.094 |
| 20-24 | 7.238 | 6.760 | 13.998 |
| 25-29 | 6.633 | 6.234 | 12.867 |
| 30-34 | 6.857 | 6.180 | 13.037 |
| 35-39 | 6.056 | 5.700 | 11.756 |
| 40-44 | 5.835 | 5.400 | 11.235 |
| 45-49 | 5.069 | 4.660 | 9.729 |
| 50-54 | 4.330 | 3.935 | 8.265 |
| 55-59 | 3.528 | 3.312 | 6.840 |
| 60-64 | 2.592 | 2.498 | 5.090 |
| 65-69 | 1.834 | 1.775 | 3.609 |
| 70-74 | 1.079 | 1.130 | 2.209 |
| 75+ | 904 | 1.093 | 1.997 |
| **Total** | **84.231** | **79.598** | **163.829** |

Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka 2021

### 2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari kawasan strategis nasional, kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tengah, dan dan Kawasan Strategis Kabupaten.

#### 2.1.4.1. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional yang terdapat di Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup Kawasan Kritis Lingkungan Balingara.

#### 2.1.4.2. Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

a. Kepentingan pertumbuhan ekonomi: KTM Padauloyo dan Kawasan Perbatasan yaitu Kawasan Kepulauan Togean (Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo);
b. Kepentingan fungsi sosial budaya: Kawasan Rumah Raja Una Una;
c. Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi: kawasan sumberdaya perikanan dan kelautan zona II Teluk Tomini
d. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan: Kawasan Kritis Lingkungan Sungai Podi dan sekitarnya; Kawasan WS Bongka-Mentawa.

#### 2.1.4.3. Kawasan Strategis Kabupaten Tojo Una Una

##### 2.1.4.3.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan stategis ekonomi Kabupaten Tojo Una–Una antara lain adalah sebagai berikut:

**a. Kawasan Perkotaan Ampana**

Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata

1. Pengembangan jalan lingkar Ampana;
2. Pengembangan kegiatan perdagangan untuk mendukung sektor perikanan, perkebunan dan industri;
3. Pengembangan kegiatan industri;
4. Pengembangan bandar udara;
5. Pengembangan jalur trans Sulawesi.

Berdasarkan fungsi Kota Ampana, mempunyai fungsi dan peran yang berorientasi pada kota industri, perdagangan, dan jasa serta penyedia jasa penunjang untuk pariwisata. Fungsi dan peran Kota Ampana adalah sebagai berikut:

1. Fungsi dari Kota Ampana dan kajian mencakup internal, yaitu dapat melayani Kawasan Kota Ampana itu sendiri. Fungsi utama dikembangkan pada Kota Ampana bertumpu pada pertanian/perkebunan, merupakan sektor paling dominan di Kota Ampana. Adapun pertanian/perkebunan terdiri dari pertanian padi sawah di Kecamatan Ampana Kota, untuk padi ladang terdapat di Kecamatan Tojo Barat. Selain itu juga terdapat

perkebunan dengan komoditas antara lain: kakao, kopi, dan kemiri. Dengan keberadaan industri dan perdagangan-jasa di Kota Ampana diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan pendapatan daerah, serta secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ampana.

2. Peran yang perlu dikembangkan dari Kota Ampana sebagai kota industri dan perdagangan-jasa, yaitu:
   a. Pemantapan keterkaitan antar Kota Ampana dengan kota-kota dan kabupaten-kabupaten lainnya, terutama dengan kota-kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hubungan dengan kota-kota lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas industri dan perdagangan-jasa di Kota Ampana, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari luar daerah.
   b. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pengembangan industri dan perdagangan-jasa yang ada di Kota Ampana.

   Adapun fungsi dan peran akan dikembangkan di Kota Ampana adalah sebagai berikut:
   a. Pusat pemerintahan untuk Wilayah Kabupaten Tojo Una-una;
   b. Pusat pendidikan skala regional Kabupaten Tojo Una-Una;
   c. Pusat transportasi, melalui darat-lewat Jalur Trans Sulawesi dan Terminal, laut-lewat pengembangan pelabuhan nusantara, maupun udara-lewat bandara;
   d. Pusat pelayanan kesehatan bagi wilayah Kabupaten Tojo Una-una, terutama dengan keberadaan RSU Ampana;
   e. Pusat jasa penunjang pariwisata, terutama berkaitan dengan pendukung kepariwisataan di Kepulauan Togean dan sekitarnya;
   f. Pusat pertambangan, dengan adanya rencana pengembangan pertambangan nikel dan bijih besi, dan eksploitasi gas alam Tanjung Api;
   g. Pusat Pengembangan industri kecil-menengah non-polutan yang mengolah hasil SDA yang ada (kelapa dan kakao);
   h. Pusat pengembangan agrobisnis;
   i. Pusat pengembangan dan distribusi peternakan, terutama sapi dan kambing;
   j. Pusat perdagangan dan jasa umum skala Kabupaten Tojo Una-una, dalam bentuk Pasar Kota dan area pusat perbelanjaan;
   k. Pusat pengembangan pemukiman skala Kabupaten Tojo Una-una.

**b. Kawasan Minapolitan**

Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, untuk memudahkan masyarakat melakukan budidaya ikan air tawar, dengan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola kelompok.

Rencana kawasan pengolahan perikanan diarahkan pada kawasan pesisir yang potensial. Kawasan ini merupakan wilayah yang diperuntukkan menjadi kawasan minapolitan. Sesuai dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, maka pengolahan perikanan pada kawasan minapolitan terletak di pesisir yaitu: Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, dan Kecamatan Walea Besar. Kawasan minapolitan terpusat di Perkotaan Ampana sebagai Pusat Kegiatan Minapolis Wilayah (PKMW), dan Wakai, Lebiti, Popolii, Pasokan sebagai Pusat Kegiatan Minapolis Lokal (PKML);

**c. Kawasan Agropolitan**

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu, atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional, dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Rencana pengembangan agropolitan di Kabupaten Tojo Una-Una tersebar di Kecamatan Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Ulubongka, dan Kecamatan Togean dengan fungsinya, meliputi:

a. Pusat administrasi dan pemerintahan kawasan agropolitan;
b. Pusat transaksi dan distribusi daerah atau simpul jasa perhubungan;
c. Pusat kegiatan transportasi kawasan;
d. Pusat pelayanan sarana dan prasarana pendukung kawasan;
e. Kegiatan jasa dan pelayanan masyarakat; dan
f. Kegiatan industri pengolahan.

**2.1.4.3.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten Tojo Una Una antara lain adalah:

1. kawasan pelestarian pembuatan gula aren di Tobil, Kecamatan Togean;
2. makam Raja Tandjumbulu Kelurahan Ampana di Kecamatan Ampana Kota;
3. makam Raja Togean di Desa Benteng Kecamatan Togean;
4. makam Raja Tojo (Raja Pileviti dan Raja Talamoa) di Kecamatan Tojo;
5. masjid Tua di Desa Binanguna Kecamatan Una-Una; dan
6. situs sejarah bawah air berupa kerangka pesawat Bomber Wrek di Perairaan Lebiti Kecamatan Una Una.

Rencana Kawasan Adat Terpencil (KAT), serta kawasan konservasi budaya dan sejarah merupakan kawasan yang merupakan peninggalan sejarah sebagai daya tarik, maupun interaksi dengan penduduk asli (suku asli). KAT merupakan kawasan yang ditempati masyarakat adat dan memiliki lokasi yang terpencil. KAT seringkali merupakan kawasan yang terisolasi, sehingga masyarakat adat tidak memperoleh akses pelayanan yang

memadai. Untuk pengembangan KAT, seharunya diberikan kemudahan pelayanan dan akses terhadap fasilitas publik yang dibutuhkan. Pada beberapa kawasan KAT, termasuk dalam hutan lindung, sehingga pengembangan diperlukan adalah pembinaan terhadap masyarakat tersebut, dalam pengelolaan lingkungan dan *agroforestry*, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak merusak lingkungan. KAT direncanakan berada pada:

1. Kawasan Adat masyarakat Suku Wana di Kecamatan Ulubongka, Ampana Tete, dan Tojo;
2. Kawasan Budaya dan Adat Istiadat Suku Bajo di Kabalutan Kecamatan Talatako;

- Desa Dolong secara administratif terbagi dalam 2 wilayah Desa yaitu Desa Dolong A dan Desa Dolong B. Terletak di Pulau Walea Kodi, Kecamatan Walea Kepulauan. Lokasi wisata ini hanya dikenal sebagai tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung di Kepulauan Togean dari Gorontalo. Padahal, Desa Dolong juga memiliki potensi wisata untuk atraksi snorkeling dan menyelam;
- Wisatawan berkunjung dan menginap di Desa Dolong A dan Dolong B dapat berwisata di Pulau Bulako, Pulau Mekeat, Pulau Lamo, dan Pantai Takuhak. Obyek-obyek wisata ini sangat menarik dan potensial bagi wisatawan peminat atraksi snorkeling dan menyelam;
- Gugusan pulau karang yakni Pulau Bulako, Pulau Makeat, dan Pulau Lamo memiliki terumbu karang yang masih bagus dengan berbagai jenis ikan karang, dan ikan hias. Bahkan di Pantai Takuhak, wisatawan dapat berenang di air laut yang jernih dan sejuk, setelah itu berjemur matahari di atas pasir putih yang bersih dan alami;
- Wisatawan yang berwisata di Desa Dolong, dapat menggunakan *public-boat* dari Gorontalo dengan waktu tempuh sekitar 8 jam, atau dari Ampana dengan waktu tempuh sekitar 12 jam.

Potensi alam dan kebudayaan di Kabupaten Tojo Una-Una, dapat dikembangkan dengan hadirnya sentra kerajinan rakyat, terutama yang potensial dapat dijual untuk industri pariwisata, misalnya atraksi pembuatan kerajinan antara lain dari kerang-kerang laut, dan cangkang mutiara. Atraksi ini dapat menarik minat wisatawan, selain tersedianya sarana dan prasaran untuk kegiatan pameran produk lokal, mendorong masyarakat dan wisatawan mengenal kerajinan di Kabupaten Tojo Una–Una secara luas. Beberapa arahan pengembangan kawasan strategis sosial-kultur:

1. Revitalisasi bentuk bangunan dan kawasan kampung adat maupun pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas *(buffer-zone);*
2. Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata antara lain hotel, agen wisata, taman parkir dan lain-lain;
3. Perbaikan agenda pariwisata Kabupaten Tojo Una–Una.

#### 2.1.4.3.3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam Kabupaten Tojo Una Una antara lain adalah:

1. PLTU Sabo Ampana Tete;
2. PLTA Ulubongka.

#### 2.1.4.3.4. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una Una antara lain adalah:

1. Cagar Alam Tanjung Api;
2. Taman Nasional Kepulauan Togean;
3. Kawasan Sungai Balingara.

#### 2.1.4.3.5. Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan Perbatasan)

Pada kawasan-kawasan perbatasan, terdapat indikasi perkembangan yang saling terkait, dalam pola pemanfaatan lahan dan infrastruktur, sehingga perlu adanya perencanaan yang saling terintegrasi (sinkronisasi penataan kawasan). Penanganan kawasan perbatasan antar wilayah kabupaten ini lebih ditekankan pada kawasan-kawasan yang berkembang cepat, yakni:

a. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Poso;
b. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara;
c. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Banggai;
d. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo.

Kerjasama dapat dilaksanakan berdasarkan keterkaitan fungsional wilayah yang terdapat dalam dua daerah otonom, sehingga tercapai sinergi pengembangan wilayah secara optimal. Kerjasama keterkaitan konteks fungsional alam antara lain daerah aliran sungai, hutan lindung, dan keterkaitan fungsi sosial ekonomi. Bentuk-bentuk kerjasama dalam pelaksanaan antar daerah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Saling menguntungkan dalam arti saling menghidupi *(simbiosis-mutualistis)*. Pelaksanaan kerjasama hanya dapat dicapai, apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat secara *win-win solution*.
b. Menciptakan proses pembangunan daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam memanfaatkan sumber daya, bersifat keterkaitan, dan ketergantungan tanpa memperhatikan batas-batas wilayah administratif, meningkatkan sinergi kebersamaan, saling menunjang dan adanya kejela-san atas pembagian tugas dan tanggung jawab, serta adanya *take and give* atau *mutual gain*.

Berbagai kawasan perbatasan di Kabupaten Tojo Una Una memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Hal ini berasal dari berbagai aspek seperti aspek fisik, komoditas unggulan, karakteristik masyarakat, maupun sarana

dan prasarana pendukung yang ada. Secara umum tujuan dari pengembangan kawasan perbatasan adalah agar penduduk yang mendiami daerah tersebut, tidak melakukan pergerakan ke daerah lain dalam tingkat pencapaian lebih mudah, dibandingkan aksesibilitas ke wilayah pusat Ibukota Kabupaten Tojo Una Una.

**2.1.4.3.6. Perbatasan Kabupaten Tojo Una Una dengan Kabupaten Poso**

Wilayah Kabupaten Tojo Una Una berbatasan dengan Kabupaten Poso adalah Kecamatan Tojo Barat. Kecamatan Tojo Barat termasuk ke dalam pelayanan PKLP Tojo dengan pusat pelayanan di Kecamatan Tojo. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka rencana dikembangkan sebagai sentra pengembangan pertanian, yakni kawasan agrowisata dan agribisnis. Potensi Wilayah Kecamatan Tojo Barat memiliki potensi ekonomi wilayah sebagai daerah penghasil komoditas pertanian, yakni pertanian tanaman pangan, palawija, holtikultura, dan perkebunan. Beberapa komoditas unggulan dan potensial di Kecamatan Tojo Barat meliputi:

- Tanaman Pangan: Padi
- Palawija: Ketela Pohon, Ketela Rambat.
- Holtikultura: Tomat, kangkung, Papaya, Mangga.
- Perkebunan: Cengkeh. Pengembangan Potensi

Pengembangan potensi ekonomi wilayah meliputi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah *(value added)* bagi peningkatan pendapatan masyarakat *(people income)*. Dalam jangka panjang dapat terbentuk kawasan agrowisata dan agribisnis. Dengan demikian, tarikan masyarakat ke Kabupaten Tojo Una Una, akan semakin besar sehingga dapat menimbulkan pergerakan dari arah luar kabupaten menuju ke dalam kabupaten. Pemasaran hasil produksi pertanian diarahkan ke ibukota kecamatan dan PKL Tojo. Pengembangan wilayah ini menjadi kawasan industri pengolahan hasil pertanian, didukung keberadaan wilayah sekitar yang memiliki potensi serupa.

**a. Pengembangan Fasilitas Pendukung**

Fasilitas pendukung yang dikembangkan di Kecamatan Tojo Barat sebagai wilayah perbatasan adalah fasilitas yang mendukung kegiatan dan roda perekonomian, yakni *home-industry* pengolahan hasil pertanian. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung tersebut meliputi:

- Peningkatan kualitas pasar desa sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli hasil pertanian;
- Penambahan fasilitas pengolahan hasil pertanian terutama alat, bahan, maupun ruang;
- Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, untuk mengantisipasi pergerakan penduduk ke arah luar kabupaten;
- Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan yang berbentuk konsentrasi kurikulum studi kepada teknologi hasil pertanian.

**b. Pengembangan Infrastruktur Pendukung**

Pengembangan infrastruktur pendukung meliputi pengembangan jaringan jalan, penyediaan air bersih, pengembangan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Penjabaran pengembangan infrastruktur tersebut meliputi:

- Pengembangan jaringan jalan, yaitu meningkatkan kualitas jalan menuju kantong produksi dan menuju lokasi pemasaran yaitu jalan menuju ibukota kecamatan dan pusat pelayanan;
- Penyediaan dan peningkatan jaringan air bersih untuk mendukung keberadaan home industri pengolahan hasil pertanian;
- Penyediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi untuk mendukung keberadaan *home-industry* pengolahan hasil pertanian;
- Penyediaan dan peningkatan jaringan listrik untuk mendukung keberadaan *home-industry* pengolahan hasil pertanian.

### 2.1.4.3.7. Perbatasan Kabupaten Tojo Una Una dengan Kabupaten Morowali Utara

Wilayah perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara yakni Kecamatan Tojo Barat dan Kecamatan Ulubongka. Bagian paling Selatan dari dua wilayah tersebut dikembangkan sebagai unit permukiman trans-migrasi di Kabupaten Tojo Una Una. Potensi wilayah perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan pemerintah daerah dan berhasil baik. Kegiatan pere-konomian penduduk di wilayah perbatasan ini, cenderung bergerak pada Sektor Pertanian dan Perkebunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui hasil produksi pertanian serta peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. Pengembangan fasilitas pendukung kawasan perbatasan adalah fasilitas secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Pengembangan fasilitas tersebut meliputi:

- Peningkatan kualitas fasilitas perdagangan untuk penyediaan peralatan dan bahan untuk operasional kegiatan perekonomian;
- Penyediaan pasar desa untuk menjual hasi pertanian;
- Penyediaan fasilitas dan utilitas yang lebih memadai untuk kebutuhan masyarakat transmigrasi.

Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan infrastruktur pendukung meliputi:

- Pengembangan jaringan jalan dengan meningkatkan dan membentuk jalan baru menuju kantong-kantong produksi dan lokasi pemasaran yakni ibukota kecamatan, pusat pelayanan maupun Ibukota Kabupaten;
- Pengembangan Jaringan irigasi sebagai penyedia air untuk pertanian dan perkebunan.

**2.1.4.3.8. Perbatasan Kabupaten Tojo Una Una dengan Kabupaten Banggai**

Wilayah perbatasan kabupaten Tojo Una Una dengan Kabupaten Banggai adalah Kecamatan Ampana Tete dan sebagian Kecamatan Ulubongka. Secara umum pengembangan wilayah perbatasan untuk pengembangan kawasan perbatasan ini meliputi: Kecamatan Ampana Tete memiliki potensi ekonomi wilayah sebagai daerah penghasil komoditas pertanian baik pertanian tanaman pangan, palawija, holtikultura maupun perkebunan. Komoditas unggulan dan potensial Kecamatan Ampana Tete meliputi:

- Tanaman pangan: Padi.
- Tanaman palawija: Ketela Pohon, Kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele;
- Tanaman holtikultura:Terung, Pisang, Jambu;
- Perkebunan: Kelapa, Kopi, Coklat. Pengembanga Potensi Wilayah

Pengembangan potensi wilayah dapat berbentuk peningkatan hasil pertanian serta pembentukan sentra pengolahan hasil pertanian. Pengembangan fasilitas pendukung antara lain dengan:

- Peningkatan kualitas pasar desa sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli hasil pertanian.
- Penambahan fasilitas pengolahan hasil pertanian baik alat, bahan maupun ruang.

Pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan infrastruktur pendukung meliputi pengembangan jaringan jalan, penyediaan air bersih, pengembangan jaringan telekomunikasi, dan jaringan listrik. Penjabaran pengembangan infrastruktur tersebut meliputi:

- Pengembangan jaringan jalan, yaitu meningkatkan kualitas jalan menuju kantong produksi dan menuju lokasi pemasaran adalah jalan menuju ibukota kecamatan dan pusat pelayanan;
- Penyediaan dan peningkatan jaringan air bersih untuk mendukung keberadaan industri pengolahan hasil pertanian;
- Penyediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi untuk mendukung keberadaan industri pengolahan hasil pertanian;
- Penyediaan dan peningkatan jaringan listrik untuk mendukung keberadaan industri pengolahan hasil pertanian.




Sumber: RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.3**
**KSN dan KSP dalam Kabupaten Tojo Una Una**




Sumber: RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.4**
**KSK Ekonomi dan Sosial Budaya**




Sumber: RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.5**
**KSK Pendayagunaan SDA dan Lingkungan**

### 2.1.5. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang di Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari kawasan hutan lindung, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, indus-tri. Potensi-potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una:

a. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kawasan hutan lindung dengan luas 181.385 Hektar, hutan produksi tetap dengan luas 445.783 hektar, hutan produksi terbatas dengan luas 141.240 hektar, hutan suaka alam dan wisata 371.041, serta hutan yang dikonversi dengan luas 13.236 hektar;
b. Kawasan pertanian terdiri atas tanaman pangan (padi sawah dan padi lading), hortikultura, perkebunan dan peternakan;
c. Kawasan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya;
d. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi:
    1. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berupa pertambangan gas alam pijar di Tanjung Api;
    2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan barubara terdiri atas; sebagai kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kecamatan Ulubongka; dan kawasan peruntukan mineral logam.
e. Kawasan Industri:
    1. Industri besar terdapat di Kecamatan Ampana Tete;
    2. Industri sedang seluas kurang lebih 90 Ha meliputi sentra industri kecil pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di Kecamatan Tojo Barat

dan Tojo; sentra industri kerajinan hasil laut di Kecamatan Una-Una, Batudaka, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Talatako, dan Walea Besar; sentra industri makanan khas hasil laut di Kecamatan Ampana Kota; sentra industri marmer di Kecamatan Tojo, meubel (furniture) di Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Tojo, Kecamatan Togean dan Walea Kepulauan; penggergajian Kayu di Kecamatan Ampana Tete; Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Tojo Barat; arang Tempurung di Kecamatan Tojo Barat; pengeringan Jagung di Kecamatan Ampana Tete; kerajinan hasil laut di Kecamatan Una–Una, Kecamatan Batudaka, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Talatako, dan Kecamatan Walea Besar; makanan dan minuman khas di seluruh kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una, dan pengolahan hasil tambang di Kecamatan Ampana Tete, dan Kecamatan Tojo.

3. Industri kecil dan rumah tangga meliputi Kecamatan Ampana Kota untuk pengembangan klaster industri (IKM) bahan baku tekstil, furniture, per-bengkelan, batako, batu bata, industri kapur, percetakan, kerajinan tangan, makanan/minuman, Kecamatan Ampana Tete untuk pengembangan klaster industri bahan baku tekstil, furniture, penggergajian kayu, rotan polis, pengolahan kelapa, kerajinan tangan, makanan/minuman, pengeringan jagung; Kecamatan Ulubongka untuk pengembangan penggergajian kayu; Kecamatan Tojo untuk pengembangan klaster industri bahan baku tekstil dan furniture; Kecamatan Tojo Barat untuk pengembangan klaster industri Penggergajian kayu, batu bata dan arang tempurung; Kecamatan Una-Una untuk pengembangan klaster industri pembuatan es; Kecamatan Togean untuk pengembangan klaster industri furnitur dan makanan/minuman; dan Kecamatan Walea Kepulauan untuk pengembangan klaster industri furniture.

**f. Kawasan Wisata Alam:**

1. Kawasan wisata alam meliputi wisata pulau di Pulau Taupan, Pulau Poyalisa, Pulau Taipi, Pulau Pangempa, Pulau Lembanato, Pulau Bolilanga, Pulau Karina, Pulau Una-Una, Katupat, Pulau Kadidiri, Kulingkinari, Malenge, Pulau Tanjung Kramat, Pulau Papan, Popoli'i, Pulau Tiga, Pulau Bukabuka, Pulau Satu, Pulau Pakang;
2. Wisata pantai terdiri atas Kecamatan Tojo Barat Pantai Matako, Kecamatan Ampana Pantai Ampana dan Tanjung Api, Kecamatan Ampana Tete Uempamaja, Kecamatan Una-Una Pantai Popa, Pulau Taupan, Pulau Tupai, Pulau Capatanah, Poya, Tangkubi, Tumbulawa (Pasir Putih Lindo), Una-Una dan Pantai Bambu, Kecamatan Togean Kadidiri, Tobil, Taipi, Pangempa dan Bolilanga, Kecamatan Walea Kepulauan

Kaba-lutan, Malenge dan Pulau Tiga Kecamatan Walea Besar Tanjung Kramat.

3. Wisata alam lain terdiri atas air terjun Sansarino di Kecamatan Ampana Kota, gua Manu, air Terjun Toe Rama, air Terjun Korompondo, danau Banano di Kecamatan Tojo; air Panas Marowo di Kecamatan Ulubongka; obyek wisata jembatan gantung Uetoli di Kecamatan Ampana Tete; permandian Malotong di Kecamatan Ampana Kota; arung jeram di sungai Bongka di Kecamatan Ulubongka; serta wisata pegunungan dan wisata riset di Dataran Bulan Kecamatan Ampana Tete;
4. Kawasan pariwisata budaya meliputi kawasan pelestarian keunikan budaya Suku Bobongko, Suku Togean, Suku Ta'a dan Saluan, serta Suku Bajo di Kabalutan Kecamatan Walea Kepulauan; kawasan pelestarian pola dan tradisi bercocok tanam serta pembuatan gula aren di Tobil Kecamatan Togean; kawasan keunikan budaya etnik Tau Ta'a (wana), kawasan pemukiman nelayan di Tupai, Tumbulawa, Tobil, Tilupan, Simpiniti dan Tanimpo, kuburan wali, Kuburan Raja Togean, Benteng Pertahanan di Kecamatan Ampana Tete; makam Raja Tandjumbulu di Kecamatan Ampana Kota; makam Raja Togean di Desa Benteng di Kecamatan Togean; kuburan Batu Karang di Kecamatan Ulubongka, makam Raja Tojo (Raja Pileviti dan Raja Talamoa) di Kecamatan Tojo; mesjid tua di Pulau Una-Una; obyek wisata sejarah bawah air berupa Bangkai Pesawat Bomber Wrek Tipe B-24 di perairan Lebiti, goa tua Malangke di Kecamatan Tojo Barat.

### 2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam yang dimaksud adalah longsor, banjir, abrasi pantai, gunung api, dan tsunami gempa.

#### 2.1.6.1. Rawan Longsor

Terdapat beberapa wilayah yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan longsor, yaitu terdapat di Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Ulubongka. Beberapa upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengatasi bencana alam. Upaya penanganan meliputi:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor;
2. Tidak diizinkan atau dihentikan, kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindung;
3. Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat;

4. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang Kawasan Rawan Longsor;
5. Setelah terjadinya bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada lereng melalui konservasi secara ketat pada lereng, melandaikan lereng, membuat terasering, perbaikan/perkuatan lereng dengan metode pelapisan beton *(shoot concrete)*; dan
6. Setelah terjadinya bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada jalan melalui revitalisasi jalan, dengan membersihkan runtuhan longsoran segera dan kontinyu, penempatan alat berat yang sanggup bermobilitas tinggi dan ditempatkan di ibukota kecamatan, perbaikan badan jalan yang telah rusak, pembuatan saluran drainase jalan dan menjauhkan/membuat jarak antara jalan dengan lereng.

### 2.1.6.2. Rawan Banjir

Tercatat ada empat kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una teridentifikasi sebagai kawasan rawan banjir. Yaitu, Kecamatan Ampana Tete (Sungai Balingara), Kecamatan Ulubongka (Sungai Ulubongka), Kecamatan Tojo (Sungai Tojo dan Sungai Podi, Sungai Pancuma, Sungai Uedele, Sungai Batua, Sungai Tayawa, dan Sungai Lemoro), dan Kecamatan Tojo Barat (Sungai Tombiano, Sungai Mawomba, dan Sungai Kabalo).

Beberapa upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengatasi masalah banjir. Upaya penanganan meliputi: Pengendalian tata ruang; Pengaturan debit banjir; Pengaturan daerah rawan banjir; Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian; Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat; Pengelolaan Daerah Tangkapan Air; Penyediaan Dana; Pembuatan tanggul permanen yang kokoh di sisi kiri kanan sungai; Pembuatan trase jalan baru, dengan memindah jalur jalan yang ada selama ini sedikit ke atas dan membuat jembatan penghubung di atas Sungai Podi.

Sepanjang pantai yang membentang dari Barat ke Timur khususnya di Kecamatan Ampana Kota (Kelurahan Malotong, Bailo, Uentanaga B dan Dondo), Ampana Tete, Tojo Barat dan Ulubongka, juga di wilayah Kepulauan Walea Kepulauan, Togean dan Una–Una. Beberapa upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengatasi masalah banjir. Upaya penanganan meliputi:

1. Pendekatan rekayasa struktur bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dalam waktu yang singkat, yang terdiri dari pengembangan bangunan pemecah gelombang, penurapan, *jetty* dan sistem *polder* yang dilengkapi dengan sistem pengendali; dan
2. Pendekatan *non-structural* bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dalam jangka waktu yang lama melalui upaya rehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.

### 2.1.6.3. Rawan Gempa dan Gunung Api

Kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri atas, kawasan rawan gempa bumi. Kawasan rawan gempa teridentifikasi di bagian Laut Utara, akibat letusan Gunung Colo, wilayah sesar naik di Uekuli dan batas antara Tojo Una-Una dan Banggai pada Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ulubongka. Upaya penanganan gempa bumi yang dilakukan, meliputi:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan gempa bumi dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian, antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
2. Peruntukan ruang kawasan rawan gempa bumi harus memperhitungkan tingkat risiko;
3. Tidak diizinkan, atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan fungsi lindung;
4. Acuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Rawan Gempa Bumi;
5. rizinan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Gempa Bumi;
6. Perangkat insentif dan disinsentif pada Kawasan Rawan Gempa Bumi;
7. Memberikan penyuluhan kepada segenap masyarakat akan adanya potensi bencana kegempaan di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una; dan
8. Membuat stasiun meteorologi pencatat beserta pengembangan pemasangan perangkat seismograf.

Kawasan rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi terletak di lereng Gunung Colo Pulau Una-Una di Kecamatan Una–Una. Tercatat beberapa upaya untuk menangani masalah gempa bumi dan letusan gunung berapi meliputi:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau Rencana Detail Tata Ruang;
2. Acuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api;
3. Perizinan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
4. Perangkat insentif dan disinsentif pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api;
5. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Api;
6. Pedoman Penataan ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Api;
7. Memberikan penyuluhan kepada penduduk di sekitar kaki Gunung Colo khususnya dan Kecamatan Una-Una pada umumnya atas bahaya dampak letusan Gunung Colo;

8. Membuat stasiun pengamat aktivitas vulkanologi di Gunung Colo beserta pemasangan perangkat seismograf;
9. Mempersiapkan perangkat tanggap darurat bencana letusan Gunung Colo, mulai dari pembentukan aparat yang menangani, skema tanggap darurat, hingga rencana area pengungsian/ relokasinya; dan mencegah kerusakan akibat gelombang pasang dampak letusan Gunung Colo, pada kawasan pantai yang memiliki permukiman pesisir, terutama Kecamatan Una–Una, Kecamatan Batudaka, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Talatako, Kecamatan Walea Besar dan Ampana Kota hendaknya dibangun bangunan pemecah gelombang.

Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.

a. Tercatat beberapa lokasi yang teridentifikasi sebagai wilayah atau kawasan rawan longsor, yaitu Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Ulubongka;
b. Kawasan rawan banjir teridentifikasi terdapat di Kecamatan Ampana Tete (Sungai Balingara), Kecamatan Ulubongka (Sungai Ulubongka dan Podi), Kecamatan Tojo (Sungai Tojo), dan Kecamatan Tojo Barat (Sungai Tombiano);
c. Kawasan rawan abrasi pantai sepanjang pantai yang membentang dari Barat ke Timur khususnya di Kecamatan Ampana Kota (Kelurahan Malotong, Bailo, Uentanaga B, dan Dondo), Kecamtan Ampana Tete, Kecamatan Tojo Barat, dan Kecamatan Ulubongka, juga di wilayah Kepulauan yakni Kecamatan Walea Kepulauan, Togean dan Una–Una.

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan *(welfare)* dan pemerataan ekonomi *(distribution of economy)*, serta kesejahteraan sosial *(social welfare)* masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu lima tahun terakhir Tahun 2016-2020.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan ekonomi *(economic development)* adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan, agar pendapatan masyarakat naik, serta tingkat pemerataan yang semakin baik. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, adalah data Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB), maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB merupakan data yang sangat penting dan urgen dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif, menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju, dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data PDRB dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah berdasarkan sektor (dan subsektor) sebagai berikut.

**Tabel 2.5**
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una**
**Atas Dasar Harga Konstan 2010**
**Tahun 2016-2020**

| No. | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.284,78 | 3,68 | 1.359,86 | 5,84 | 1.366,76 | 0,51 | 1.434,36 | 4,95 | 1.425,24 | - 0,64 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 57,23 | 6,96 | 63,42 | 10,82 | 66,54 | 4,92 | 77,50 | 16,47 | 58,11 | - 25,02 |
| 3 | Industri Pengolahan | 310,12 | 9,04 | 322,41 | 3,96 | 331,00 | 2,66 | 341,06 | 3,04 | 337,99 | - 0,90 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,55 | 4,33 | 1,68 | 8,39 | 1,81 | 7,74 | 2,04 | 12,71 | 2,13 | 4,41 |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur | 5,54 | 8,16 | 6,06 | 9,39 | 6,39 | 5,45 | 6,60 | 3,29 | 6,79 | 2,88 |
| 6 | Konstruksi | 297,48 | 3,37 | 298,48 | 0,34 | 302,85 | 1,46 | 320,92 | 5,97 | 260,01 | - 18,98 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 318,95 | 6,74 | 333,21 | 4,47 | 337,84 | 1,39 | 349,49 | 3,45 | 328,34 | - 6,05 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 105,09 | 7,14 | 113,28 | 7,79 | 115,67 | 2,11 | 122,47 | 5,88 | 85,51 | - 30,18 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 24,18 | 6,19 | 26,36 | 9,02 | 27,80 | 5,46 | 27,43 | -1,33 | 24,48 | - 10,75 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 181,58 | 7,87 | 195,23 | 7,52 | 219,23 | 12,29 | 240,54 | 9,72 | 259,47 | 7,87 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 50,41 | 17,13 | 54,52 | 8,15 | 57,80 | 6,02 | 57,83 | 0,05 | 67,70 | 17,07 |
| 12 | Real Estat | 149,21 | 4,04 | 156,23 | 4,70 | 162,53 | 4,03 | 163,86 | 0,82 | 164,66 | 0,49 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,45 | 7,63 | 1,54 | 6,21 | 1,37 | -11,04 | 1,42 | 3,65 | 1,41 | - 0,70 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 246,34 | 6,44 | 270,08 | 9,64 | 280,91 | 4,01 | 294,25 | 4,75 | 297,69 | 1,17 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 210,49 | 3,01 | 222,06 | 5,50 | 234,18 | 5,46 | 240,18 | 2,56 | 236,02 | - 1,73 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 95,61 | 4,27 | 102,99 | 7,72 | 108,55 | 5,40 | 118,81 | 9,45 | 122,63 | 3,22 |
| 17 | Jasa Lainnya | 41,56 | 1,87 | 44,35 | 6,71 | 47,33 | 6,72 | 48,57 | 2,62 | 45,68 | - 5,95 |
| **PDRB** | | **3.381,57** | **5,16** | **3.571,76** | **5,62** | **3.668,56** | **2,71** | **3.847,33** | **4,87** | **3.723,86** | **- 3,21** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2017-2021

PDRB Kabupaten Tojo Una-Una cenderung mengalami pertumbuhan positif selama kurun waktu Tahun 2016-2019. Pertumbuhan tersebut didukung hampir semua sektor lapangan usaha, khususnya Sektor Pertanian. Namun, pada Tahun 2020, PDRB mengalami penurunan dari Rp3.847,33 miliar menjadi Rp3.723,86 miliar, atau kontraksi sebesar (3,21) persen. Penurunan tersebut satu diantara dipengaruhi Covid-19. Sektor yang paling terdampak adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan kontraksi (-30,18 persen), Sektor Pertam-bangan dan Penggalian (25,02 persen), konstruksi (18,98 persen), serta penye-diaan akomodasi makan dan minum mengalami kontraksi sebersar (10,75 persen). Namun, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Sektor Ppengadaan Listrik dan Gas (4,41 persen); pengadaan air pengelolaan 2,88 persen; informasi dan komunikasi sebesar 7,87 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 17,07 persen, real estat sebesar 0,49 persen, administrasi pemerintahan sebesar 1,17 persen, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,22 persen.

**Tabel 2.6**
**Kontribusi PDRB Kabupaten Tojo Una-Una**
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha**
**Tahun 2016-2020**

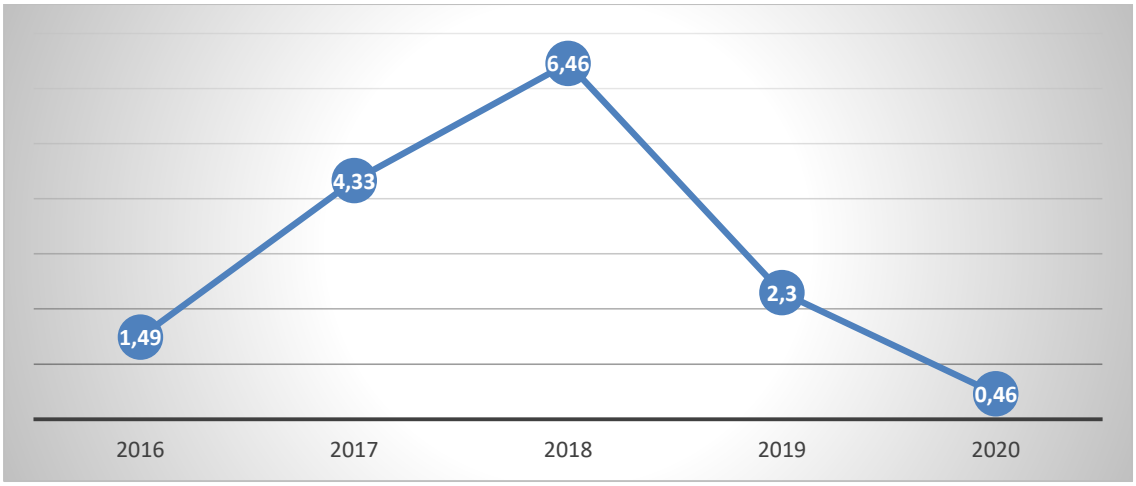
| No. | Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % | Rp. Miliar | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.284,78 | 37,99 | 1.359,86 | 38,07 | 1.366,76 | 37,26 | 1.434,36 | 37,28 | 1.425,24 | 38,27 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 57,23 | 1,69 | 63,42 | 1,78 | 66,54 | 1,81 | 77,50 | 2,01 | 58,11 | 1,56 |
| 3 | Industri Pengolahan | 310,12 | 9,17 | 322,41 | 9,03 | 331,00 | 9,02 | 341,06 | 8,86 | 337,99 | 9,08 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,55 | 0,05 | 1,68 | 0,05 | 1,81 | 0,05 | 2,04 | 0,05 | 2,13 | 0,06 |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan | 5,54 | 0,16 | 6,06 | 0,17 | 6,39 | 0,17 | 6,60 | 0,17 | 6,79 | 0,18 |
| 6 | Konstruksi | 297,48 | 8,80 | 298,48 | 8,36 | 302,85 | 8,26 | 320,92 | 8,34 | 260,01 | 6,98 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 318,95 | 9,43 | 333,21 | 9,33 | 337,84 | 9,21 | 349,49 | 9,08 | 328,34 | 8,82 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 105,09 | 3,11 | 113,28 | 3,17 | 115,67 | 3,15 | 122,47 | 3,18 | 85,51 | 2,30 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 24,18 | 0,72 | 26,36 | 0,74 | 27,80 | 0,76 | 27,43 | 0,71 | 24,48 | 0,66 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 181,58 | 5,37 | 195,23 | 5,47 | 219,23 | 5,98 | 240,54 | 6,25 | 259,47 | 6,97 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 50,41 | 1,49 | 54,52 | 1,53 | 57,80 | 1,58 | 57,83 | 1,50 | 67,70 | 1,82 |
| 12 | Real Estat | 149,21 | 4,41 | 156,23 | 4,37 | 162,53 | 4,43 | 163,86 | 4,26 | 164,66 | 4,42 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,45 | 0,04 | 1,54 | 0,04 | 1,37 | 0,04 | 1,42 | 0,04 | 1,41 | 0,04 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 246,34 | 7,28 | 270,08 | 7,56 | 280,91 | 7,66 | 294,25 | 7,65 | 297,69 | 7,99 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 210,49 | 6,22 | 222,06 | 6,22 | 234,18 | 6,38 | 240,18 | 6,24 | 236,02 | 6,34 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 95,61 | 2,83 | 102,99 | 2,88 | 108,55 | 2,96 | 118,81 | 3,09 | 122,63 | 3,29 |
| 17 | Jasa Lainnya | 41,56 | 1,23 | 44,35 | 1,24 | 47,33 | 1,29 | 48,57 | 1,26 | 45,68 | 1,23 |
| **PDRB** | | **3.381,57** | **100** | **3.571,76** | **100** | **3.668,56** | **100** | **3.847,33** | **100** | **3.723,86** | **100** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2017-2021

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi pembentukan PDRB tahun 2016-2020 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (rerata 37,8%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rerata 9,2), Industri Pengolahan (9,0). Kondisi ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir pembentukan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una ditopang oleh lapangan usaha pertanian.

### 2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi *(inflation)* adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebab-kan berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebih likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga ber-langsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2017-2021

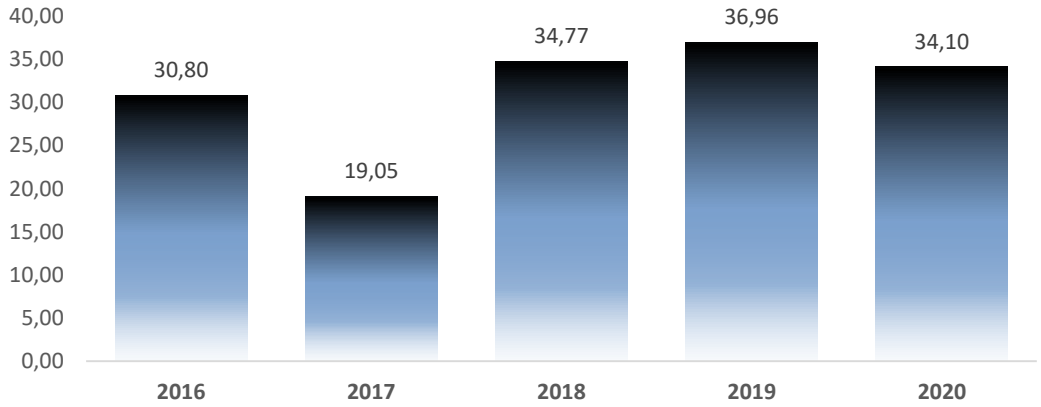
**Gambar 2.6**
**Laju Inflasi Tahun 2016-2020**

Laju inflasi Kabupaten Tojo Una-Una diproksi dengan inflasi Kota Palu. Laju inflasi mengalami kenaikan dari Tahun 2016-2018 dari 1,49 persen menjadi 6,46 persen. Laju inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebesar 6,46 persen disebabkan dari kelompok pengeluaran konsumsi masyarakat pada kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 8,12 persen. Kemudian diikuti kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 8,01 persen. Selain itu, laju inflasi lainnya, berturut-turut dari terbesar hingga terkecil antara lain: kelompok Transportasi dan Komunikasi sebesar 7,69 persen, kelompok Bahan Makanan sebesar 6,37 persen, kelompok Kesehatan 6,21 persen, kelompok Perumahan sebesaar 4,68 persen, dan kelompok Sandang sebesar 2,12 persen.

Namun demikian mengalami penurunan secara drastis pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 menjadi masing-masing sebesar 2,3 persen dan 0,46 persen.

### 2.2.1.3. PDRB per kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Tojo Una-Una. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.




Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una dalam Angka, 2017-2021

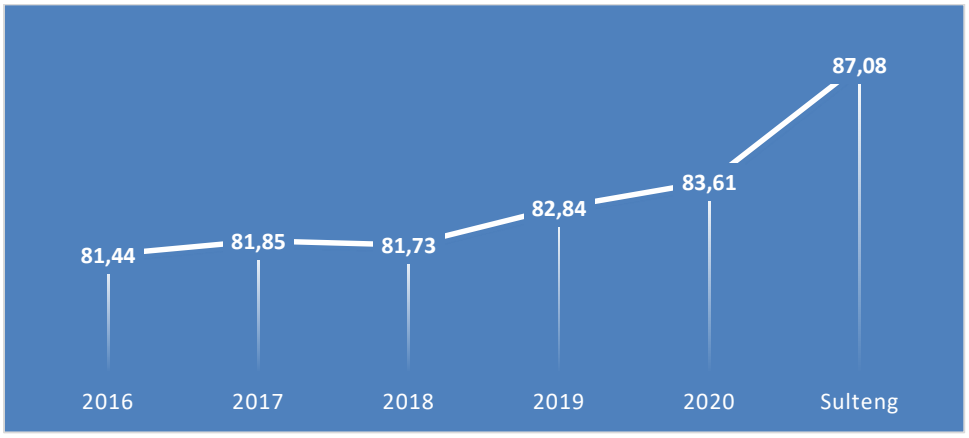
**Gambar 2.7**
**PDRB per Kapita Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)**

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Tojo Una-Una mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 PDRB perkapita Kabupaten Tojo Una-Una mencapai Rp30,80 juta, Tahun 2017 menurun menjadi Rp19,05 juta. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita meningkat menjadi Rp34,77 juta; Tahun 2019 sebesar Rp36,96 juta; dan Tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp34,10 Juta. Penurunan PDRB per kapita tahun 2020 tersebut disebabkan karena perkemba-ngan PDRB ADHB lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk. Namun, secara umum selama kurun waktu lima Tahun 2016-2020, PDRB per kapita mengalami peningkatkan sebesar 10,72 persen. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una semakin baik selama kurun waktu lima tahun terakhir.

### 2.2.1.4. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Pembangunan *(development)* merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup *(basic needs)*, meningkatnya

tingkat konsumsi masyarakat dengan kuantias dan kualitas yang lebih baik. Berbagai upaya telah ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar antara lain makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan *(education)*, kesehatan *(healthy)*, dan lapangan peker-jaan.




Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

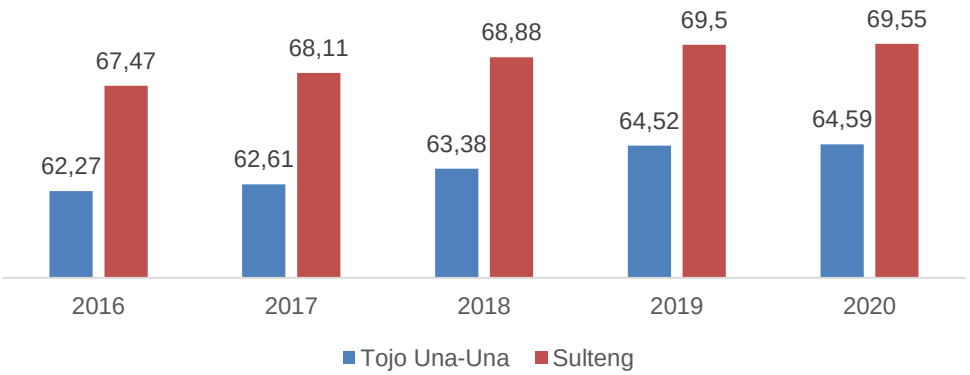
**Gambar 2.8**
**Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahun (periode 2016-2020), khususnya Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 83,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 2,17 persen. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi penduduk miskin, diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dari segi kinerja perekonomian maupun penciptaan pemerataan pembangunan, serta mempertajam dan memfokuskan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una, antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengintegra-sikan strategi, kebijakan, dan program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan bersumber dari Program Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa. Namun demikian, jumlah penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una masih di bawah angka Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk *(enlarging people choice).* IPM merupakan indikator penting untuk meng-ukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masya-rakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diusulkan oleh UNDP Tahun 1990, dan metode IPM baru Tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014, dan melakukan backcasting sejak Tahun 2010. IPM dibentuk tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat *(along and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standard hidup layak *(decent standard of living).* Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli *(purchasing power parity)*. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.




Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2017-2021

**Gambar 2.9**
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una yang ditunjukkan melalui IPM selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada Tahun 2016 sebesar 62,27 poin; kemudian terus meningkat pada Tahun 2017-2020 yaitu masing-masing sebesar 62,61 pada Tahun 2017; 63,38 poin pada Tahun 2018; 64,52 poin pada Tahun 2019; dan 64,59 poin pada Tahun 2020. Peningkatan IPM disebabkan oleh peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup, dan rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam meningkatkan pembangunan manusia telah membuahkan hasil. Namun demikian, IPM Kabupaten Tojo Una-Una masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.2.2.2. Angka melek huruf (AMH)

AMH merupakan satu diantara indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di Sektor Pendidikan. Melek huruf adalah indikator pendidikan yang mengukur kemampuan membaca. Ukuran melek huruf digunakan adalah mampu membaca setidaknya satu aksara.




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

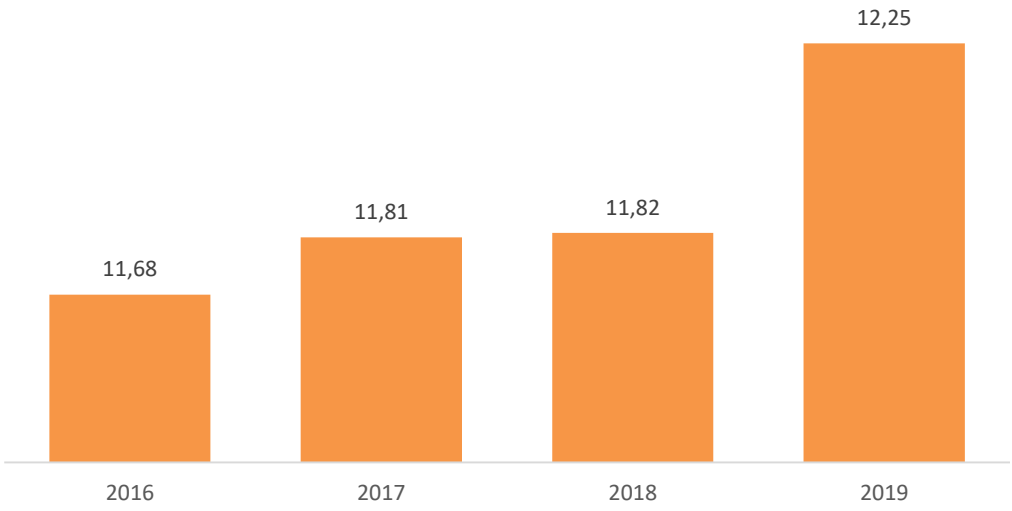
**Gambar 2.10**
**Angka Melek Huruf (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

AMH Kabupaten Tojo Una-Una cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu empat tahun terakhir 2017-2020. Terjadi peningkatan AMH dari 95,50 persen menjadi 99,40 persen, atau meningkat sebesar 3,90 persen. AMH Kabupaten Tojo Una-Una lebih tinggi dibanding AMH Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah,

jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak memperhitungkan kasus-kasus tidak naik kelas, dan putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan angka RLS dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga, lama bersekolah setiap penduduk merupakan angka yang menunjukkan waktu bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

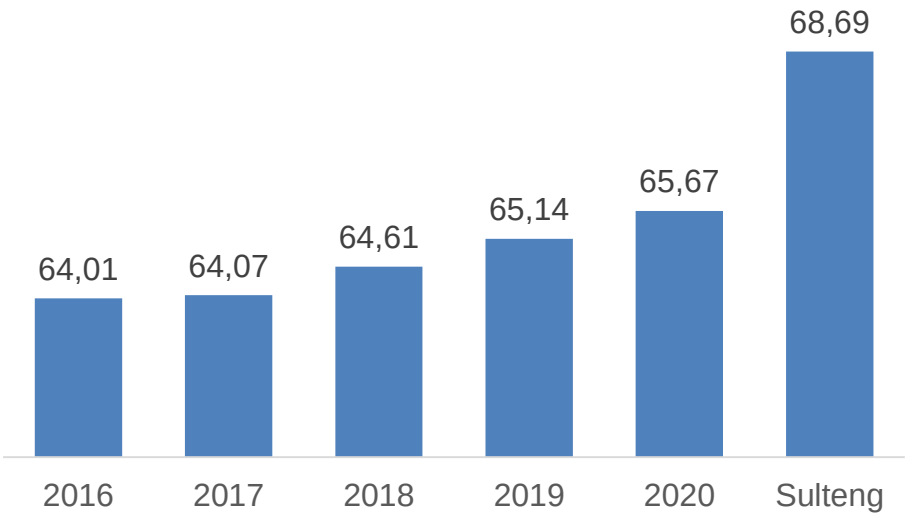
**Gambar 2.11**
**Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

Selama periode empat tahun terakhir 2016-2019, angka RLS Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 11,68 pada Tahun 2016; 11,81 pada Tahun 2017; 11,82 pada Tahun 2018; dan 12,25 pada Tahun 2019. Hal ini menunjukkan pada Tahun 2019, secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Tojo Una-Una usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XII (SLTA kelas III). Kenaikan angka RLS ini, merupakan modal manusia *(human capital)* yang penting dan urgen, untuk mendukung pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya, kualitas sumber daya manusia dari sisi pen-didikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun, akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia *(human resources competitiveness)* sebagai pelaku utama pembangunan.

### 2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial eko-nomi secara umum dapat terlihat dari peningkatan usia harapan hidup (UHH) penduduk. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas,

meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang UHH. Angka UHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka UHH pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka UHH merupakan indikator kesehatan untuk meng-evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka UHH yang rendah di suatu daerah membutuhkan strategi dan kebijakan dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program penanggulangan kemiskinan.




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

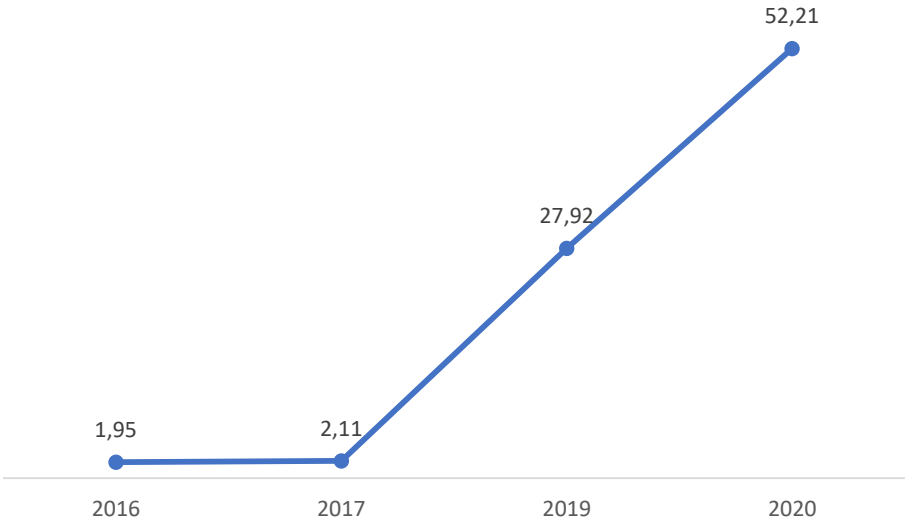
**Gambar 2.12**
**Umur Harapan Hidup (Tahun)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

Perkembangan angka UHH Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan setiap tahun selama kurun waktu lima Tahun 2016-2020, yaitu dari 64,01 pada Tahun 2016 menjadi 65,67 pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan derajat kesejahteraan penduduk, dan meningkatkan derajat kesehatan dalam kurun waktu tersebut. Secara rata-rata angka UHH umur tumbuh sebesar 3,7 bulan per tahun. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Meskipun demikian, angka UHH

Kabupaten Tojo Una-Una masih berada di bawah angka UHH Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.2.2.5. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Kondisi gizi buruk *(malnutrition problems)* merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan, persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana, kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana, dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur, maupun menurut panjang badan dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik; Apabila sedikit berada di bawah standar, maka disebut berstatus gizi kurang. Secara umum kondisi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una masih dihadapkan pada masalah gizi kurang.



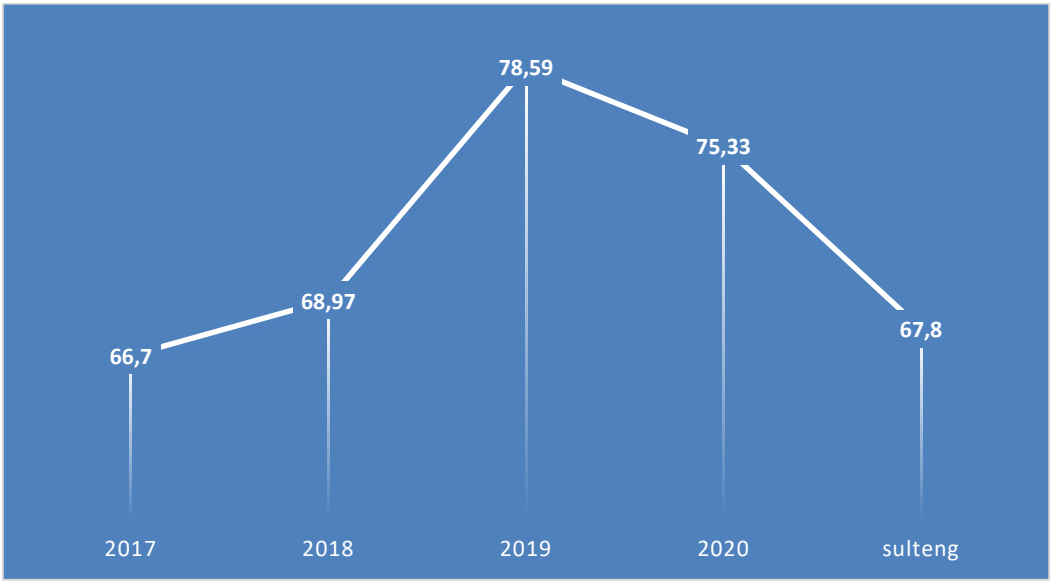

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.13**
**Balita Gizi Kurang (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

Merujuk pada data yang tersedia, jumlah balita berstatus gizi kurang di Kabupaten Tojo Una-Una terus mengalami peningkatan. Peningkatan balita gizi kurang terbilang tinggi mencapai 52,21 persen pada Tahun 2020. Kondisi ini perlu menjadi perhatian penting dan fokus bagi pemerintah daerah di bidang kesehatan, khususnya menyediakan makanan bergizi bagi balita, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal.

### 2.2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja sangat diharapkan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una.



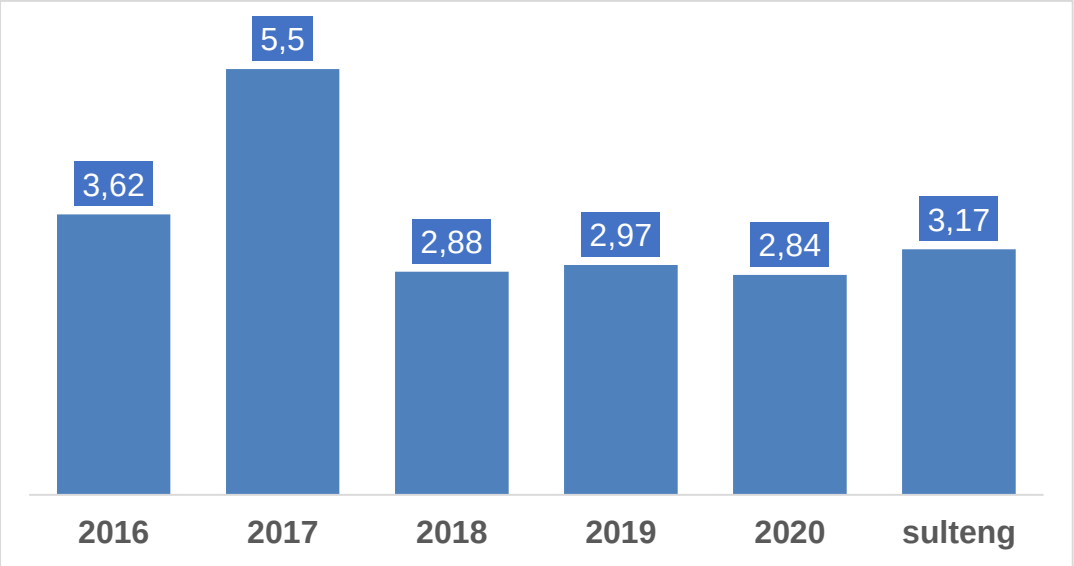

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

**Gambar 2.14**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

TPAK Kabupaten Tojo Una-Una mengalami kenaikan dari Tahun 2017 sebesar 66,7 persen; pada Tahun 2018 sebesar 68,97 persen; dan Tahun 2019 sebesar 78,59 persen. Selanjutnya, justru mengalami penurunan menjadi sebesar 75,33 persen pada Tahun 2021. Namun demikian, selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terjadi peningkatan TPAK rata-rata sebesr 2,16 persen per tahun. TPAK Kabupaten Tojo Una-Una lebih tinggi dibanding TPAK Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.2.2.7. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja *(labor force)*. Pengangguran terbuka *(unemployment)* adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



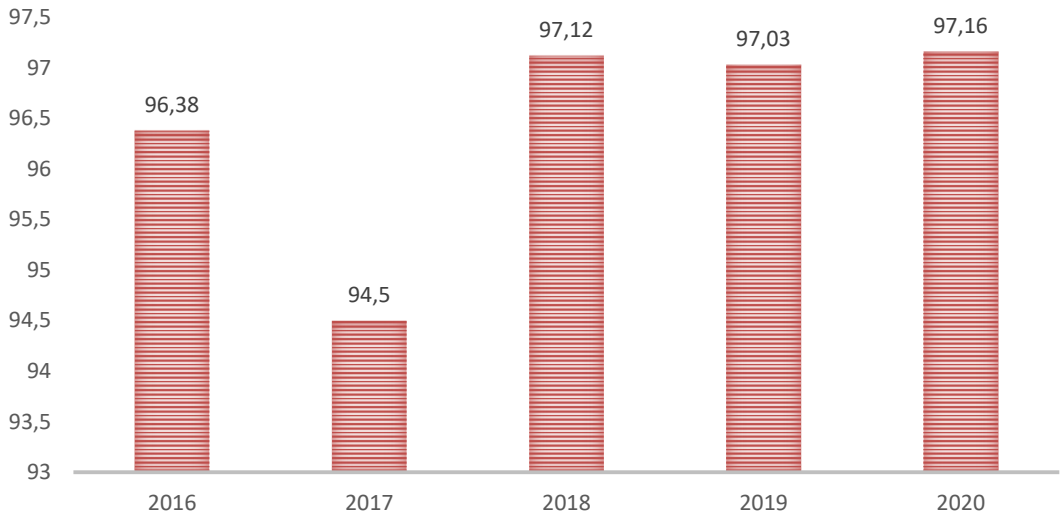

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

**Gambar 2.15**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Selama kurun waktu lima tahun 2016-2020, angka TPT Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan dari sebesar 3,62 persen pada Tahun 2016 menjadi sebesar 2,84 persen pada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan atau mengindi-kasikan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Tojo Una-Una pada umumnya sudah bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Namun, penting juga untuk ditelaah lebih lanjut, angkatan kerja yang tidak dapat masuk dalam pasar tenaga kerja *(labor market)* masuk ke sektor-sektor informal untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga terjadi Angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan masuk bekerja di Sektor Pertanian menjadi petani atau buruh tani, atau bekerja di Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai nelayan.

### 2.2.2.8. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja. Rasio ini cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, bahkan mencapai angka 97,16 persen penduduk angkatan yang telah bekerja pada berbagai sektor di Kabupaten Tojo Una-Una.

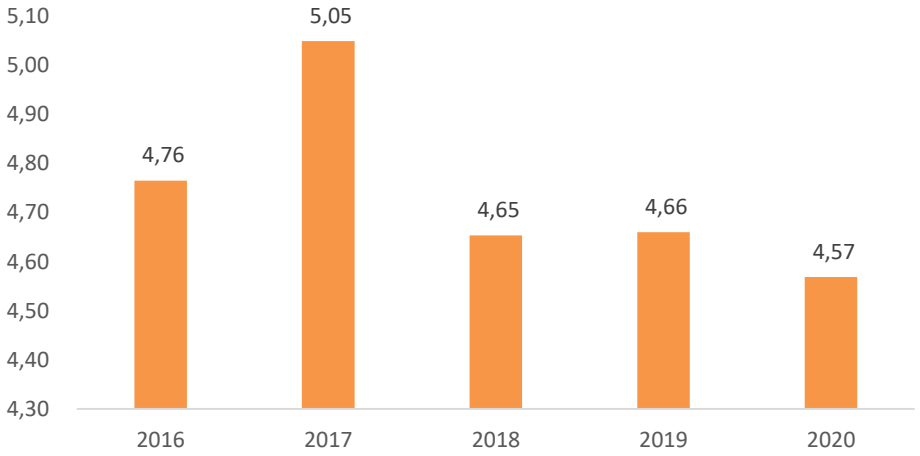



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

**Gambar 2.16**
**Rasio Penduduk yang Bekerja (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

### 2.2.2.9. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan (ADH), sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

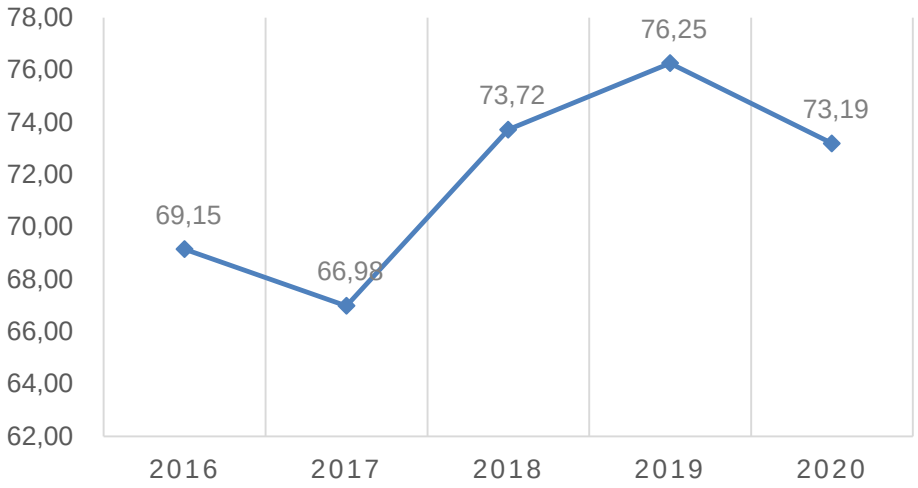
**Gambar 2.17**
**Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Kabupaten Tojo Una-Una dengan tren mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016 mencapai 4,76 persen menjadi 4,57 persen pada Tahun 2020.

Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pertumbuhan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya Tahun 2020.

### 2.2.2.10. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja), adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang diguna-kan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja *(supply side)* dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

**Gambar 2.18**
**Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Tojo Una-Una cenderung meningkat selama Tahun 2016-2020. Kesempatan kerja Tahun 2016 sebesar 69,15 persen meningkat menjadi sebesar 73,19 pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata 1,01 persen kesempatan kerja setiap tahun di Kabupaten Tojo Una-Una.

### 2.2.2.11. Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan /pegawai, pekerja bebas di pertanian, majikan, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah di-keluarkan untuk usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja

dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

**Tabel 2.7**
**Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Tahun 2016-2020**

| No. | Status Pekerjaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenaga kerja yang berusaha sendiri | 9.053 | 13.463 | 15.324 | 16.720 | 16.275 |
| 2 | Pekerja bebas keluarga | 14.474 | 14.145 | 17.270 | 18.038 | 17.504 |
| Jumlah | | 23.527 | 27.608 | 32.594 | 34.758 | 33.779 |
| Total kesempatan kerja | | 70.974 | 70.751 | 78.841 | 82.569 | 81.516 |
| Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | | 33,15 | 39,02 | 41,34 | 42,10 | 41,44 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2017-2021

Proporsi tenaga kerja kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016 sebesar 33,15 persen menjadi sebersar 41,44 persen pada Tahun 2020.

### 2.2.2.12. Persentase PAD terhadap pendapatan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewe-nangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dalam mendanai program-program pembangunan daerah.

**Tabel 2.8**
**Persentase PAD terhadap pendapatan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

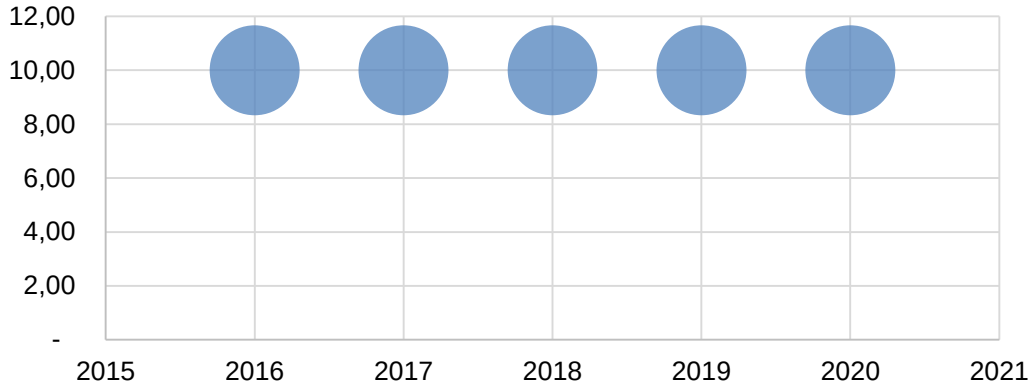
| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAD | 48.453.761.094 | 58.913.541.695,26 | 60.587.017.564,15 | 73.927.998.565,70 | 74.525.995.692,20 |
| 2 | Pendapatan Daerah | 1.062.566.334.258,27 | 944.824.831.591,26 | 1.007.824.498.904,15 | 1.115.881.009.484,70 | 1.093.078.106.661,20 |
| **Rasio** | | **4,56** | **6,24** | **6,01** | **6,63** | **6,82** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2017-2021

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016 rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 4,56 persen, meningkat menjadi 6,82 persen pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan keuangan daerah (kemandirian keuangan daerah) yang bersumber dari penerimaan daerah sendiri, yakni pajak dan retribusi daerah.

#### 2.2.2.13. Opini BPK

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan bebe-rapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecu-kupan pengungkapan *(adequate disclosures)*; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas sistem pengendalian internal. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disaji-kan dalam laporan keuangan.




Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.19**
**Opini BPK Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Kabupaten Tojo Una-Una memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas opini BPK. Opini WTP atau *unqualified opinion* menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

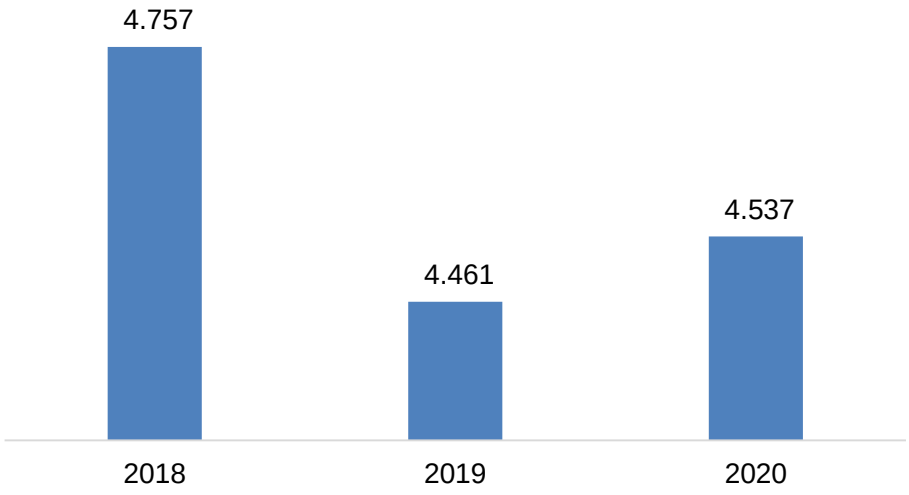
#### 2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan *(education)* memiliki peran sangat penting, karena melalui pen-didikan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, serta potensi yang ada dalam setiap individu. Posisi pendidikan begitu penting terdapat dalam

pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 berbunyi: *"Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."* Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah peran penting dan strategis dari pendidikan, karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dibentuk melalui sistem pendidikan yang baik dan berkualitas. Pernyataan pentingnya pendidikan juga tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar"*. Sangat jelas dan eksplisit dalam pernyataan tersebut, pendidikan terutama pendidikan dasar yang diwajibkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

**a. Jumlah Murid TK/RA**

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/*Raudhatul Athfal (RA)* merupa-kan satu diantara bentuk pendidikan pra-sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia dini (usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar). Pendidikan di Taman Kanak-Kanak dilaksanakan dengan prinsip ber-main sambil belajar atau belajar seraya bermain. Sesuai dengan perkemba-ngan anak didik. Tujuan Pendidikan TK, adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak, pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.




Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.20**
**Jumlah Murid TK/RA (orang)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

Jumlah murid TK/RA di Kabupaten Tojo Una-Una cenderung menurun dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2018 sebanyak 4.757 orang

menjadi 4.461 orang pada Tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 4.537 orang. Jadi selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah murid sebanyak 4,62 persen atau rata-rata sebanyak 220 orang murid.

**b. Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pen-didikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja *(supply of labor)*, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu daerah.

**Tabel 2.9**
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI/Paket A | 38,6 | 38,74 | 38,98 |
| 2 | SMP/MTs/Paket B | 20,04 | 21,24 | 19,52 |
| 3 | SMA/SMK/MA/Paket C | 19,36 | 22,64 | 21,59 |
| 4 | Diploma I/II/II | 3,04 | 1,9 | 2,13 |
| 5 | Diploma IV/S1/S2/S3 | 6,83 | 4,58 | 5,6 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Angka Pendidikan yang Ditamatkan pada jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A dan SMA/SMK/MA/Paket C cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, Diploma I/II/II, dan Diploma IV/S1/S2/S3 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 7-12 tahun dan usia 16-18 tahun cenderung memasuki pendidikan sekolah dasar dan pendidikan menengah. Namun, mereka yang tamat sekolah menangah justru cenderung tidak melanjutkan pendididikan pada jenjang yang lebih tinggi.

**c. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) dimaknai sebagai rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/SLTP/SLTA atau yang sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 tahun untuk SD atau sederajat; 13-15 tahun untuk SLTP atau sederajat; dan 16-18 tahun untuk SLTA atau sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan ter-tentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana, untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Meskipun

demikian, APK merupakan satu diantara indikator kinerja utama (IKU) dalam mengukur keberhasilan pemba-ngunan pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 2.10**
**Angka Partisipasi Kasar (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | Sulteng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI/Paket A | 113,07 | 109,72 | 107,91 | 103,95 |
| 2 | SMP/MTs/Paket B | 78,31 | 79,08 | 80,23 | 91,98 |
| 3 | SMA/SMK/MA/Paket C | 74,43 | 88,66 | 88,62 | 88,42 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

APK pendidikan SD/MI/Paket A cenderung menurun selama kurun waktu Tahun 2018-2020. Hal ini menunjukkan partisipasi anak usia sekolah menga-lami penurunan untuk bersekolah di sekolah dasar. Namun demikian, partisi-pasi anak usia sekolah untuk bersekolah di SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/ MA/Paket C cenderung meningkat. APK pendidikan dasar Kabupaten Tojo Una-Una berada di bawah APK Provinsi Sulawesi Tengah. Di sisi lain, APK pendidikan menengah Kabupaten Tojo Una-Una lebih tinggi dibanding APK Provinsi Sulawesi Tengah.

**d. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan jumlah penduduk usia seko-lah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, dan juga merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan pendidikan atas pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

**Tabel 2.11**
**Angka Partisipasi Murni (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sulteng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI/Paket A | 95,58 | 95,42 | 98,41 | 98,55 | 98,94 | 93,24 |
| 2 | SMP/MTs/Paket B | 67,35 | 68,92 | 69,39 | 71,04 | 70,91 | 74,42 |
| 3 | SMA/SMK/MA/ Paket C | 56,84 | 55,58 | 60,19 | 61,68 | 63,33 | 65,02 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Partisipasi masyarakat usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun cenderung mengalami peningkatan untuk bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu lima tahun terakhir Tahun 2016-2020. Hal ini

mengindikasikan adanya keberhasilan program-program pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam bidang pendidikan.

**e. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar yakni 7-12 tahun; 13-15 tahun; dan 16-18 tahun yang masih menempuh pendidikan dasar dan menengah, atau sedang sekolah SD, SLTP, dan SLTA per 100 penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

**Tabel 2.12**
**Angka Partisipasi Sekolah (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI/Paket A | 99,42 | 100,00 |
| 2 | SMP/MTs/Paket B | 93,00 | 94,28 |
| 3 | SMA/SMK/MA/Paket C | 69,33 | 63,16 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2019

Jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, pada tahun 2016 sebesar 99,42 persen untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 93,00 persen. Artinya ada 99 persen anak dari setiap 100 anak usia sekolah 7-12 tahun menempuh pen-didikan dasar, dan terdapat 93 anak dari 100 anak usia sekolah 13-15 tahun menempuh pendidikan SMP/MTs/Paket B . Untuk jenjang pendidikan mene-ngah (SMA/SMK/MA/Paket C) sebesar 69,33 persen, artinya ada 69 anak dari setiap 100 anak usia sekolah 16-18 tahun menempuh pendidikan menengah, sisanya sebesar 31 anak tidak bersekolah. APS jenjang pendidikan sekolah dasar mengalami peningkatan, sedangkan pada jenjang pendidikan mene-ngah mengalami penurunan pada Tahun 2017.

**f. Jumlah Sekolah**

Ketersediaan faktor pendukung pendidikan adalah adanya sarana dan prasarana pendidikan, yakni gedung-gedung sekolah.

**Tabel 2.13**
**Jumlah Sekolah (unit)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK/RA | - | - | 131 | 117 | 126 |
| 2 | SD/MI/Paket A | 192 | 192 | 194 | 192 | 192 |
| 3 | SMP/MTs/Paket B | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
| 4 | SMA/SMK/MA/Paket C | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Ketersediaan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan TK/RA dan SD cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 3-5 tahun terakhir.

Jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,8 persen, 1 persen, dan 13,3 persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mengalami kenaikan sebesar 30,8 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**g. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar**

Rasio ketersediaan sekolah dasar adalah perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar dengan usia sekolah (7-15 tahun) pada jenjang pendidikan dasar. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana sekolah dasar di Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 2.14**
**Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | | | | | | |
| 1 | SD/MI | 192 | 192 | 194 | 192 | 192 |
| 2 | SMP/MTS | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
| | Total | 267 | 267 | 259 | 257 | 257 |
| Penduduk | | | | | | |
| 1 | usia 7-12 tahun | 20.009 | 20.131 | 20.253 | 20.262 | 20.384 |
| 2 | usia 13-15 tahun | 11.533 | 11.655 | 11.777 | 11.123 | 11.245 |
| | Total | 31.542 | 31.786 | 32.030 | 31.385 | 31.629 |
| **Rasio** | | **84,6** | **84,0** | **80,9** | **81,9** | **81,3** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Ketersediaan sekolah dasar bagi penduduk usia 7-15 tahun (SD/MI dan SMP/MTS) mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh tinggi peningkatan jumlah penduduk usia sekolah dasar yang tidak diimbangi oleh peningkatan sarana sekolah dasar di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**h. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah**

Rasio ketersediaan sekolah menengah adalah perbandingan antara jumlah sekolah menengah (SMA/SMK/MA) pada jenjang pendidikan menengah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah (16-18 tahun). Rasio ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana sekolah menengah di Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 2.15**
**Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah SMA/MA/SMK | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 |

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Penduduk usia 16-19 | 12.251 | 12.173 | 12.532 | 12.421 | 15.094 |
| **Rasio** | | **21,2** | **21,4** | **22,3** | **27,4** | **22,5** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Ketersediaan sekolah menengah bagi penduduk usia 16-18 tahun (SMA/ MA/SMK) cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini disebabkan pening-katan jumlah penduduk usia sekolah menengah yang diimbangi peningkatan sarana sekolah menengah di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu lima tahun terakhir.

### i. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dasar dapat diukur dari rasio guru pendidikan dasar terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini meng-indikasikan ketersediaan tenaga guru. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru, agar tercapai mutu pengajaran sesuai standar pendidikan.

**Tabel 2.16**
**Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar (per 1.000)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | Jenjang | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah guru | SD/MI | 1.508 | 1.589 | 1.624 | 1.575 | 1.691 |
| | SMP/MTs | 462 | 694 | 629 | 644 | 714 |
| | **Total** | 1.970 | 2.283 | 2.253 | 2.219 | 2.405 |
| Jumlah Murid | SD/MI | 21.063 | 20.624 | 21.613 | 20.287 | 19.361 |
| | SMP/MTs | 9.301 | 8.912 | 8.270 | 8.820 | 8.977 |
| | **Total** | 30.364 | 29.536 | 29.883 | 29.107 | 28.338 |
| **Rasio (%)** | | **64,9** | **77,3** | **75,4** | **76,2** | **84,9** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Selama kurun Tahun 2016-2020, terlihat bahwa rasio guru pendidikan dasar terhadap murid mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pening-katan kualitas pelayanan pendidikan, karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak.

### j. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Pelayanan pendidikan menengah dapat diamati dari rasio guru pen-didikan menengah terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga, untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran sesuai standar pendidikan.

**Tabel 2.17**
**Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah (per 1.000)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guru | 399 | 607 | 455 | 437 | 546 |
| Murid | 7.020 | 7.134 | 6.573 | 6.415 | 7.360 |
| **Rasio** | **56,8** | **85,1** | **69,2** | **68,1** | **74,2** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Selama kurun Tahun 2016-2020, terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin meningkat.

### 2.3.1.2. Kesehatan

Satu diantara tolok ukur kinerja layanan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator sangat penting untuk mengukur keberhasilan program-program untuk menanggulangi berbagai penyebab penyakit terhadap bayi, maupun program kesehatan ibu dan anak sebab AKB ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau proba-bilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

**Tabel 2.18**
**Angka Kematian Bayi (per 1.000)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. | 22 | 24 | 28 | 25 |
| Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu | 2.442 | 2.703 | 268 | 263 |
| **Rasio** | **9,01** | **8,88** | **104,48** | **95,06** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

AKB Kabupaten Tojo Una-Una cenderung meningkat selama kurun waktu Tahun 2016-2019. Hal ini menunjukkan upaya-upaya atau program-program yang dilakukan untuk menekan AKB belum optimal. Tingginya AKB disebabkan berat badan bayi lahir yang rendah (di bawah 2.500 gram).

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**a. Jalan Kondisi Baik**

Kriteria jalan kondisi baik adalah jalan yang memiliki kerataan per-mukaan jalan memadai untuk dapat dilalui kendaraan dengan cepat, aman,

dan nyaman. Kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (nilai IRI), atau diukur secara visual (nilai RCI). Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

**Tabel 2.19**
**Kondisi Jalan Baik (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Jalan Kondisi Baik (meter) | 540.156 | 559.352 | 589.974 | 307.030 | 255.930 |
| Panjang Jalan Seluruhnya (meter) | 1.150.139 | 1.150.139 | 1.150.139 | 1.150.139 | 1.150.139 |
| **Rasio** | **46,96** | **48,63** | **51,30** | **26,70** | **22,25** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Panjang jalan di Kabupaten Tojo Una-Una 1.150.139 meter selama kurun waktu Tahun 2016-2020 (konstan). Panjang jalan berkondisi baik mengalami penurunan dari Tahun 2016 sebesar 46,96 persen menjadi sebesar 22,25 persen atau berkurang 24,71 persen pada Tahun 2020.

**b. Panjang Jalan**

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk dengan panjang jalan (meter). Rasio ini memiliki arti 1 (satu) meter jalan berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin Tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani dengan adanya jalan tersebut.

**Tabel 2.20**
**Panjang Jalan per Penduduk**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Panjang Jalan | 1.150.139 | 1.150.139 | 1.150.139 | 1.150.139 | 1.150.139 |
| Jumlah Penduduk | 149.214 | 150.820 | 152.476 | 153.991 | 163.829 |
| **Rasio** | **770,8** | **762,6** | **754,3** | **746,9** | **702,0** |

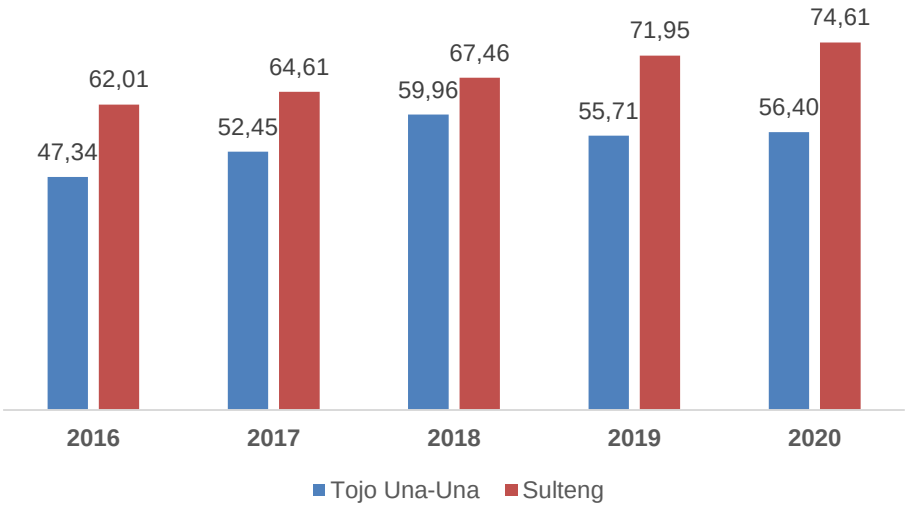
Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Rasio panjang jalan per penduduk mengalami penurunan di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu Tahun 2016-2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah akses jalan untuk melayani masyarakat mengalami penurunan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi pembangunan atau pertambahan panjang jalan baru.

**c. Rumah Tinggal Bersanitasi**

Sanitasi *(sanitation)* adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.

Menurut WHO, sanitasi didefinisikan sebagai pengawasan faktor-faktor dalam lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap perkembangan jasmani. Kondisi berarti pula suatu usaha untuk menurunkan jumlah penyakit manusia sedemikian rupa, sehingga derajat kesehatan yang optimal dapat dicapai.




Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2021

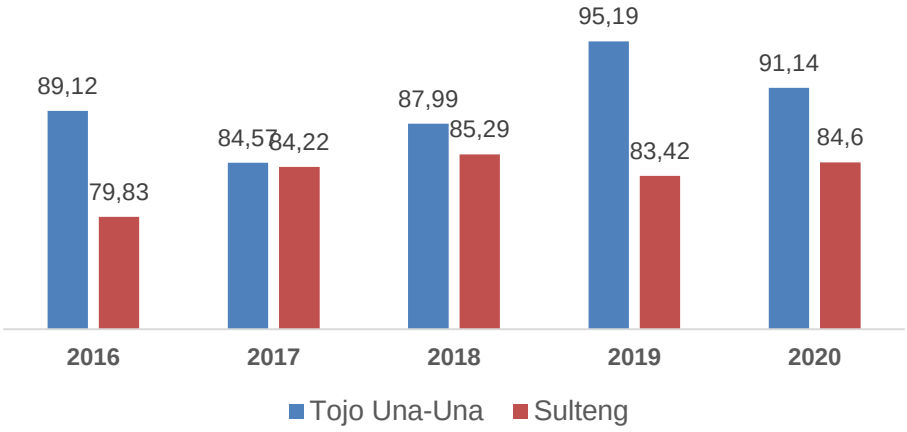
**Gambar 2.21**
**Rumah Tinggal Bersanitasi Layak (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, rumah tinggal ber-sanitasi layak sebesar 47,34 persen dan meningkat menjadi sebesar 56,40 persen pada lima tahun terakhir, atau meningkat sebesar 9,06 persen tahun 2020. Namun demikian, angka sanitasi layak Kabupaten Tojo Una-Una masih di bawah angka Provinsi Sulawesi Tengah.

**d. Akses Air Minum Layak**

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, pena-mpungan air hujan (PAH) atau mata air, dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, pena-mpungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses ter-hadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan seluruh rumah tangga. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas, berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum

bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas ada-lah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, semakin baik kondisi rumah tangga di suatu daerah tersebut.




Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2021

**Gambar 2.22**
**Rumah Tinggal Berakses Air Minum Layak (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Rumah tinggal berakses air minum layak mencapai angka tertinggi pada Tahun 2019 sebanyak 95,19 persen. Angka ini tertinggi sepanjang lima tahun terakhir 2016-2020. Rumah tinggal berakses air minum layak pada Tahun 2016 sebesar 89,12 persen dan meningkat menjadi sebesar 91,14 persen pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun, terjadi peningkatan kualitas akses air minum layak di Kabupaten Tojo Una-Una. Persentase rumah tinggal berakses air minum layak di Kabupaten Tojo Una-Una lebih tinggi dibanding angka Provinsi Sulawesi Tengah.

**e. Irigasi**

Irigasi *(irrigation)* merupakan satu diantara faktor yang amat menentukan suksesnya usaha di bidang pertanian. Oleh sebab itu, tanpa pengairan yang tersedia dengan baik, maka sebagian besar tanaman (komoditas) pertanian tidak akan dapat tumbuh subur, bahkan mengalami kegagalan. Irigasi meme-gang peran penting sebab tanaman yang membutuhkan pengairan tidak hanya pada awal penanaman, atau masa-masa tertentu namun hingga masa panen. Kondisi irigasi harus dapat dipastikan dalam kondisi baik, karena ber-dampak pada hasil tanaman pertanian, yang bermuara pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.

**Tabel 2.21**
**Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang irigasi kabupaten dalam kondisi baik (m) | 953,79 | 1019,70 | 1072,42 | 1089,09 | 1097,00 |
| Panjang irigasi kabupaten (m) | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 2.887 |
| **Persentae (%)** | **40,13** | **42,90** | **45,12** | **45,82** | **38,00** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Kondisi irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan dari Tahun 2016 sebesar 40,13 persen menjadi sebesar 38 persen pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan layanan irigasi kepada masyarakat petani dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**f. Tempat Ibadah**

Tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah tempat yang digunakan umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.

**Tabel 2.22**
**Tempat Ibadah per Penduduk (per 1.000)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Tempat Ibadah (unit) | 337 | 337 | 361 | 383 | 383 |
| Jumlah Penduduk (orang) | 149.214 | 150.820 | 152.476 | 153.991 | 163.829 |
| Rasio (per 1.000) | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk cenderung konstan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016, rasio jumlah tempat ibadah per 1.000 penduduk sebesar 2,3 dan kondisi tersebut sama pada Tahun 2020 tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk diimbangi pertambahan rumah ibadah di Kabupaten Tojo Una-Una.

### 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

**a. Dinding Rumah Masyarakat**

Indikator kualitas perumahan rakyat adalah jenis dinding, lantai rumah, atap rumah, dan tempat tinja yang digunakan. Jenis dinding rumah yang digunakan masyarakat Tojo Una-Una antara lain: tembok, kayu/papan, bambu, dan lainnya.

**Tabel 2.23**
**Jenis Dinding Rumah Tinggal (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sulteng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Tembok* | 51,91 | 52,05 | 55,45 | 49,68 | 58,57 | 61,19 |
| *-Kayu* | 45,83 | 47,25 | 44,55 | 50,32 | 39,99 | 35,19 |
| *-Bambu* | 2,25 | 0,7 | 0 | 0 | 0,29 | 0,37 |
| *-Lainnya* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 2,53 |

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2021

Jenis dinding tembok rumah mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir 2016-2020. Sedangkan jumlah rumah tinggal yang menggunakan dinding kayu/papan mengalami penurunan dari sebesar 45,83 persen Tahun 2016 menjadi sebesar 39,99 persen pada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perumahan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun.

**b. Jenis Lantai Rumah Tinggal**

Indikator kualitas perumahan rakyat adalah jenis dinding, lantai rumah, atap rumah, dan tempat tinja yang digunakan. Jenis lantai rumah yang di-gunakan masyarakat Tojo Una-Una antara lain: tanah dan bukan tanah.

**Tabel 2.24**
**Jenis Lantai Rumah Tinggal (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Lantai Rumah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sulteng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Bukan Tanah* | 96,34 | 96,79 | 96,1 | 99,24 | 98,42 | 97,69 |
| *-Tanah* | 3,66 | 3,21 | 3,9 | 0,76 | 1,58 | 2,31 |

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2021

Persentase masyarakat yang menggunakan lantai bukan tanah menga-lami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari sebesar 96,34 persen Tahun 2016 menjadi sebesar 98,42 persen Tahun 2020. Sementara persentase masyarakat yang menggunakan tanah terus mengalami penu-runan hingga mencapai sebesar 1,58 persen Tahun 2020. Hal ini menu-njukkan terjadi peningkatan kualitas perumahan masyarakat selama kurun waktu lima tahun di Kabupaten Tojo Una-Una.

**c. Atap Rumah Masyarakat**

Indikator kualitas perumahan rakyat adalah jenis dinding, lantai rumah, atap rumah, dan tempat tinja yang digunakan. Jenis atap rumah yang diguna-kan masyarakat Tojo Una-Una, antara lain: beton, genteng, kayu/sirap, seng, asbes, ijuk, bambu, dan lainnya.

**Tabel 2.25**
**Jenis Atap Rumah Tinggal (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Jenis Atap Rumah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sulteng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Beton* | 0 | 0,36 | 0,15 | 0,43 | 0,26 | 0,84 |
| *-Genteng* | 0,22 | 0,18 | 0 | 0,36 | 1,66 | 1,92 |
| *-Kayu/Sirap* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,09 |
| *-Seng* | 75,84 | 79,73 | 82,29 | 79,29 | 85,73 | 90,51 |
| *-Asbes* | 1,94 | 1,01 | 0,56 | 0,57 | 0,22 | 0,49 |
| *-Ijuk* | 21,99 | 18,72 | 16,99 | 19,34 | 11,62 | 5,72 |
| *-Bambu* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,42 |
| *-Lainnya* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2021

Jenis atap tempat tinggal masyarakat Tojo Una-Una pada umumnya menggunakan atap seng. Penggunaan atap seng tersebut mengalami pening-katan setiap tahun hingga mencapai angka tertinggi pada Tahun 2020 menjadi sebesar 85,73 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas rumah tinggal masyarakat ditinjau dari jenis atap yang digunakan.

**d. Tempat Pembuangan Tinja Masyarakat**

Indikator kualitas perumahan rakyat adalah jenis dinding, lantai rumah, atap rumah, dan tempat tinja yang digunakan. Jenis tempat tinja rumah yang digunakan masyarakat Tojo Una-Una, antara lain: tangki septik, IPAL, kolam/ sungai, lubang tanah, pantai/tanah terbuka, dan lainnya.

**Tabel 2.26**
**Jenis Tempat Tinja Masyarakat (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Jenis Tempat Tinja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sulteng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Tangki Septik* | 42,48 | 66,04 | 85,7 | 73,14 | 76,18 | 91,52 |
| *-IPAL* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *-Kolam/Sungai* | 22,81 | 5,01 | 10,74 | 12,38 | 16,56 | 3,42 |
| *-Lubang Tanah* | 13,87 | 28,95 | 3,56 | 14,49 | 5,24 | 4,46 |
| *-Pantai/Tanah Terbuka* | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,36 |
| *-Lainnya* | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0,24 |

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2021

Persentase tempat tinja masyarakat yang menggunakan kolam/sungai, lubang tanah, dan pantai/tanah terbuka mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan yang menggunakan tangki septik me-ngalami peningkatan dari sebesar 42,48 persen Tahun 2016 menjadi sebesar 76,18 persen pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan meningkatnya kualitas perumahan masyarakat sebagai tempat tinggal yang layak.

### 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

**a. Petugas Perlindungan Masyarakat**

Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan.

**Tabel 2.27**
**Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Orang per Desa)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Petugas Linmas di Kabupaten (orang) | 750 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| Wilayah kerja kabupaten (Desa) | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| **Rasio (per Desa)** | **5,10** | **5,42** | **5,42** | **5,42** | **5,42** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Cakupan petugas perlindungan masyarakat mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun, meskipun meningkat relatif kecil. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin bertambah jumlah dan peran Linmas dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat setempat.

**b. Penyelesaian pelanggaran K3**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan mau-pun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja. Kese-lamatan dan kesehatan kerja, juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

**Tabel 2.28**
**Pelanggaran K3 (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelanggaran K3 yang terselesaikan | 382 | 437 | 472 | 531 | 190 |
| Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP | 382 | 437 | 472 | 531 | 190 |
| **Rasio** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi mengalami penu-runan selama kurun waktu Tahun 2016-2020. Hal tersebut menunjukkan se-makin meningkat kualitas layanan terhadap pelaporan kasus K3 di

Kabupaten Tojo Una-Una. Semua kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan secara menyeluruh oleh petugas.

**c. Pelayanan Bencana Kebakaran**

Kebakaran *(fire)* adalah suatu nyala api dalam kecil atau besar pada tempat yang tidak dikehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Bencana kebakaran dapat terjadi setiap saat tanpa dapat diperkirakan sebelumnya. Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una menyediakan layanan bencana kebakaran melalui bidang Pemadam Kebakaran (Damkar).

**Tabel 2.29**
**Pelayanan Bencana Kebakaran (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran ($Km^2$) | 4.958 | 4.958 | 4.958 | 4.958 | 4.958 |
| Luas wilayah ($Km^2$) | 5.721,51 | 5.721,51 | 5.721,51 | 5.721,51 | 5.721,51 |
| **Persentase** | **86,66** | **86,66** | **86,66** | **86,66** | **86,66** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase jangakauan layanan bencana kebakaran setiap tahun tetap (kostan). Jangkauan layanan kebakaran mencakup wilayah Kecamatan Tojo Barat seluas 1.092,27 $Km^2$; Kecamaan Tojo seluas 1.065,48 $Km^2$; Kecamatan Ulubongka seluas 1.767,11 $Km^2$; Kecamatan Ampana Tete seluas 796,02 $Km^2$; Kecamatan Ampana Kota seluas 175,42 $Km^2$; dan Kecamatan Ratolindo seluas 61,88 $Km^2$.

**d. Tingkat waktu tanggap layanan Kebakaran**

Pelayanan korban bencana kebakaran harus dilakukan dengan cepat dan tepat, mengingat api sebagai sumber kebakaran dapat menjalar dengan cepat sehingga dapat menimbulkan korban yang cukup tinggi. Standar tanggap kebakaran ditangani dalam waktu 15 menit.

**Tabel 2.30**
**Tingkat Waktu Tanggap Layanan Kebakaran (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit | 14 | 33 | 30 | 44 |
| Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK | 14 | 33 | 30 | 44 |
| **Rasio** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Merujuk pada data tersedia, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus kebakaran dari Tahun 2017 sebanyak 14 kasus, menjadi sebanyak 44 kasus pada Tahun 2020 atau bertambah sebanyak 30 kasus. Namun demikian, semua kasus kebakaran masih dapat tertangani dalam waktu 15 menit.

**e. Penegakan Perda**

Berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah *(policy of regional government)* dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur ketertiban umum dan ke-amanan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan Perda untuk menjamin pelaksa-naan dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap Perda.

**Tabel 2.31**
**Penegakan Perda (%) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penyelesaian penegakan Perda | 776 | 796 | 796 | 7 | 7 |
| Jumlah pelanggaran Perda | 892 | 865 | 865 | 7 | 7 |
| **Rasio** | **87,00** | **92,02** | **92,02** | **100,00** | **100,00** |

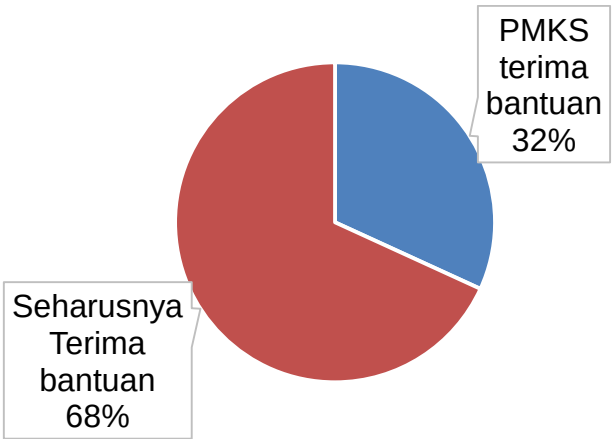
Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Jumlah pelanggaran Perda mengalami penurunan drastis selama kurun waktu Tahun 2016-2020. Penyelesaian kasus pelanggaran Perda tersebut dapat diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran Perda me-ngalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 87 persen menjadi 100 persen tertangani.

### 2.3.1.6. Sosial

**a. PMKS yang memperoleh bantuan sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, karena itu tidak dapat menjalin hubu-ngan yang serasi dan kreatif dengan lingkungan, sehingga tidak dapat meme-nuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Oleh karena itu, PMKS perlu mendapatkan bantuan sosial. Pada Tahun 2020, persentase PMKS di Kabupaten Tojo Una-Una memperoleh bantuan sosial sebesar 32 persen.

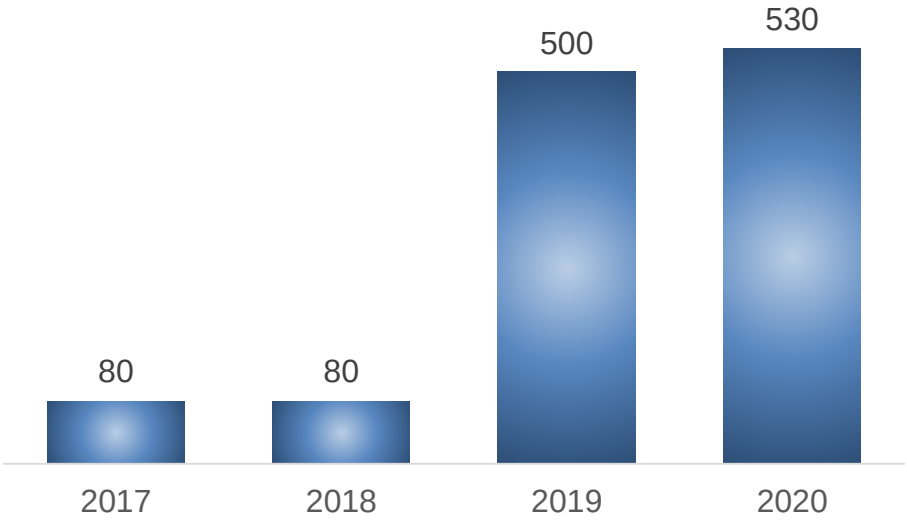



Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.23**
**PMKS yang Memperoleh Bantuan (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020**

**b. PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE**

Pengembangan KUBE sebagai program penanggulangan kemiskinan mempunyai strategi mendorong PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) supaya mampu berdaya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberdayaan secara ekonomi adalah mendorong KUBE supaya bisa mela-kukan kegiatan ekonomi produktif sehingga mampu meningkatkan pendapa-tan keluarga *(income generating capacity)* dan secara simultan dari keluar dari jebakan kemiskinan *(poverty trap)*.Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan KUBE mengalami peningkatan selama kurun waktu Tahun 2017-2020, dari sebanayak 80 orang menjadi sebanyak 530 orang.

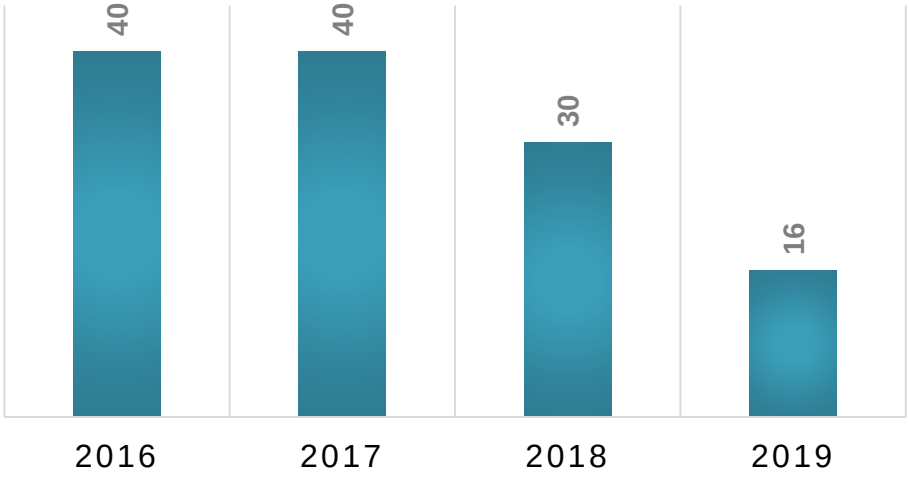



Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.24**
**PMKS yang Mendapatkan KUBE (orang)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

**c. Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial**

Sebagai satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana. Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Diharapkan melalui bantuan tersebut, kelangsungan hidup korban bencana dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial.



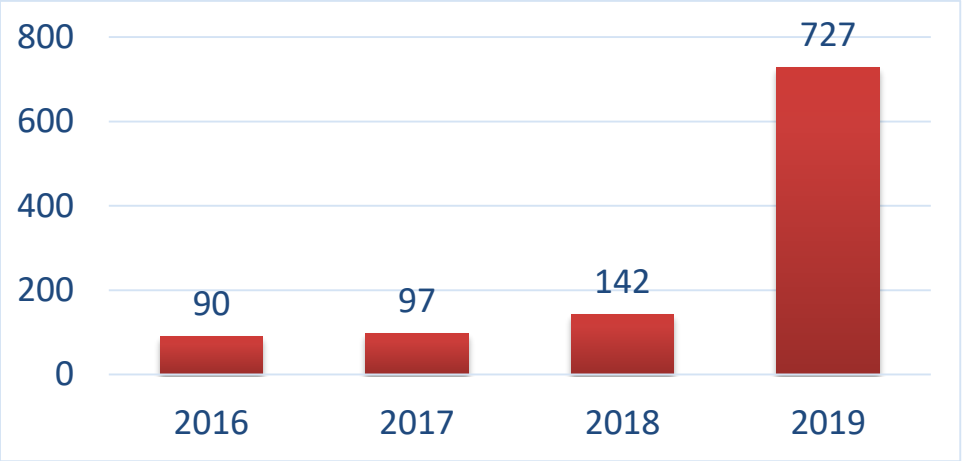

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.25**
**Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan korban bencana alam di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan dari sebanyak 40 orang pada Tahun 2016 menjadi sebanyak 16 orang pada Tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan terjadinya penurunan jumlah korban bencana setiap tahun di Kabupaten Tojo Una-Una. Kondisi ini menunjukkan semakin baik upaya-upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

**d. Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lansia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Begitupula dengan penyandang cacat fisik dan mental.




Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.26**
**Penyandang Catat Fisik dan Mental, serta Lansia tidak Potensial yang Menerima Bantuan Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019**

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu Tahun 2016-2019. Penerima jaminan sosial pada Tahun 2016 sebanyak 90 orang menjadi sebanyak 727 orang pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial.

### 2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### 2.3.2.1. Tenaga Kerja

**a. Angka Sengkata Pengusaha-Pekerja**

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial *(industrial relations)* antara pengusaha dan pekerja sangat diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja.

**Tabel 2.32**
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Jumlah sengketa pengusaha pekerja | 21 | 22 | 33 |
| Jumlah Perusahaan | 135 | 169 | 172 |
| **Rasio** | **15,56** | **13,02** | **19,19** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Tojo Una-Una yang sebelumnya mengalami penurunan, dan kemudian kembali mengalami peningkatan. Rasio jumlah sengketa pengusaha-pekerja pada Tahun 2017 sebesar 15,56, namun pada Tahun 2018 jumlah rasio sengketa pengusaha-pekerja turun dengan rasio sebesar 13,02 dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sengketa pengusaha-pekerja dengan rasio sebesar 19,19.

**b. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**

Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus melalui 3 tahapan yakni Bipartit, Mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya jika dalam proses tersebut tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, maka dibuatlah kesepakatan tersebut dalam suatu Perjanjian Bersama (PB).

**Tabel 2.33**
**Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | 12 | 13 | 21 |
| Kasus yang dicatatkan | 21 | 22 | 33 |
| **Rasio** | **57,1** | **59,1** | **63,6** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran Kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Rasio jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada Tahun 2017 sebesar 57,1; pada Tahun 2018 rasio jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama meningkat menjadi sebesar 59,1; dan Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 63,6.

**c. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatatpada dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota, yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini

peru-sahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.34**
**Pencari Kerja yang Mendaftar yang Ditempatkan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pencari kerja yang ditempatkan | 491 | 4.281 | 18 | 213 |
| Pencari kerja yang terdaftar | 739 | 4.358 | 591 | 669 |
| **Rasio** | **66,4** | **98,2** | **3,0** | **31,8** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran Pencari Kerja yang Mendaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016-2017 mengalami penaikan. Dimana jumlah rasio sebesar 66,4; meningkat menjadi sebesar 98,2 pada Tahun 2017. Namun, pada Tahun 2018 jumlah rasio pencari kerja yang mendaftar yang ditempatkan mengalami penurunan dengan rasio sebesar 3,0; dan pada Tahun 2019 jumlah rasio pencari kerja yang mendaftar yang ditempatkan meningkat dengan nilai rasio sebesar 31,8. Penurunan rasio tersebut disebabkan adanya beberapa perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Tojo Una-Una yang berhenti beroperasi.

**d. Keselamatan dan perlindungan**

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman bagi pekerjaann, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik, atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perli-ndungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan ter-sebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaan sehari-hari, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal di-sekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya, serta pelaksanaan pekerjaan. keselamatan kerja adalah suatu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Dalam hubungan ini, bahaya yang timbul dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, keadaan tempat kerja, lingkungan, cara melakukan pekerjaan, karakteristik fisik, dan mental dari pekerjaan, harus sejauh mungkin diberantas, dan/atau dikendalikan.

**Tabel 2.35**
**Keselamatan dan Perlindungan Kerja**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n | 15 | 21 | 25 | 102 |
| Perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n | 135 | 169 | 172 | 219 |
| **Rasio** | **11,11** | **12,43** | **14,53** | **46,58** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran jumlah keselamatan dan perlindungan kerja di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2017-2020 mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah rasio keselamatan dan perlindungan pada Tahun 2017 sebesar 11,11; pada Tahun 2018 dengan rasio sebesar 12,43; pada Tahun 2019 dengan rasio sebesar 14,53; dan pada Tahun 2020 dengan rasio sebesar 46,58.

**e. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek**

Pekerja di Indonesia perlu mengenal empat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek) yang menjadi hak pekerja. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.

Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di Sektor Formal. Sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.36**
**Buruh/Pekerja yang Menjadi Program Jamsostek**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekerja/buruh AMSOSTEK | 1.497 | 1.499 | 2.024 | 2.035 | 2.344 |
| Pekerja/buruh | 1.497 | 1.499 | 2.024 | 2.035 | 2.344 |
| **Persentase (%)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase buruh/pekerja yang menjadi Program Jamsostek di Kabupaten Tojo Una-Una dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu konsisten setiap tahun. Persentase buruh/pekerja yang menjadi peserta Prog-ram Jamsostek dari Tahun 2016-2020 sebesar 100 persen setiap tahun.

### 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### a. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya ter-padu *(integrated)*, menyeluruh *(comprehensive)*, dan berkelanjutan *(sustaina-bility)* untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perem-puan, dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan, untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di Lembaga-lembaga pemerintah. Rasio partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga peme-rintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

**Tabel 2.37**
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekerja perempuan di lembaga pemerintah | 2.628 | 2.534 | 2.590 | 2.536 | 2.550 |
| Jumlah pekerja di lembaga pemerintahan | 4.696 | 4.397 | 4.420 | 4.316 | 4.316 |
| **Rasio** | **55,96** | **57,63** | **58,60** | **58,76** | **59,08** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Merujuk pada data rasio partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Tojo Una-Una pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahun. Jumlah rasio partisipasi perempuan pada Tahun 2016 sebesar 55,96; pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 57,63; pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 58,60; pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 58,76; dan pada Tahun 2020 partisipasi meningkat sebesar 59,08. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan setiap tahun semakin baik, dimana perempuan sudah menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

**b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR**

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II.

Kegunaan Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang pere-mpuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pember-dayaan. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dina-mika dan membawa perubahan bagi perempuan.

**Tabel 2.38**
**Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Persentase (%)** | **4** | **8** | **8** | **4** | **4** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 4 persen menjadi sebesar 8 persen; dan pada Tahun 2018 masih sebesar 8 persen. Namun, pada kurun waktu Tahun 2019-2020 persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan turun menjadi 4 persen.

**c. Persentase Angkatan Kerja perempuan**

Menurut Badan Pusat Statistik, TPAK adalah proporsi penduduk yang termasuk angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja, yakni penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Tingkat Angkatan kerja perempuan (TAKP) menjadi ukuran untuk menu-njukkan seberapa besar keterlibatan perempuan dalam dunia ketenaga-kerjaan. Semakin banyak jumlah perempuan yang bekerja maka semakin meningkat-kan kesejahteraan, kualitas individu, dan rumah tangga, serta pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan perempuan secara absolut lebih besar dari penduduk laki-laki adalah potensi untuk menunjang proses pembangunan. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi TAKP adalah jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

**Tabel 2.39**
**Persentase Angkatan Kerja Perempuan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angkatan kerja perempuan yang bekerja | 25.577 | 25783 | 32500 | 34007 | 32.896 |
| Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja | 70.974 | 70.751 | 78.841 | 82.569 | 81.516 |
| **Persentase (%)** | **36,0** | **36,4** | **41,2** | **41,2** | **40,4** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase TAKP di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019, setiap tahun mengalami peningkatan, namun khusus Tahun 2020 terjadi penurunan. Pada Tahun 2016 persentasi TAKP sebesar 36 persen; pada Tahun 2017 sebesar 36,4 persen; pada Tahun 2018 sebesar 41,2 persen; pada Tahun 2019 sebesar 41,2 persen; dan pada Tahun 2020 turun menjadi sebesar 40,4 persen. Kondisi persentase TAKP di Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan peran perempuan masih di bawah laki-laki dalam angkatan kerja setiap tahun.

**d. Persentase penduduk perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas yang status pekerjaan utama berusaha sendiri (%)**

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomi, yaitu dengan tidak kembalinya biaya produksi yang telah dikeluarkan dalam usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaan memerlukan teknologi, atau keahlian khusus. Penduduk perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas yang status pekerjaan utama berusaha sendiri merupakan perempuan yang berumur 15 tahun, atau lebih yang termasuk dalam penduduk usia kerja dengan perkerjaan usaha sendiri.

**Tabel 2.40**
**Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas**
**yang Status Pekerjaan Utama Berusaha Sendiri**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perempuan Berusaha Sendiri | 2702 | 2776 | 4376 | 5275 | 4456 |
| Jumlah pekerja berusaha sendiri | 9.053 | 13.463 | 15.324 | 16.720 | 16.275 |
| **Persentase (%)** | **29,8** | **20,6** | **28,6** | **31,5** | **27,4** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang status pekerjaan utama berusaha sendiri di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 sebesar 29,8 persen; pada Tahun 2017 mengalami penuruan

dengan persentase sebesar 20,6 persen; pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dengan persentas sebesar 28,6 persen; pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 31,5 persen; dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 27,4 persen.

**e. Persentase pencari kerja perempuan yang terdaftar (%)**

Persentase pencari kerja perempuan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut.

**Tabel 2.41**
**Pencari Kerja Perempuan Yang Terdaftar**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pencari kerja perempuan yang terdaftar | 51 | 2733 | 299 | 254 | 95 |
| Jumlah pencari kerja yang terdaftar | 143 | 4.258 | 591 | 669 | 257 |
| **Persentase (%)** | **35,7** | **64,2** | **50,6** | **38,0** | **37,0** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase pencari kerja perempuan yang terdaftar di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2018-2020 terjadi penurunan setiap tahun. Pada Tahun 2016 persentase sebesar 35,7 persen; pada Tahun 2017 meningkat dengan persentase sebesar 64,2 persen; pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 50,6 persen; pada Tahun 2019 sebesar 38 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 37 persen.

**f. Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian (%)**

Pekerja pada sektor pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebolan terakhir) di usaha pertanian, berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah, atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

**Tabel 2.42**
**Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Pertanian**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Tenaga kerja perempuan di sektor pertanian | 10.712 | 10.530 | 13.534 | 14.406 |
| Jumlah tenaga kerja sektor pertanian | 37.205 | 35.709 | 39.162 | 40.713 |
| Rasio | 28,8 | 29,5 | 34,6 | 35,4 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Data tenaga kerja perempuan di Sektor Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun waktu Tahun 2016-2019 setiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 tenaga kerja perempuan dengan rasio sebesar 28,8; pada Tahun 2017 dengan rasio sebesar 29,5; pada Tahun 2018 dengan rasio sebesar 34,6; dan pada Tahun 2019 dengan rasio sebesar 35,4. Kondisi ini menunjukkan setiap tahun terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja perempuan di Sektor Pertanian.

**g. Proporsi tenaga kerja perempuan di luar sektor pertanian (%)**

Tenaga kerja di luar sktor pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan berupa uang maupun barang, dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di Sektor Pertambangan, Industri, Listrik, Gas dan Air; Sektor Konstruksi/Bangunan; Sektor Per-dagangan, Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi; Sektor Keua-ngan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Peru-sahaan; Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

**Tabel 2.23**
**Tenaga Kerja Perempuan di Luar Sektor Pertanian**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Tenaga kerja perempuan di luar sektor pertanian | 26.493 | 25.179 | 25.628 | 26.307 |
| Jumlah tenaga kerja sektor pertanian | 37.205 | 35.709 | 39.162 | 40.713 |
| Rasio | 71,2 | 70,5 | 65,4 | 64,6 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Data besaran tenaga kerja perempuan di luar Sektor Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun waktu Tahun 2016-2019 mengalami penurunan setiap tahun. Rasio tenaga kerja perempuan di luar Sektor Pertanian pada tahun 2016 sebesar 71,2; pada Tahun 2017 sebesar 70,5; pada Tahun 2018 rasio sebesar 65,4; dan pada Tahun 2019 dengan rasio sebesar 64,6.

**h. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)**

Penegak hukum *(law enforcer)* adalah institusi-institusi yang melaksana-kan penegakan hukumdari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan di sidang pengadilan. Putusan pengadilan adalah vonis hakim yang dijatuhkan dalam proses persidangan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan

sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 2.44**
**Cakupan Penegakan Hukum Kasus Kekerasan**
**Terhadap Perempuan dan Anak**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 16 | 7 | 7 | 18 |
| Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan | 16 | 7 | 7 | 18 |
| **Rasio** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran cakupan penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tojo Una-Una kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir selalu konsisten setiap tahun. Rasio cakupan penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2016-2019 sebesar 100 persen untuk setiap tahun.

**i. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)**

Bantuan hukum *(legal assistance)* adalah jasa hukum yang diberikan pendamping hukum dan advokat, untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak-hak yang dijamin regulasi atau kebijakan lainn, dalam kaitan penyelesaian bantuan hukum. Bukan saksi korban tidak menjadi penerima manfaat layanan bantuan hukum ini.

**Tabel 2.45**
**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**
**Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum | 19 | 13 | 21 | 24 |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah korban | 22 | 15 | 22 | 24 |
| **Rasio** | **86,4** | **86,7** | **95,5** | **100** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016-2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 rasio cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 86,4, pada tahun 2017 rasio sebesar 86,7, pada tahun 2018 rasio sebesar 95,5 dan pada tahun 2019 rasio sebesar 100.

### 2.3.2.3. Pangan

Pangan *(food)* merupakan kebutuhan dasar utama *(main basic needs)* bagi manusia, untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak azasi yang harus dipenuhi. Sebagai kebutuhan dasar dan hak azasi manusia, pangan mem-punyai peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Keter-sediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Pengawasan dan pem-binaan keamanan pangan seharusnya mendapat perhatian serius. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi, jika ketahanan pangan terganggu yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional. Ketahanan pangan *(food security)* menjadi syarat mutlak bagi suatu negara untuk dapat melak-sanakan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

**Tabel 2.46**
**Ketersediaan Pangan Utama dan Pengawasan Pangan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Pangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan pangan utama (kg) | 5.180 | 4.530 | 3.891 | 4.677 | 4.442 |
| 2 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Ketersediaan pangan utama *(main food availability)* di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 sebesar 5.180 kg; pada Tahun 2017 menurun menjadi sebesar 4.530 kg; pada Tahun 2018 turun menjadi sebesar 3.891 kg; pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 4.677 kg; dan pada Tahun

2020 turun menjadi sebesar 4.442 kg. Terjadinya penurunan ketersediaan pangan utama disebabkan penurunan jumlah produksi akibat cuaca panas *(climate change)* dan terjadinya gagal panen. Persentase pengawasan pangan di Kabupaten Tojo Una-Una selama 5 (lima) tahun terakhir selalu konsisten setiap tahun. Persentase tingkat pengawasan pangan selama Tahun 2016-2020 sebesar 100 persen untuk setiap tahun.

### 2.3.2.4. Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas di bidang pertanahan dengan unit kerja, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di setiap wilayah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah, dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Sehinga, perlunya pendaftaran tanah agar tidak terjadi masalah (sengketa) pertanahan, khususnya pada aspek administratif dan hukum. Luas lahan yang bersertifikat dan persentase penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut.

**Tabel 2.47**
**Tanah Bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Tanah Negara**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Pertanahan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat ($M^2$) | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 5,9 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah negara (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran luas lahan bersertifikat ($M^2$) di Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2016 luas lahan bersertifikat sebesar 3,1; pada Tahun 2017 sebesar 3,4; pada Tahun 2018 sebesar 3,9; pada Tahun 2019 sebesar 5,1; dan pada Tahun 2020 luas lahan sebesar 5,9. Sementara itu, persentase penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar 100 persen; namun pada Tahun 2020 menga-lami penurunan menjadi sebesar 80 persen.

### 2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Aspek layanan pada bidang lingkungan terdiri dari tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten, terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan, adanya dokumen KLHS Kabupaten, dan terselenggaranya KLHS untuk K/R/P. Adapun aspek lingkungan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai beri-kut:

**Tabel 2.48**
**Lingkungan Hidup**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Lingkungan Hidup | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Aspek layanan pada bidang lingkungan di Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun waktu Tahun 2016-2020 yang terdiri dari tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten, terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan, tersedianya dokumen KLHS Kabupaten, dan terselenggaranya KLHS untuk K/R/P telah tersedia dan lengkap.

### 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**

Administrasi kependudukan *(population administration)* adalah rang-kaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen, dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penge-lolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Pendaftaran penduduk adalah pro-ses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP) atau surat keterangan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.49**
**Penduduk ber KTP**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber KTP | 42.231 | 76.320 | 82.410 |
| Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang telah menikah | 42.231 | 81.631 | 82.410 |
| **Rasio** | 100 | 93,49 | 100 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2018 sebesar 100 persen; pada Tahun 2019 rasio penduduk ber-KTP

menurun dengan rasio sebesar 93,49 persen; dan pada Tahun 2020 rasio penduduk ber-KTP meningkat dengan rasio sebesar 100 persen.

**b. Rasio bayi berakte kelahiran**

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahiran akan terdaftar dalam kartu keluarga (KK) dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan lainnya. Akte kelahiran sangat penting dan memiliki banyak manfaat. Mulai sebagai dokumen sah mengenai identitas seseorang, syarat mendaftar sekolah, salah satu berkas untuk melamar pekerjaan, hingga sebagai syarat pencatatan perkawinan.

**Tabel 2.50**
**Bayi berAkte Kelahiran**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Jumlah bayi berakte kelahiran | 17.398 | 2.114 | 2.019 |
| Jumlah bayi | 17.630 | 2.284 | 2.299 |
| Rasio | 98,68 | 92,56 | 87,82 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Tojo Una-Una pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penuruan setiap tahun. Pada Tahun 2018 rasio bayi berakte kelahiran sebesar 98,68; pada Tahun 2019 rasio bayi berakte kelahiran sebesar 92,56; dan pada Tahun 2020 rasio bayi berakte kelahiran sebesar 87,82.

**c. Rasio pasangan berakte nikah**

Akte nikah dalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh peme-rintah/instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Setiap pasangan yang baru saja menikah wajib membuat akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan doku-men penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumen-tasikan pernikahan dengan pasangan.

**Tabel 2.51**
**Pasangan Berakta Nikah**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2020**

| Uraian | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Jumlah pasangan nikah berakte nikah | 24.777 | 30.144 |
| Jumlah keseluruhan pasangan nikah | 41.903 | 82.410 |
| Rasio | 59,13 | 36,57 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Besaran rasio pasangan berakte nikah kabupaten tojo una-una 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2019 rasio pasangan berakte nikah sebesar 69,13, namun pada tahun 2020 turun dengan rasio sebesar 36,57.

**d. Ketersediaan database kependudukan skala daerah**

Ketersediaan administrasi kependudukan skala daerah pada penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun waktu Tahun 2018-2020 sudah ada dan tersedia. Hal itu bertujuan untuk menunjang sistem pendataan penduduk yang dapat digunakan sebagai informasi tentang kependudukan yang resmi.

**e. Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)**

Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terahkir mengalami penurunan setiap tahun. Pada Tahun 2018 persentase cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 97,3 persen; pada Tahun 2019 cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 92,6 persen; dan pada Tahun 2020 cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 87,8 persen. Data cakupan penerbitan akta kelahiran secara lengkap disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.52**
**Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan | 2.497 | 2.114 | 2.019 |
| Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan | 2.567 | 2.284 | 2.299 |
| Persentase | 97,3 | 92,6 | 87,8 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

### 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aspek pemberdayaan masyarakat dan desa pada rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok), persentase LSM aktif (%), Persentase PKK aktif (%), Persentase Posyandu aktif (%), Pemeliharaan Pasca Program dan pember-dayaan masyarakat (%) disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.53**
**Pemberdayaan Masyarakat Desa**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok) | 17,3 | 16,8 | 16,8 | 15,2 | 15,2 |
| 2 | Persentase LSM aktif (%) | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 6,2 | 6,8 |

| No | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Persentase PKK aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Posyandu aktif (%) | 81,1 | 86,2 | 102,5 | 77,5 | 77,5 |
| 5 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat (%) | 50,6 | 57,6 | 57,6 | 82,3 | 94,9 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Rasio pada Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 sebesar 17,3; pada Tahun 2017 rasio sebesar 16,8; pada Tahun 2018 rasio sebesar 16,8; pada Tahun 2019 rasio sebesar 15,2; dan pada Tahun 2020 rasio sebesar 15,2. Sementara itu, persentase LSM aktif di Kabupaten Tojo Una-Una selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 sebesar 41,1 persen; pada Tahun 2017 sebesar 4,8 persen; pada Tahun 2018 sebesar 4,8 persen; pada Tahun 2019 sebesar 6,2. Pada Tahun 2020 naik menjadi sebesar 6,8.

Selanjutnya, persentase PKK aktif di Kabupaten Tojo Una-Una pada 5 (lima) tahun terakhir tetap sebesar 100 persen. Untuk, persentase Posyandu aktif di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 sebesar 81,1 persen; pada Tahun 2017 sebesar 86,2 persen; pada Tahun 2018 sebesar 102,5 persen; pada Tahun 2019 sebesar 77,5 persen; dan pada Tahun 2020 turun menjadi sebesar 77,5.

Pemeliharaan Pasca Program dan pemberdayaan masyarakat (%) kabupaten tojo una-una pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 50,6, pada tahun 2017 sebesar 57,6, pada tahun 2018 sebesar 67,6, pada tahun 2019 sebesar 82,3 dan pada tahun 2020 sebesar 94,9.

### 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. LPP pada Tahun 2016 adalah sebesar 1,14 persen; pada Tahun 2017 sebebsar 1,08 persen; pada Tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 1,74 persen; pada Tahun 2019 menjadi sebesar 1,46 persen; dan pada Tahun 2020 naik menjadi sebesar 1,69 persen.

Ratio akseptor pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu: pada Tahun 2016 sebesar 80,8 persen; pada Tahun 2017 sebesar 81,2 persen; pada Tahun 2018 sebesar 82,3 persen; dan pada Tahun 2019 sebesar 82,4 persen. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada Tahun 2016 sebesar 16,4 persen; pada Tahun 2017 sebesar 21,6 persen; pada Tahun 2018 sebesar 18,5 persen; pada Tahun 2019 sebesar 17,9 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 30,5 persen.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB pada kurun 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020 memiliki angka yang konstan sebesar 100 persen. Hal yang sama terjadi pada cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB pada Tahun 2016-2020 sebesar 100 persen. Hal yang sama juga terjadi pada cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB pada 5 tahun terakhir 2016-2020 sebesar 100 persen. Sementara itu, cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri pada Tahun 2016 sebesar 97,2 persen; pada Tahun 2017 sebesar 96,7 persen; pada Tahun 2018 sebesar 96,4 persen; pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 100 persen.

**Tabel 2.54**
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 1,14 | 1,08 | 1,74 | 1,46 | 1,69 |
| 2 | Ratio Akseptor KB (%) | 80,8 | 81,2 | 82,3 | 82,4 | - |
| 3 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%) | 16,4 | 21,6 | 18,5 | 17,9 | 30,5 |
| 4 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%) | 97,2 | 96,7 | 96,3 | 100,0 | 100,0 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

### 2.3.2.9. Perhubungan

Aspek perhubungan *(transportation aspect)* pada jumlah arus penumpang melalui Bandara Tanjung Api yang datang pada Tahun 2018 sebanyak 11.719 orang; pada Tahun 2019 sebanyak 5.033 orang; dan pada Tahun 2020 sebanyak 2.874 orang. Jumlah arus penumpang yang berangkat melalui bandara Tajung Api pada Tahun 2018 sebanyak 12.696 orang; pada tahun 2019 sebanyak 5.148 orang; dan pada Tahun 2020 sebanyak 173 orang.

Jumlah arus penumpang melalui Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong yang datang pada Tahun 2018 sebanyak 56.509 orang; pada Tahun 2019

sebanyak 48.819 orang; dan pada Tahun 2020 sebanyak 58.236 orang. Jumlah arus penumpang yang berangkat melalui bandara Tajung Api pada Tahun 2018 sebanyak 63.422 orang; pada Tahun 2019 sebanyak 57.408 orang; dan pada Tahun 2020 sebanyak 57.570 orang.

**Tabel 2.55**
**Perhubungan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Perhubungan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Melalui Bandara/Pelabuhan (orang) | | | | | |
| | *Bandara Tanjung Api* | | | | | |
| | *-Datang* | - | - | 11.719 | 5.033 | 2.874 |
| | *-Berangkat* | - | - | 12.696 | 5.148 | 173 |
| | *Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong* | | | | | |
| | *-Datang* | - | - | 56.509 | 48.819 | 58.236 |
| | *-Berangkat* | - | - | 63.422 | 57.408 | 57.570 |
| 2 | Jumlah uji kir angkutan umum (unit) | - | 82 | 77 | 77 | 80 |
| 3 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (bangunan) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Persentase layanan angkutan darat (%) | 69,7 | 17,4 | 20,0 | 1,9 | 1,9 |
| 5 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m) | 42,0 | 38,7 | 35,8 | 36,0 | 36,9 |
| 6 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | 6,5 | 7,6 | 6,4 | 7,8 |
| 7 | Jumlah Barang Melalui Bandara/Pelabuhan (Ton) | | | | | |
| | *Bandara Tanjung Api* | | | | | |
| | *-Bongkar* | - | - | 65.208 | 12.476 | 927 |
| | *-Muat* | - | - | 69.808 | 13.989 | 643 |
| | *Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong* | | | | | |
| | *-Bongkar* | - | - | 1.594 | 872 | 5.646 |
| | *-Muat* | - | - | 99.982 | 142.172 | 83.600 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Jumlah uji kir angkutan umum (unit) pada Tahun 2017 sebanyak 82 unit; pada Tahun 2018 sebanyak 77 unit; pada Tahun 2019 sebanyak 77 unit; dan pada Tahun 2020 sebanyak 80 unit. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (bangunan) pada 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020 memiliki sebanyak 10 bangunan.

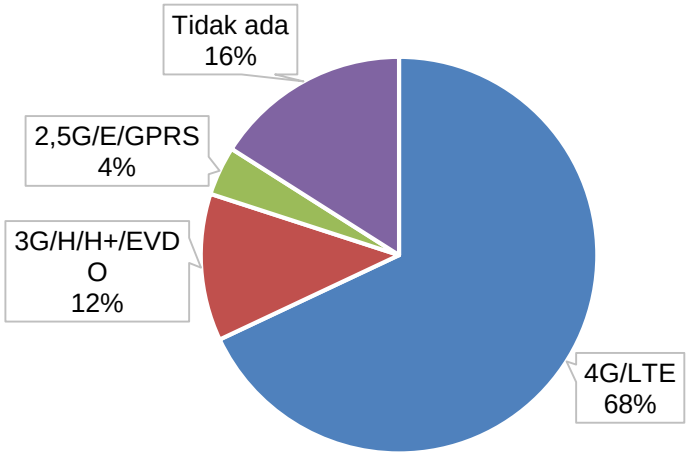
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m), pada Tahun 2016 sepanjang 42,0 m; pada tahun 2017 sepanjang 38,7 m; pada Tahun 2018 sepanjang 35,8 m; pada tahun 2019 sepanjang 36,0 m; dan pada Tahun 2020 sepanjang 36,9 m. Sementara itu, data jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, pada Tahun 2017 sebesar 6,5; pada Tahun 2018 sebesar 7,6; pada Tahun 2019 sebesar 6,4; dan pada Tahun 2020 sebesar 7,8.

Jumlah barang melalui melalui bandara Tanjung Api bongkar barang pada Tahun 2018 seberat 65.208 ton; pada Tahun seberat 12.476 ton; pada Tahun 2020 seberat 927 ton. Sedangkan, muat barang melalui bandara Tanjung Api pada Tahun 2018 seberat 69.808 ton; pada Tahun 2019 seberat 13.989 ton; dan pada Tahun 2020 seberat 643 tono. Data jumlah barang melalui Pelabuhan Ampana, Wakai, dan Dolong untuk bongkar pada Tahun 2018 seberat 1.594 ton; pada Tahun 2019 seberat 872 ton; pada Tahun 2020 seberat 5.646 ton. Sedangkan, muat barang melalui pelabuhan yang sama pada Tahun 2018 seberat 99.982 ton; pada Tahun 2019 seberat 142.172 ton; dan pada Tahun 2020 seberat 83.600 ton.

### 2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

**a. Cakupan Wilayah Akses Layanan Internet dan Telepon Seluler**

Akses internet *(internet access)* melalui telepon seluler sudah umum dilakukan saat ini. Hampir semua pengguna telepon seluler, khususnya *smartphone* sudah memiliki akses internet dengan menggunakan layanan *mobile data* dari berbagai provider. Jaringan yang digunakan bervariasi dari teknologi 2G, 3G, 4G sudah dapat dilaksanakan setiap pengguna layanan seluler.



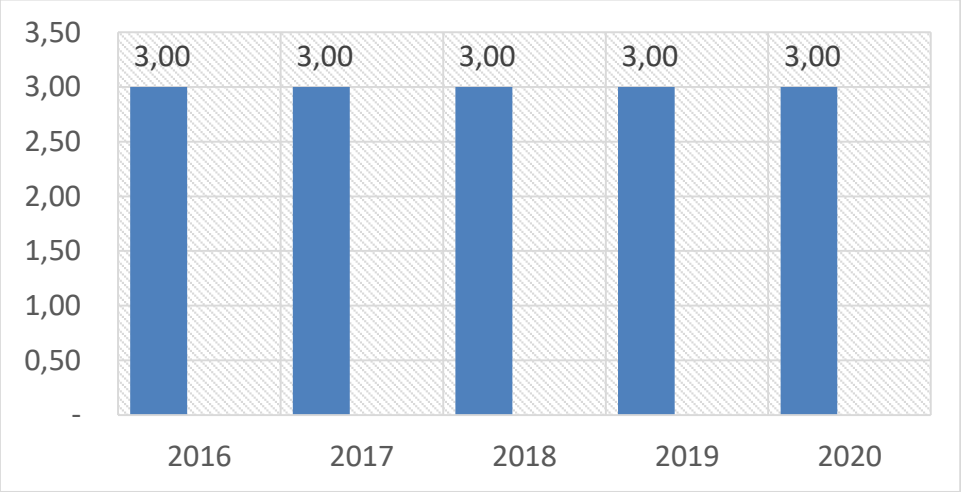

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.27**
**Cakupan Wilayah Akses Layanan Internet dan Telepon Seluler (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020**

Cakupan wilayah akses layanan internet dan telepon seluler di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 dengan wilayah akses layanan internet dan telepon seluler 4G/LTE sebesar 68 persen; layanan internet dan telepon seluler 3G/H/H+/EVDO sebesar 12 persen; layanan internet dan telepon seluler 2,5G/E/GPRS sebesar 4 persen; dan wilayah yang tidak ada (belum) memiliki layanan internet dan telepon seluler sebesar 16 persen.

**b. Jumlah Kantor Pos**

Kantor pos *(post office)* adalah fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Kantor pos menjual benda-benda pos dan filateli, seperti prangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan untuk membungkus paket. Di beberapa negara, kantor pos berfungsi sebagai tempat penerimaan aplikasi paspor, pengiriman wesel pos atau *money-order*, penjualan asuransi, pemesanan barang, serta layanan giro pos dan perbankan.



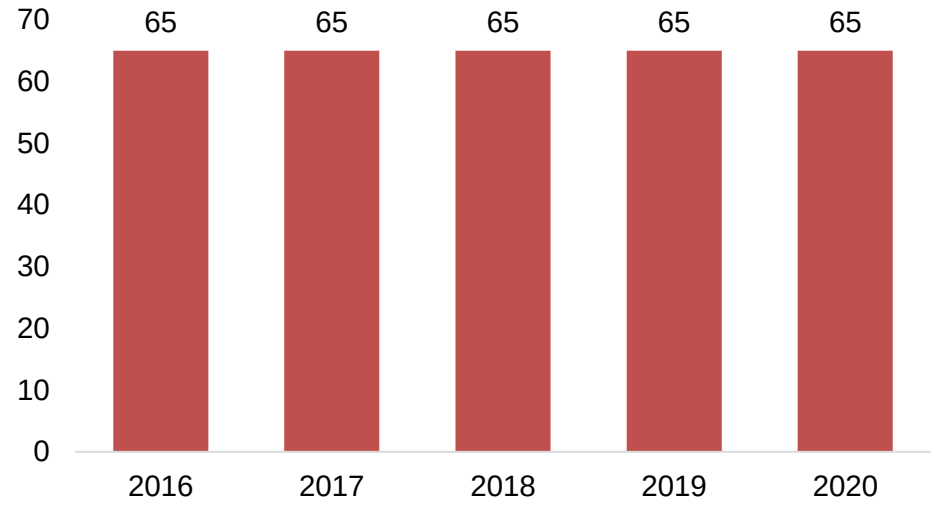

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.28**
**Jumlah Kantor Pos Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Jumlah kantor pos di kabupaten tojo una-una pada 5 (lima) tahun terakhir masih tetap sebanyak 3 (tiga) kantor pos.

### 2.3.2.11. Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki dan dijalankan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan, atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.




Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.29**
**Koperasi Aktif**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tojo Una-Una pada 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020 memiliki jumlah koperasi aktif sebesar 65 unit.

### 2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal *(capital investment)* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jumlah investor berskala nasional pada Tahun 2020 di Kabupaten Tojo Una-Una sejumlah 26 perusahaan; Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp91,67 miliar; dan Jumlah tenaga kerja yang bekerja (PMDN/PMA) sebanyak 1.135 orang.

**Tabel 2.56**
**Penanaman Modal**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020**

| No | Uraian | 2020 | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan) | **26** | Perusahaan |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Miliar) | 91,67 | Rp.Miliar |
| 3 | Jumlah tenaga kerja yang bekerja (PMDN/PMA) (orang) | 1135 | orang |

Sumber: Badan Penanaman Modal Prov. Sulteng, 2021

### 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020 sebesar 100 persen. Cakupan pembinaan olahraga pada Tahun 2016 sebesar 25,0 persen; pada Tahun 2017 sebesar 30,0 persen; pada Tahun 2018 sebesar 20,0 persen; pada Tahun 2019 sebesar 33,3 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 33,3 persen. Cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir dari sebesar 25 persen menjadi 33,3 persen.

Cakupan pelatih yang bersertifikasi pada Tahun 2016 sebesar 50,0 persen; pada Tahun 2017 sebesar 50,0 persen; pada Tahun 2018 sebesar 40,0 persen; pada Tahun 2019 sebesar 46,2 persen; dan pada tahun 2020 sebesar 46,2 persen. Cakupan pembinaan atlet muda pada Tahun 2016 sebesar 12,90 persen; pada Tahun 2017 sebesar 11,63 persen; pada Tahun 2018 sebesar 12,24 persen; pada Tahun 2019 sebesar 12,5 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 12,5 persen. Jumlah atlet berprestasi pada Tahun 2018-2020 sebanyak 1 orang; jumlah prestasi pada Tahun 2018 sebanyak 2; pada tahun 2019 dan Tahun 2020 sebanyak 3 .

**Tabel 2.77**
**Kepemudaan dan Olah Raga**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No | Kepemudaan dan Olah Raga | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan pembinaan olahraga (%) | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 33,3 | 33,3 |
| 3 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi(%) | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 46,2 | 46,2 |
| 4 | Cakupan pembinaan atlet muda (%) | 12,90 | 11,63 | 12,24 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | Jumlah atlet berprestasi (orang) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jumlah prestasi olahraga (buah) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

### 2.3.2.14. Statistik

Statistik *(statistics)* adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lainnya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam ber-bagai bidang studi, antara lain ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Statistik Kabupaten Tojo Una-una pada 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020 telah tersedia dalam sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku Kabupaten Dalam Angka, buku PDRB.

**Tabel 2.58**
**Statistik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Statistik | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Buku ”kabupaten dalam angka” | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Buku ”PDRB” | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

### 2.3.2.15. Persandian

Tujuan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan *(confdentiality)*, keutuhan *(integrity)*, keaslian *(authentication)*, dan tidak ada pengingkaran *(non repudiation)* informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Tujuan persandian di peme-rintahan, termasuk juga pemerintah daerah (pemda) sangat penting. Penye-lenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau pena-nggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Persandian di Kabupaten Tojo Una-Una belum terlaksana secara optimal kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020.

### 2.3.2.16. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya *(arts and culture festival)* diselenggarakan tiap tahun dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 hanya berjumlah 1 (satu) kegiatan setiap tahun. Sementara itu, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada 5 tahun terakhir 2016-2020 sebesar 77,8 persen setiap tahun. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi berjumlah 7 buah dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu kurun waktu tahun 2016-2020 berjumlah 1 buah.

**Tabel 2.59**
**Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Kebudayaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |

| No | Kebudayaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | | | | | |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (buah) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

### 2.3.2.17. Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) pada Tahun 2016 sebanyak 1.803 orang; pada Tahun 2017 sebanyak 2.158 orang; pada Tahun 2018 sebanyak 1.713; pada Tahun 2019 sebanyak 5.092 orang; dan pada Tahun 2020 sebanyak 1.570 orang. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (exp.) pada Tahun 2016 sebanyak 3.813 exp; pada Tahun 2017 sebanyak 4.098 exp; pada Tahun 2018 sebanyak 4.098 exp; pada Tahun 2019 sebanyak 4.201 exp; dan pada Tahun 2020 sebanyak 4.654 exp. Rasio perpustakaan sebanyak 1 unit pada 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020; dan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (orang) belum ada.

**Tabel 2.60**
**Perpustakaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Perpustakaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) | 1.803 | 2.158 | 1.713 | 5.092 | 1.570 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Exp.) | 3.813 | 4.098 | 4.098 | 4.201 | 4.654 |
| 3 | Rasio perpustakaan (unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

### 2.3.2.18. Kearsipan

Sistem kearsipan *(archive system)* dikembangkan untuk mengatasi per-masalahan dokumentasi informasi. Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi, dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi. Sistem kearsipan dikembangkan dengan

tujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang dianggap penting bagi suatu organisasi/ lembaga.

**Tabel 2.61**
**Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Kearsipan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase Perangkat Daerah yang sudah mengelola arsip secara baku belum ada. Sementara itu, peningkatan SDM pengelola kearsipan pada kurun waktu Tahun 2016-2019 dilakukan hanya 1 (satu) kali; dan pada Tahun 2020 tidak dilakukan.

### 2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata *(tourism),* secara etimologi berasal dari dua kata yaitu “pari” berarti banyak atau berkeliling, sedangkan “wisata” berarti pergi. Pengertian pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Capaian kunjungan wisata pada Tahun 2016 sebesar 199,47 persen; pada Tahun 2017 sebesar 194,21 persen; pada Tahun 2018 sebesar 185,50 persen; pada Tahun 2019 sebesar 162,96 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 126,77 persen. Data jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2016 sebanyak 5.984 orang; pada Tahun 2017 sebanyak 13.595 orang; pada Tahun 2018 sebanyak 20.405 orang; pada Tahun 2019 sebanyak 11.407 orang; dan pada Tahun 2020 sebanyak 7.606 orang.

**Tabel 2.62**
**Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No | Pariwisata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capaian Kunjungan Wisata (%) | 199,47 | 194,21 | 185,50 | 162,96 | 126,77 |
| 2 | Jumlah Kunjungan wisatawan (orang) | 5.984 | 13.595 | 20.405 | 11.407 | 7.606 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

#### 2.3.3.2. Pertanian

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan *(agriculture sector)* terhadap PDRB pada Tahun 2016 sebesar 39,86 persen; pada Tahun 2017 sebesar 39,73 persen; pada Tahun 2018 sebesar 38,93 persen; pada Tahun 2019 sebesar 38,29 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 38,68 persen. Sementara itu, kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB pada Tahun 2016 sebesar 42,04

persen; pada Tahun 2017 sebesar 43,71 persen; pada Tahun 2018 sebesar 42,72 persen; pada Tahun 2019 sebesar 43,43 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 42,37 persen.

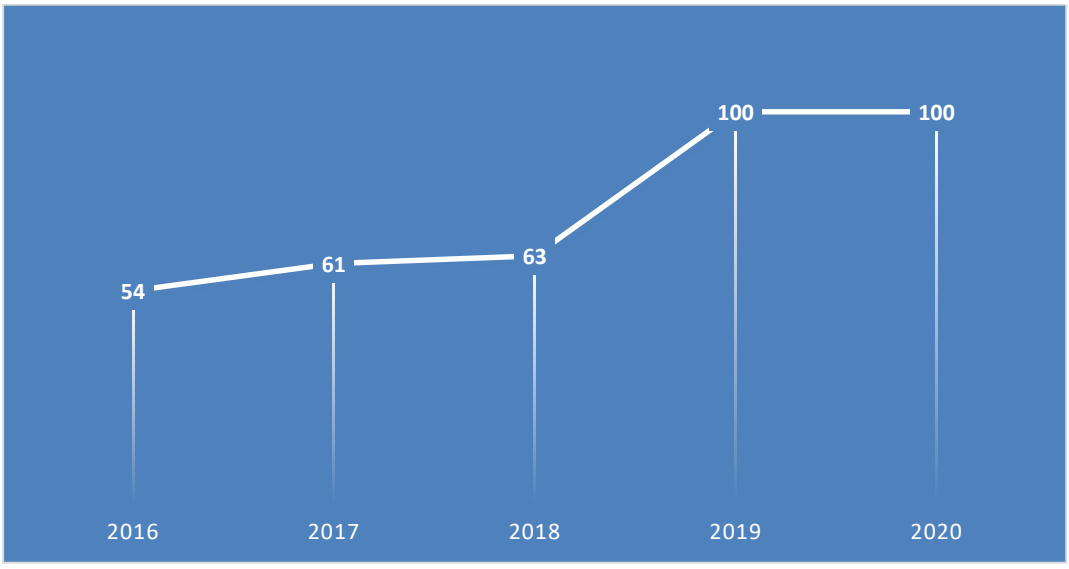
**Tabel 2.63**
**Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No | Pertanian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) | 39,86 | 39,73 | 38,93 | 38,29 | 38,68 |
| 2 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) | 42,04 | 43,71 | 42,37 | 43,43 | 42,37 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021 Ntp

### 2.3.3.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya *(resources)* adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi, atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik (*tangible*), tetapi juga non-fisik (*intangible*). Sumber daya ada yang dapat berubah, menjadi semakin besar atau hilang, ada juga sumber daya yang kekal (tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (*renewable resources*), dan sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resour-ces*). Sumber daya dapat pulih termasuk tanaman dan hewan (sumber daya hayati). Sumber daya energi *(energy resources)* adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia, sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Sumber daya energi ini disebut sumber energi primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam.



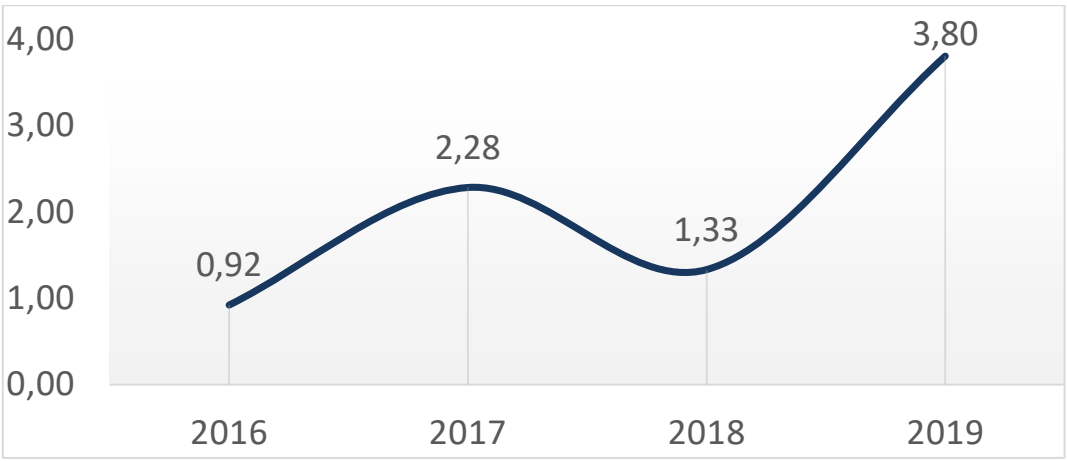

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.30**
**Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, data jumlah RT pengguna listrik sebesar 54 persen; pada Tahun 2017 sebesar 61 persen; pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar 100 persen.

### 2.3.3.4. Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan (%)

Ekspor neto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal. Juga dikenal sebagai neraca perdagangan *(balance of trade)*. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan), berarti suatu negara adalah eksportir bersih untuk barang dan jasa. Surplus ini meningkatkan permintaan agregat dan PDB, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Sebaliknya, nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan), berarti suatu negara adalah importir neto. Defisit perdagangan ini mengurangi PDB dan mereduksi pertumbuhan ekonomi domestik.



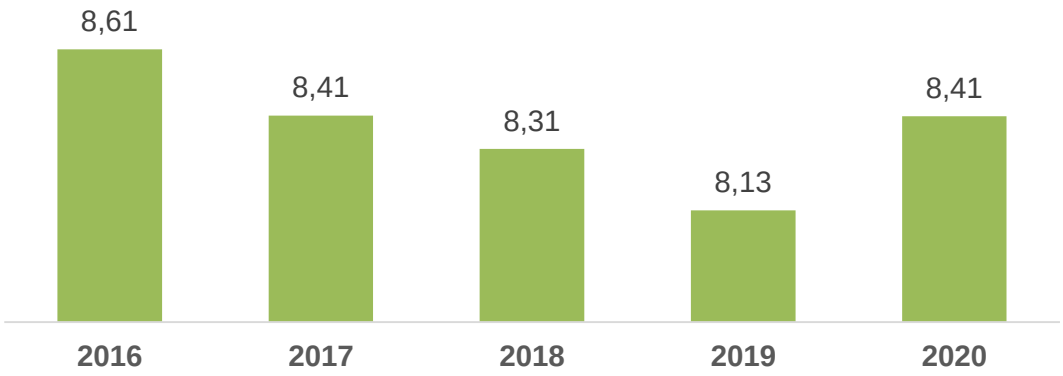

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.31**
**Ekspor Bersih Perdagangan (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019**

Persentase ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 sebesar 0,92 persen; pada Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,28 persen; pada Tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebesar 1,33 persen; dan pada Tahun 2019 naik menjadi sebesar 3,80 persen.

### 2.3.3.5. Perindustrian

Perindustrian *(industry)* adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan cara mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi suatu barang baru yang memiliki nilai penggunaan yang lebih tinggi.



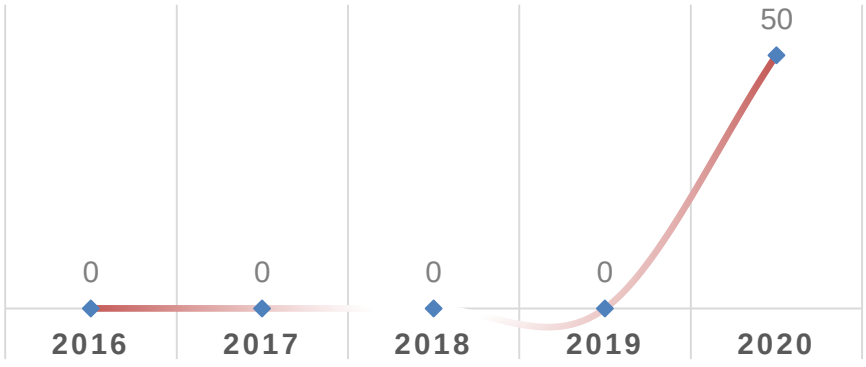

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.32**
**Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tojo Una-Una selama kuruwn Tahun 2016-2019 pengalami penurunan setiap tahun, dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016, kontribusi sebesar 8,61 persen; pada Tahun 2017 sebesar 8,41 persen; pada Tahun 2018 sebesar 8,31 persen; pada Tahun 2019 sebesar 8,13 persen; dan pada tahun 2020 sebesar 8,41 persen. Kondisi ini menunjukkan peran Sektor Industri dalam perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una belum optimal.

### 2.3.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi (transmigration) adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di tanah air, untuk memenuhi kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Transmigran *(transmigrant)* merupakan penduduk yang ber-pindah dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya, dimana sebagian besar direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan.




Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2021

**Gambar 2.33**
**Jumlah Penempatan Transmigrasi (KK)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Jumlah penempatan transmigrasi di Kabupaten Tojo Una-Una belum pernah terjadi dalam kurun Tahun 2016-2019, namun penempatan transmirasi baru terjadi pada Tahun 2020 berjumlah 50 KK.

### 2.3.3.7. Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan pada Tahun 2016 seberat 11647,52 ton; pada Tahun 2017 seberat 16961,78 ton; pada Tahun 2018 seberat 18658,78 ton; pada Tahun 2019 seberat 20523,70 ton; dan pada Tahun 2020 seberat 225765,18 ton. Data konsumsi Ikan (kg/kapita) di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 seberat 60,5; pada Tahun 2017 sebesar 60,6; pada Tahun 2018 sebesar 66,7; pada Tahun 2019 sebesar 80,3; dan pada Tahun 2020 sebesar 83,4. Sementara itu, cakupan bina kelompok nelayan pada Tahun 2016 sebesar 12,6 persen; pada Tahun 2017 sebesar 12,4 persen; pada Tahun 2018 sebesar 8,5 persen; pada Tahun 2019 sebesar 10,7 persen; dan pada tahun 2020 sebesar 3,3 persen.

**Tabel 2.64**
**Kelautan dan Perikanan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Kelautan dan Perikanan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produksi Perikanan (ton) | 1647,52 | 16961,78 | 18658,00 | 20523,70 | 225765,18 |
| 2 | Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) | 60,5 | 60,6 | 66,7 | 80,3 | 83,4 |
| 3 | Cakupan Bina kelompok nelayan (%) | 12,6 | 12,4 | 8,5 | 10,7 | 3,3 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

## 2.3.4. Penunjang Urusan

### 2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan *(development planning)* nasional dan daerah terlaksana dengan baik, sinergi dan terarah, apabila diawali dengan perencanaan yang baik dan berkualitas dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal. Perencanaan pembangunan yang holistik dan komprehensif diperlukan untuk memastikan dan menjamin laju perkembangan pembangunan, untuk mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur *(welfare society)*. Sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah, maka Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut memiliki kesiapan dan kemandirian dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif dan lebih akomodatif dengan potensi daerah setempat, sehingga memiliki kemampuan dan ketahanan dalam meng-hadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

**Tabel 2.65**
**Perencanaan Pembangunan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Dokumen Perencanaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan | ada | ada | ada | ada | ada |

| No | Dokumen Perencanaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | | | | | |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tojo Una-Una tersedia selama kurun waktu 5 tahun, dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada tersedia selama 5 tahun, dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada telah tersedia selama 5 tahun, dan dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda telah tersedia selama 5 tahun. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 100 persen selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya, persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 100 persen selama 5 tahun terakhir.

### 2.3.4.2. Keuangan

Keuangan *(financial)* sebagai cara mengetahui berbisnis secara individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek. Istilah dalam keuangan berarti: ilmu keuangan dan aset lainnya, manajemen aset tersebut, serta menghitung dan mengatur risiko proyek. Pada dasarnya, keuangan merupakan manajemen uang dan proses memperoleh dana yang dibutuhkan.

**Tabel 2.66**
**Keuangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Keuangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase belanja pendidikan (20%) | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% |
| 3 | Persentase belanja kesehatan (10%) | >10% | >10% | >10% | >10% | >10% |

| No | Keuangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun 2016-2020 dinyatakan WTP (wajar tanpa pengecualian) setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Persentase belanja pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun waktu Tahun 2016-2020 sudah konsisten pada tinggkat >20 persen setiap tahun; persentase belanja kesehatan juga konsisten pada tinggkat >10 persen setiap tahun.Penetapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun waktu Tahun 2016-2020 telah ditetapkan tepat waktu setiap tahun.

### 2.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan pegawai *(education and training for apparatus)* sangat penting, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat *(public)*. Persentase ASN dan pejabat ASN yang mengikuti pelatihan cenderung menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Jumlah jabatan administrasi di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penambahan dari sebanyak 1.232 pada Tahun 2016 menjadi sebanyak 1.999 pada Tahun 2020. Di sisi lain, pemangku jabatan fungsional yang cenderung menurun selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

**Tabel 2.67**
**Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase pejabat ASN yang mengikuti pelatihan (%) | 6,89 | 1,89 | 8,38 | 7,30 | 0,14 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan (%) | 4,92 | 7,57 | 2,95 | 4,74 | 1,74 |
| 3 | Jumlah Jabatan administrasi | - | 1.232 | 1.273 | 1.302 | 1.999 |
| 4 | Jumlah pemangku jabatan fungsional | - | 2.538 | 2.139 | 2.291 | 2.287 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

### 2.3.4.4. Pengawasan

Pengawasan *(supervision)* adalah proses yang memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dimana, pengawasan juga merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh aktivitas/kegiatan organisasi. Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

**Tabel 2.68**
**Pengawasan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Pengawasan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | 84,21 | 79,66 | 66,67 | 48,98 | - |
| 2 | Jumlah temuan BPK | 48 | 47 | 48 | 24 | 65 |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Persentase tingkat pengawasan di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan selama kurun waktu Tahun 2016-2019. Pada Tahun 2016 pengawasan sebesar 84,21 persen; pada Tahun 2017 pengawasan sebesar 79,66 persen; pada Tahun 2018 persentase pengawasan sebesar 66,67 persen; dan pada Tahun 2019 pengawasan sebesar 48,98 persen.

Data jumlah temuan BPK di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 berjumlah 48 temuan; pada Tahun 2017 berjumlah 47 temuan; pada Tahun 2018 berjumlah 48 temuan; pada Tahun 2019 berjulah 24 temuan; dan pada Tahun 2020 berjumlah 65 temuan.

### 2.3.4.5. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Tabel 2.69**
**Sekretariat Dewan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Kegiatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD | Ada | ada | Ada | ada | ada |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya ProgramProgram Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | ada | ada | Ada | ada | ada |
| 3 | Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda | ada | ada | Ada | ada | ada |

| No | Kegiatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | | | | | |

Sumber: OPD Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una telah tersedia selama 5 tahun. Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam RPJMD maupun RKPD telah tersusun dan terintegritas selama 5 (lima) tahun. Program-program DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una telah terintegritas selama 5 tahun.

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah *(regional competitiveness)* terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia yang terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wWilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Sektor rumah tangga *(household sector)* mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen, serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan sektor institusi lainnya.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama, dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok Coicop *(classification of individual consumption by purpose),* yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga periode Tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK). Namun, pengecualian hanya terjadi pada Tahun 2020 mengalami penurunan sedikit karena terjadi pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah penduduk menjadi

salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan nilai penge-luaran konsumsi rumah tangga, yang akhirnya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2.70**
**Angka Konsumsi RT Tahun 2016-2020**
**Kabupaten Tojo Una-Una**

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Pengeluaran RT (Rp. Miliar) | 1.948,94 | 2.035,11 | 2.134,78 | 2.182,42 | 2.103,71 |
| 2 | Jumlah RT | 149.214 | 150.820 | 152.476 | 153.991 | 155.614 |
| Konsumsi RT (Rp.Juta) | | 13,06 | 13,49 | 14,00 | 14,17 | 13,52 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2016-2021

Selama periode Tahun 2016–2020 proporsi pengeluaran konsumsi per rumah tangga mengalami peningkatan, terutama terjadi pada Tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi secara langsung pertumbuhan penduduk. Data perkembangan proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga selama periode Tahun 2016-2020 yaitu sebesar 13,06 persen Tahun 2016; sebesar 13,49 Tahun 2017; sebesar 14,00 persen Tahun 2018; sebesar 14,17 persen Tahun 2019; dan sebesar 13,52 persen Tahun 2020. Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga selama periode Tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan menurut ADHB maupun ADHK 2010. Terkecuali kondisi yang terjadi pada Tahun 2020, yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19 menyebabkan konsumsi rumah tangga berkurang disebabkan pendapatan yang juga menurun. Pada Tahun 2016, secara rata-rata setiap orang di Kabupaten Tojo Una-Una menghabiskan uang sebesar Rp15,65 juta per tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi Rp16,68 juta pada Tahun 2017; sebesar Rp19,26 juta Tahun 2018; sebesar Rp21,08 juta Tahun 2019; dan sebesar Rp20,67 juta Tahun 2020. Sementara itu, PDRB Perkapita ADHK 2010 sebesar Rp13,06 juta pada Tahun 2016; sebesar Rp13,49 juta pada Tahun 2017; sebesar Rp14,00 juta pada Tahun 2018; sebesar Rp14,17 juta pada Tahun 2019; dan sebesar Rp13,52 juta pada Tahun 2020. Pada saat ini terjadi pandemi Covid-19, menyebabkan menurun seluruh aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi oleh pelaku usaha di berbagai lapangan usaha mengakibatkan menurunnya penawaran *(supply)* dan permintaan *(demand)* atas barang dan jasa, sehingga menyebabkan pendapatan rumah tangga dan perusahaan menurun.

### 2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan

Konsumsi *(consumption)* memiliki peran penting dan strategis dalam akti-vitas perekonomian suatu daerah atau negara. Konsumsi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi *(economic growth)*. Perubahan aktivitas dan roda perekonomian dipengaruhi oleh besar tingkat konsumsi. Semakin tinggi tingkat konsumsi makan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi (output) suatu daerah atau negara. Konsumsi keluarga merupakan

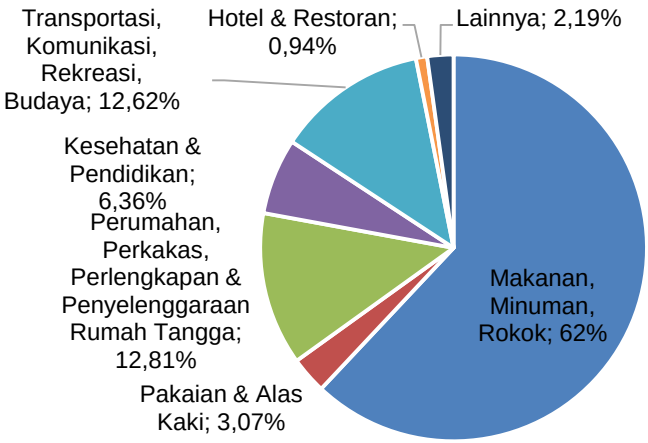
kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup khususnya barang dan jasa. Penge-luaran konsumsi *(consumption expenditure)* masyarakat terbagi ke dalam 2 (dua) yaitu: konsumsi pangan dan non-pangan. Pengeluaran konsumsi pangan dan non-pangan berupa pengeluaran antara lain: makanan, minuman, rokok; pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, budaya; hotel dan restoran; dan lainnya.

**Tabel 2.71**
**Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2016-2020**
**Kabupaten Tojo Una-Una**

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Pengeluaran RT Non Pangan | 861,63 | 919,46 | 919,66 | 884,75 | 799,41 |
| 2 | Total Pengeluaran RT | 1.948,94 | 2.035,11 | 2.134,78 | 2.182,42 | 2.103,71 |
| **Persentase Konsumsi RT Non-Pangan** | | **44,21** | **45,18** | **43,08** | **40,54** | **38,00** |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Pengeluaran konsumi non-pangan cenderung menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Persentase pengeluaran konsumsi non-pangan Tahun 2016 sebesar 44,21 persen yang mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi hanya sebesar 38 persen. Masyarakat masih lebih dominan untuk memprioritaskan pengeluaran konsumsi pangan.




Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

**Gambar 2.34**
**Distribusi Pengeluaran Konsumsi Pangan**
**dan Non-Pangan Masyarakat**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020**

Struktur komponen konsumsi rumah tangga didominasi pengeluaran makanan, minuman, dan rokok kurun Tahun 2016-2020, yakni pada Tahun 2020

sebesar 62,00 persen. Sementara distribusi komponen konsumsi rumah tangga terendah adalah hotel dan restoran sebesar 0,94 persen. Sementara itu, persentase peningkatan harga setiap tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, kecuali di kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya yang mengalami penurunan sebesar 5 (lima) persen. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang mewabah sejak awal Tahun 2019, menyebabkan turunnya perekonomian yang cukup tinggi di Sektor Transportasi dan Pariwisata, karena aturan pemerintah bekerja dari rumah *(work from home)*, dan jaga jarak sosial *(social distancing)* untuk mengurangi mobilitas. Peningkatan harga tertinggi dalam kurun Tahun 2016-2020 terjadi pada Tahun 2018, yaitu sebesar 20,76 persen untuk harga kelompok makanan, minuman, dan rokok. Sedangkan terendah Tahun 2019 sebesar (-8,69) persen pada kelompok pakaian dan alas kaki.

### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### 2.4.2.1. Luas Wilayah Produktif

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi wilayah budidaya pertanian yang luas untuk budidaya tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan. Sebagian wilayah tersebut sudah dikelola oleh masyarakat dikelola menghasilkan tanaman produktif.

**Tabel 2.72**
**Luas Wilayah Produktif**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018 s/d 2020**

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Produktif (Ha) | 36.667,13 | 36.798,33 | 38.532,77 |
| 2 | Luas Wilayah Budidaya (Ha) | 62.503,10 | 62.503,10 | 62.503,10 |
| | -Tanaman Pangan | 35.020,10 | 35.020,10 | 35.020,10 |
| | -Tanaman Holtikultura | 27.483,00 | 27.483,00 | 27.483,00 |
| | -Tanaman Perkebunan | 16.332.60 | 16.332.60 | 16.332.60 |
| **Persentase Luas Wilayah Produktif (%)** | | **58,66** | **58,87** | **61,65** |

Sumber: BPS dan RT/RW Kabupaten Tojo Una-Una, diolah 2021

Persentase luas wilayah produktif di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan luas wilayah produktif rata-rata 1,49 persen per tahun. Kawasan pertanian terdiri dari kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan pertanian holtikultura. Pertanian merupakan satu bidang yang mempunyai nilai ekonomis dan strategis dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Tojo Una-Una. Bidang Pertanian ini masih sangat dominan dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pengembangan pertanian ini perlu memperhatikan nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai sosial-budaya, dan nilai-nilai lingkungan.

Kawasan pertanian di Kabupaten Tojo Una-Una terbagi menjadi pengembangan pertanian tanaman pangan, dan hortikultura. Kegiatan pertanian tersebut berkembang mulai dari wilayah dengan ketinggian 30-1.000 meter dpl dengan bermacam komoditas yang dihasilkan, pengembangan kawasan budidaya ini didasarkan pada potensi dan sumber daya di setiap wilayah.

Kawasan pertanian tanaman pangan berupa lahan sawah terletak di Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Walea Besar, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat dengan rencana pengembangan sawah irigasi teknis sekitar 8.186,05 Ha, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan sekitar 11.760,50 Ha.

Perkembangan kawasan kegiatan pertanian pada Kecamatan Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ampana Kota. Dimana masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki komoditas unggulan yang berbeda-beda. Rencana pengembangan kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Ulubongka, dan Kecamatan Togean sekitar 27.483 Ha.

Pengembangan sentra produksi komoditas holtikultura pada masing-masing wilayah sesuai dengan jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan. Beberapa jenis tanaman perkebunan dan hortikultura di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Kelapa Dalam/Kelapa Manado, Kakao, Kopi, Pala, Kemiri, Cengkeh, Jambu Mente, Lada, Kapuk, Vanili, dan Enau dengan luas sekitar 16.332.60 Ha.

### 2.4.2.2. Panjang Jalan

Jalan *(road)* merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dae-rah, karena jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan barang dalam suatu daerah. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki beberapa jenis jalan yakni: jalan aspal, jalan kerikil, jalan tanah, dan jalan lainnya. Data panjang jalan berdasarkan jenis di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.73**
**Panjang Jalan (Meter)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 s/d 2019**

| No. | Jalan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspal | 352.206 | 358.904 | 373.082 | 358.904 |
| 2 | Kerikil | 532.089 | 522.596 | 511.169 | 522.596 |
| 3 | Tanah | 197.145 | 195.744 | 192.992 | 195.744 |
| 4 | Lainnya | 86.699 | 90.895 | 90.896 | 90.895 |
| **Jumlah (m)** | | 1.168.139 | 1.168.139 | 1.168.139 | 1.168.139 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2021

Berdasarkan data panjang jalan di Kabupaten Tojo Una-Una cenderung konstan yakni sekitar 1.168.139 meter selama 4 (empat) tahun terakhir 2016-2019. Jenis jalan didominasi jalan kerikil, jalan aspal, jalan tanah, dan jenis lainnya.

### 2.4.2.3. Jumlah Orang dan Barang Melalui Bandara/Pelabuhan

Bandara *(airport)* dan pelabuhan *(harbor)* menjadi sarana transportasi strategis dan penting bagi peningkatan daya saing dan kemajuan daerah. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Bandara Tanjung Api dan Pelabuhan Ampana, Wakai, dan Dolong. Sarana Fasilitas bandara dan pelabuhan tersebut memperlancar mobilitas dan aksesibilitas penumpang dan barang ke wilayah kepulauan dan luar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 2.74**
**Jumlah penumpang Melalui Bandara/Pelabuhan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Penumpang | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat |
| **Pelabuhan (orang)** | | | | | | |
| **-Ampana** | 19.877 | 37.070 | 22.659 | 37.136 | 35.246 | 38.889 |
| **-Wakai** | 23.061 | 15.222 | 16.882 | 11.324 | 15.477 | 11.819 |
| **-Dolong** | 13.571 | 11.130 | 9.278 | 8.948 | 7.513 | 6.862 |
| **Badara Tanjung Api** | 11.719 | 12.696 | 5.033 | 5.148 | 2.874 | 173 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2017-2021

Jumlah arus datang dan berangkat penumpang pada pelabuhan cenderung meningkat selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun berbeda dengan arus datang dan berangkat di bandara yang cenderung menurun. Kondisi yang sama terjadi pada bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara. Penurunan kedatangan dan keberangkatan penumpang, serta bongkar muat barang di Bandara Tanjung Api disebabkan pandemi Covid-19.

**Tabel 2.75**
**Jumlah Barang Melalui Bandara/Pelabuhan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| Barang | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bongkar | Muat | Bongkar | Muat | Bongkar | Muat |
| Pelabuhan (Ton) | | | | | | |
| -Ampana | 977 | 74.771 | 872 | 142.172 | 5.228 | 78.639 |
| -Wakai | 439 | 186 | - | - | 309 | 4.955 |
| -Dolong | 178 | 25.025 | - | - | 109 | 6 |
| Badara Tanjung Api (Kg) | 65.208 | 69.808 | 12.476 | 13.989 | 927 | 643 |

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2017-2021

### 2.4.2.4. Wilayah Rawan Kebanjiran

Wilayah rawan banjir *(flood area)* merupakan wilayah yang perlu perhatian khusus bagi pemerintah daerah, karena dapat menyebakan kerusakan harta dan bangunan yang bermuara pada penurunan daya saing daerah. Kabupaten Tojo Una-Una merupakan wilayah yang memiliki banyak aliran sungai, sehingga ber-

potensi besar terjadi banjir. Luas wilayah rawan banjir di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.76**
**Luas Wilayah Rawan Kebanjiran**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No. | Kecamatan | Aliran Sungai | Luas Km2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Ampana Tete | Sungai Balingara | 796,02 | 796,02 | 796,02 |
| 2 | Ulubongka | Sungai Ulubongka dan Podi | 1.767,11 | 1767,11 | 1767,11 |
| 3 | Tojo | Sungai Tojo | 1.065,48 | 1065,48 | 1065,48 |
| 4 | Tojo Barat | Sungai Tombiano | 1.092,27 | 1092,27 | 1092,27 |
| Luas Wilayah Banjir | | | 4.720,88 | 4720,88 | 4720,88 |

Sumber: RT/RW Kabupaten Tojo Una-Una, 2018

Terdapat 4 (empat) wilayah kecamatan rawan banjir, yaitu Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat. Wilayah tersebut dilalui aliran sungai yang cukup besar, yakni Sungai Balingara, Sungai Ulubongka dan Podi, Sungai Tojo, dan Sungai Tombiano. Wilayah banjir bandang pada Tahun 2021 terjadi di Desa Tayawa Kecamatan Tojo dan Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat.



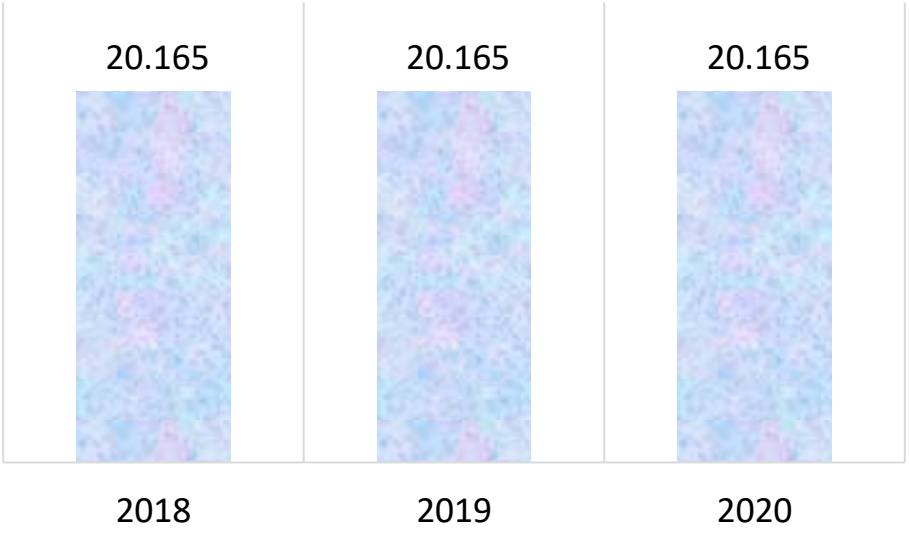
Sumber: Kompas.com, 2021

**Gambar 2.35**
**Kondisi Banjir Bandang di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021**

### 2.4.2.5. Kawasan industri

Kawasan industri *(industrial area)* merupakan wilayah yang diperuntukan untuk pengembangan dan pembangunan industry. Kawasan industri mempengaruhi daya tarik investasi pada suatu daerah. Tingginya investasi yang masuk dalam kawasan industi akan meningkatkan daya saing daerah. Kawasan industri

akan menarik investor menanamkan modal di Kabupaten Tojo Una-Una. Kawasan industri yang dikembangkan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Kawasan Terpadu Mandiri (KTM).



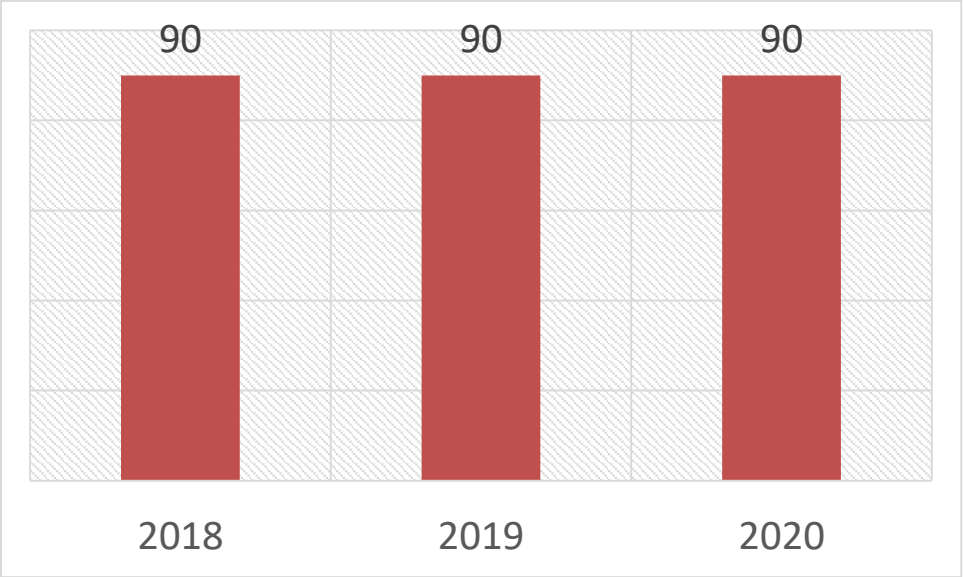

Sumber: RT/RW Kabupaten Tojo Una-Una, 2018

**Gambar 2.36**
**Luas Kawasan Terpandu Mandiri (Ha)**
**Kabupaten Tojo Una-Una**

Beberapa KTM yang dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah KTM Air Terang, KTM Bungku, KTM Padauloyo, KTM Bahari Bolano Lambunu dan KTM Talabosa yang menjadi bagian dari kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pengembangan KTM di Kabupaten Tojo Una-Una adalah KTM Tampabatu dan sekitarnya yang secara administrasi terletak di Kecamatan Ampana Tete (Desa Longge, Desa Balingara, Desa Bulan Jaya, Desa Wanasari, Desa Girimulyo, Desa Sabo, Desa Tampabatu, dan Desa Balanggala) dan Kecamatan Ulubongka (Desa Uematopa). Dengan rencana pengembangan meliputi: Pusat KTM ± 165 Ha (Tampabatu); Kawasan Inti : ± 10.000 Ha; Kawasan Plasma : ± 10.000 Ha (Tersebar); Usulan Komoditas: Karet, Sengon, Nilam, Palawija (Kedelai); Pengembangan aksesibiltas Kecamatan Ampana Kota-Tampabatu, Kecamatan Ulubongka-Tampabatu maupun Tampabatu dengan Kawasan di sekitarnya, dan kawasan perbatasan kabupaten.

### 2.4.2.6. Kawasan industri kecil dan Menengah

Industri kecil menengah *(small medium industry)* merupakan satu di antara penggerak perekonomian dan pertumbuhan *(engine of growth)* daerah yang ber-basis kerakyatan (masyarakat). IKM di Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari industri pangan, kerajinan, perbengkelan, perdagangan, dan lainnya. Data luas kawasan IKM di Kabupaten Tojo Una-Una.




Sumber: RT/RW Kabupaten Tojo Una-Una, 2018

**Gambar 2.37**
**Luas Kawasan Industri Kecil (Ha)**
**Kabupaten Tojo Una-Una**

Kawasan sentra IKM memiliki lokasi tersebar di Kabupaten Tojo Una-Una berdasarakan potensi di masing-masing wilayah kecamatan. Pada umumnya meru-pakan *home industry* dengan tenaga kerja lokal dan dikerjakan setiap rumah tangga. Pengembangan sentra IKM diarahkan dengan pengendalian terhadap pemanfataan lahann serta dikelola limbah pada tempat yang sudah berkembang dengan luas kurang lebih 90 hektar, antara lain:

a. Sentra industri kecil pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di Kecamatan Tojo Barat dan Tojo;
b. Sentra industri kerajinan hasil laut di Kecamatan Una-Una, Togean, Walea Kepulauan, dan Walea Besar;
c. Sentra industri makanan khas hasil laut di Kecamatan Ampana Kota; Sentra industri marmer di Kecamatan Tojo; Furniture di Kecamatan Ampana Kota, Ampana Tete, Tojo, Togean dan Walea Kepulauan; Penggergajian Kayu di Kecamatan Ampana Tete, Ulubongka dan Tojo Barat;
d. Arang Tempurung di Kecamatan Tojo Barat;
e. Pengeringan Jagung di Kecamatan Ampana Tete;
f. Kerajinan Hasil Laut di Kecamatan Una-Una, Togean, Walea Kepulauan dan Walea Besar Makanan dan minuman khas di seluruh kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una;
g. Pengolahan hasil tambang di Kecamatan Ampana Tete dan Tojo.

### 2.4.2.7. Kawasan Pertambangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

Kabupaten dan Kota, menyebutkan rencana kawasan peruntukan pertambangan meliputi: peruntukan mineral dan batubara, peruntukan minyak dan gas bumi, peruntukkan air tanah di kawasan pertambangan. Luas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 199.954 Ha. Arahan pengembangan kawasan pertambangan berada di sepanjang pesisir laut Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya di di Kecamatan Tojo.

Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah. Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
- Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
- Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

### 2.4.2.8. Kawasan Pemukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan *(urban settlement area)* merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang retatif sempit dan dinamika kehidupan yang retatif tinggi, dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan *(urban)* termasuk di dalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perda-gangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabu-paten maupun kota-kota kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan ini diarahkan pada ibu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Tojo Una-Una, rencana penataan dan pengembangan sebagai berikut:

- Seiring dengan pengembangan Perkotaan Ampana sebagai Ibukota Kabupaten Tojo Una-Una, maka permukiman di wilayah perkotaan Ampana ini akan meningkat, sehingga perlu meningkatkan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba)-Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) berdiri sendiri. Pada setiap kawasan permukiman disedia-kan berbagai fasilitas yang memadai, sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
- Permukiman perkotaan merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengemba-ngan adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkap, sehingga menjadi wilayah permukiman yang nyaman dan layak huni;
- Permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak,

saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus), dan pelayanan air bersih;

- Pengembangan kawasan permukiman baru harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, antara lain penyediaan jaringan drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih, dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola *enclave*; serta
- Kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara. Selanjutnya, bangunan tersebut dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunan;
- Luas rencana permukiman perkotaan di Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10,884,67 Ha.

Jika dilihat dari penambahan dan persebaran penduduk, maka dibutuhkan adanya pengembangan kawasan permukiman baru untuk menampung pertambahan jumlah penduduk. Selain penambahan jumlah penduduk, perencanaan pemba-ngunan dan pengembangan kawasan juga didukung beberapa faktor lain, yakni kesiapan lahan kesesuaian peruntukkan dan daya dukung lahan, jaminan keter-sediaan air, terbentuk kelompok pendukung pembangunan perumahan dan per-mukiman yang tidak hanya mendukung usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga usaha peningkatan kesehatan masyarakat, serta sasaran stra-tegis yang telah disepakati. Pembangunan di sektor perumahan rakyat berdasarkan tingkat kesesuaian lahan tersebut diprioritaskan di Kecamatan Tojo, Kecamatn Tojo Barat, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Walea Kepulauan, dan Kecamatan Walea Besar dengan luas lahan cadangan sekitar 4.489,77 Ha.

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi *(investment climate)* berhubungan dengan sarana dan prasarana serta keamanan/kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Sarana prasarana yang dapat mendukung iklim investasi antara lain: koperasi, perbankan, restoran, perhotelan, akses air minum, akses listrik, akses layanan internet, dan penanganan kriminalitas.

#### 2.4.3.1. Koperasi

Koperasi dapat menjadi sarana masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan perekonomian rumah tangga. Selain itu, koperasi juga bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai akses mendapat bantuan modal usaha, serta koperasi dapat menumbuhkan kemandirian, disiplin, dan kerjasama untuk meningkatkan keuangan anggota. Data jumlah koperasi di Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 2.77**
**Jumlah Koperasi (unit)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Kecamatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tojo Barat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Tojo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Ulubongka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Ampana Tete | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Ampana Kota | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 6 | Ratolindo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Una-Una | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Batudaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Togean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Walea Kepulauan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Walea Besar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Talatako | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** |

Sumber: BPS Kab. Tojo Una-Una, 2020

### 2.4.3.2. Bank

Lembaga keuangan perbankan juga dapat meningkatkan iklim investasi di daerah setempat. Perbankan *(banking)* berfungsi untuk meningkatkan aktivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat, melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Data sarana dan prasarana perbankan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.78**
**Jumlah Sarana dan Prasarana perbankan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

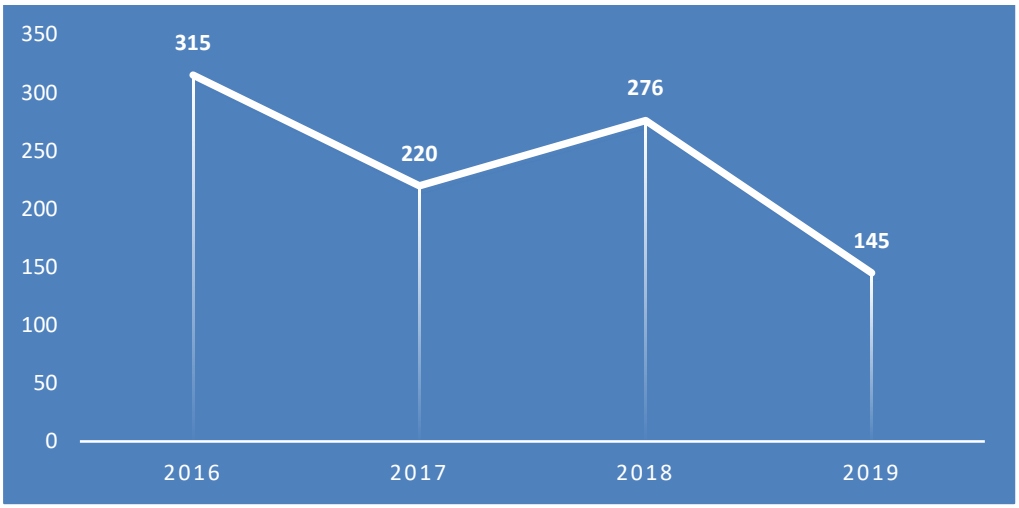
| No. | Jenis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Cabang | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Kantor Cabang Pembantu | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Kantor Kas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Payment Point | | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | ATM | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 |

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2020

Sarana dan prasarana perbankan di Kabupaten Tojo Una-Una cukup memadai dengan 3 (tiga) unit kantor cabang, 5 (lima) unit kantor cabang pembantu, 2 (dua) unit kantor kas, 1 (satu) unit payment point, dan 11 unit ATM (anjungan tunai mandiri) yang tersebar di Kabupaten Tojo Una-Una.

### 2.4.3.3. Rumah Makan/Restoran

Rumah makan/restoran menjadi satu diantara sarana penting bagi masyarakat dan pelaku usaha. Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan drastis pada Tahun 2019 sebesar 11,23 persen. Penurunan cukup tajam ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebab-kan terjadinya penurunan omset rumah makan/restoran, sehingga terjadi penutu-pan usaha untuk menghindari kerugian yang lebih besar.




Sumber: BPS Kab. Tojo Una-Una, 2020

**Gambar 2.38**
**Jumlah Restoran/Rumah Makan (unit)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2019**

### 2.4.3.4. Perhotelan

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan, dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang. Hotel juga merupakan sarana yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 2.79**
**Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2020**

| No. | Hotel/Penginapan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akomodasi | 43 | 49 | 53 | 53 |
| 2 | Kamar | 515 | 586 | 610 | 719 |
| 3 | Tempat Tidur | 840 | 924 | 927 | 836 |

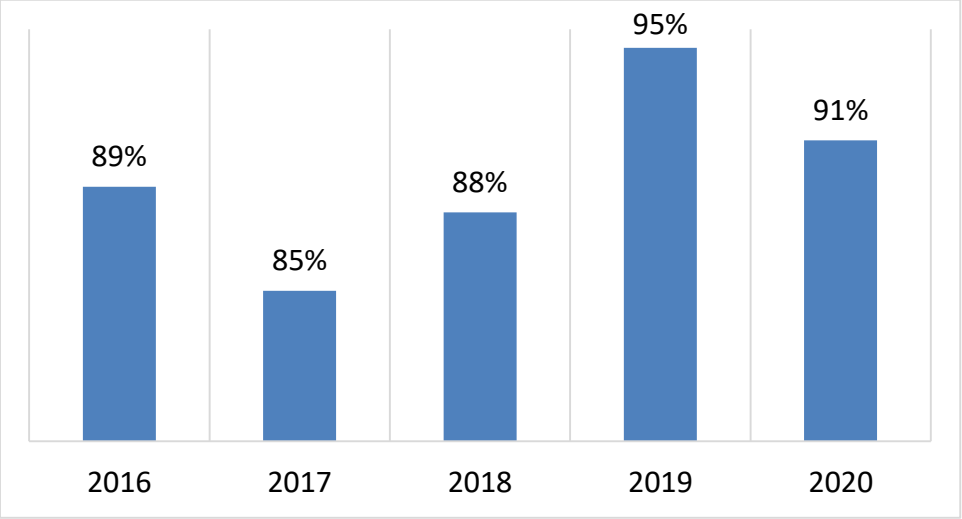
Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2021

Jumlah akomodasi perhotelan di Kabupaten Tojo Una-Una cenderung meningkat selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Peningkatan jumlah

akomodasi hotel diikuti peningkatan jumlah kamar hotel dari sebanyak 515 unit Tahun 2017 naik menjadi sebanyak 719 unit pada Tahun 2020. Kondisi ini berdampak positif bagi pengembangan dan kemajuan Sektor Pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una pada masa mendatang.

### 2.4.3.5. Akses Sumber Air minum Layak

Air minum layak *(drinking water)* merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, karena berdampak pada derajat Kesehatan dan produktivitas masyarakat setempat. Akses masyarakat terhadap air minum layak cenderung meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2016 persentase masyarakat berakses air minum layak sebesar 89 persen mengalami kenaikan menjadi sebesar 91 persen pada Tahun 2020. Bahkan, pada Tahun 2019 mencapai 95 persen. Angka ini berarti bahwa hampir keseluruhan masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una sudah terakses dan mendapatkan air minum layak.

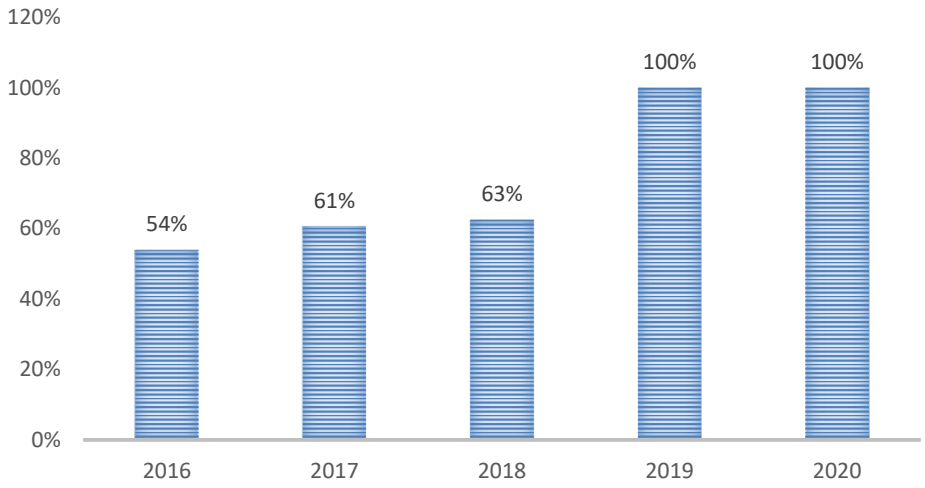



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2020

**Gambar 2.39**
**Akses Masyarakat Terhadap Air Minum Layak (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

### 2.4.3.6. Akses Listrik

Listrik *(electricity)* sudah menjadi kebutuhan mendasar untuk memenuhi kebutuhan energi dari rumah tangga masyarakat maupun kalangn industri. Oleh karena itu, ketersediaan energi listrik sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan dan pembangunan daerah. Data persentase masyarakat yang terakses listrik di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:




Sumber: BPS Tojo Una-Una, 2016-2020

**Gambar 2.40**
**Akses Rumah Tangga Terhadap Listrik (%)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

Data rumah tangga yang memiliki akses terhadap energi listrik terus mengalami peningkatan setiap tahun dalam kurun 2016-2020. Persentase rumah tangga terakses listrik pada Tahun 2016 sebesar 54 persen, dan dalam kurun waktu empat tahun sudah mencapai 100 persen.

### 2.4.3.7. Akses Layanan Internet dan Telepon Seluler

Akses atas layanan internet dan telepon seluler juga sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat maupun industri. Oleh karena itu, akses layanan internet dan telepon seluler menjadi bagian penting dalam mendukung dan mendorong daya saing daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 2.80**
**Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler (% Desa)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2020**

| No. | Jenis Layanan | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wilayah | Cakupan | Wilayah | Cakupan |
| 1 | 4G/LTE | 57 | 51% | 79 | 68% |
| 2 | 3G/H/H+/EVDO | 23 | 21% | 14 | 12% |
| 3 | 2,5G/E/GPRS | 6 | 5% | 5 | 4% |
| 4 | Tidak ada | 25 | 23% | 18 | 16% |

Sumber: BPS Tojo Una-Una, 2016-2020

Layanan internet dan seluler terhadap masyarakat mengalami peningkatan dalam kurun Tahun 2019-2020. Akses layanan internet dan seluler sudah mencapai 68 persen (4G/LTE), sebesar 12 persen (3G/H/H+/EVDO), sebesar 4 persen (2,5G/ E/GPRS), dan jenis lainnya sebesar 16 persen.

### 2.4.3.8. Angka kriminalitas

Daya saing daerah *(regional competitiveness)* juga dipengaruhi angka krimi-nalitas. Jumlah kejahatan dilaporkan cenderung menurun dari sebanyak 446 kasus Tahun 2016 menjadi sebanyak 166 kasus Tahun 2020. Persentase penyelesaian kasus meningkat dari sebesar 70,1 persen Tahun 2016 menjadi sebesar 78,92 persen Tahun 2020. Data selang waktu terjadinya kejahatan mengalami pelam-batan dari sekitar 22 jam menjadi sekitar 52 jam. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan angka kriminalitas semakin membaik di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

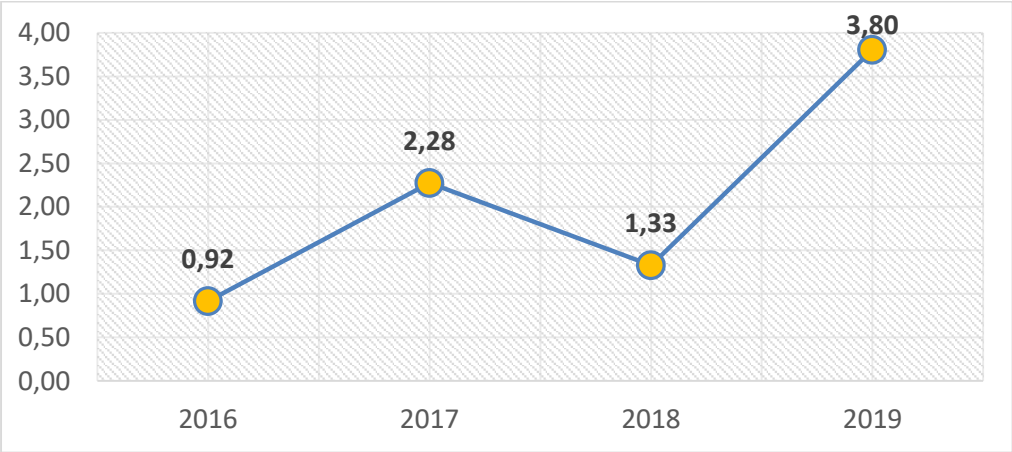
**Tabel 2.81**
**Persentase Penyelesaian Kejahatan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Kriminal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejahatan yang Dilaporkan | 446 | 257 | 387 | 314 | 166 |
| 2 | Persentase Penyelesaian Kejahatan (%) | 70,1 | 52,14 | 59,43 | 52,87 | 78,92 |
| 3 | Selang Waktu Terjadi Kejahatan (jam) | - | - | 22.38'24" | 27.57'36" | 52.46'12" |

Sumber: BPS Tojo Una-Una, 2016-2020

### 2.4.3.9. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)

Rasio keterbukaan ekonomi *(economy openess)* di Kabupaten Tojo Una-Una berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 2,28 persen; menurun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 1,33 persen. Namun, pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 3,80 persen. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan ekspor maupun impor barang di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.




Sumber: BPS Tojo Una-Una, 2016-2020

**Gambar 2.41**
**Rasio Ekspor-Impor terhadap PDB**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia *(human resources)* menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing daerah, karena ketersediaan sumber daya manusia yang tinggi mampu menggerakkan dan meningkatkan seluruh aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai.

#### 2.4.4.1. Kualitas tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja *(quality of labor)* dapat diukur melalui tingkat pendidikan angkatan kerja *(labor force)* dari pendidikan formal maupun pendidikan informal yang ditamatkan. Tingkat pendidikan formal angkatan kerja yakni: sekolah dasar, sekolah lanjut pertama, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja.

**Tabel 2.82**
**Kualitas Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Tingkat Pendidikan | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < SD/Sederajat | 39.068 | 53,1 | 39.857 | 54,7 | 43.596 | 53,2 | 40.735 | 47,9 | 39.462 | 47,0 |
| 2 | SMP/Sederajat | 12.488 | 17,0 | 10.289 | 14,1 | 11.903 | 14,5 | 13.660 | 16,1 | 14.141 | 16,9 |
| 3 | SMA/ke atas | 13.487 | 18,3 | 22.700 | 31,2 | 19.714 | 24,1 | 20.798 | 24,4 | 20.524 | 24,5 |
| 4 | Perguruan Tinggi | 8.599 | 11,7 | - | - | 6.692 | 8,2 | 9.906 | 11,6 | 9.780 | 11,7 |
| **Jumlah** | | **73.642** | **100,0** | **72.846** | **100,0** | **81.905** | **100,0** | **85.099** | **100,0** | **83.907** | **100,0** |

Sumber: BPS Tojo Una-Una, 2016-2020

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja pada jenjang SMA/sederajat dan perguruan tinggi. Pada Tahun 2016 angkatan kerja berpendidikan SMA/sederajat sebesar 18,3 persen dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 24,5 persen pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, dan kondisi ini mengindikasikan adanya keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.

#### 2.4.4.2. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Bonus demografi *(demography bonus)* adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan, karena jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah usia belum produktif dan jumlah usia lanjut. Tingginya usia produktif disebut bonus demografi. Bonus demografi juga merupakan kondisi jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun)

lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk berusia non-produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun). Sementar itu, perbandingan antara usia produktif dan usia tidak produktif disebut sebagai rasio ketergantungan *(dependency ratio)*. Artinya, ketika terjadi fenomana bonus demografi, maka rasio ketergantungan penduduk lebih rendah dari kondisi sebelum adanya bonus demografi.

**Tabel 2.83**
**Rasio Ketergantungan Penduduk**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk usia < 15 tahun | 45.373 | 45.555 | 45.781 | 45.857 | 48.103 |
| 2 | Jumlah penduduk usia > 64 tahun | 7.059 | 7.298 | 7.563 | 7.855 | 7.815 |
| 3 | Total penduduk usia tidak produktif (1) &(2) | 52.432 | 52.853 | 53.344 | 53.712 | 55.918 |
| 4 | Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun | 96.782 | 97.967 | 99.132 | 100.279 | 107.911 |
| 5 | Rasio ketergantungan (3)/ (4) | 54,18 | 53,95 | 53,81 | 53,56 | 51,82 |

Sumber: BPS Tojo Una-Una, 2016-2020

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menurun selama kurun waktu Tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif semakin tinggi dibanding penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Tojo Una-Una. Bonus demografi ini dapat bermanfaat dengan baik pada suatu daerah, jika pemerintah daerah mempersiapkan untuk menerima bonus demografi. Namun, menjadi masalah jika pemerintah tidak dapat mengelola dan memanfaatkan dengan baik. Bonus demografi dapat menjadi pemicu *(trigger)*, untuk mengembangkan dan memajukan pembanguanan daerah, apabila pemerintah daerah mempersiapkan dengan baik generasi muda yang berkualitas tinggi dengan adanya ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Namun, sebaliknya jika pemerintah daerah tidak mampu mempersiapkan dengan baik menghadapi bonus demografi tersebut, justru akan menjadi beban bagi daerah, karena meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah.

**Tabel 2.84**
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB ADHK (%) | % | 5,16 | 5,62 | 2,71 | 4,87 | -3,21 |
| 2 | Laju Inflasi (%) | % | 1,49 | 4,33 | 6,46 | 2,3 | 0,46 |
| 3 | PDRB per Kapita ADHB (Rp. Miliar) | (Rp. Miliar) | 30,80 | 19,05 | 34,77 | 36,96 | 34,10 |
| 4 | Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%) | % | 81,44 | 81,85 | 81,73 | 82,84 | 83,61 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 62,27 | 62,61 | 63,38 | 64,52 | 64,59 |
| 6 | Angka Melek Huruf (%) | % | - | 95,5 | 99,24 | 99,48 | 99,4 |
| 7 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 11,68 | 11,81 | 11,82 | 12,25 | - |
| 8 | Umur Harapan Hidup (tahun) | Tahun | 64,01 | 64,07 | 64,61 | 65,14 | 65,67 |
| 9 | Balita Gizi Kurang (%) | % | 1,95 | 2,11 | 0,00 | 27,92 | 52,21 |
| 10 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | % | - | 66,7 | 68,97 | 78,59 | 75,33 |
| 11 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | % | 3,62 | 5,5 | 2,88 | 2,97 | 2,84 |
| 12 | Rasio Penduduk Bekerja (%) | % | 96,38 | 94,5 | 97,12 | 97,03 | 97,16 |
| 13 | Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) | % | 4,76 | 5,05 | 4,65 | 4,66 | 4,57 |
| 14 | Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (%) | % | 69,15 | 66,98 | 73,72 | 76,25 | 73,19 |
| 15 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%) | % | 33,15 | 39,02 | 41,34 | 42,10 | 41,44 |
| 16 | Persentase PAD terhadap pendapatan (%) | % | 4,56 | 6,24 | 6,01 | 6,63 | 6,82 |
| 17 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%) | % | 39,86 | 39,73 | 38,93 | 38,29 | 38,68 |
| 19 | Produksi Sektor Pertanian | | | | | | |
| | *Padi (ku)* | Kw | 11173,39 | 11173,39 | 7924,53 | 7237,19 | 6660,2 |
| | *Kelapa (ton)* | ton | 27811,96 | 27912 | 33097 | 31953,45 | 31953,45 |
| | *Kakao (ton)* | ton | 8814,5 | 5102 | 5197 | 5199,5 | 5200 |
| | *Cengkeh (ton)* | ton | 1701,6 | 1678 | 1478 | 1479,7 | 1490,5 |
| | *Nilam (ton)* | ton | 1752 | 197 | 41 | 41 | 41 |
| 20 | Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%) | % | 1,60 | 1,67 | 1,70 | 1,90 | 1,46 |
| 21 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) | % | 11,40 | 11,56 | 11,44 | 11,74 | 10,95 |
| 22 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) | % | 7,82 | 7,97 | 7,88 | 8,16 | 8,13 |
| 23 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) | % | 8,61 | 8,41 | 8,31 | 8,13 | 8,41 |
| **B** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.Juta) | Rp.Juta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Nilai Tukar Petani (%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persentase pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita (%) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Persentase Luas Wilayah Produktif (%) | % | - | - | 58,66 | 58,87 | 61,65 |
| 5 | Panjang Jalan (Meter) | Meter | 1.168.139 | 1.168.139 | 1.168.139 | 1.168.139 | - |
| | *-Aspal* | Meter | 352.206 | 358.904 | 373.082 | 358.904 | - |
| | *-Kerikil* | Meter | 532.089 | 522.596 | 511.169 | 522.596 | - |
| | *-Tanah* | Meter | 197.145 | 195.744 | 192.992 | 195.744 | - |
| | *-Lainnya* | Meter | 86.699 | 90.895 | 90.896 | 90.895 | - |
| 6 | Luas Wilayah Banjir ($Km^2$) | Km2 | - | - | 4.720,88 | 4.720,88 | 4.720,88 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luas Kawasan Industri (Ha) | Ha | - | - | 20.165 | 20.165 | 20.165 |
| 8 | Luas Kawasan Industri Kecil dan Menengah (Ha) | Ha | - | - | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Luas Pemukiman Perkotaan (Ha) | Ha | - | - | 10.884,67 | 10.884,67 | 10.884,67 |
| 10 | Jumlah Koperasi (Unit) | Unit | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | Perbankan | | | | | | |
| | *Kantor Cabang (unit)* | Unit | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | *Kantor Cabang Pembantu (unit)* | Unit | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| | *Kantor Kas (unit)* | Unit | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | *Payment Point (unit)* | Unit | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | *ATM (unit)* | Unit | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 |
| 12 | Perhotelan | | | | | | |
| | *Akomodasi (unit)* | Unit | - | 43 | 49 | 53 | 53 |
| | *Kamar (unit)* | Unit | - | 515 | 586 | 610 | 719 |
| | *Tempat Tidur (unit)* | Unit | - | 840 | 924 | 927 | 836 |
| 13 | Restoran/Rumah Makan (unit) | Unit | 315 | 220 | 276 | 145 | - |
| 14 | Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak (%) | % | 89 | 85 | 88 | 95 | 91 |
| 15 | Rumah Tangga Akses Listrik (%) | % | 54 | 61 | 63 | 100 | 100 |
| 16 | Angka kriminalitas yang tertangani (%) | % | 70,1 | 52,14 | 59,43 | 52,87 | 78,92 |
| 17 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (%) | % | 0,92 | 2,28 | 1,33 | 3,80 | - |
| 18 | Kualitas Tenaga Kerja berdasarkan tingkat pendidikan | | | | | | |
| | *< SD/Sederajat (%)* | % | 53,1 | 54,7 | 53,2 | 47,9 | 47 |
| | *SMP/Sederajat (%)* | % | 17 | 14,1 | 14,5 | 16,1 | 16,9 |
| | *SMA/ke atas (%)* | % | 18,3 | 31,2 | 24,1 | 24,4 | 24,5 |
| | *Perguruan Tinggi (%)* | % | 11,7 | - | 8,2 | 11,6 | 11,7 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rasio Ketergantungan (%) | % | 54,18 | 53,95 | 53,81 | 53,56 | 51,82 |
| **C** | **PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| **C.1** | **Pendidikan** | | | | | | |
| 1 | Jumlah Murid TK/RA (orang) | Orang | - | - | 4.757 | 4.461 | 4.537 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (%) | | | | | | |
| | *SD/MI/Paket A* | % | - | - | 113,07 | 109,72 | 107,91 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | - | - | 78,31 | 79,08 | 80,23 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | - | - | 74,43 | 88,66 | 88,62 |
| 3 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan (%) | | | | | | |
| | *SD/MI/Paket A* | % | - | - | 38,6 | 38,74 | 38,98 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | - | - | 20,04 | 21,24 | 19,52 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | - | - | 19,36 | 22,64 | 21,59 |
| | *Diploma I/II/II* | % | - | - | 3,04 | 1,9 | 2,13 |
| | *Diploma IV/S1/S2/S3* | % | - | - | 6,83 | 4,58 | 5,6 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (%) | | | | | | |
| | *SD/MI/Paket A* | % | 95,58 | 95,42 | 98,41 | 98,55 | 98,94 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | 67,35 | 68,92 | 69,39 | 71,04 | 70,91 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | 56,84 | 55,58 | 60,19 | 61,68 | 63,33 |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah (%) | | | | | | |
| | *SD/MI/Paket A* | % | 99,42 | 100,00 | - | - | - |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | 93,00 | 94,28 | - | - | - |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | 69,33 | 63,16 | - | - | - |
| 6 | Jumlah Sekolah(unit) | | | | | | |
| | *TK/RA* | Unit | - | - | 131 | 117 | 126 |
| | *SD/MI/Paket A* | Unit | 192 | 192 | 194 | 192 | 192 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | Unit | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | Unit | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 |
| 7 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10.000) | per 10.000 | 84,65 | 84,00 | 80,86 | 81,89 | 81,25 |
| 8 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10.000) | per 10.000 | 21,22 | 21,36 | 22,34 | 27,37 | 22,53 |
| 9 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1.000) | per 1.000 | 64,9 | 77,3 | 75,4 | 76,2 | 84,9 |
| 10 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (per 1.000) | per 1.000 | 56,8 | 85,1 | 69,2 | 68,1 | 74,2 |
| **C.2** | **Kesehatan** | | | | | | |
| 1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | per 1.000 | 9,01 | 8,88 | 104,48 | 95,06 | - |
| 2 | Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran | per 1.000 | 991 | 991 | 896 | 905 | - |
| 3 | Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup | per 1.000 | 11 | 9 | 108 | 99 | - |
| 4 | Angka Kematian Ibu per 1.000 kelahiran hidup | per 1.000 | 7 | 1 | 34 | 27 | - |
| 5 | Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita) | per 1.000 | 12,19 | 12,25 | 12,37 | 17,93 | - |
| 6 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1.0000) | per 10.000 | 4,22 | 4,11 | 4,13 | 4,16 | - |
| 7 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000) | per 100.000 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | - |
| 8 | Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000) | per 10.000 | 1,88 | 3,71 | 3,48 | 3,57 | 1,59 |
| 9 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000) | per 10.000 | 2,35 | 7,43 | 3,48 | 3,57 | 1,59 |
| 10 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | % | 57,99 | 76,28 | 24,86 | 92,47 | - |
| 11 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | % | 68,87 | 78,07 | 75,78 | 75,33 | - |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* | UCI | 80,27 | 84,93 | 70,55 | 75,34 | - |
| 13 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%) | % | 20,69 | 32,36 | 4,78 | 38,32 | - |
| 14 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) | % | 88,78 | 69,92 | 66,32 | 82,62 | - |
| 15 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 10.000 penduduk) | per 10.000 penduduk | 9,38 | 22,08 | 22,89 | 24,74 | - |
| 16 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | per 100.000 penduduk | 0,00 | 6,63 | 0,66 | 1,95 | - |
| 17 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%) | % | 97,33 | 92,75 | 72,21 | 61,15 | - |
| 18 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 19 | Penderita diare yang ditangani (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 20 | Angka kejadian Malaria (per 100.000) | per 100.000 | 158,16 | 68,29 | 41,97 | 5,20 | - |
| 21 | Tingkat kematian akibat malaria | malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | tepat | 38,56 | 61,17 | 100 | 100 | - |
| 23 | Cakupan puskesmas (%) | % | 108 | 108 | 117 | 117 | 133 |
| 24 | Cakupan pembantu puskesmas (%) | % | 31,97 | 32,19 | 32,88 | 33,56 | 34,25 |
| 25 | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **C.3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | |
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) | % | 46,96 | 48,63 | 51,30 | 26,70 | 22,25 |
| 2 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (m) | m | 770,80 | 762,59 | 754,31 | 746,89 | 702,04 |
| 3 | Persentase rumah tinggal bersanitasi layak (%) | % | 47,34 | 52,45 | 59,96 | 55,71 | 56,40 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | % | 40,13 | 42,90 | 45,12 | 45,82 | 38,00 |
| 5 | Persentase penduduk berakses air minum (%) | % | 89,12 | 84,57 | 87,99 | 95,19 | 91,14 |
| 6 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1.000) | per 1.000 | 2,26 | 2,23 | 2,37 | 2,49 | 2,34 |
| **C.4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | | |
| 1 | Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas (%) | | | | | | |
| | *-Beton* | % | 0 | 0,36 | 0,15 | 0,43 | 0,26 |
| | *-Genteng* | % | 0,22 | 0,18 | 0 | 0,36 | 1,66 |
| | *-Kayu/Sirap* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| | *-Seng* | % | 75,84 | 79,73 | 82,29 | 79,29 | 85,73 |
| | *-Asbes* | % | 1,94 | 1,01 | 0,56 | 0,57 | 0,22 |
| | *-Ijuk* | % | 21,99 | 18,72 | 16,99 | 19,34 | 11,62 |
| | *-Bambu* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| | *-Lainnya* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas (%) | | | | | | |
| | *-Bukan Tanah* | % | 96,34 | 96,79 | 96,1 | 99,24 | 98,42 |
| | *-Tanah* | % | 3,66 | 3,21 | 3,9 | 0,76 | 1,58 |
| 3 | Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas (%) | | | | | | |
| | *-Tembok* | % | 51,91 | 52,05 | 55,45 | 49,68 | 58,57 |
| | *-Kayu* | % | 45,83 | 47,25 | 44,55 | 50,32 | 39,99 |
| | *-Bambu* | % | 2,25 | 0,7 | 0 | 0 | 0,29 |
| | *-Lainnya* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Persentase Rumah Tangga menurut Pembuangan Akhir Tinja (%) | | | | | | |
| | *-Tangki Septik* | % | 42,48 | 66,04 | 85,7 | 73,14 | 76,18 |
| | *-IPAL* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *-Kolam/Sungai* | % | 22,81 | 5,01 | 10,74 | 12,38 | 16,56 |
| | *-Lubang Tanah* | % | 13,87 | 28,95 | 3,56 | 14,49 | 5,24 |
| | *-Pantai/Tanah Terbuka* | % | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| | *-Lainnya* | % | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| **C.5** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | |
| 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%) | % | 13,33 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) | % | 86,66 | 86,66 | 86,66 | 86,66 | 86,66 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Persentase Penegakan Perda (%) | % | 87,00 | 92,02 | 92,02 | 100,00 | 100,00 |
| **C.6** | **Sosial** | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) | % | - | - | - | - | 32 |
| 2 | Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalaui KUBE (orang) | Kelompok | - | 80 | - | 420 | 30 |
| 3 | Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (orang) | Orang | 40 | 40 | 30 | 16 | 0 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (orang) | Orang | 90 | 97 | 142 | 727 | 0 |
| **D** | **LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | | |
| D.1 | **Tenaga Kerja** | | | | | | |
| 1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) | % | - | 15,56 | 13,02 | 19,19 | - |
| 2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%) | % | - | 57,14 | 59,09 | 63,64 | - |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) | % | 66,44 | 98,23 | 3,05 | 31,84 | - |
| 4 | Keselamatan dan perlindungan (%) | % | - | 11,11 | 12,43 | 14,53 | 46,58 |
| 5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%) | % | - | 11,11 | 12,43 | 14,53 | 46,58 |
| D.2 | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | % | 55,96 | 57,63 | 58,60 | 58,76 | 59,08 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%) | % | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Persentase Angkatan Kerja perempuan (%) | % | 36,04 | 36,44 | 41,22 | 41,19 | 40,36 |
| 4 | Persentase penduduk perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas yang status pekerjaan utama berusaha sendiri (%) | % | 29,85 | 20,62 | 28,56 | 31,55 | 27,38 |
| 5 | Persentase pencari kerja perempuan yang terdaftar (%) | % | 35,66 | 64,19 | 50,59 | 37,97 | 36,96 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian (%) | % | 28,79 | 29,49 | 34,56 | 35,38 | - |
| 7 | Proporsi tenaga kerja perempuan di luar sektor pertanian (%) | % | 71,21 | 70,51 | 65,44 | 64,62 | - |
| 8 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 9 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%) | % | 86,36 | 86,67 | 95,45 | 100,00 | - |
| D.3 | **Pangan** | | | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama (Kg) | Kg | 5.180 | 4.530 | 3.891 | 4.677 | 4.442 |
| 2 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **D.4** | **Pertanahan** | | | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat ($m^2$) | M2 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 5,9 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah Negara (%) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 |
| **D.5** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| **D.6** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | - | - | 1,00 | 0,93 | 1,00 |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran | % | - | - | 98,60 | 92,50 | 87,80 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | % | - | - | - | 59,10 | 36,50 |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala daerah | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6 | Cakupan penerbitan akta kelahiran (%) | % | - | - | 97,3 | 92,6 | 87,8 |
| **D.7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok) | Kelompok | 17,3 | 16,8 | 16,8 | 15,2 | 15,2 |
| 2 | Persentase LSM aktif (%) | % | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 6,2 | 6,8 |
| 3 | Persentase PKK aktif (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Posyandu aktif (%) | % | 81,1 | 86,2 | 102,5 | 77,5 | 77,5 |
| 5 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) | % | 50,6 | 57,6 | 57,6 | 82,3 | 94,9 |
| **D.8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 1,14 | 1,08 | 1,74 | 1,46 | 1,69 |
| 2 | Ratio Akseptor KB (%) | % | 80,8 | 81,2 | 82,3 | 82,4 | - |
| 3 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%) | % | 16,4 | 21,6 | 18,5 | 17,9 | 30,5 |
| 4 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%) | % | 97,2 | 96,7 | 96,3 | 100,0 | 100,0 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D.9** | **Perhubungan** | | | | | | |
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Melalui Bandara/Pelabuhan (orang) | | | | | | |
| | *Bandara Tanjung Api* | | | | | | |
| | *-Datang* | orang | - | - | 11.719,0 | 5.033,0 | 2.874,0 |
| | *-Berangkat* | orang | - | - | 12.696,0 | 5.148,0 | 173,0 |
| | *Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong* | | | | | | |
| | *-Datang* | orang | - | - | 56.509,0 | 48.819,0 | 58.236,0 |
| | *-Berangkat* | orang | - | - | 63.422,0 | 57.408,0 | 57.570,0 |
| 2 | Jumlah uji kir angkutan umum (unit) | Unit | - | 82,0 | 77,0 | 77,0 | 80,0 |
| 3 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (buah) | Buah | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Persentase layanan angkutan darat (%) | % | 69,7 | 17,4 | 20,0 | 1,9 | 1,9 |
| 5 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m) | Meter | 42,0 | 38,7 | 35,8 | 36,0 | 36,9 |
| 6 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | | 6,5 | 7,6 | 6,4 | 7,8 |
| 7 | Jumlah Barang Melalui Bandara/Pelabuhan (Ton) | | | | | | |
| | *Bandara Tanjung Api* | | | | | | |
| | *-Bongkar* | Ton | - | - | 65.208 | 12.476 | 927 |
| | *-Muat* | Ton | - | - | 69.808 | 13.989 | 643 |
| | *Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong* | | | | | | |
| | *-Bongkar* | Ton | - | - | 1.594 | 872 | 5.646 |
| | *-Muat* | Ton | - | - | 99.982 | 142.172 | 83.600 |
| **D.10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | |
| 1 | Cakupan Wilayah Akses Layanan Internet dan Telepon Seluler (%) | | | | | | |
| | *4G/LTE* | % | - | - | - | 0,51 | 0,68 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *3G/H/H+/EVDO* | % | - | - | - | 0,21 | 0,12 |
| | *2,5G/E/GPRS* | % | - | - | - | 0,05 | 0,04 |
| | *Tidak ada* | % | - | - | - | 0,23 | 0,16 |
| 2 | Jumlah Kantor Pos | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **D.11** | **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah** | | | | | | |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif (Unit) | Unit | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| **D.12** | **Penanaman Modal** | | | | | | |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan) | Perusahaan | - | - | - | - | **26** |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Miliar) | Rp.Miliar | - | - | - | - | 91,67 |
| 3 | Jumlah tenaga kerja yang bekerja (PMDN/PMA) (orang) | orang | - | - | - | - | 1135 |
| **D.13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | Cakupan pembinaan olahraga (%) | % | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 33,3 | 33,3 |
| 3 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi(%) | % | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 46,2 | 46,2 |
| 4 | Cakupan pembinaan atlet muda (%) | % | 12,90 | 11,63 | 12,24 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | Jumlah atlet berprestasi (orang) | orang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **6** | Jumlah prestasi olahraga (buah) | Buah | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| **D.14** | **Statistik** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Buku ”kabupaten dalam angka” | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Buku ”PDRB” | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| **D.15** | **Persandian** | | | | | | |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D.16** | **Kebudayaan** | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | % | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (buah) | Buah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (buah) | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **D.17** | **Perpustakaan** | | | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) | orang | 1.803 | 2.158 | 1.713 | 5.092 | 1.570 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Exp.) | Exp. | 3.813 | 4.098 | 4.098 | 4.201 | 4.654 |
| 3 | Rasio perpustakaan (unit) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (orang) | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D.18** | **Kearsipan** | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali) | kali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **E** | **LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | |
| **E.1** | **Pariwisata** | | | | | | |
| 1 | Capaian Kunjungan Wisata (%) | % | 199,47 | 194,21 | 185,50 | 162,96 | 126,77 |
| 2 | Jumlah Kunjungan wisatawan (orang) | orang | 5.984 | 13.595 | 20.405 | 11.407 | 7.606 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E.2** | **Pertanian** | | | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) | % | 39,86 | 39,73 | 38,93 | 38,29 | 38,68 |
| 2 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) | % | 42,04 | 43,71 | 42,37 | 43,43 | 42,37 |
| **E.3** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | |
| 1 | Persentase rumah tangga pengguna listrik (%) | % | 54 | 61 | 63 | 100 | 100 |
| **E.4** | **Perdagangan** | | | | | | |
| 1 | Ekspor Bersih Perdagangan (%) | % | 0,92 | 2,28 | 1,33 | 3,80 | - |
| **E.5** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | |
| 1 | Produksi Perikanan (ton) | Ton | 11647,52 | 16961,78 | 18658,00 | 20523,70 | 225765,18 |
| 2 | Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) | Kg/Kapita | 60,5 | 60,6 | 66,7 | 80,3 | 83,4 |
| 3 | Cakupan Bina kelompok nelayan (%) | % | 12,6 | 12,4 | 8,5 | 10,7 | 3,3 |
| **F** | **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | |
| **F.1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F.2** | **Keuangan** | | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase belanja pendidikan (20%) | | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% |
| 3 | Persentase belanja kesehatan (10%) | | >10% | >10% | >10% | >10% | >10% |
| 4 | Penetapan APBD | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| **F.3** | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | | | |
| 1 | Persentase pejabat ASN yang mengikuti pelatihan (%) | % | 6,89 | 1,89 | 8,38 | 7,3 | 0,14 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan (%) | % | 4,92 | 7,57 | 2,95 | 4,74 | 1,74 |
| 3 | Jumlah Jabatan administrasi | Jabatan | - | 1.232 | 1.273 | 1.302 | 1.999 |
| 4 | Jumlah pemangku jabatan fungsional | Orang | - | 2.538 | 2.139 | 2.291 | 2.287 |
| **F.4** | **Pengawasan** | | | | | | |
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | % | 84,21 | 79,66 | 66,67 | 48,98 | - |
| 2 | Jumlah temuan BPK | Buah | 48 | 47 | 48 | 24 | 65 |
| **F.5** | **Sekretariat Dewan** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya ProgramProgram Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |

| NO. | ASPEK | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2017-2020

## 2.5 Evaluasi Capaian Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Tojo Una-Una yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 juga merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025, ***"Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una yang Sejahtera dan Berbudaya, Didukung oleh Sumber Daya Serta Mampu Bersaing"***. Kriteria Kabupaten Tojo Una-Una yang "Sejahtera dan Berbudaya, Didukung oleh Sumber Daya Serta Mampu Bersaing" dicirikan dengan kondisi masyarakat yang hebat dalam bidang Pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman sebagai keunggulan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Visi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una dijabarkan kedalam 5 misi berikut ini.




Total indikator kelima misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-una sabanyak 132 indikator. Dimana, hasil evaluasi menunjukan sebanyak 63 indikator atau sebesar 47,73 persen tercapai **sangat tinggi**; sebanyak 50 indikator atau sebesar 37,88 persen tingkat capaian **tidak diketahui**; sebanyak 11 indikator atau sebesar 8,33 persen tingkat capaian **sangat rendah**. Selanjutnya, terdapat sebanyak masing-masing 3 (tiga) indikator atau 2,27 persen dengan status capaian **tinggi** dan status capaian **rendah**.

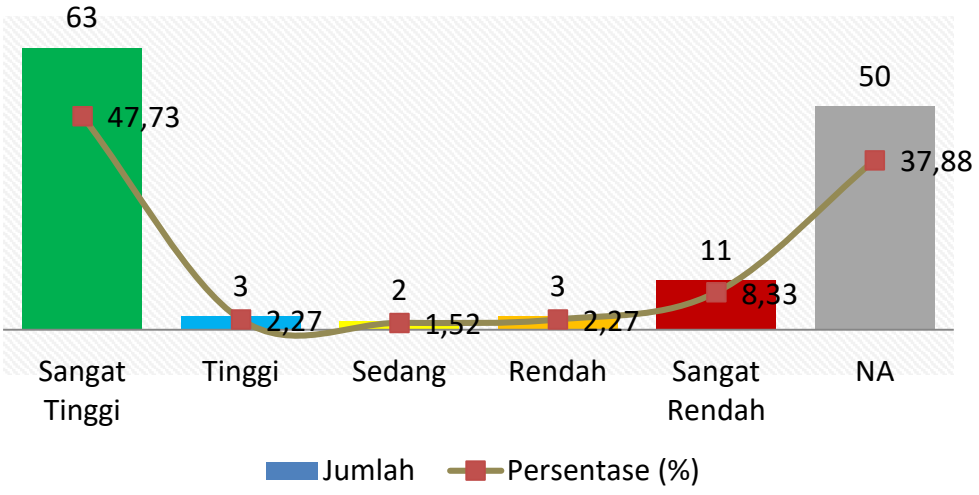
**Tabel 2.85**
**Rangkuman Hasil Evaluasi Indikator Setiap Misi**
**RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021**

| No | Misi | Jumlah Indikator | Status Capaian | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ST | | T | | S | | R | | SR | | NA | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Membangun keberdayaan rakyat serta penataan wilayah pedesaan secara merata mandiri dan berkelanjutan | 59 | 29 | 49,15 | 1 | 1,69 | 0 | 0,00 | 3 | 5,08 | 7 | 11,86 | 19 | 32,20 |

| No | Misi | Jumlah Indikator | Status Capaian | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ST | | T | | S | | R | | SR | | NA | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| | yang berbasis Ekonomi pertanian, pariwisata dan kemaritiman | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mewujudkan kelembagaan Birokrasi yang bersih efisien, efektif dan akuntabel. | 5 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 80,00 |
| 3 | Mewujudkan Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi | 34 | 14 | 41,18 | 0 | 0,00 | 1 | 2,94 | 1 | 2,94 | 2 | 5,88 | 16 | 47,06 |
| 4 | Mewujudkan pengarusutamaan gender dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. | 15 | 10 | 66,67 | 0 | 0,00 | 1 | 6,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 26,67 |
| 5 | Mengembangkan kemitraan usaha lokal, investasi dan pengembangan infrastruktur. | 19 | 4 | 21,05 | 2 | 10,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 10,53 | 11 | 57,89 |
| **TOTAL** | | **132** | **63** | 47,73 | **3** | 2,27 | **2** | 1,52 | **3** | 2,27 | **11** | 8,33 | **50** | 37,88 |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

Rekapitulasi hasil evaluasi misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 terdapat pada gambar sebagai berikut.




Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

**Gambar 2.42**
**Rekap Capaian Indikator Setiap Misi**
**RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021**

**Tabel 2.86**
**Evaluasi Indikator Misi 1**
**RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021**

| Tujuan | Sasaran | | Indikator | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan kemadirian ekonomi yang berbasis Pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman | Terwujudnya keberdayaan masyarakat miskin, anak terlantar dan penyandang tuna sosial | 1 | Jumlah cakupan pemberdayaan Fakir Miskin | 700 | 578 | 82,57 | T |
| | | 2 | Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 6734 dari 14.546 jiwa | 184 | 2,73 | SR |
| | | 3 | Jumlah cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 32 | 66,77 | 208,66 | ST |
| | | 4 | Jumlah anak terlantar yang mendapat pembinaan | 10 | 60,34 | 603,40 | ST |
| | | 5 | Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina | 80 | NA | NA | NA |
| | | 6 | Jumlah cakupan pembinaan eks penyandang penyakit social | 50 | NA | NA | NA |
| | | 7 | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan | 12 | 12 | 100 | ST |
| | Meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja | 8 | Jumlah Tenaga kerja yang memperoleh pelatihan kerja | 85 | NA | NA | NA |
| | | 9 | Pertumbuhan kesempatan kerja | 2,30 | 3,02 | 131,30 | ST |
| | | 10 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,79 | 2,84 | 101,79 | ST |
| | | 11 | Jumlah Organisasi ketenagakerjaan yang aktif | 4 | 1 | 25,00 | SR |
| | Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM | 12 | Jumlah unit UKM Menengah yang memiliki Izin Usaha | 232 | NA | NA | NA |
| | | 13 | Jumlah unit UKM yang mendapat bantuan modal Usaha | 112 | NA | NA | NA |
| | | 14 | Jumlah unit UKM yang menjadi binaan | 660 | NA | NA | NA |
| | | 15 | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pelatihan manajemen kewirausahaan | 40 | NA | NA | NA |
| | | 16 | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pelatihan manajemen pengelolaan keuangan usaha | 90 | NA | NA | NA |
| | | 17 | Jumlah Koperasi yang memperoleh akte pendirian | 62 | 60,29 | 97,25 | ST |
| | | 18 | Jumlah Koperasi yang mendapat | 150 | 68 | 45,33 | SR |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pembinaan kelembagaan | | | | |
| | | 19 | Jumlah Koperasi meperoleh bantuan permodalan | 20 | NA | NA | NA |
| | | 20 | Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT | 90 | 41 | 45,56 | SR |
| | | | Jumlah Koperasi Aktif | 90 | 41 | 45,56 | SR |
| Mewujudkan Penataan Ruang yang terpadu dan berkelanjutan | Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur berbasis ruang dan kewilayahan | 21 | Jumlah kawasan strategis berbasis rencana tata ruang | 6 | NA | NA | NA |
| | | 22 | Jumlah dan kualitas infrastruktur di perdesaan | 431 km, jembatan 50 unit, drainase 14.500 m, 75 unit, 30 desa | NA | NA | NA |
| | | 23 | Jumlah kawasan pemukiman sehat | 46,81 | 56,4 | 120,49 | ST |
| | | 24 | Jumlah kelompok komunitas perumahan | 13.607 RTM | NA | NA | NA |
| | Terwujudnya Penyediaan Dokumen Perencanaan berbasis ruang dan wilayah | 25 | Jumlah dan kualitas data yang terintegrasi | 7 | 7 | 100,00 | ST |
| | | 26 | Jumlah kegiatan bidang pariwisata, pertanian dan perikanan yang melibatkan lintas SKPD | 22 keg pariwisata, 39 keg pertanian, 24 keg perikanan | NA | NA | NA |
| | | 27 | Jumlah dokumen potensi wilayah perbatasan yang akan dikembangkan | Hanya ada fasilitasi penyelesaian tapal batas antar daerah, kec/desa Rp.566.320 ribu dan Rp.300 juta | NA | NA | NA |
| | | 28 | Jumlah dokumen potensi wilayah strategis dan cepat tumbuh yang akan dikembangkan | 1 | 1 | 100,00 | ST |
| | | 29 | Pertumbuhan Ekonomi | 7,93 | -3,21 | -40,48 | SR |
| | | 30 | PDRB Perkapita | 28,04 | 34,1 | 121,61 | ST |
| | | 31 | Perubahan Struktur Ekonomi | 34 | 38,68 | 113,76 | ST |
| | | | | 15 | 8,41 | 56,07 | R |
| | | 32 | Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan | Ada | Ada | 100 | ST |
| | | 33 | Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa | Ada | Ada | 100 | ST |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34 | Rencana Umum Penanaman Modal daerah (RUPMD) | Ada | Ada | 100 | ST |
| | | 35 | Dokumen perencanaan pembangunan prasarana | 1 Dok | 1 | 100 | ST |
| | | 36 | Dokumen Rencana Induk Pengendalian SDA | 1 Dok | 1 | 100 | ST |
| | | 37 | Dokumen RTRW Kecamatan | 4 dok | 1 | 25 | SR |
| Mewujudkan ketersediaan prasarana perhubungan, pengendalian SDA dan Lingkungan | Terwujudnya informasi profil prasarana perhubungan, pengendalian SDA dan Lingkungan | 38 | Dokumen Profil Wilayah Rawan Bencana | 1 | 1 | 100 | ST |
| | | 39 | Jumlah obyek wisata alam yang dilindungi | 22 | 62 | 281,8 | ST |
| | | 40 | Jumlah obyek wisata alam yang direhabilitasi | 1 jembatan wisata mangrove, Rp.108 juta | 1 | 100 | ST |
| | | 41 | Tersedianya Informasi SDA dan Lingkungan Hidup | 1 Dok | 1 | 100 | ST |
| | | 42 | Dokumen Rencana Pengembangan Pariwiisata Daerah | Ada | ADA | 100 | ST |
| | | 43 | Jumlah Destinasi Tujuan Wisata | 15 | 62 | 413,3 | ST |
| Mewujudkan peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat | Terwujudnya produktivitas dan kualitas masyarakat perdesaan | 44 | Jumlah Aparat Desa | 536 org | NA | NA | ST |
| | | 45 | Jumlah Penduduk yang bekerja | 157.390 jiwa | 81516 | 51,79 | R |
| | | 46 | Jumlah Penduduk yang aktif dalam pembangunan desa | 112.674 jiwa | 112674 | 100 | ST |
| | | 47 | Tingkat pendidikan apartur desa | SMA/Paket C | SMA/C | 100 | ST |
| | | 48 | Intensitas pelatihan bagi aparatur desa | 4 kali | 4 | 100 | ST |
| | | 49 | Jumlah penduduk perempuan dalam pemerintahan desa | 84 | NA | NA | NA |
| | | 50 | Jumlah petani yang meghasilkan komoditas unggulan | 110.173 | NA | NA | NA |
| | | 51 | Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan | 77.061,06 | 6.117.920,00 | 100 | ST |
| | | 52 | Jumlah komoditas pertanian dan perkebunan yang diekspor/antar pulau | 5 Komoditas (Jagung, kedelai, cacao, cengkih, kelapa) | 3 | 60 | R |
| | | 53 | Penerapan teknologi pertanian secara massif | Ya (1 paket pertanian, 7 paket peternakan | NA | NA | NA |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54 | Jumlah produksi pertanian dan perkebunan | 5,66 | NA | NA | NA |
| | | 55 | Jumlah penyuluh pertanian yang berkualitas | 28 orang penyuluh mengikuti S1 beasiswa Kementan, 114 penyuluh telah mengikuti pelatihan pada Balai Penyuluh Pertanian Sidera Kab. Sigi | NA | NA | NA |
| | | 56 | Jumlah ternak yang sehat | 85 ribu | 510.193 | 600,2 | ST |
| | | 57 | Jumlah produksi ternak | 100 ribu | 510.193 | 5101,9 | ST |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

Keterangan:

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah
- Tidak Dapat Diketahui/Tidak Dapat Diolah

**Tabel 2.87**
**Evaluasi Indikator Misi 2**
**RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021**

| Tujuan | Sasaran | | Indikator Target | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel | Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efisien dan efektif | 1 | Jumlah serta kualitas sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa | 134 kantor desa | 134 | 100 | ST |
| | | 2 | Kualitas pelayanan pada masyarakat meningkat | 4.439 org | NA | NA | NA |
| | | 3 | Jumlah aparat pemerintahan yang disiplin | 4.439 org | NA | NA | NA |
| | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat | 4 | Jumlah aparat yang berkualifikasi pendidikan tinggi. | 337 org | NA | NA | NA |
| | | 5 | Jumlah aplikasi yang memanfaatkan IT | 9.032 berkas | NA | NA | NA |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

Keterangan:

- Sangat Tinggi
- Tidak Dapat Diketahui/Tidak Dapat Diolah

**Tabel 2.88**
**Evaluasi Indikator Misi 3**
**RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021**

| Tujuan | Sasaran | | Indikator Target | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan Pendidikan yang Unggul dan Terjangkau | Terwujudnya peningkatan fasilitas pendidikan yang bekualitas | 1 | Jumlah penambahan gedung sekolah pada semua jenjang | 8 | 584 | 7300 | ST |
| | | 2 | Jumlah sekolah dalam kondisi baik pada semua jenjang | 285 | 980 | 343,86 | ST |
| | | 3 | Jumlah penambahan gedung PAUD | 12 | 195 | 1625 | ST |
| | | 4 | Rasio Guru terhadap Murid PAUD | 25 | 13,08 | 52,31 | R |
| | | 5 | Sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang baik | 80,00 | 72,24 | 90,31 | ST |
| | | 6 | Jumlah perpustakaan sekolah pada semua jenjang | 285 | NA | NA | NA |
| | | 7 | Jumlah Kunjungan pada perpustakaan daerah | 3946 | 10923 | 276,8 | ST |
| | | 8 | Jumlah perpustakaan desa dan perpustakaan khusus | 134 | NA | NA | NA |
| | Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik | 9 | Kualifikasi S1/D4 semua jenjang pendidikan | 5203 | 1639 | 31,50 | SR |
| | | 10 | Kualifikasi S1/S2 untuk SLTA | 125 | NA | NA | NA |
| | | 11 | Kualifikasi Diploma Guru Terpencil | 270 | NA | NA | NA |
| | | 12 | Kualifikasi S1 Guru Terpencil | 355 | NA | NA | NA |
| | | 13 | Kualifikasi S2 Guru Terpencil | 15 | NA | NA | NA |
| | | 14 | Angka Kelulusan SD | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | 15 | Angka Kelulusan SLTP | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | 16 | Angka Kelulusan SLTA | 95 | NA | NA | NA |
| | | 17 | Jumlah Kelulusan Program Pendidikan Paket | 90 | NA | NA | NA |
| | Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan | 18 | Jumlah Guru Jenjang SD Bersertifikasi | 1.701 | 1.636 | 96,18 | ST |
| | | 19 | Jumlah Guru Jenjang SLTP Bersertifikasi | 503 | 769 | 152,88 | ST |
| | | 20 | Jumlah Guru SLTA Bersertifikasi | 354 | NA | NA | NA |
| Mewujudkan Partisipasi masyarakat dalam bidang | Meningkatkan partisipasi masyarakat | 21 | Jumlah LSM/organisasi profesi terlibat dalam penyusunan kurikulum | 8 | NA | NA | NA |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Target | | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | dalam penyelenggaraan pendidikan | 22 | Jumlah warisan budaya yang terpelihara | 21 situs | 9 | 42,86 | SR |
| | | 23 | Jumlah Komite Sekolah | 285 | NA | NA | NA |
| Meniengkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan | Meningkatnya fasilitas kesehatan yang bekualitas | 24 | Jumlah fasilitas kesehatan | 67 | NA | NA | NA |
| | | 25 | Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan | 64 | NA | NA | NA |
| | | 26 | Jumlah pendataan bidang kesehatan | 5 | NA | NA | NA |
| | Meningkatnya pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau | 27 | Jumlah kesakitan menurun | - | NA | NA | NA |
| | | 28 | Jumlah dan jenis obat-obatan | Rp.20.000/kapita | NA | NA | NA |
| | | 29 | Jumlah SPM bidang kesehatan | 5 Dok | 5 | 100 | ST |
| | | 30 | Jumlah masyarakat miskin | 22.463 | 25.430 | 113,21 | ST |
| | | 31 | Jumlah kegiatan promosi kesehatan | 15 | 10 | 66,67 | S |
| | | 32 | Jumlah penerima bantuan iuran BPJS | 22.463 | 25.430 | 113,21 | ST |
| | | 33 | Penurunan jumlah balita gizi buruk | 0,30 (% balita gizi buruk) | 118,92 | 100 | ST |
| | | 34 | Jumlah tenaga kesehatan (medis dan para medis) di fasilitas kesehatan | 555 | 598 | 107,75 | ST |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

Keterangan:

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah
- Tidak Dapat Diketahui/Tidak Dapat Diolah

**Tabel 2.89**
**Evaluasi Indikator Misi 4**
**RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Target | | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan Peran Perempuan | Terwujudnya pengarusutamaan Gender | 1 | Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah | 1.110 | 2535 | 228,38 | ST |
| | | 2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 18,7 | 68,47 | 366,15 | ST |
| | | 3 | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 0,001 | 0,001 | 100,00 | ST |
| | | 4 | Jumlah pekerja perempuan dibawah umur | 1.245 | NA | NA | NA |
| | | 5 | Rasio Peserta KB terhadap PUS | 106,86 | 76,60 | 71,68 | S |
| | | 6 | Intensitas penyuluhan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) | 4 keg, 38.576 PUS | 180 | NA | NA |
| | | 7 | Jumlah Peserta KB Laki-laki | 1736 | 10807 | 622,52 | ST |
| | | 8 | Intensitas penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja | 175 org | NA | NA | NA |
| | | 9 | Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi pada wanita pasca nikah | 265 | NA | NA | NA |
| Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pembentukan lembaga adat | Terwujudnya pembentukan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal | 10 | Adanya kebijakan pengembangan tentang nilai budaya lokal daerah | 1 dokumen | 1 | 100,00 | ST |
| | | 11 | Sosialisasi kebijakan pengembangan nilai budaya lokal daerah | 1 dok hasil sosialisasi | 1 | 100,00 | ST |
| | | 12 | Penyusunan Sistem Informasi database Kebudayaan | 1 dokumen | 1 | 100,00 | ST |
| | | 13 | Dialog Kebudayaan | 1 Rumusan dan RKTL hasil dialog | 1 | 100,00 | ST |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Target | | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | Seminar Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal | 1 kegiatan | 1 | 100,00 | ST |
| | | 15 | Terbentuknya lembaga kemitraan perlindungan masyarakat antara pemangku kepentingan | 1 | 1 | 100,00 | ST |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

Keterangan:

- Sangat Tinggi
- Sedang
- Tidak Dapat Diketahui/Tidak Dapat Diolah

**Tabel 2.90**
**Evaluasi Indikator Misi 5**
**RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021**

| Tujuan | Sasaran | | Indikator Target | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Terwujudnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang membuka keterisolasian wilayah | 1 | Pertambahan panjang Jalan desa | 385 Km | NA | NA | ST |
| | | 2 | Pertambahan Jumlah jembatan desa | 490 | NA | NA | NA |
| | | 3 | Pertambahan panjang Jalan dan Jumlah Jembatan | 1483,72 | 1168,14 | 78,73 | T |
| | | 4 | Panjang jalan dalam kondisi baik | 866,2 | 255,93 | 29,55 | SR |
| | | 5 | Jumlah jembatan dalam kondisi baik | 50 unit | NA | NA | NA |
| | | 6 | Jumlah dermaga dan tambatan perahu | 7 unit, 5.800 m | 9 unit | 128,57 | ST |
| | | 7 | Jumlah sarana pelabuhan | 31 | 9 | 29,03 | SR |
| | | 8 | Jumlah fasilitas pelabuhan udara | 1 Bandara | 1 | 100 | ST |
| | Terwujudnya pembangunan Irigasi yang berkualitas | 9 | Panjang saluran irigasi | 2.697 | 40071,48 | 1485,78 | ST |
| | Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan lingkungan | 10 | Jumlah pelanggan, | Fasilitas Air Minum 38 unit, penampungan air limbah 2 unit | NA | NA | NA |
| | | 11 | Tempat penampungan air limbah industri dan RS | 15 unit total 75 unit, 6 desa total 30 desa | NA | NA | NA |
| | | 12 | Jumlah sumber air bersih | 3000 m, total 14.000 m | NA | NA | NA |
| | | 13 | Jumlah rumah pemukiman yang sehat | 1 kegiatan bantuan perumahan swadaya | NA | NA | NA |
| | | 14 | Jumlah perumahan baru | | NA | NA | NA |
| | | 15 | Panjang drainase dan gorong-gorong | 18.950 m. (144.312,645 drainase dalam kondisi baik) | NA | NA | NA |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Target | | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Tahun 2020 | % Capaian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | Panjang Jalan, jumlah jembatan, panjang drainase dan gorong-gorong, rehab jalan, rehab jembatan, panjang jaringan air bersih, raingan air bersih yg direhab,pembangunan jalan setapak/beton, turap/talud/bronjong, rehab talud/turap/bronjong, embangunan pintu air, irigasi | 376 km, 59 unit, 5 km, 14 unit, 18.590 m, 38 unit, 169.798 m, 4.250 m, 14.500 m, 5.800 m, 825 m, 5 paket, 18 DI | NA | NA | NA |
| | Terwujudnya penyediaan listrik dan telekomunikasi | 17 | Jumlah pelanggan | 15.064 | 11902 | 79,01 | T |
| | | 18 | Jumlah sumber air bersih | 15 Unit | NA | NA | NA |
| | | 19 | Jumlah pembangkit mikrohidro | 1 Paket Alat Komunikasi | NA | NA | NA |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

Keterangan:

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sangat Rendah
- Tidak Dapat Diketahui/Tidak Dapat Diolah

APBD



# BAB 3

# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah *(regional financial)* merupakan satu di antara komponen penting dalam pemerintahan daerah yang menunjukkan gambaran kapasitas pembiayaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Fungsi pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan akan berjalan secara optimal, apabila keuangan daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip *"money follow program"*. Komponen penting dalam keuangan daerah antara lain adalah penerimaan daerah *(regional income)*, pengeluaran daerah *(regional spending)*, dan kekayaan daerah *(regional asset)* yang dikelola sendiri, atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Selain itu, keuangan daerah juga meliputi hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, melakukan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan baik, jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan. Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap peraturan-peraturan pengelolaan keuangan telah menuai hasil yang dibuktikan dengan capaian opini WTP Kabupaten Tojo Una-Una atas pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Tahun 2015 sampai saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus memperhatikan isu kesenjangan gender dalam alokasi belanja daerah, untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Pada Tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres)

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas, atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan, yakni kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diproyeksikan pendapatan *(income)*, belanja *(spending)*, dan pembiayaan *(financing)* sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

## 3.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi *(condition)*, potensi *(potential)*, aspirasi *(aspirations)*, dan kebutuhan riil di masyarakat *(real needs)* untuk suatu tahun tertentu.

Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas, atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2016-2020 sebagai dasar untuk menentukan rata- rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021, pasca adanya perubahan dengan dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 (lima) tahun ke depan sampai Tahun 2026. Perkiraan proyeksi ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya Covid-19 yang masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sampai Tahun 2020 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selalu menerapkan prinsip dan pendekatan, serta norma yang berlaku secara universal, yaitu pelaksanaan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan nilai manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Beberapa permasalahan pokok daerah yang masih menjadi pekerjaan utama pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una yakni tingginya tingkat kemiskinan berbasis wilayah pulau dan komunitas adat terpencil (KAT), aksesibiltas wilayah sulit dan infrastruktur antara wilayah kepulauan dan daratan yang timpang, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masih rendah (Indeks Pembangunan Manusia rendah). Untuk itu APBD yang terbatas tersebut, harus dikekola dengan prinsip efektif dan efisien serta fokus pada penyelesaian permasalahan pokok daerah.

#### 3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (berjalan). Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek, serta sub rincian objek pendapatan daerah, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada Pasal 30 sampai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

1) pajak daerah;
2) retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

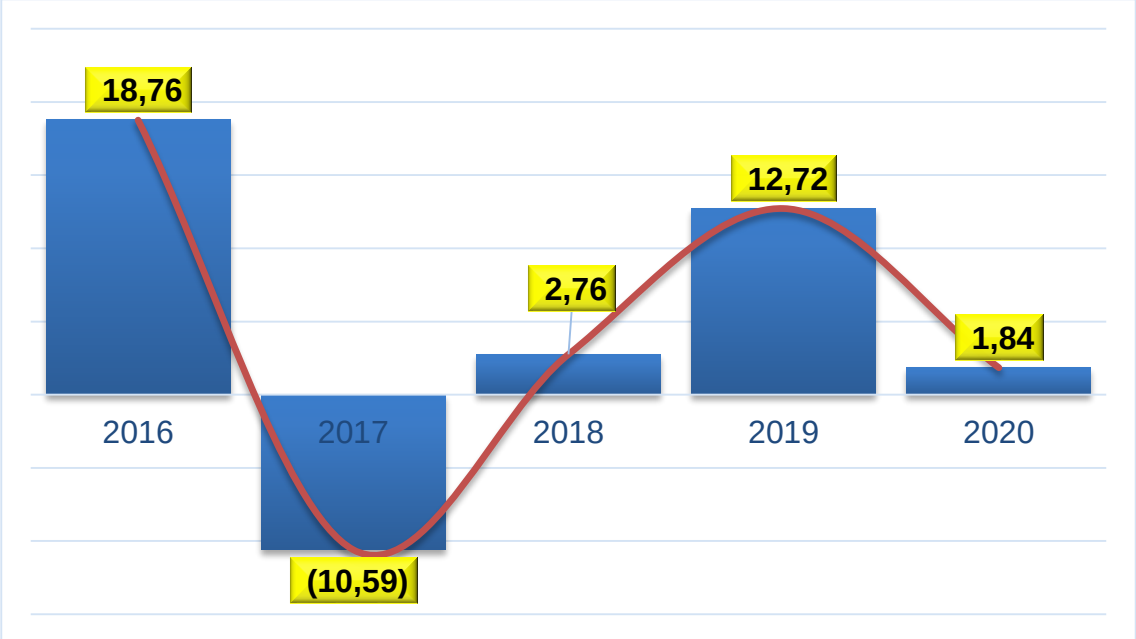
Pendapatan transfer diatur pada pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait meliputi:

1) transfer Pemerintah Pusat;
2) transfer antar-daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada pasal 46 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, sebagai berikut:

1) Hibah;
2) Dana darurat; dan/atau
3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengalami kenaikan, pada periode Tahun 2016-2020 kecuali pada Tahun 2017. Pada Tahun 2016 pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp1.095.471.090.765, terjadi penurunan pada Tahun 2017 menjadi sebesar Rp979.412.717.879, meningkat lagi hingga pada Tahun 2019 menjadi Rp1.134.472.545.889, dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp1.155.403.490.132. Berdasarkan data laju pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi terjadi pada Tahun 2016 yakni sbesar 18,76 persen; menurun pada Tahun 2017 dengan minus (10,59) persen; laju meningkat pada Tahun 2018 sebesar 2,76 persen; dan Tahun 2019 meningkat cukup tinggi sebesar 12,72 persen; dan pada Tahun 2020 meningkat sebesar 1,84 persen. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada periode tersebut adalah sebesar 1,68 persen. Pada Tahun 2020, dimana terjadi pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja ekonomi, juga berdampak pada penerimaan pendapatan daerah yang terkoreksi signifikan. Hal ini menyebabkan proyeksi dan target pendapatan daerah yang direncanakan tidak dapat tercapai. Data pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-una terdapat pada gambar berikut ini.

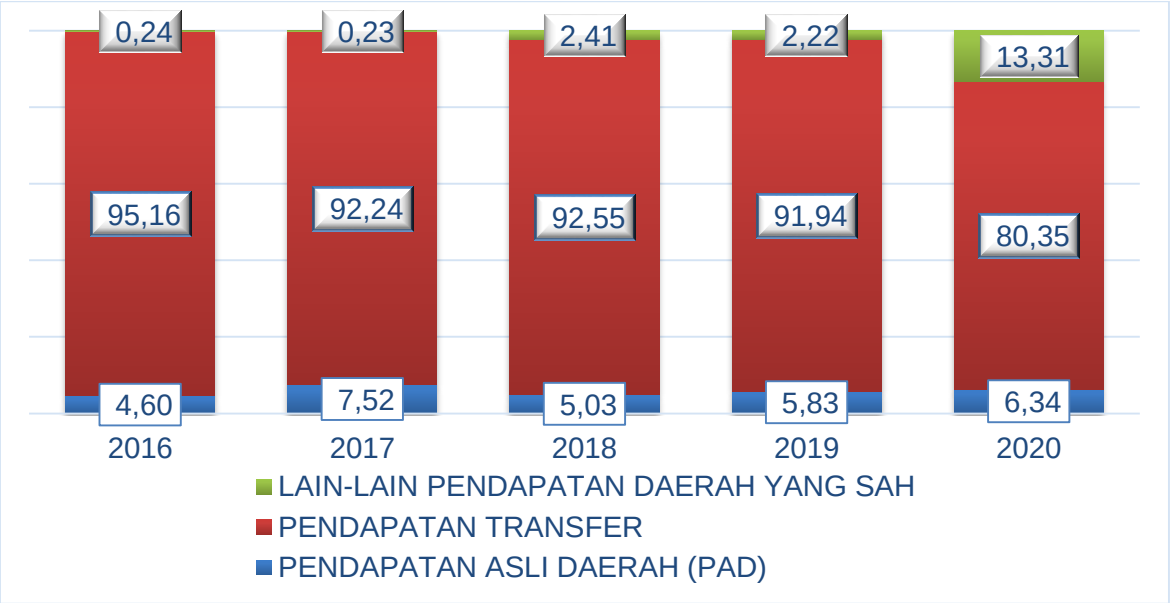



Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

**Gambar 3.1**
**Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una**
**Tahun 2016-2020**

Selanjutnya, berdasarkan proporsi strukrur pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-una periode Tahun 2016-2020, menunjukan tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Tojo una-Una dalam melakukan pembangunan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari proporsi komponen pendapatan terbesar yakni bersumber dari pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pusat. Proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan pada Tahun 2016

sebesar 95,16 persen, hingga Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 80,35 persen. Proporsi terbesar kedua yakni Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 6,34 persen. PAD pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Secara lengkap terdapat pada gambar berikut ini.




Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

**Gambar 3.2**
**Proporsi Struktur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

**Tabel 3.1**
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Kode | URAIAN AKUN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **50.406.846.140** | **73.699.835.626** | **50.653.520.589** | **66.194.369.828** | **73.236.183.337** | **14,06** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 7.341.991.820 | 8.822.550.000 | 9.157.000.000 | 10.768.000.000 | 12.654.600.000 | **14,77** |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 27.138.106.320 | 1.918.100.860 | 2.185.134.147 | 2.299.948.908 | 3.378.860.508 | **(6,71)** |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.100.000.000 | 2.230.303.580 | 2.250.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | **(7,35)** |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 12.826.748.000 | 60.728.881.186 | 37.061.386.442 | 50.926.420.920 | 55.002.722.829 | **94,97** |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.042.432.306.341** | **903.413.882.253** | **931.488.613.787** | **1.043.085.594.561** | **928.356.165.795** | **(2,31)** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.018.838.885.364 | 880.895.312.811 | 910.595.788.550 | 1.021.510.127.541 | 906.780.698.775 | **(2,30)** |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23.593.420.977 | 22.518.569.442 | 20.892.825.237 | 21.575.467.020 | 21.575.467.020 | **(2,13)** |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **2.631.938.284** | **2.299.000.000** | **24.291.980.121** | **25.192.581.500** | **153.811.141.000** | **364,56** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 2.000.000.000 | 1.059.000.000 | 24.291.980.121 | 25.192.581.500 | 29.669.800.000 | **542,07** |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 631.938.284 | 1.240.000.000 | 0 | 0 | 124.141.341.000 | **24,06** |
| | **Jumlah Pendapatan** | **1.095.471.090.765** | **979.412.717.879** | **1.006.434.114.497** | **1.134.472.545.889** | **1.155.403.490.132** | **1,68** |

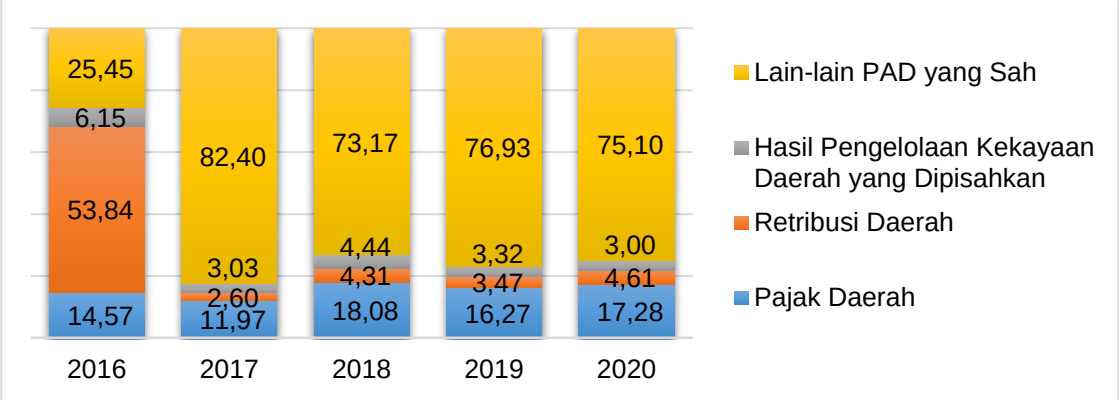
Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

## A. Pendapatan Asli Daerah

Era otonomi daerah saat ini, maka sangat diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pendorong utama *(main driver)* bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan *(governance)*, pembangunan *(development)*, pemberdayaan masyarakat *(community development)*, dan pelayanan publik *(public services)*. Dimana, semakin tinggi PAD, maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat ke daerah, atau semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Pada periode Tahun 2016-2020, tumbuh cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,06 persen.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan total Kabupaten Tojo Una-Una juga relatif mengalami peningkatan, dari sebesar 4.60 persen pada Tahun 2016 menjadi sebesar 6,34 persen Tahun 2020. PAD Tahun 2016 didominasi retribusi sebesar 53,84 persen, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,45 persen. Kurun waktu Tahun 2017-2020, kontribusi retribusi terhadap PAD justru menjadi **sangat kecil**, yaitu sebesar 4,61 persen. PAD pada kurun waktu Tahun 2017-2019 didominasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 75,10 persen pada Tahun 2017; dan pada Tahun 2020 sebesar 75,10 persen. Selanjutnya, sumber PAD yang kedua adalah pajak dengan sumbangan sebesar 11,97 persen pada Tahun 2017 dan Tahun 2020 sebesar 17,28 persen.

Peningkatan PAD yang tinggi merupakan indikator yang cukup baik di masa-masa mendatang yang menunjukkan, bahwa peranan PAD di Kabupaten Tojo Una-Una semakin signifikan. Posisi PAD yang tinggi juga menunjukkan bahwa daerah semakin mandiri secara keuangan dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin menurun. Namun, perkembangan PAD Kabupaten Tojo Una-Una cenderung konstan, atau tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut sebagai dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi, dan juga berdampak pada kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tojo Una-Una ke depan. Data proporsi PAD Kabupaten Tojo Una-una terdapat pada gambar sebagai berikut.




Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

**Gambar 3.3**
**Proporsi Pendapatan Terhadap PAD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

## B. Pendapatan Transfer

Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah dana transfer ke daerah. Dana transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Komponen utama Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Dana perimbangan terdiri atas Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. Sedangkan, Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Setiap jenis dana perimbangan mempunyai peran masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasari oleh adanya kebijakan khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Dana desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan tujuan pembangunan berbasis Desa secara merata dan berkeadilan yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sehingga Pemanfaatan dana perimbangan diserahkan kepada daerah, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat secara efektif dan efisien menggunakan dana tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat *(public services)*.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam pembangunan daerah masih sangat besar. Potensi daerah yang ada belum dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah sampai dengan Tahun 2020 sebesar 80,35 persen. Lebih jauh dilakukan analisis untuk menunjukan bahwa penerimaan dari pendapatan transfer terbesar bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai sebesar 97,68 persen pada Tahun 2020, sedangkan pendapatan transfer antar daerah hanya sebesar 2,32 persen. Gambaran proporsi pendapatan transfer di Kabupaten Tojo Una-Una kurun Tahun 2016-2020 terdapat pada gambar berikut ini.




Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

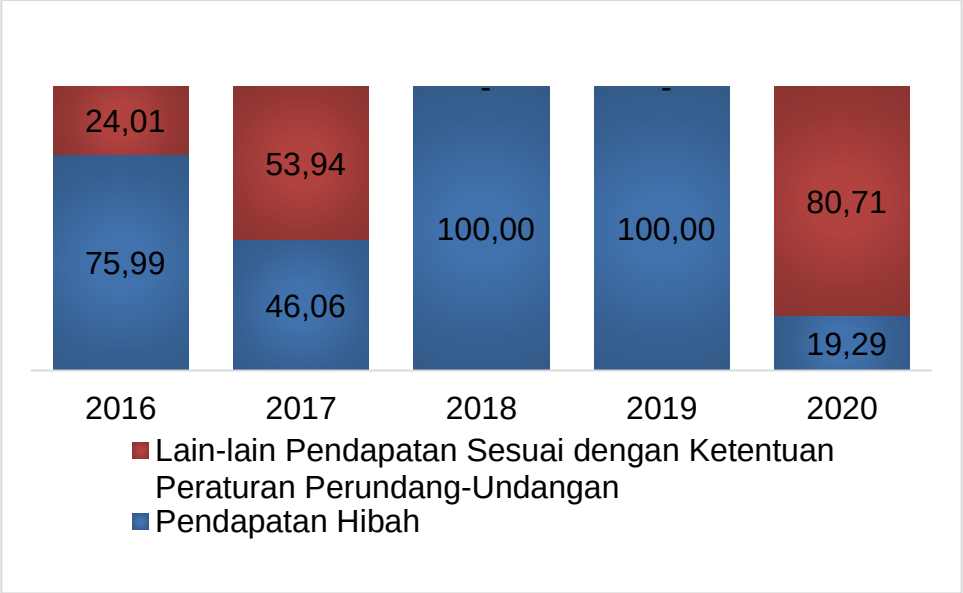
**Gambar 3.4**
**Proporsi Pendapatan Terhadap Pendapatan Transfer**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

## C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas:

- Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri, atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Perkembangan pendapatan daerah dari komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah hingga Tahun 2020 terbesar bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebesar 80,71 persen, sedangkan pendapatan hibah sebesar 19,29 persen, secara lengkap terdapat pada gambar berikut ini.




Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

**Gambar 3.5**
**Proporsi Pendapatan Terhadap Pendapatan Transfer**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

### 3.1.1.2 Belanja Daerah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah *(regional spending)* selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah, digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, yakni belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksaaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta dilengkapi dengan prinsip *equity* atau keadilan bagi semua, agar hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

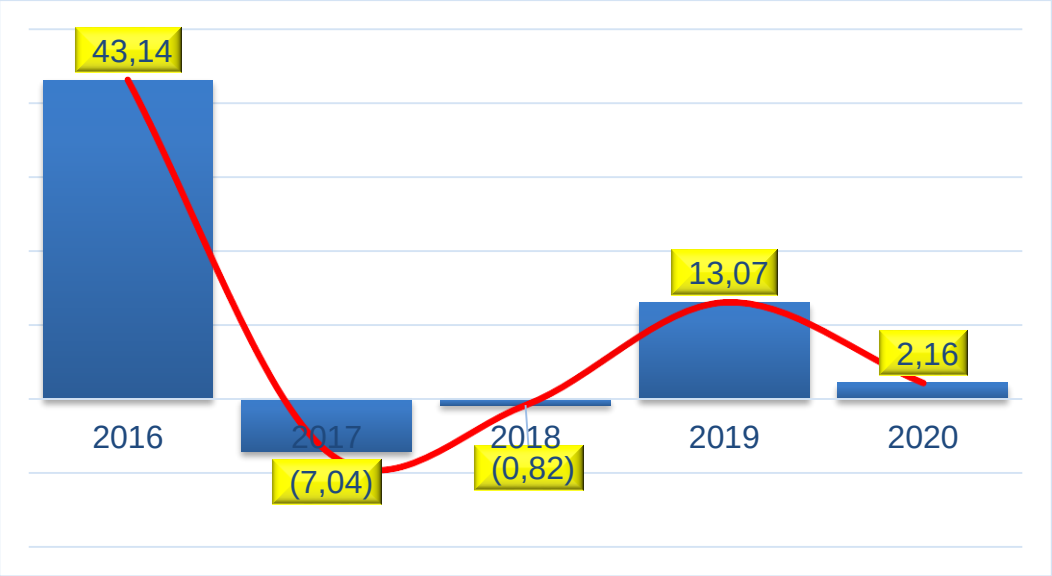
a. **Belanja operasi**
   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b. **Belanja modal**
   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
c. **Belanja tidak terduga**; dan
   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

**d. Belanja transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan umum belanja daerah harus menganut asas keadilan anggaran. Hal ini diartikan bahwa pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul segenap lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan penggunaan pendapatan di dalam belanja secara reprensentatif dan proporsional, agar dalam pemberian pelayanan dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. APBD harus diupayakan dapat memperkuat alokasi anggaran di sektor publik, untuk mencapai target-target tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga dalam penyusunan APBD dilakukan peningkatan secara proporsional.

Laju pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada kurun Tahun 2016- 2020 sebesar 1,10 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebesar 43,14 persen. Pada Tahun 2017-2018, mengalami penurunan atau minus dari periode sebelumnya masing-masing sebesar (-7,04 persen) dan sebesar (-0,82 persen). Pada Tahun 2019 belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una tumbuh sebesar 13,07 persen; dan pada Tahun 2020 sebesar 2,16 persen. Data laju pertumbuhan belanja daerah di Kabupaten Tojo Una-Una terdapat pada gambar berikut ini.




Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

**Gambar 3. 6**
**Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una**
**Tahun 2017-2020**

- Proporsi Belanja operasi terhadap total belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2016 sebesar 57,12 persen; meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 63,15 persen. Komposisi belanja operasi terbesar yakni

Belanja Pegawai pada Tahun 2016 sebesar 59,52 persen; sedikit menurun pada Tahun 2020 sebesar 55,95 persen. Proporsi belanja barang dan jasa terbesar kedua sebesar 38,74 persen Tahun 2016 hingga Tahun 2020 sebesar 36,55 persen. Proporsi terbesar ketiga adalah belanja hibah sebesar 7,20 persen. Selanjutnya, masing-masing belanja subsidi sebesar 0,24 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 0,01 persen;

- Proporsi belanja modal dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Dimana pada Tahun 2016 sebesar 29,50 persen; menurun hingga Tahun 2018 sebesar 17,68 persen; kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 23,49 persen; dan kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 20,76 persen;
- Proporsi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2016 sebesar 0,22 persen menurun hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 0,08 persen.
- Proporsi Belanja Transfer dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari Tahun 2016 sebesar 13,16 persen meningkat sampai dengan Tahun 2020 menjadi sebesar 16,00 persen.

**Tabel 3.2**
**Proporsi Realisasi Klasifikasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| Kode | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **57,12** | **61,53** | **65,96** | **60,36** | **63,15** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 59,52 | 60,01 | 64,11 | 62,56 | 55,99 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38,74 | 37,54 | 33,67 | 35,54 | 36,55 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,29 | 0,24 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1,64 | 1,43 | 1,33 | 1,24 | 7,20 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 0,03 | 0,97 | 0,85 | 0,38 | 0,01 |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **29,50** | **22,10** | **17,68** | **23,49** | **20,76** |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **0,22** | **0,23** | **0,20** | **0,17** | **0,08** |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **13,16** | **16,14** | **16,16** | **15,97** | **16,00** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2,36 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,83 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 97,64 | 99,36 | 99,32 | 99,28 | 99,17 |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

**Tabel 3. 3**
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| | Uraian Akun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Belanja** | | | | | | |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **634.654.990.025** | **635.594.873.637** | **675.792.687.092** | **699.241.703.744** | **747.348.433.610** | **4,21** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 377.719.489.430 | 381.422.227.163 | 433.218.547.519 | 437.430.110.234 | 418.441.506.301 | 2,80 |
| 5.1.02 | Belanja Barang Dan Jasa | 245.850.499.911 | 238.616.046.474 | 227.543.739.573 | 248.505.093.510 | 273.171.627.309 | 2,89 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 500.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 2.000.000.000 | 1.800.000.000 | 129,17 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 10.385.000.684 | 9.116.600.000 | 9.005.400.000 | 8.639.000.000 | 53.830.300.000 | 126,40 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 200.000.000 | 6.140.000.000 | 5.725.000.000 | 2.667.500.000 | 105.000.000 | 703,44 |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **327.800.612.920** | **228.308.653.680** | **181.117.103.593** | **272.130.810.747** | **245.662.796.317** | **(2,62)** |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **2.500.000.000** | **2.400.000.000** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **1.000.000.000** | **(17,67)** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000 | 2.400.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | (17,67) |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **146.213.202.840** | **166.683.258.701** | **165.611.727.060** | **185.033.384.864** | **189.392.260.205** | **6,86** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.448.009.814 | 1.069.865.086 | 1.134.213.415 | 1.329.999.999 | 1.565.000.000 | (7,01) |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 142.765.193.026 | 165.613.393.615 | 164.477.513.645 | 183.703.384.865 | 187.827.260.205 | 7,31 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.111.168.805.785** | **1.032.986.786.018** | **1.024.521.517.745** | **1.158.405.899.355** | **1.183.403.490.132** | **1,84** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **-15.697.715.020** | **-53.574.068.139** | **-18.087.403.248** | **-23.933.353.466** | **-28.000.000.000** | **56,09** |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

### 3.1.1.3 Belanja Daerah Daerah

Pembiayaan daerah *(regional financing)* ditetapkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una kurun waktu Tahun 2016-2020 terdapat dilihat pada tabel 3.11. Sumber Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Selama kurun Tahun 2016-2020 SiLPA berfluktuasi turun-naik Tahun 2016-2017 tren menurun, namun dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 tren meningkat. SiLPA yang besar menunjukkan kurangnya kecermatan dan ketepatan dalam perhitungan dalam perencanaan pendapatan dan belanja. Rasionalitasnya diharapkan pada masa mendatang SiLPA semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal dilakukan kepada BUMD Bank BPD Sulteng dan PDAM sebesar Rp2.000.000.000,00. Data mengenai komponen pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayan Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| | URAIAN AKUN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **52.822.331.528,44** | **53.574.068.138,71** | **42.675.489.185,00** | **22.133.353.467,00** | **30.000.000.000,00** | **(7,88)** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 52.822.331.528,44 | 53.574.068.138,71 | 42.675.489.185,00 | 22.133.353.467,00 | 30.000.000.000,00 | **(7,88)** |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | **-** |
| 6.1.03 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | - | - | - | - | **-** |
| 6.1.04 | Penerimaan pinjaman daerah | - | - | - | - | - | **-** |
| 6.1.05 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - | - | - | - | - | **-** |
| 6.1.06 | Penerimaan piutang daerah | - | - | - | - | - | **-** |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **52.822.331.528,44** | **53.574.068.138,71** | **42.675.489.185,00** | **22.133.353.467,00** | **30.000.000.000,00** | **(7,88)** |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **2.000.000.000,00** | **-** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **-** |
| 6.2.01 | Pembentukan dana cadangan | - | - | - | - | - | **-** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | **(25,00)** |
| 6.2.03 | Pembayaran pokok utang | - | - | - | - | - | **-** |
| 6.2.04 | Pemberian pinjaman daerah | - | - | - | - | - | **-** |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | **(25,00)** |
| | **Pembiayaan Netto** | **50.822.331.528,44** | **53.574.068.138,71** | **40.675.489.185,00** | **20.133.353.467,00** | **28.000.000.000,00** | **(7,52)** |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

### 3.1.2 Neraca Daerah

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan *(decision making)* dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian, Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. **Analisis Rasio likuiditas** dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. **Analisis solvabilitas** dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Dan, **analisis rasio aktivitas** dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Pada data Tabel 3.5 berikut disajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama 5 (lima) tahun terakhir.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Perkembangan neraca daerah, pada sisi aset, selama periode Tahun 2016-2020 terjadi penambahan dengan pertumbuhan yang variatif. Pertumbuhan asset rata-rata per tahun adalah sebesar 8,85 persen. Pertumbuhan di atas angka rata-rata tahunan terjadi pada Tahun 2017 tumbuh sebesar 19,77 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah pada Tahun 2020 hanya sebesar 2,71 persen. Komponen asset terdiri dari asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya. Pada asset lancar, terdapat kecenderungan menurun setiap tahun. Rata-

rata pertumbuhan asset lancar pada periode Tahun 2016-2020 adalah sebesar minus (7,14 persen) per tahun. Pada Tahun 2017 total aset lancar sebesar Rp78.553.348.208,27 meningkat dari tahun sebelumnya dari sebesar hanya Rp78.298.228.173,48. Selanjutnya, pada Tahun 2018 aset lancar Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp71.508.159.185,07; dan hingga Tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp57.888.057.516,54.

Selanjutnya untuk komponen investasi jangka panjang, pada periode yang sama, untuk sub komponen investasi jangka panjang non permanen cenderung stabil. Dimana, rata-rata pertumbuhan per tahun minus (46,66 persen). Sementara itu, pada sub komponen investasi jangka panjang permanen terdapat pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,65 persen.

Komponen asset tetap, selama kurun waktu Tahun 2016-2020 tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,68 persen. kemudian, komponen asset lainnya juga tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 17,67 persen. Pertumbuhan aset yang positif memberikan indikasi, bahwa Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi yang **cukup baik**, jika dikelola secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Kewajiban dalam Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas, atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2020 dengan rata-rata sebesar 732,47 persen. Ini berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat besar. Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una keseluruhan merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan untuk kewajiban jangka panjang nihil atau tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Peningkatan kewajiban dengan pihak ketiga yang terjadi pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020 sebenarnya bukanlah merupakan suatu kejelekan (keburukan) dalam pengelolaan keuangan daerah, selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan sebesar-besar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat *(society welfare)*, maka penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat memberikan *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi dan dinamika ini tentunya akan memberikan dampak positif *(positif impact)* pada perkembangan berbagai aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan dunia usaha (swasta) dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah setempat.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami rata-rata

pertumbuhan sebesar 5,74 persen. Ini berarti bahwa modal Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan selalu meningkat.

Sementara itu, secara keseluruhan perkembangan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengalami pertumbuhan positif seiring dengan bergerak dan berjalan berbagai aktivitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Kondisi inilah yang mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas usaha yang dilaksanakan kelompok usaha kecil, menengah dan besar, serta usaha-usaha produkif masyarakat lainnya yang semakin berkembang di Kabupaten Tojo Una-Una.

Selanjutnya, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain: rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek, dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Formulanya, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Formulanya, yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

**Tabel 3.5**
**Analisis Rasio Keuangan Daerah (Rp juta) Kabupaten Tojo Una-Una**
**Tahun 2016-2020**

| Rasio | Rumus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio Likuiditas** | Aset Lancar | 78.298,23 | 78.553,35 | 71.508,16 | 66.755,58 | 57.888,06 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 478,19 | 14.243,73 | 20.895,21 | 21.762,41 | 21.839,11 |
| | Rasio Lancar | 163,74 | 5,51 | 3,42 | 3,07 | 2,65 |
| | Aset Lancar Persediaan | 7.778,79 | 16.415,33 | 4.477,05 | 8.888,37 | 11.401,27 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 478,19 | 14.243,73 | 20.895,21 | 21.762,41 | 21.839,11 |
| | Rasio Cepat | 16,27 | 1,15 | 0,21 | 0,41 | 0,52 |
| | | | | | | |
| **Rasio Solvabilitas** | Total Hutang | 478,19 | 14.243,73 | 20.895,21 | 21.762,41 | 21.839,11 |
| | Total Aset | 1.407.279,35 | 1.685.468,49 | 1.769.612,01 | 1.909.554,73 | 1.961.336,93 |
| | Rasio Total Hutang (%) | 0,03 | 0,85 | 1,18 | 1,14 | 1,11 |
| | Total Hutang | 478,19 | 14.243,73 | 20.895,21 | 21.762,41 | 21.839,11 |
| | Total Ekuitas | 1.552.573,08 | 1.671.224,76 | 1.748.716,81 | 1.887.792,31 | 1.939.497,82 |

| Rasio | Rumus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rasio Hutang/Modal (%) | 0,03 | 0,85 | 1,19 | 1,15 | 1,13 |

Sumber: LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (Diolah kembali)

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menjelaskan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya, untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu Tahun 2016-2020 relatif tinggi. Ini berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat memenuhi kewajiban **jatuh tempo**. Rasio lancar pada Tahun 2016 mencapai sebesar 163,74. Ini berarti bahwa aset lancar peme-rintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 163 kali lipat apabila dibanding-kan dengan kewajiban jatuh tempo. Namun, terus menurun hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 2,65. Nilai rasio ini masih berada di atas angka 1, artinya **sangat baik**. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun, apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio cepat lebih akurat dibandingkan rasio lancer, karena telah memper-timbangkan persediaan dalam perhitungan. Angka rasio di atas 1 berarti menunjuk-kan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajiban **jatuh tempo**. Berdasarkan perhitungan pada Analisis Rasio Neraca Daerah, diperoleh nilai rasio cepat neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang fluktuatif.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemam-puan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*), dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedang-kan rasio hutang terhadap ekuitas, mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar, atau sebaliknya. Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 sebesar 1,11 persen. Artinya sebesar Rp1,13 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

**Tabel 3.6**
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **ASET** | | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 52.849.181.801,57 | 37.472.608.665,19 | 6.206.403.092,12 | 31.079.213.315,41 | 32.178.363.686,61 | 72,94 |
| Kas Setara Kas | | - | 32.000.000.000,00 | - | - | (25,00) |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 22.664,00 | 4.208.948,00 | 468.941,00 | 207.682.663,00 | - | 15.617,45 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 7.073.000,00 | 7.073.000,00 | 10.486.783,00 | 13.880.000,00 | - | (4,84) |
| Kas BLUD | 42.701.954,00 | 381.028.036,00 | 6.185.889.402,00 | 1.000.377.221,80 | 2.464.236.286,55 | 594,57 |
| Kas di Bendahara FKTP | 706.218.742,14 | 502.319.308,00 | 514.847.182,00 | 887.174.833,00 | 551.990.938,00 | 2,04 |
| Kas di Bendahara BOS | | | | - | 653.150.228,00 | 25,00 |
| Kas Lainnya | 891.390.374,00 | 1.444.458.851,00 | 1.012.764.022,00 | 820.904.244,00 | 21.278.769,00 | (21,05) |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | - | - | - | - | |
| Piutang Pajak | 13.943.043.821,32 | 20.322.467.829,32 | 12.029.182.817,00 | 2.674.275.579,00 | 2.998.620.367,00 | (15,17) |
| Penyisihan Piutang Pajak | (347.586.784,05) | (508.446.290,05) | (796.953.184,05) | (917.729.705,04) | (1.146.349.189,06) | 35,77 |
| Piutang Pajak Netto | 13.595.457.037,27 | 19.814.021.539,28 | 11.232.229.632,96 | 1.756.545.873,96 | 1.852.271.177,94 | (19,12) |
| Piutang Retribusi | - | - | 9.280.390.738,00 | - | - | |
| Penyisihan Piutang Retribusi | - | - | (138.012,50) | - | - | |
| Piutang Retribusi Netto | - | - | 9.280.252.725,50 | - | - | |
| Belanja Dibayar Dimuka | - | - | - | - | - | |
| Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | - | - | - | 7.833.404.876,00 | 2.537.052.174,00 | (67,61) |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah | - | - | - | (150.945.789,00) | (22.075.144,00) | (85,38) |
| Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | - | - | - | 7.682.459.087,00 | 2.514.977.030,00 | (67,26) |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | - | - | - | 11.976.027.802,00 | 2.233.736.735,00 | (81,35) |
| Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | - | - | - | - | - | |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto | - | - | - | 11.976.027.802,00 | 2.233.736.735,00 | (81,35) |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | 1.673.252.631,00 | 3.512.070.740,00 | 109,89 |
| Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | - | - | |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto | - | - | - | 1.673.252.631,00 | 3.512.070.740,00 | 109,89 |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | - | - | - | - | - | |
| Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | - | - | - | - | - | |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto | - | - | - | - | - | |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto | - | - | - | - | - | |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 974.738.892,50 | 940.978.892,50 | 802.158.330,00 | 363.646.224,00 | 477.524.327,00 | (10,39) |
| Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | (675.827.809,00) | (939.658.892,00) | (801.113.329,50) | (168.772.488,50) | (291.226.723,50) | 4,48 |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto | 298.911.083,50 | 1.320.000,50 | 1.045.000,50 | 194.873.735,50 | 186.297.603,50 | 4.605,85 |
| Piutang Lainnya | 4.484.429.746,00 | 4.795.160.495,00 | 2.550.688.314,99 | 2.573.552.234,00 | 2.329.497.084,00 | (12,12) |
| Penyisihan Piutang Lainnya | (2.355.951.361,00) | (2.284.184.037,00) | (1.963.968.608,00) | (1.998.732.693,00) | (2.011.085.793,00) | (3,67) |
| Piutang Lainnya Netto | 2.128.478.385,00 | 2.510.976.458,00 | 586.719.706,99 | 574.819.541,00 | 318.411.291,00 | (26,32) |
| Persediaan | 7.778.793.132,00 | 16.415.333.402,30 | 4.477.052.697,00 | 8.888.367.237,67 | 11.401.273.030,94 | 41,28 |
| **Jumlah Aset Lancar** | 78.298.228.173,48 | 78.553.348.208,27 | 71.508.159.185,07 | **66.755.578.185,34** | **57.888.057.516,54** | (7,14) |
| | | | | | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | | |
| Investasi Nonpermanen | | | | | | |
| Pinjaman Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| Investasi dalam Surat Utang Negara | - | - | - | - | - | |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | - | - | - | - | - | |
| Investasi Nonpermanen | 964.069.408,22 | 774.811.500,22 | 560.921.502,22 | - | - | |
| Dana Bergulir | | | | 339.861.547,22 | 1.482.589.690,22 | 336,23 |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih | | | | - | (1.482.589.690,22) | |
| **Jumlah Investasi Nonpermanen** | **964.069.408,22** | **774.811.500,22** | **560.921.502,22** | **339.861.547,22** | - | (46,66) |
| Investasi Permanen | | | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 40.397.445.877,54 | 40.663.955.188,02 | 40.134.394.676,02 | 34.963.571.082,09 | 42.880.537.719,07 | 2,28 |
| Investasi Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| **Jumlah Investasi Permanen** | **40.397.445.877,54** | **40.663.955.188,02** | **40.134.394.676,02** | **34.963.571.082,09** | **42.880.537.719,07** | 2,28 |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **41.361.515.285,76** | **41.438.766.688,24** | **40.695.316.178,24** | **35.303.432.629,31** | **42.880.537.719,07** | 1,65 |
| | | | | | | |
| ASET TETAP | | | | | | |
| Tanah | 145.106.828.816,00 | 171.941.789.247,00 | 178.471.008.953,00 | 182.715.782.480,00 | 183.796.330.381,00 | 6,32 |
| Peralatan dan Mesin | 320.158.204.452,07 | 348.169.282.496,80 | 386.498.175.446,80 | 436.834.715.879,80 | 478.200.063.738,80 | 10,56 |
| Gedung dan Bangunan | 495.894.329.064,24 | 545.371.862.617,25 | 646.212.257.261,96 | 711.719.444.196,69 | 791.940.397.441,69 | 12,47 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.036.998.447.470,43 | 1.142.765.776.598,00 | 1.246.000.698.419,28 | 1.349.492.293.302,28 | 1.433.064.785.206,28 | 8,43 |
| Aset Tetap Lainnya | 28.033.547.390,00 | 31.684.265.502,00 | 29.711.120.229,00 | 31.562.358.009,00 | 49.804.264.622,00 | 17,71 |
| Kontruksi dalam Pengerjaan | 51.672.673.859,00 | 24.947.751.616,00 | 15.990.779.968,73 | 56.203.639.901,00 | 29.884.271.190,00 | 29,26 |
| Akumulasi Penyusutan | (670.584.683.992,00) | (740.709.967.999,00) | (873.617.049.549,00) | (1.003.723.353.418,00) | (1.145.674.735.832,80) | 14,36 |
| **Jumlah Aset Tetap** | **1.407.279.347.059,74** | **1.524.170.760.078,05** | **1.629.266.990.729,77** | **1.764.804.880.350,77** | **1.821.015.376.746,97** | 6,68 |
| | | | | | | |
| DANA CADANGAN | | | | | | |
| Dana Cadangan | - | - | - | - | - | |
| **Jumlah Dana Cadangan** | - | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASET LAINNYA | | | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | |
| Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | |
| Tagihan Penjualan Angsuran Netto | - | - | - | - | - | |
| Tuntutan Ganti Rugi | 225.256.382,00 | 223.418.132,00 | 747.891.627,19 | 8.681.728.173,19 | 11.211.435.315,45 | 330,97 |
| Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi | - | - | - | - | - | |
| Tuntutan Ganti Rugi Netto | 225.256.382,00 | 223.418.132,00 | 747.891.627,19 | 8.681.728.173,19 | 11.211.435.315,45 | 330,97 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | - | - | - | - | |
| Aset Tak Berwujud | 1.395.739.000,00 | 2.404.962.480,00 | 2.851.687.480,00 | 2.889.352.954,00 | 2.889.352.954,00 | 23,05 |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud | - | (165.597.368,67) | (306.839.233,67) | (450.075.740,67) | (594.543.386,84) | 54,69 |
| Aset Tak Berwujud Netto | 1.395.739.000,00 | 2.239.365.111,33 | 2.544.848.246,33 | 2.439.277.213,33 | 2.294.809.567,16 | 16,00 |
| Aset Lain-Lain | 24.491.185.114,01 | 38.842.836.253,51 | 24.848.806.240,85 | 31.569.831.910,85 | 26.046.713.667,01 | 8,03 |
| **Jumlah Aset Lainnya** | **26.112.180.496,01** | **41.305.619.496,84** | **28.141.546.114,37** | **42.690.837.297,37** | **39.552.958.549,62** | 17,67 |
| | | | | | | |
| **JUMLAH ASET** | **1.553.051.271.014,99** | **1.685.468.494.471,40** | **1.769.612.012.207,45** | **1.909.554.728.462,79** | **1.961.336.930.532,20** | 8,85 |
| | | | | | | |
| **KEWAJIBAN** | | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 31.130.023,00 | 11.741.821,00 | 32.159.018,72 | 234.369.845,72 | 180.883.666,72 | 179,39 |
| Utang Bunga | - | - | - | | | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Diterima Dimuka | - | - | - | - | - | |
| Utang Beban | 432.667.300,00 | 3.233.299.765,00 | 4.524.581.757,00 | 3.628.557.104,00 | 3.865.800.448,60 | 168,49 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 14.392.000,00 | 10.998.692.856,00 | 16.338.464.608,00 | 17.899.487.243,00 | 17.792.430.236,00 | 19.094,94 |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **478.189.323,00** | **14.243.734.442,00** | **20.895.205.383,72** | **21.762.414.192,72** | **21.839.114.351,32** | 732,47 |
| | | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | |
| Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan | - | - | - | - | - | |
| Utang Dalam Negeri - Obligasi | - | - | - | - | - | |
| Premiun (Diskonto) Obligasi | - | - | - | - | - | |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | - | - | - | - | - | |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | - | - | - | **-** | **-** | |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **478.189.323,00** | **14.243.734.442,00** | **20.895.205.383,72** | **21.762.414.192,72** | **21.839.114.351,32** | 732,47 |
| | | | | | | |
| **EKUITAS** | | | | | | |
| EKUITAS | 1.552.573.081.691,99 | 1.671.224.760.029,40 | 1.748.716.806.823,73 | 1.887.792.314.270,07 | 1.939.497.816.180,88 | 5,74 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **1.552.573.081.691,99** | **1.671.224.760.029,40** | **1.748.716.806.823,73** | **1.887.792.314.270,07** | **1.939.497.816.180,88** | 5,74 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKUITAS** | **1.553.051.271.014,99** | **1.685.468.494.471,40** | **1.769.612.012.207,45** | **1.909.554.728.462,79** | **1.961.336.930.532,20** | 6,03 |

Sumber: LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020

## 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir, dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran, untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas kerja aparatur.

Analisis selanjutnya adalah realisasi belanja untuk penenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Perkembangan realisasi belanja pemenuhan aparatur selama periode tersebut cenderung berfluktuatif. Realisasi pemenuhan belanja aparatur pada tahun 2016 sebesar Rp564.179.536.500, Selanjutnya di tahun 2017 menurun Rp502.826.473.763,00, hingga tahun 2019 meningkat menjadi Rp596.297.511.820,00 (tertinggi dalam 5 tahun terakhir), mengalami penurunan ditahun 2020 Rp558.451.930.593,00. Rincian kebutuhan belanja pemenuhan aparatur terbesar masih Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2016 sebesar Rp246.084.403.768,00 dan tahun 2020 sebesar Rp304.055.537.687,00 atau sebesar 54,45 persen. Kemudian terbesar kedua untuk Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) tahun 2016 sebesar Rp105.171.979.758,00, dan tahun 2020 sebesar Rp88.193.814.994,00 atau sebesar 15,79 persen. Belanja perjalanan dinas terbesar ditahun 2016-2019, namun menurun signifikan ditahun 2020 karena pandemi Covid-19 dimana kebijakan pembatasan aktivitas perjalanan dibatasi. Selanjutnya Belanja Tambahan Penghasilan PNS hingga tahun 2020 sebesar Rp44.267.182.832,00 atau 7,93 persen. Belanja yang lain yang cukup tinggi adalah Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp32.171.530.500,00, dan Belanja makanan dan minuman pegawai sebesar Rp11.167.219.790,00. Belanja yang mengalami peningkatan yang signifikan ditahun 2020 adalah Belanja Premi Kesehatan yang mencapai Rp18.831.019.697,00 atau sebesar 3,37 persen. Sebaliknya belanja yang terendah adalah Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Belanja pakaian dinas dan atributnya dan beberapa belanja lainnya. Lebih lengkap tersaji pada tabel 3.7 berikut ini.

**Tabel 3.7**
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 246.084.403.768,00 | 239.706.766.887,00 | 286.083.249.531,00 | 304.819.941.461,00 | 304.055.537.687,00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 41.634.856.120,00 | 40.241.996.800,00 | 25.339.901.527,00 | 39.555.087.562,00 | 44.267.182.832,00 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 1.477.270.000,00 | 2.367.784.000,00 | 3.550.000.000,00 | 3.528.800.000,00 | 3.528.750.000,00 |
| 4 | Belanja pemungutan Pajak Daerah | 1.200.803.988,00 | 337.469.410,00 | 484.750.272,00 | 861.463.097,00 | - |
| 5 | Belanja Honorarium PNS | 30.132.099.000,00 | 29.680.800.000,00 | 13.596.052.500,00 | 12.711.485.000,00 | 11.085.450.000,00 |
| 6 | Belanja Honorarium Non PNS | 32.554.225.000,00 | 39.457.512.000,00 | 38.324.372.500,00 | 37.604.470.000,00 | 32.171.530.500,00 |
| 7 | Belanja Uang Lembur | 2.612.623.750,00 | 2.368.238.425,00 | 102.030.000,00 | 497.474.459,00 | 649.705.210,00 |
| 8 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 459.378.650,00 | 736.238.430,00 | 538.533.800,00 | 499.113.500,00 | 407.626.500,00 |
| 9 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 1.413.869.000,00 | 539.770.000,00 | 2.535.112.670,00 | 1.756.723.550,00 | 314.165.800,00 |
| 10 | Belanja premi asuransi kesehatan | 845.357.235,00 | 204.351.850,00 | 5.988.377.845,00 | 7.291.932.480,00 | 18.831.019.697,00 |
| 11 | Belanja makanan dan minuman pegawai | 19.479.794.804,00 | 18.454.930.540,00 | 15.331.742.926,00 | 17.187.304.151,00 | 11.167.219.790,00 |
| 12 | Belanja pakaian dinas dan atributnya | 372.220.000,00 | 372.118.000,00 | 575.633.000,00 | 959.272.640,00 | 175.400.000,00 |
| 13 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 1.037.380.000,00 | 874.478.000,00 | 766.625.000,00 | 1.247.006.982,00 | 382.394.200,00 |
| 14 | Belanja perjalanan dinas | 79.703.275.427,00 | 68.251.643.514,00 | 80.134.088.773,00 | 79.896.812.000,00 | 43.222.133.383,00 |
| 15 | Belanja perjalanan pindah tugas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Belanja Pemulangan Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) | 105.171.979.758,00 | 59.232.375.907,00 | 59.153.265.986,42 | 87.880.624.938,00 | 88.193.814.994,00 |
| **TOTAL** | | **564.179.536.500,00** | **502.826.473.763,00** | **532.503.736.330,42** | **596.297.511.820,00** | **558.451.930.593,00** |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

Data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tojo Una-Una selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan melalui data proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini, dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini terdapat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.8**
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahun anggaran 2016 | 564.179.536.500,00 | 1.113.168.805.785,44 | 50,68 |
| 2 | Tahun anggaran 2017 | 502.826.473.763,00 | 1.032.986.786.018,44 | 48,68 |

| No | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tahun anggaran 2018 | 532.503.736.330,42 | 1.026.521.517.745,00 | 51,87 |
| 4 | Tahun anggaran 2019 | 596.297.511.820,00 | 1.160.405.899.355,00 | 51,39 |
| 5 | Tahun anggaran 2020 | 558.451.930.593,00 | 1.185.403.490.132,00 | 47,11 |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, meski secara nominal belanja aparatur tersebut masih cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 proporsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 50,68 persen dari total realisasi pengeluaran daerah. Pada Tahun 2018 menjadi sebesar 51,87 persen; dan turun kembali pada tahun selanjutnya menjadi sebesar 51,97 persen Tahun 2019; dan pada Tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 47,11 persen. Pada Tahun 2020 adalah proporsi paling rendah selama lima tahun terakhir. Rata-rata persentase belanja aparatur dalam pengeluaran selama Tahun 2016-2020 mencapai sebesar 49,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan proprosi belanja aparatur yang cenderung menurun, alokasi belanja untuk program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian kinerja daerah semakin besar. Hal ini mengindikasikan arah kebijakan dan pelaksanaan anggaran lebih memprioritaskan pada program-program prioritas pembangunan daerah.

**Tabel 3.9**
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Belanja** | | | | | |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 246.084.403.768,00 | 239.706.766.887,00 | 286.083.249.531,00 | 304.819.941.461,00 | 304.055.537.687,00 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 1.477.270.000,00 | 2.367.784.000,00 | 3.550.000.000,00 | 3.528.800.000,00 | 3.528.750.000,00 |
| 3 | Belanja Bunga | - | - | - | - | |
| 4 | Belanja Bagi Hasil | 356.669.491,00 | 450.820.579,00 | 1.132.391.071,96 | 1.197.815.530,00 | 1.256.918.764,46 |
| 5 | Belanja Honorarium PNS | 30.132.099.000,00 | 29.680.800.000,00 | 13.596.052.500,00 | 12.711.485.000,00 | 11.085.450.000,00 |
| 6 | Belanja Honorarium Non PNS | 32.554.225.000,00 | 39.457.512.000,00 | 38.324.372.500,00 | 37.604.470.000,00 | 32.171.530.500,00 |
| 7 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 459.378.650,00 | 736.238.430,00 | 538.533.800,00 | 499.113.500,00 | 407.626.500,00 |
| 8 | Belanja Jasa Medik | 16.288.921.927,00 | 3.130.549.050,00 | 5.941.221.784,00 | 60.000.000,00 | 189.015.360,00 |
| 9 | Belanja Barang Dana BOS | 3.536.481.500,00 | 16.773.748.886,00 | 17.229.473.394,00 | 17.989.416.373,00 | 18.831.019.697,00 |
| **B** | **Pengeluaran Pembiayaan** | | | | | |
| 1 | Pembentukan dana cadangan | 22.156.630,00 | - | - | - | - |
| 2 | Penyertaan Modal Daerah | - | - | - | - | 1.600.000.000,00 |
| 3 | Pembayaran pokok utang | - | - | - | - | - |

| No | Uraian | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pemberian pinjaman daerah | - | - | - | - | - |
| **Total** | | **330.911.605.966,00** | **332.304.219.832,00** | **366.395.294.580,96** | **378.411.041.864,00** | **373.125.848.508,46** |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

Dalam analisis belanja daerah hal yang perlu untuk diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut adalah belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis ini diperlukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikatadalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Pada tabel 3.9 di atas disajikan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja gaji dan tunjangan sebesar 5,76. Secara umum rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama pada periode tersebut sebesar 0,17 persen.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud-kan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran pokok hutang.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pem-biayaan di masa datang untuk penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Data surplus/defisit riil APBD Kabupaten Tojo Una-Una selama periode Tahun 2018-2020 terdapat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.10**
**Defisit Riil Anggaran**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No | Uraian | Tahun 2018 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 1.006.434.114.497 | 1.134.472.545.889 | 1.155.403.490.132 |
| | Dikurangi realisasi | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 1.024.521.517.745 | 1.158.405.899.355 | 1.183.403.490.132 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| | **Defisit riil** | **(20.087.403.248,00)** | **(25.933.353.466,00)** | **(30.000.000.000,00)** |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

Defisit Kabupaten Tojo Una-Una terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan defisti rill yang terjadi cukup besar dan cenderung meningkat. Pada Tahun 2018 sebesar Rp20.087.403.248,00, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp30.000.000.000. Dan komposisi penutup defisit rill keuangan Kabupaten Tojo Una-Una 100 persen bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

**Tabel 3.11**
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2020**

| No | Uraian | Tahun 2018 (%) | Tahun 2019 (%) | Tahun 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 |

Sumber: LRA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020, (dianalisis 2021)

## 3.3 Kerangka Pendanaan

Menganut prinsip perencanaan *(planning)* dan penganggaran *(budgeting)* yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncana-kan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelak-sanaan tugas pokok dan fungsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanan dan anggaran, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mendanai program-program pembangunan.

Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program pembangunan yang dibiayai akan memberi dampak positif *(positive impact)* dan berdaya ungkit *(leverage)* yang siginifikan dalam menyelesaikan dan menanggulangi berbagai permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, dan proyeksi pembiayaan untuk jangka menengah perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud, serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1, bahwa Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah, serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menge-tahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kurun waktu Tahun 2021-2026. Kerangka pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah pada Tahun 2021 merupakan nilai yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021, dan nilai pada Tahun 2022 merupakan nilai yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una. Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi keuangan Kabupaten Tojo Una-Una pada periode ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kondisi ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una ditengah masih berlansung pandemi Covid-19 masih akan terkontraksi 2-3 tahun ke depan. Dimana, Sektor-sektor unggulan daerah (trisula ekonomi) daerah masih akan mengalami perlambatan, khususnya Sektor Pariwisata karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Sementara itu, dua sektor lainnya yakni Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan akan tetap bergerak dan diasumsikan tetap tumbuh memiliki resiliensi *(resilience)* terhadap tekanan pandemi Covid-19. Dimana, hubungan antara Pertumbuhan PDRB dengan Peningkatan PAD Kabupaten Tojo Una-Una bersifat elastis yakni sebesar 1,03;
2. Kondisi ekonomi nasional yang masih melambat pada beberapa periode ke depan, diasumsikan akan berimplikasi pada pertumbuhan penerimaan pendapatan transfer daerah, terutama pendapatan transfer pemerintah pusat yang rendah dan cenderung berubah-berubah *(uncertainty)*. Asumsi ini juga mengacu pada kondisi dana transfer pada Tahun 2021 dan rencana Tahun

2022 yang lebih rendah dibandingkan pada periode sebelumnya. Dengan menggunakan asumsi kondisi riil penerimaan dana transfer Tahun 2020-2021 dan pagu anggaran Tahun 2022 dijadikan sebagai dasar proyeksi pendapatan dan belanja daerah;

3. Beberapa sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak dapat lagi dipungut, terkait dengan kewenangan Kabupaten yang terbatas atau sudah dihapus;
4. Berdasarkan data historis, dimana nilai realisasi investasi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una masih rendah. Maka proyeksi pertumbuhan investasi pada sektor-sektor unggulan daerah tersebut juga masih cukup rendah apalagi pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhir.
5. Pemerintah menyampaikan dan menegaskan dalam penyusunan anggaran dan belanja pemerintah daerah didesain untuk **antisipatif**, **responsif**, dan **fleksibel** merespon ketidakpastian pandemi Covid-19 yang belum berakhir, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian (prudent), karena penyusunan anggaran dan belanja dalam menghadapi situasi yang bersifat *VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)*.

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah pada rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Uuna tahun 2021-2026 dilakukan dengan teknik *forecasting least square* terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2020. Di sisi lain, juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 masih tetap berlangsung baik di level provinsi dan nasional. Hal ini berimplikasi pada kondisi ekonomi nasional yang masih *struggling* dan berdampak hingga Tahun 2023. Selanjutnya, maka pada Tahun 2024 kondisi nasional diharapkan sudah menuju kondisi yang lebih baik (stabil). Kondisi ini berimplikasi terhadap kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara berangsur-angsur membaik, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal.

- **Pendapatan Daerah**

  Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan jangka menengah Kabupaten Tojo Una-Una untuk periode Tahun 2021-2026 antara lain: a. Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan: 1. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi; 3. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek

PBB-P2 dan BPHTB. 4. Terbentuknya sistem zona nilai tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; b. Pendapatan transfer pemerintah pusat diasumsukan tumbuh rendah; c. Lain-Lain Daerah yang Sah juga diasumsikan meningkat.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku, serta memanfaatkan teknologi informasi terkini; 2) Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal; 3) Pendayagunaan aset daerah; 4) Pengembangan usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD), agar memberikan kontribusi optimal secara khusus kepada PAD dan secara umum pada penerimaan daerah; 5) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi untuk memudahkan investasi *(market friendly)* khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah Kabupaten Tojo Una-Una yakni: Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.

- **Belanja Daerah**

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja, serta berdasarkan pada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: a. Mendanai belanja wajib dan mengikat; b. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan c. Mendanai hibah bansos dan bantuan keuangan yang diberikan jika belanja wajib dan mengikat, dan belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sudah tercukupi. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mengingat kondisi APBD kabupaten Tojo Una-Una yang masih sangat terbatas, untuk itu pengelolaan belanja daerah ke depan harus benar-benar lebih efektif dan lebih efisien serta tepat sasaran yang dilakukan untuk mengatasi permasalah pokok daerah dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut: a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai, serta pengadaan pegawai PPPK. b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya

pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026;
c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

- **Pembiayaan Daerah**

  Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una diarahkan untuk: 1) Menjaga keuangan daerah agar tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran semaksimal mungkin dapat ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu; 2) Mengembangkan dan mengerakan investasi daerah, dan melakukan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian *(prudent)*. Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan, untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun-tahun berikutnya.

  Pembiayaan daerah terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan, untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib yakni penyertaan modal pada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

  Berdasarkan agenda pembangunan dan ketiga asumsi tersebut di atas, maka Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdapat pada tabel berikut ini.

## Tabel 3.12
## Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
## Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 s/d Tahun 2026

| Kode | URAIAN AKUN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **70.260.763.338,00** | **70.260.763.338** | **72.515.196.995** | **74.950.176.514** | **77.385.156.032** | **79.820.135.551** | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 10.147.700.000,00 | 10.147.700.000,00 | 11.096.709.164,08 | 12.134.469.315,42 | 13.172.229.466,77 | 14.209.989.618,12 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 2.710.540.508,00 | 2.710.540.508,00 | 3.189.627.615,89 | 3.912.874.587,06 | 4.636.121.558,23 | 5.359.368.529,41 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.200.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 2.224.667.200,19 | 2.338.597.666,01 | 2.452.528.131,83 | 2.566.458.597,65 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 55.202.522.830,00 | 55.202.522.830,00 | 56.004.193.014,95 | 56.564.234.945,10 | 57.124.276.875,25 | 57.684.318.805,40 | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **917.103.515.891,00** | **898.345.815.891** | **900.022.424.081** | **902.644.104.841** | **905.265.785.600** | **907.887.466.359** | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 892.451.973.400,00 | 873.694.273.400,00 | 875.124.366.165,33 | 876.874.614.897,67 | 878.624.863.630,00 | 880.375.112.362,33 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 24.651.542.491,00 | 24.651.542.491,00 | 24.898.057.915,91 | 25.769.489.942,97 | 26.640.921.970,02 | 27.512.353.997,08 | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **30.653.800.000** | **28.919.800.000** | **29.966.869.847** | **31.058.380.884** | **32.149.891.921** | **33.241.402.958** | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 5.984.000.000,00 | 4.250.000.000,00 | 4.250.000.000,00 | 4.250.000.000,00 | 4.250.000.000,00 | 4.250.000.000,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 24.669.800.000,00 | 24.669.800.000,00 | 25.716.869.847,22 | 26.808.380.884,28 | 27.899.891.921,33 | 28.991.402.958,39 | |
| | **Jumlah Pendapatan** | **1.018.018.079.229,00** | **997.526.379.229** | **1.002.504.490.924** | **1.008.652.662.239** | **1.014.800.833.553** | **1.020.949.004.868** | **0,06** |
| | | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA** | | | | | | | |

| Kode | URAIAN AKUN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **685.093.682.874,00** | **663.390.151.893,85** | **682.391.705.500,17** | **688.469.841.875,46** | **689.569.686.124,99** | **691.397.596.912,60** | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 384.906.743.916,00 | 391.477.505.222,15 | 391.613.822.641,17 | 392.788.664.109,10 | 393.963.505.577,02 | 395.138.347.044,94 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 258.712.695.913,00 | 245.556.753.176,70 | 250.646.882.858,99 | 243.596.507.266,99 | 255.475.180.547,97 | 256.128.249.867,66 | |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 300.000.000,00 | 525.000.000,00 | 531.000.000,00 | 531.000.000,00 | 531.000.000,00 | 531.000.000,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 24.823.435.995,00 | 25.523.643.495,00 | 24.600.000.000,00 | 42.000.000.000,00 | 24.600.000.000,00 | 24.600.000.000,00 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 16.350.807.050,00 | 307.250.000,00 | 15.000.000.000,00 | 9.553.670.499,38 | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **158.861.248.089,00** | **120.428.365.000,00** | **127.700.558.623,47** | **126.925.427.415,48** | **131.128.588.333,26** | **134.603.682.712,96** | |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **2.250.000.000,00** | **34.500.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 2.250.000.000,00 | 34.500.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **184.489.601.000,00** | **184.474.601.000,00** | **185.412.226.799,93** | **186.257.392.947,55** | **187.102.559.095,18** | **187.947.725.242,80** | |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.422.000.000,00 | 1.422.000.000,00 | 1.444.287.794,93 | 1.553.582.186,54 | 1.662.876.578,14 | 1.772.170.969,75 | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 183.067.601.000,00 | 183.052.601.000,00 | 183.967.939.005,00 | 184.703.810.761,02 | 185.439.682.517,04 | 186.175.554.273,06 | |
| | **Jumlah Belanja** | **1.030.694.531.963** | **1.002.793.117.894** | **1.000.504.490.924** | **1.006.652.662.239** | **1.012.800.833.553** | **1.018.949.004.868** | **(0,22)** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **(12.676.452.734,00)** | **-5.266.738.664,85** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | |
| | | | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **20.000.000.000,00** | **7.566.738.664,85** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 20.000.000.000,00 | 7.566.738.664,85 | - | - | - | - | |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - | |
| 6.1.03 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | - | - | - | - | - | |
| 6.1.04 | Penerimaan pinjaman daerah | - | - | - | - | - | - | |
| 6.1.05 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - | - | - | - | - | - | |

| Kode | URAIAN AKUN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.06 | Penerimaan piutang daerah | - | - | - | - | - | - | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **20.000.000.000,00** | **7.566.738.664,85** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **2.300.000.000,00** | **2.300.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | |
| 6.2.01 | Pembentukan dana cadangan | - | - | - | - | - | - | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.300.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | |
| 6.2.03 | Pembayaran pokok utang | - | - | - | - | - | - | |
| 6.2.04 | Pemberian pinjaman daerah | - | - | - | - | - | - | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2.300.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | |
| | Pembiayaan Netto | 17.700.000.000,00 | 5.266.738.664,85 | (2.000.000.000,00) | (2.000.000.000,00) | (2.000.000.000,00) | (2.000.000.000,00) | |
| **6.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan** | **5.023.547.266,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

Sumber: Hasil Analsis dan FGD Tahun 2021

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sampai dengan Tahun 2026.

Selanjutnya, hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program pembangunan yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan, untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 (tiga) prioritas. Ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar dan *mandatory spending*;
b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una di luar program prioritas, untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya, serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, untuk pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una periode Tahun 2021- 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.13**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**

| No. | Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | Pendapatan | 1.018.018.079.229,00 | 998.255.679.229,00 | 1.003.233.790.923,57 | 1.009.450.166.105,72 | 1.015.666.541.287,87 | 1.021.882.916.470,01 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | - | - | - | - | - | |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 20.000.000.000,00 | 7.566.738.664,85 | - | - | - | - |
| *Total penerimaan* | | *1.038.018.079.229,00* | *1.005.822.417.893,85* | *1.003.233.790.923,57* | *1.009.450.166.105,72* | *1.015.666.541.287,87* | *1.021.882.916.470,01* |
| Dikurangi: | | | | | | | |
| 4 | Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama | 596.769.780.911,00 | 636.500.749.717,15 | 607.157.049.441,11 | 626.577.057.056,65 | 611.197.064.672,20 | 613.217.072.287,75 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 2.300.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| **Kapasitas riil kemampuan keuangan** | | **438.948.298.318,00** | **367.021.668.176,70** | **394.076.741.482,47** | **380.873.109.049,06** | **402.469.476.615,66** | **406.665.844.182,26** |

Sumber: Hasil Analsis dan FGD Tahun 2021

**Tabel 3.14**
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**

| No. | Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | **Kapasitas riil kemampuan keuangan** | 438.948.298.318 | 367.021.668.177 | 394.076.741.482 | 380.873.109.049 | 402.469.476.616 | 406.665.844.182 |
| | | | | | | | |
| 2 | **Prioritas I** | 245.811.047.058 | 205.532.134.179 | 220.682.975.230 | 213.288.941.067 | 225.382.906.905 | 227.732.872.742 |
| 3 | **Prioritas II** | 175.579.319.327 | 146.808.667.271 | 157.630.696.593 | 152.349.243.620 | 160.987.790.646 | 162.666.337.673 |
| 4 | **Prioritas III** | 17.557.931.933 | 14.680.866.727 | 15.763.069.659 | 15.234.924.362 | 16.098.779.065 | 16.266.633.767 |

Sumber: Hasil Analsis dan FGD Tahun 2021



# BAB 4

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis *(analysis of issues strategic)* merupakan pemahaman atas permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Isu-isu strategis *(strategic issues)* merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan, atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif *(anticipated)*, adaptif *(adaptive),* dan akomodatif *(acommodative)* atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat *(welfare society)* dalam jangka menengah. Di sisi lain, permasalahan pembangunan daerah *(problems of regional development)* adalah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yangbelum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tojo Una-Una.

Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, regional, nasional maupun internasional semakin dinamis dan berubah secara cepat, sebagai implikasi terjadinya pandemi Covid-19, mulai awal Tahun 2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak Covid-19 sudah terjadi dalam kurun waktu Tahun 2020-2021, dan diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi Covid-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una. Prinsip dasar dalam menghadapi kondisi ketidakpastian yang disebabkan Covid-19, maka diperlukan desain perencanaan strategis dan arah kebijakan yang antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian pandemi Covid-19 tersebut.

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan pada kondisi gambaran umum daerah dari berbagai aspek, dan capaian kinerja pembangunan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, rumusan permasalahan dan isu-isu strategis juga mengacu pada analisis lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal.

## 4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una

Permasalahan pembangunan daerah pada intinya merupakan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai di daerah tersebut. Potensi permasalahan pembangunan daerah akan muncul jika kekuatan yang dimiliki daerah tersebut, belum dapat dikelola secara optimal, kelemahan tidak dapat diatasi dan tidak diminimalisir, peluang tidak dapat dimanfaatkan, dan ancaman tidak dapat diantisipasi dengan baik.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, pada periode pemerintahan daerah

Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok *(main problem)*, masalah *(problem)*, dan akar masalah *(root of problem)*.

Berdasarkan gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana telah diuraikan di Bab II, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan wilayah daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT);
2. Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah Kecamatan;
3. Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah;
4. Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian);
5. Kemampuan fiskal yang rendah dalam membiayai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya risiko bencana alam dan non alam;
7. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.




**Gambar 4.1**

**Permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una**

Selanjutnya, permmasalahan pokok tersebut akan diselesaikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah. Sesuai dengan kerangka logis permasalahan daerah, maka masalah daerah akan dijabarkan dalam permasalahan (masalah pokok, masalah, dan akar masalah) yang akan diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Secara sistematis

uraian penyelesaian permasalahan daerah (masalah pokok, masalah, dan akar masalah) sesuai dengan prioritas visi misi Bupati/Wakil Bupati Tojo Una-Una dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1. Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)**

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan kecil anggota masyarakat yang hidup berkelompok di pelosok daerah dan hidup berpindah-pindah (nomaden), atau menetap pada kawasan pulau terpencil, pegunungan, atau daerah perbatasan dan memiliki keterbelakangan kondisi dari sisi transportasi, kesehatan dan pendidikan. KAT juga dipahami sebagai orang dalam jumlah tertentu yang terikat kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Beberapa kriteria KAT yang dimaksud antara lain: terbatas-nya akses untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, masyarakatnya tertutup, homogen, hidupnya bergantung kepada sumberdaya alam, tersisih di pedesaan dan perkotaan dan/atau tinggal di wilayah pulau-pulau terluar dan terpencil.

**Tabel 4.1**
**Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan Daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Tojo Una-Una**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| 1. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan dan daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) | ▪ Jumlah penduduk miskin masih tinggi sebesar 25.430 jiwa;<br>▪ Persentase penduduk miskin kabupaten Tojo Una-Una masih sangat hingga tahun 2020 sebesar 16,39 persen. Tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Tengah. | Sulitnya Kondisi geografis menyebabkan terbatanya jangkauan, khususnya terhadap wilayah kepulauan dan pegunungan |
| | | Masih adanya budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang sulit menerima perubahan (kemajuan dan teknologi) |
| | | Adanya sebagian masyarakat miskin hidup di wilayah hutan dan wilayah pesisir yang tidak memiliki aset tanah dan bangunan layak huni |
| | | Masih tingginya harga-harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan dan daratan terpencil, termasuk wilayah KAT |
| | | Belum dapat dikendalikan harga-harga kebutuhan pokok (tidak stabil) disebabkan biaya produksi dan distribusi ke wilayah pengunungan dan pulau-pulau masih tinggi |
| | ▪ Pendapatan per kapita masyarakat rendah | Rendahnya produktivitas kerja dan etos kerja masyarakat |
| | | Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | hanya sebesar 28,04 Juta pada Tahun 2020 | Belum optimalnya pengelelolaan dan perkembangSektor Industri, perdagangan, dan bisnis |
| | | Belum optimalnya Sektor unggulan daerah yakni Pariwisata, Pertanian, dan Perikanan kelautan dikelola untuk meningkatkan pendapatan masyarakat |
| | ▪ Program bantuan pemerintah untuk penduduk miskin belum tepat sasaran | Belum optimalnya pelaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) data penduduk miskin/penerima bantuan |
| | | Belum digunakan secara baik dan tepat hasil monitoring dan evaluasi distribusi bantuan kepada penduduk miskin |
| | ▪ Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin belum memadai | Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas Kesehatan masyarakat miskin |
| | | Terbatasnya sarana dan prasarana publik yang dapat diakses oleh masyarakat miskin |
| | | Terbatasnya akses informasi tentang lapangan pekerjaan dan peluang usaha (ekonomi) |
| | | Tatalaksana dan pola pikir yang belum berorientasi pada *good and clean governance* |
| | | Belum optimalnya inovasi birokrasi yang dijalankan |
| | Kualitas layanan publik masih rendah | Adanya struktur organisasi yang belum menerapkan pembagian kerja secara professional dan berbasis kinerja |
| | | Adanya SDM aparatur yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberikan pelayanan optimal |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2020-2021

**2. Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah Kecamatan**

Aksesibilitas (ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain, aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi *(transportation system)*. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan (mobilitas) antar tempat atau antar kawasan.

**Tabel 4.2**
**Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan**
**Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah Kabupaten Tojo Una-Una**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan | ▪ Pengembangan wilayah belum merata antar Kecamatan dan antar Desa, Dimana<br>▪ Panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 255.930 meter atau baru mencapai 22,5 persen dari panjang jalan Seluruh 1.150.139 meter.<br>▪ Rumah tinggal bersanitasi sebesar 56,40 persen Tahun 2020 berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah | Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD Tojo Una-Una untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara merata |
| | | Belum optimal dilakukan langkah-langkah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program antar OPD yang menangani infrastruktur dengan OPD lain |
| | | Belum dilaksanakan dengan baik pelaksanaan identifikasi dan prioritas pengembangan wilayah |
| | | Masih terbatasnya pembiayaan Infrastruktur sebagai satu kabupaten tertinggal di Sulteng melalui pemanfaatan alokasi dana Provinsi Sulteng dan Pemerintah Pusat |
| | ▪ Ketimpangan Infrastruktur menyangkut rumah tinggal berakses air minum layak mencapai 91,14 persen pada Tahun 2020. Masih ada 8,86 persen RT yang belum terakses Air munum layak. | Belum meratanya kemampuan ekonomi antara wilayah disebabkan infrastruktur pendukung belum memadai |
| | | Lemahnya kapasitas masyarakat di perdesaan |
| | | Belum tersediannya layanan air bersih di wilayah-wilayah kepulauan |
| | | Belum meratanya akses terhadap komunikasi (khususnya jaringan internet dan sejenisnya) |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2020-2021

**3. Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah**

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja *(key perfomance)* adalah kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat mempengaruhi kualitas dan kapasitas SDM antara lain, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif, tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian, namun juga dalam mendukung pembangunan secara

luas. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, *pertama,* adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dunia industry (DUDI). Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEKS yang lebih merata. *Kedua* adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian (*character building*). *Ketiga,* adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, dan pembinaan lain-lain.

**Tabel 4.3**
**Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah Kabupaten Tojo Una-Una**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah | ▪ Capaian IPM Kabupaten Tojo Una-una dengan nilai IPM 64,59 Tahun 2020 masih berada pada posisi terendah | Masih rendahnya angka Rata-rata lama sekolah (RLS).<br>Masih rendahnya angka harapan lama sekolah.<br>Masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat masih tergolong rendah rata-rata 28,04 Juta. |
| | ▪ Rata-rata lama sekolah masih rendah sebesar 8,39 pada Tahun 2020 | Belum memadainya sarana dan prasarana sekolah terutama wilayah-wilayah terpencil |
| | | Belum tercukupinya jumlah dan kualifikasi guru yang sesuai standar |
| | | Belum meratanya distribusi guru di seluruh wilayah kecamatan, terutama di wilayah kepulauan dan daratan yang terpencil |
| | ▪ Masih rendahnya harapan lama sekolah (HLS) meningkat namun baru mencapai 12,55 Tahun 2020 | Belum optimalnya pelaksanaan program paket A, B, C untuk memenuhi kuantitas dan kualitas pendidikan |
| | | Masih mahalnya biaya pendidikan dan akses terhadap perguruan tinggi setara diploma dan strata satu |
| | | Masih tingginya angka putus sekolah (APTS) terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | ▪ Usia Harapan Hidup (UHH) masih di bawah rata-rata provinsi sebesar 65,67 Tahun 2020 | Masih rendahnya kesadaran massyarakat untuk menerapkan PHBS (pola hidup bersih dan sehat) |
| | | Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan, terutama pada wilayah kepulauan dan daratan yang terpencil dan sulit dijangkau |
| | | Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan), sehingga alokasi biaya kesehatan masih rendah |
| | | Masih tingginya angka kesakitan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah KAT |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2020-2021

**4. Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian)**

Pertumbuhan ekonomi daerah *(regional economic growth)* pada dasarnya dipengaruhi keunggulan komperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Penetapan suatu sektor komoditas sebagai sektor unggulan daerah harus disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*). Sektor unggulan Kabupaten Tojo Una-Una yakni Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Sektor Pariwisata.

**Tabel 4.4**
**Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian) Kabupaten Tojo Una-Una**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian) | Masih rendahnya kontribusi Sektor Pariwisata masih rendah hanya sebesar 10,95 persen Tahun 2020 | Belum dikelolanya potensi Sektor Pariwisata secara optimal dan profesional |
| | | Belum tertatanya dengan baik destinasi pariwisata yang mencakup aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | Belum dikembangkannya kelembagaan dan industri pariwisata secara optimal |
| | | Masih bersifat tradisionalnya (konvensional) pengelolaan pemasaran pariwisata |
| | | Masih sangat terbatasnya atraksi dan event wisata untuk menarik minat wisatawan |
| | | Terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi turis mancanegara dan domestik yang menurunkan arus kunjungan wisatawan ke Tojo Una-Una kurun waktu Tahun 2019-2020 |
| | | Belum terintegrasinya pengelolaan Sektor Pariwisata dengan sektor lainnya dan antar OPD yang terkati pariwisata |
| | | Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata khususnya pulau-pulau (jaringan internet, listrik, air bersih) |
| | Makin menurun dan rendahnya pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian yakni sebesar 38,68 persen Tahun 2020 | Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan rendahnya kesejahteraan petani, karena nilai yang diterima dibandingkan nilai yang dibayarkan |
| | | Terbatasnya akses dan informasi pasar |
| | | Masih panjangnya rantai nilai hasil-hasil Sektor Pertanian |
| | | Masih rendahnya teknologi pengolahan hasil pertanian sehingga memberikan *value added* yang rendah |
| | | Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian, termasuk rendahnya akses terhadap bantuan permodalan dan usaha Sektor Pertanian |
| | Sektor Perikanan (Kelautan) belum memberikan kontribusi pendapatan yang optimal | Belum adanya industri pengolahan hasil perikanan |
| | | Masih terbatasnya informasi dan akses pasar hasil perikanan (kelautan) |
| | | Masih rendahnya SDM di Sektor Perikanan/Kelautan kelautan, termasuk belum memadainya sarana (peralatan) yang dimiliki nelayan tradisional |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2020-2021

**5. Kemampuan Fiskal Yang Rendah Dalam Membiayai Upaya Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Tojo Una-Una**

Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) adalah kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah ini menjadi unsur untuk menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Dimana, peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan ber-dasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah dihitung dengan formula pendapatan dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan yang dimaksud untuk daerah provinsi meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Intinya, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

**Tabel 4.5**
**Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Pembangunan Kemampuan Fiskal Yang Rendah Dalam Membiayai Upaya Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Tojo Una-Una**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Kemampuan fiskal yang rendah dalam membiayai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una | ▪ Masih rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 6,34 persen terhadap total pendapatan daerah Tahun 2020 | Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi asli daerah yang belum tergali |
| | | Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah |
| | | Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah |
| | | Kurangnya peran dan kontribsui perusahaan daerah (BUMD) sebagai sumber penghasil pendapatan daerah |
| | | Belum optimalnya tatakelola pendapatan daerah |
| | Belanja daerah belum efisien dan efektif | Belum tepatnya dan konsistennya belanja daerah dalam membiayai Program-Program Prioritas Daerah |
| | | Masih rendahnya kualitas SDM aparatur |
| | | Belum optimalnya pemanfaatan belanja karena masihnya adanya SILPA yang besar |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2020-2021

**6. Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya risiko bencana alam dan non alam**

Lingkungan hidup *(enviroment)* merupakan satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, ling-kungan hidup perlahan mengalami degradasi. Degradasi tersebut menye-babkan kerugian bagi kehidupan manusia. Degradasi lingkungan hidup *(enviromental degradation)* adalah menurun-nya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan. Terjadianya degradasi lingkungan dapat menyebabkan beberapa masalah serius dan berbahaya yang dapat ditimbulkan antara lain, bencana alam, perubahan iklim secara drastis, munculnya penyakit, dan pencemaran lingkungan. Selain bencana alam, tentu bencana non-alam juga perlu mendapatkan perhatian serius.

**Tabel 4.6**
**Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya resiko bencana alam dan non alam Di Kabupaten Tojo Una-Una**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya resiko bencana alam dan non alam | ▪ Adanya perubahan penggunaan lahan (alih fungsi lahan) yang terjadi | Meningkatnya aktivitas masyarakat di dalam pemanfaatan lahan dan pembukan lahan baru |
| | | Belum optimalnya penerapan tatakelola dan kelembagaan lahan |
| | | Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukkannya |
| | | Tingginya alih fungsi lahan dan adanya kasus penebangan liar hutan sehingga menggangu daerah resapan air *(catchmen area)* yang dapat memicu bahaya banjir bandang |
| | | Adanya perubahan iklim yang meningkatkan curah hujan dan suhu udara yang juga ikut berimbas terhadap wilayah Kabupaten Tojo Una-Una |
| | | Belum terlaksananya reforma agraria dan perhutanan social dalam mendukung lingkungan yang berkelanjutan |
| | ▪ Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup | Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dalam mendukung dan membantu upaya-upaya konservasi (misalnya adanya pengeboman ikan yang merusak terumbu karang khususnya di wilayah kepualan) |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | Belum optimalnya pengelolaan dan upaya tampung limbah *(assimilative capacity)* |
| | | Belum optimalnya tatakelola dan manajemen pengelolan persampahan |
| | | Adanya aktivitas pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan |
| | ▪ Belum optimalnya mitigasi manajemen risiko bencana | Belum optimalnya dukungan anggaran untuk mitigasi dan manajemen risiko kebencanaan |
| | | Belum optimalnya mobilisasi dan penggunaan sumberdaya |
| | | Faktor geomorfologi Kabupaten Tojo Una-Una berbentuk perbukitan yang mempunyai relief perbukitan dan memiliki lereng yang bervariasi mulai dari terjal hingga agak miring serta perbukitan struktural lipatan yang memiliki pola-pola struktur lipatan dan banyaknya aliran sungai yang melewati wilayah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan bencana banjir dan tanah longsor ditengah meningkatnya curah hujan. Jenis bentanglahan tersebut mempengaruhi tata aliran air di bagian hulu yang mempengaruhipencegahan bajir |
| | | Masih rendahnya kompetensi, kehandalan, dan kualitas SDM penanganan bencana |
| | | Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana |
| | | Belum terbentuknya desa tangguh bencana secara merata |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2020-2021

**7. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Publik**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Barang, jasa dan pelayanan administratif bukanlah barang yang dapat diperdagangkan sehari-hari, tetapi yang dimaksud

adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan pemerintah. Sehingga, pelayanan publik dapat dipahami sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat penyelenggara pemerintahan. Keberadaan pemerintah daerah tentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, pemerintah daerah (birokrat/aparatur) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

**Tabel 4.7**
**Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik Di Kabupaten Tojo Una-Una**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik | ▪ Masih rendahnya kinerja aparatur daerah dimana Nilai Sakip Kabupaten Tojo Una-Una dan PD baru mencapai CC Tahun 2020 | Rendahya kualitas SDM aparatur |
| | | Tatalaksana dan pola pikir yang belum berorientasi pada *good and clean governance* |
| | | Belum optimalnya inovasi birokrasi masih belum optimal |
| | | Masih rendahnya capaian kinerja pembangunan, karena capaian indikator belum sesuasi dengan target kinerja |
| | | Masih sangat terbatasnya ketersediaan data dan informasi pembangunan |
| | ▪ Kualitas layanan publik masih rendah berdasrkan Hasil evaluasi kinerja OPD Tahun 2020.<br>▪ Hasil evaluasi kinerja OPD 2020 kedalam kuadran-kuadran. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukaan menunjukan bahwa sebanyak 20 OPD yang masuk kuadran 1 (tidak efektif dan tidak efisien). Kemudian 7(tujuh) atau 17,07% OPD kuadran 2, Kuadran sebanyak 4 OPD (9,76%) pada kuadran 4 dan kuadran 5 sebanyak 2 OPD (efektif dan efisien) dan pada kuadran sebanyak 3 | Terdapatnya hanya beberapa OPD yang menjalankan kinerja secara efektif dan efisien khususnya yang masuk dalam kelompok kuadran 4, 5 dan 6 sementara sebagian besar belum efektif didalam optimalisasi belanja dan target kinerja yang diberikan. |
| | | Struktur organisasi yang belum menerapkan pembagian kerja secara professional |
| | | Kualitas SDM aparatur belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | OPD (juga efektif tapi kurang efisien). | |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2020-2021

Pemetaan masalah pembangunan daerah *(mapping of regional development problems)* dapat dikelompokkan menjadi dua aspek utama sehingga lebih fokus untuk diintervensi. Kedua aspek yang dimaksud adalah aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Pembahasan dan analisis tentang permasalahan berdasarkan aspek-aspek tersebut disajikan dalam uraian berikut:

### 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

**1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum optimal**

Membangun manusia seutuhnya merupakan tujuan utama pembangunan di tingkat nasional hingga daerah. Hal ini disebabkan SDM adalah modal manusia *(human capital)*, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat diprioritaskan. Dimana, IPM menjadi indikator penting mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM memberikan gambaran penduduk memiliki akses atas hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Capaian IPM Kabupaten Tojo Una-Una terendah di Sulawesi Tengah, menempati urutan ke-13 dari kabupaten/kota sebesar 64,59 pada Tahun 2020. IPM ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 69,55 dan nasional sebesar 71,94. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan berbagai upaya peningkatan IPM. Hal ini dapat dilihat dari naiknya IPM setiap tahun, dimana pada Tahun 2010 IPM sebesar 58,33 meningkat menjadi sebesar 61,33 pada Tahun 2015. Artinya bahwa kenaikan IPM rata-rata per tahun dari Tahun 2010 hingga Tahun 2015 sebesar 0,6 poin. Selanjutnya, pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 62,27 dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2020 mencapai 64,59. Tahun 2016 hingga Tahun 2020, IPM Tojo Una-Una rata-rata mengalami kenaikan 0.58 per tahun. Namun, IPM Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2020 sebesar 64,59 menempati posisi terendah. IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar 69,55 lebih rendah dari nasional sebesar 71,94. Selain itu, rata-rata lama sekolah masih rendah yakni 8,39 tahun pada Tahun 2020, serta masih rendahnya harapan lama sekolah (HLS) baru mencapai 12,55 tahun. Pada sisi lain, Usia Harapan Hidup (UHH) Tojo Una-Una sebesar 65,67 tahun masih di bawah rata-rata provinsi Tahun 2020.

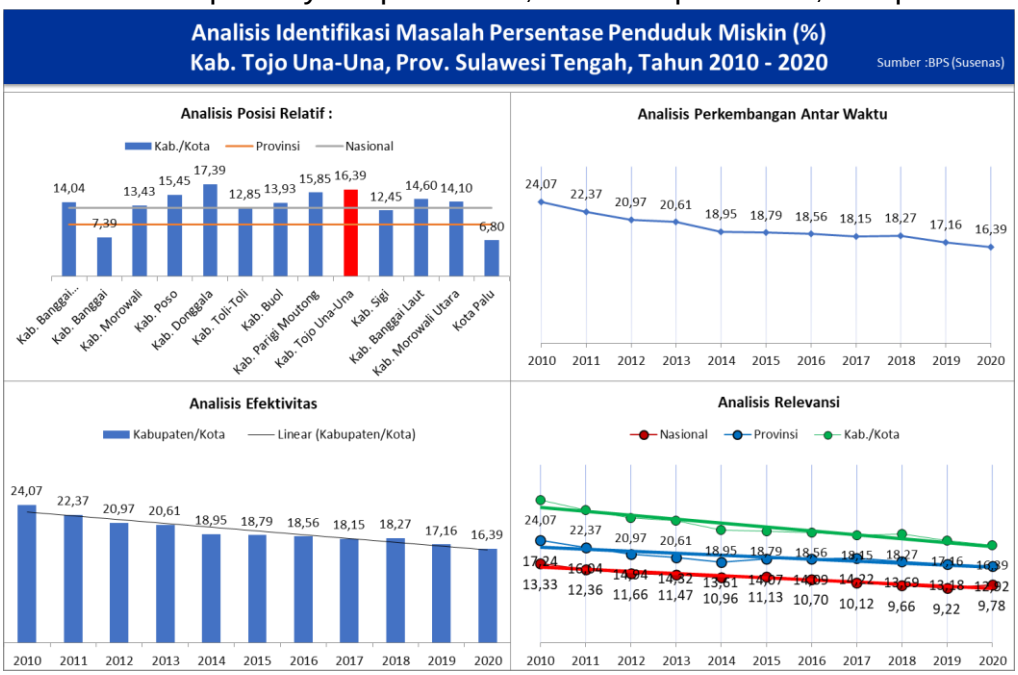
Sementara itu, untuk bidang pendidikan angka harapan lama sekolah (HLS) baru mencapai 12,55 tahun. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas mengikuti pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS

Tojo Una-Una Tahun 2020 sebesar 12,55 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau setara dengan diploma I.

**2. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal**

Persentase penduduk miskin *(poverty population)* di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 masih **sangat tinggi** yaitu sebesar 16,39 persen. Angka ini di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92 persen; dan rata-rata nasional sebesar 9,78 persen. Tojo Una-Una menempati urutan kedua tertinggi kemiskinan di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Donggala sebesar 17,39 persen. Jumlah penduduk miskin sebanyak 25.430 jiwa, dimana jumlah lebih rendah dari daerah lain. Sementara itu, pendapatan perkapita masyarakat jga masih rendah pada Tahun 2020 hanya sebesar 28,04 Juta. Program-Program bantuan tunai langsung *(direct funding)* dari pemerintah daerah, untuk penduduk miskin belum sepenuhnya tepat sasaran. Di sisi lain, garis kemiskinan terus meningkat setiap tahun.

Kondisi lainnya, masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una disebabkan kondisi geografis yang sulit dijangkau, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah-daerah terpencil, masih adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan infrastruktur wilayah yang terbatas, sehingga desa-desa terpencil sulit mendapatkan akses. Selain itu, trisula unggulan daerah belum dikelola secara optimal yaitu pariwisata, kelautan-perikanan, dan pertanian.




Sumber: BPS-TNP2K, Aplikasi Analisis kemiskinan berbasis Excel, Diolah 2021

**Gambar 4.2**
**Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2020**

**3. Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi**

Pertumbuhan ekonomi *(economic growth)* Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (-3,21) persen, akibat pandemi Covid-19. Aktivitas ekonomi sejak Maret 2019 sampai pertengahan Tahun 2021 mengalami penurunan yang besar. Sektor Industri, Sektor Perdagangan, dan UMKM cenderung stagnan, karena adanya regulasi dari pemerintah untuk *stay at home, work from home,* dan *social distancing* (Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB).

Sektor UMKM mengalami dampak yang parah. Dimana, UMKM memiliki kontribusi dan peran yang cukup besar dalam perekonomian, antra lain: perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Disamping itu, UMKM merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengerakkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi untuk pemulihan ekonomi *(economy recovery)* melalui UMKM.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM disebutkan sebanyak 1.785 koperasi, dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19. Sektor UMKM paling terdampak yakni penyedia makanan dan minuman. Selain itu, koperasi bergerak pada bidang jasa dan produksi juga terdampak Covid-19. Para pengusaha UMKM mengalami turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama PSBB dan PPKM. Sementara itu, sebanyak 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko ditutup.

Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki potensi pariwisata yang sudah terkenal, yaitu Kepulauan Togean, mendapatkan dampak penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara menurun drastis, bahkan untuk wisatawan manca-negara hampir tidak ada. Sektor pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una sangat berat menghadapai Covid-19. Hal ini berpengaruh pada hilangnya pekerjaan di Sektor Pariwisata antara lain: karyawan hotel dan restoran, pemandu wisata, dan toko souvenir/oleh-oleh.

**4. Ketimpangan Infrastruktur antara Wilayah Kecamatan**

Kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak meratanya penyebaran penduduk, terutama pada daerah–daerah perdesaan, perdalaman, dan terpencil. Kondisi ini sekaligus menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan, dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar kecamatan seperti jalan dan jembatan, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan permukinan, telekomunikasi, dan kelistrikan. Panjang jalan

dalam kondisi baik sepanjang 255.930 meter, atau hanya 22,5 persen dari panjang jalan seluruhnya (1.150.139 meter).

Transportasi antar kecamatan di wilayah kepulauan menjadi permasalahan urgen dan penting untuk disediakan. Oleh karena mahalnya biaya transportasi *(cost transportation)* menyebakan pada mahalnya harga kebutuhan pokok *(basic needs)* yang ada di wilayah kepulauan, juga di wilayah terpencil daerah pegunungan. Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

**5. Kapasitas Keuangan dalam Membiayai Pembangunan Daerah Terbatas**

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kemampuan kapasitas keuangan yang masih sangat terbatas. Rendahnya kapasitas fiskal *(fiscal capacity)* daerah ini, juga pertumbuhan ekonomi saat ini belum mampu mendorong peningkatan dan menggerakan sumber-sumber pendapatan dalam APBD. Alokasi APBD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada dana transfer (dana perimbangan), karena rendahnya kinerja pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, belum optimalnya tatakelola pendapatan daerah, dan sumber pembiayaan lainnya.

Belanja daerah *(regional spending)* dinilai belum efisien dan efektif, belum optimalnya pemanfaatan belanja, masih adanya belanja yang dialokasi pada program dan kegiatan yang tidak tepat sasaran. Merujuk pada konsep dan pengertian efisiensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana efisiensi dimaknai sebagai hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain: 1). Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep *input-output*; 2). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan; 3). Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Belanja pemerintah daerah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan daerah. Besarnya pendapatan daerah tidak akan bermanfaat secara optimal, apabila alokasi belanja masih menyebabkan terjadinya inefisiensi dan tidak berorientasi, serta bersentuhan langsung

dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, maka belanja daerah memiliki peran yang penting dan strategis, sebagai stimulus ekonomi bagi daerah. Untuk mendapatkan dampak positif bagi ekonomi daerah, maka diperlukan suatu sistem perencanaan belanja pemerintah daerah yang baik dan tepat sasaran, serta tranparan dan akuntabel.

**6. Kerusakan Lingkuran Hidup dan meningkatnya Bencana Alam dan Non Alam.**

Amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim *(climate change)*. Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon *(low carbon*). Demikian juga di dalam perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah, termasuk dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una akan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan bencana alam *(natural disaster)* sebagai masalah dan isu penting.

Bencana alam yang terjadi dikabupaten Tojo Una-Una secara beruntun pada Juli-Agustus Tahun 2021, akibat adanya deformasi sesar lokal (tanpa nama) di wilayah tersebut berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Palu. Selain itu, adanya perubahan iklim yang berdampak pada naiknya temperatur, curah hujan, atau angin mengakibatkan perubahan pola tanam, serta terjadi peningkatan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten. Sehingga hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian penting dalam perencanaan sensitif bencana. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini mendapatkan tantangan untuk dapat menyusun skenario-skenario pembangunan yang didesain antisipatif, responsif dan fleksibel dalam membangkitkan kembali ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una.

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daerah rawan bencana. Bencana yang mengancam wilayah tersebut antara lain: tanah longsor, banjir, abrasi pantai, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Pengendalian kerusakan lingkungan dan hutan lindung juga harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya bencana akibat ulah manusia. Selain itu, juga terdapat masalah untuk antisipasi virus Covid-19 yang melanda saat ini. Persiapan mitigasi dengan menyiapkan kabupaten dan desa tangguh bencana, menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak bencana dan pandemi tersebebut. Penyiapan sarana prasarana, peningkatan pemahaman masyarakat, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu terus dilakukan. Selain itu,

Kabupaten Tojo Una-Una juga akan menghadapi bencana sosial kemanusiaan, terutama konflik pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam yang tidak terkontrol, serta adanya konflik lahan. Atas berbagai kejadian dan kerentanan bencana itu, pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una perlu melakukan mitigasi melalui upaya memyiapkan masyarakat dalam menghadapinya, Sehingga ketika terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana sosial lainnya, adanya respons yang cepat dan memadai, serta pengeloaan manajemen pasca bencana yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah kabupaten Tojo Una-Una mengintegrasikan upaya pelestarian Lingkungan hidup dalam dokumen perancanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menerjemahkan dan mengikuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4/Menlhk/Sekjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Berwawasan Lingkungan. Dalam rangka mendorong dan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta mengintegrasikan program terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

### 4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik *(public services)* di Kabupaten Tojo Una-Una belum optimal, sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan publik masih rendah. Gambaran kondisi Pelayanan umum telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan data dan realitas, bahwa masih terdapat masalah pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan disajikan pada tabel sebagai berikut.

## Tabel 4.8
## Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Menurut Urusan

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB** | | | | | |
| **1.1** | **Pendidikan** | | | | | 1. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2020 yaitu selama 8,39 tahun;<br>2. Masih tinggi angka putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA<br>3. Belum berkualitas dan belum meratanya layanan pendidikan di semua wilayah khususnya bagi masyarakat miskin di wilayah kepulauan dan terpencil;<br>4. Belum meratanya persebaran guru dan ketersediaan guru di ke-camatan luar ibukota kabupaten masih didominasi Non-PNS sebesar 85 persen setiap sekolah;<br>5. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru honorer;<br>6. Terbatasnya sarana prasarana pendidikan didalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ);<br>7. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;<br>8. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarga-negaraan, dan kebangsaan;<br>9. Belum optimalnya rasio guru dan murid; |
| 1.1.1 | Harapan lama sekolah (Tahun) | 12,28 | 95,19 | ST | Belum Tercapai | |
| 1.1.2. | Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) | 8,39 | 103,45 | ST | Melampaui | |
| 1.1.3. | Angka partisipasi kasar | | | | | |
| 1.1.3.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 107,91 | 101,30 | ST | Melampaui | |
| 1.1.3.2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 80,23 | 80,63 | T | Belum Tercapai | |
| 1.1.3.3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK | 88,62 | 95,88 | ST | Belum Tercapai | |
| 1.1.4 | Angka Partisipasi Murni | | | | | |
| 1.1.4.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 98,94 | 106,05 | ST | Melampaui | |
| 1.1.4.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 70,91 | 85,00 | T | Belum Tercapai | |
| 1.1.4.3 | Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C | 63,33 | 90,47 | ST | Belum Tercapai | |
| 1.1.2. | Pendidikan dasar: | | | | | |
| 1.1.2.1. | Angka partisipasi sekolah | | | | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI | | 102,04 | ST | Melampaui | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs | | 98,88 | ST | Belum Tercapai | |
| 1.1.2.2 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah | | | | | |
| | SD/MI | 192 | 174,55 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SMP/MTs | 66 | 84,29 | T | Belum Tercapai | 10. Kurangnya pendidikan vokasi ber-basis sumber daya dan potensi trisula pembangunan (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian). |
| 1.1.3 | Rasio murid terhadap guru | | | | | |
| | SD/MI | 798 | 106,40 | ST | Melampaui | |
| | SMP/MTs | 779 | 97,38 | ST | Belum Tercapai | |
| 1.1.4. | Pendidikan menengah (SMA/MA,SMK ) | | | | | |
| 1.1.4.1. | Angka partisipasi sekolah | 69,65 | 81,70 | T | Belum Tercapai | |
| 1.1.4.2 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | 21 | 59,66 | R | Belum Tercapai | |
| 1.1.4.3 | Rasio guru terhadap murid | 452 | 50,22 | SR | Belum Tercapai | |
| 1.1.4.4 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,4 | 99,70 | ST | Belum Tercapai | |
| 1.1.5 | Fasilitas Pendidikan: | | | | | |
| 1.1.5 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) | 100 | 101,00 | ST | Melampaui | |
| 1.1.5 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%) | 100 | 101,01 | ST | Melampaui | |
| 1.1.6 | Pendidikan Anak Usia Dini (%) | 40,73 | 46,15 | SR | Belum Tercapai | |
| 1.1.6.1 | Angka Putus Sekolah: | | | | | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,71 | (0,00) | SR | Tercapai | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 4,71 | 0,05 | SR | Belum Tercapai | |
| **1.2** | **Kesehatan** | | | | | |
| 1.2.1 | Angka kelangsungan hidup bayi | 991 | 100,51 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Angka usia harapan hidup (Tahun) | 65,67 | 99,50 | ST | Belum Tercapai | 1. Masih tingginya prevalensi *stunting* dan gizi buruk, khususnya di wilayah kepulauan dan terpencil. Prevalensi *stunting* Tojo Una-Una sebesar 22,68 persen pada Tahun 2020;<br>2. Rendahnya persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);<br>3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga Kesehatan;<br>4. Beum meratanya distribusi tenaga kesehatan. |
| 1.2.3 | Persentase balita gizi buruk (%) | 0,44 | 157,14 | SR | Melampaui | |
| 1.2.4 | Rasio posyandu per 1000 balita | 10 | 85,18 | T | Belum Tercapai | |
| 1.2.5 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | | | | |
| | 1.Puskesmas per penduduk | 16 | 228,57 | ST | Melampaui | |
| | 2.Pustu per penduduk | 50 | 714,29 | ST | Melampaui | |
| 1.2.6 | Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk | 2 | 285,71 | ST | Melampaui | |
| 1.2.7 | Rasio dokter per 1000 penduduk | 23 | 85,19 | T | Belum Tercapai | |
| 1.2.7. | Rasio tenaga medis per 1000 penduduk | 2,38 | 61,03 | R | Belum Tercapai | |
| 1.2.8. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) | 100 | 101,01 | ST | Melampaui | |
| 1.2.9. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 40 | 72,75 | S | Belum Tercapai | |
| 1.2.10. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 60,41 | 107,88 | ST | Melampaui | |
| 1.2.11. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) | 100 | 105,82 | ST | Melampaui | |
| 1.2.12. | Cakupan puskesmas | 1,17 | 1,08 | SR | Belum Tercapai | |
| 1.2.13. | Cakupan pembantu puskesmas | 0,382 | 122,04 | ST | Melampaui | |
| **1.3** | **Pekerjaan Umum** | | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) | | 48,67 | SR | Belum Tercapai | 1. Masih rendahnya capaian panjang jalan dalam kondisi baik;<br>2. Masih belum memadaia jaringan Irigasi dan belum mampu mengairi pengembagan sektor pertanian;<br>3. Belum optimalnya akses masyarakat daerah perkotaan Ampana dan masyarakat wilayah Pulau-pulau terhadap air minum yang disediakan oleh PDAM sebesar 50 persen<br>4. Rendahnya persentase ketaatan masyarakat terhadap arahan rencana tata ruang atau masih sebesar 45 persen. |
| 1.3.2. | Panjang Jaringan Irigasi (km) | 33,28 | 1,40 | SR | Belum Tercapai | |
| 1.3.3. | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) | | 48,67 | SR | Belum Tercapai | |
| **1.4** | **Perumahan** | | | | | |
| 1.4.1. | Rumah tangga pengguna air bersih (%) | 91,14 | 101,27 | ST | Melampaui | 1. Sistem penyediaan air bersih khususnya di wilayah kepulauan belum optimal sehingga dibutuhkan terobosan layanan angkutan air bersih untuk memenuhi kelangkaan air bersih di Pulau-pulau;<br>2. Rumah tangga bersanitasi layak hanya mencapai sebesar 56,40 persen Tahun 2020. Angka sanitasi layak ini masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah;<br>3. Rendahnya kontribusi penanganan kumuh perkotaan khususnya pesisir dan Kawasan kumuh di kecamatan pulau-pulau terutama pada KAT dan Bajo: |
| 1.4.2. | Rumah tangga pengguna listrik (%) | 80,59 | 87,41 | T | Belum Tercapai | |
| 1.4.3. | Rumah tangga berSanitasi (%) | 56,4 | 134,86 | ST | Melampaui | |
| 1.4.4 | Jumlah Pelanggan PLN | 37.348 | 144,30 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4. Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni karena keterbatasan anggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman; |
| **1.5** | **Urusan Sosial** | | | | | 1. Persentase penduduk miskin masih sangat tinggi sebesar yaitu 16,39 persen pada Tahun 2020<br>2. Verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan belum optimal sehingga perlu selalu diperbaharui;<br>3. Masih adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sulit ditanggani di wilayah pegunungan dan kepulauan. |
| 1.5.1 | Kemiskinan | 25430 | 25,27 | S | Belum Tercapai | |
| 1.5.2 | Persentase Penduduk Miskin | 16,39 | 34,34 | R | Belum Tercapai | |
| 1.5.3 | Sarana Sosial (panti asuhan) | 2 | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 1.5.4 | Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial | 31,83 | 32,16 | SR | Belum Tercapai | |
| **1.6** | **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | 1. Rendahnya kesiapsiagaan untuk mitigasi bencana;<br>2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;<br>3. Rendahnya kualitas SDM dalam penanganan bencana;<br>4. Belum optimalnya cakupan pene-gakan Perda terhadap masalah K3;<br>5. Rendahnya cakupan antisipasi dan pelayanan kebakaran dan bencana alam.<br>6. |
| | Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk | 10,13 | 44,05 | SR | Belum Tercapai | |
| **2** | Bidang Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar | | | | | |
| **2.1** | Bidang Tenaga Kerja | | | | | 1. Masih ada tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,84 persen pada Tahun 2020;<br>2. Masih rendahanya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; |
| 2.1.1 | Persentase penduduk yang bekerja | 97,16 | 99,14 | ST | Belum Tercapai | |
| 2.1.2 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) | 75,33 | 107,61 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Jumlah Pengangguran | 1.513 | 126,08 | SR | Melampaui | 3. Belum sepenuhnya pengusaha dan pekerja memahami ketentuan perundangan-undangan (regulasi) ketenagakerjaan'<br>4. Belum optimalnya pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) |
| 2.1.4 | Pencari kerja yang ditempatkan (%) | 32 | 212,26 | ST | Melampaui | |
| 2.1.5 | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%) | 2,84 | 42,00 | R | Belum Tercapai | |
| 2.1.6 | Persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 63,64 | 106,06 | ST | Melampaui | |
| **2.2** | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 sebesar 91,28, masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 92,01;<br>2. Rendahnya penyelesaian penga-duan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;<br>3. Kurangnya cakupan regulasi dan kebijakan pemberdayaan Pere-mpuan dan Anak. |
| 2.2.1 | Rasio KDRT | 0,0100 | 0,00 | ST | Belum Tercapai | |
| 2.2.2 | Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak | 100 | 105,26 | ST | Melampaui | |
| **2.3** | Bidang Pangan | | | | | 1. Tingginya tingkat ketergantungan konsumsi beras masyarakat<br>2. Masih adanya desa rawan pangan<br>3. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknologi serta inovasi pelaku usaha ketahanan pangan dan penyuluhan |
| 2.3.1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (adhk) | | 67,44 | S | Belum Tercapai | |
| 2.3.2 | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | | 73,81 | S | Belum Tercapai | |
| 2.3.3 | Produktivitas total daerah | 46,11 | 75,12 | S | Belum Tercapai | |
| **2.4** | Bidang Pertanahan | | | | | 1. Adanya tumpang tindih *(overlapping)* kepemilikan lahan; |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Luas lahan bersertifikat | 335.913.978 | 1.964,43 | ST | Melampaui | 2. Belum optimalnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah Pemda;<br>3. Belum sesuainya pemanfaatan dan pengelolaan lahan dengan peruntukannya |
| 2.4.2 | Jumlah kasus tanah yang diselesaikan | 2 | 100,00 | ST | Sesuai | |
| | | | | | | |
| **2.5** | Bidang Lingkungan Hidup | | | | | 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan;<br>2. Tingginya alih fungsi lahan dan penebangan liar hutan sehingga menggangu daerah resapan air mengakibatkan beberapa daerah mudah banjir;<br>3. Adanya perubahan iklim meningkatkan curah hujan dan suhu udara ikut dirasakan oleh Kabupaten Tojo Una-Una;<br>4. Tatakelola persampahan yang kurang baik mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan;<br>5. Tingginya kerusakan Terumbu Karang sebagai asset potensi pariwisata Kepulauan Togean karena maraknya *illegal fishing* (bom ikan) oleh masyarakat setempat;<br>6. Rendahnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, luas pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau;<br>7. Rendahnya persentase penanganan dan pengelolaan sampah;<br>8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan |
| 2.5.1 | Persentase Penduduk berakses air minum | 95,32 | 107,10 | ST | Melampaui | |
| | Jumlah pelanggan PDAM | 19.100 | 155,66 | ST | Melampaui | |
| | Jumlah RT pengguna air bersih | 33948 | 140,17 | ST | Melampaui | |
| | Persentase RT Pengguna Air Bersih | 95,32 | 126,60 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6** | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | 1. Belum optimalnya penyelesaian pasangan berakta nikah;<br>2. Belum optimalnya penerbitan kuti-pan akta kematian;<br>3. Seluruh pelaksanaan catatan sipil perkawinan masih dilaksanakan di tingkat kabupaten |
| 2.6.1 | Persentase penduduk ber-KTP | | 52,95 | R | Belum Tercapai | |
| 2.6.2 | Persentase pasangan ber-akta nikah | | 180,10 | ST | Melampaui | |
| 2.6.3 | Persentase penduduk ber-akta kelahiran | 87,82 | 131,08 | ST | Melampaui | |
| 2.6.4 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 2.6.5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | 100,00 | ST | Sesuai | |
| **2.7** | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | | | 1. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur apparat desa;<br>2. Desa membangun sebagai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 belum diimplementasikan dengan baik;<br>3. Rendahnya kemampuan manajerial pengurus Bumdesa dan Bumdes;<br>4. Kurangnya tingkat pemahaman dan komitmen aparatur Pemerintah Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;<br>5. Rendahnya kualitas SDM pengelola Keuangan dan asset desa |
| 2.7.1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 15,23 | 38,07 | SR | Belum Tercapai | |
| 2.7.2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 0 | 0,00 | SR | Belum Tercapai | |
| 2.7.3 | Rasio LPM Berprestasi | Belum ada | 0,00 | SR | Belum Tercapai | |
| 2.7.4 | PKK aktif (%) | 100 | 101,01 | ST | Melampaui | |
| 2.7.5 | Posyandu aktif (%) | 100 | 208,77 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8** | Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | | 1. Tingginya laju pertumbuhan pen-duduk;<br>2. Belum optimalnya capaian penuru-nan angka pernikahan usia dini;<br>3. Rendahnya capaian persentase Keluarga Sejahtera |
| 2.8.1 | Jumlah akseptor KB aktif | 22.612 | 43,94 | SR | Belum Tercapai | |
| 2.8.2 | Cakupan peserta KB aktif | 76,60 | 90,12 | ST | Belum Tercapai | |
| 2.8.3 | Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I | 6763 | 62,97 | R | Belum Tercapai | |
| **2.9** | Bidang Perhubungan | | | | | 1. Terbatasnya moda transportasi khususnya yang menghubungkan wilayah pulau-pulau;<br>2. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut belum memadai;<br>3. Rendahnya rasio izin trayek;<br>4. Menurunnya frekuensi penerbangan udara dari dan ke Kota Tojo Una-Una karena adanya pandemi Covid-19 dan belum beroprasinya Pelabuhan Udara Ampana. |
| 2.9.1 | Penumpang Kapal Laut | | 25,10 | SR | Belum Tercapai | |
| 2.9.1.1 | Jumlah Pelabuhan Laut | | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 2.9.1.2 | Jumlah Pelabuhan udara | 1 | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 2.9.1.3 | Jumlah terminal | 1 | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 2.9.2 | Angkutan darat | 44 | 38,26 | SR | Belum Tercapai | |
| 2.9.2.1 | Pemasangan Rambu-rambu | 31 | 68,89 | S | Belum Tercapai | |
| 2.9.2.2 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 1,22 | 555,18 | ST | Melampaui | |
| 2.9.2.3 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | | | | |
| 2.9.2.4 | Jumlah orang (jiwa) | 118.853 | 58,80 | R | Belum Tercapai | |
| 2.9.2.5 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | | | | | |
| | Dermaga (orang) | 115806 | 1.871,76 | ST | Melampaui | |
| | Dermaga (Barang) | 89246 | 2.992,82 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.10** | Bidang Komunikasi Dan Informatika | | | | | 1. Satu data Kabupaten Tojo Una-Una belum terbangun di dalam mewujudkan *Smart Governance*;<br>2. Masih sulitnya pengolahan data dan informasi pembangunan;<br>3. Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan fasilitas teknologi informasi;<br>4. Belum optimalnya Ketersediaan jaringan komunikasi dan infor-matika terutama di wilayah-wilayah Kecamatan Pulau-Pulau dan Desa terpencil;<br>5. Rendahnya minat masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang disediakan pemerintah daerah melalui situs resmi pemda/website;<br>6. Belum terbangun dan terintegrasi-nya Satu data Tojo Una-Una |
| | **Rasio Wartel dan Warnet per penduduk** | **0** | **-** | **SR** | **Belum Tercapai** | |
| **2.11** | Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | | | | | 1. Masih adanya koperasi berstatus kurang sehat;<br>2. Pelaku usaha UKM menghadapi permasalahan akses permodalan ke Lembaga keuangan;<br>3. Kemampuan teknologi infomasi dalam memasarkan produk masih rendah |
| 2.11.1 | Persentase koperasi aktif | 41 | 68,33 | S | Belum Tercapai | |
| 2.11.2 | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM | 258 | 191,11 | ST | Melampaui | |
| **2.12** | Bidang Penanaman Modal | | | | | 1. belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari investor dengan Jaminan *safe investment* di Kabupaten Tojo Una-Una |
| 2.12.1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 26 | 236,36 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2 | Realisasi investasi berskala nasional PMDN/PMA (Juta Rupiah) | 69.870,00 | 221,81 | ST | Melampaui | 2. Rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA;<br>3. Kurangnya kecamatan yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 2.12.3 | Lama proses perijinan | 3 | 142,86 | ST | Melampaui | |
| 2.12.4 | Jumlah Perda terkait Perizinan | 1 | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 2.12.5 | Rasio daya serap tenaga kerja | 0,00 | 0,0000001 | SR | Belum Tercapai | |
| **2.13** | Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | | | | | 1. Masih kurangnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una;<br>2. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;<br>3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik belum memadai |
| | a. Jumlah klub olahraga | 70 | 90,91 | ST | Belum Tercapai | |
| | b. Jumlah gedung olahraga | 11 | 100,00 | ST | Sesuai | |
| **2.14** | Bidang Statistik | | | | | 1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM bidang statistic;<br>2. Berbagai Indikator pencapaian dan evaluasi pembangunan berdasarkan urusan belum semuanya dapat di hitung secara sattistik oleh Kabupaten;<br>3. Terbatasnya anggaran bidang statistik |
| | Buku ”kabupaten dalam angka” | Ada | 100,00 | ST | Sesuai | |
| | Buku ”PDRB kabupaten” | Ada | 100,00 | ST | Sesuai | |
| **2.15** | Bidang Persandian | | | | | 1. Kemampuan SDM masih terbatas dibidang sandiman;<br>2. Sarana dan prasarana dalam bekerja dibidang persandian belum memadai; |
| | | | | | | |
| **2.16** | Bidang Kebudayaan | | | | | 1. Anggaran dalam memelihara benda dan situs daerah terbatas; |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.1 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 9 | 450,00 | ST | Melampaui | 2. Kabupaten Tojo Una-Una hanya 2 (dua) peninggalan sejarah dan cagar budaya yang di yang terdaftar padahal masih banyak cagar budaya yang perlu mendapat perhatian.<br>3. Dampak negatif yang ditimbulkan dari arus globalisasi terutama kebudayaan barat.<br>4. Kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal masih rendah |
| 2.16.2 | Total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah | 7 | 41,18 | SR | Belum Tercapai | |
| **2.17** | Bidang Perpustakaan | | | | | 1. Rendahnya minat baca masyarakat<br>2. Kurangnya jumlah koleksi buku/ bahan bacaan di perpustakaan<br>3. Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai |
| **2.17.1** | Jumlah perpustakaan | 1 | 100,00 | ST | Sesuai | |
| **2.17.2** | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 157 | 157,00 | ST | Melampaui | |
| **2.18** | **Bidang Kearsipan** | | | | | 1. Belum optimalnya pengelolaan, pe-nyelamatan dan pelestarian Arsip secara baku sesuai standar arsip<br>2. Manajemen dan tatakelola kearsipan belum optimal |
| | | | | | | |
| **Fokus Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | |
| **3.1** | **Pertanian** | | | | | 1. Kesejahteraan petani masih rendah;<br>2. Menurunnya kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB selama beberapa tahun terakhir;<br>3. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Sektor Pertanian; |
| 3.1.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | | | | | |
| 3.1.1.1 | Padi Sawah | 6,60 | 160,98 | ST | Melampaui | |
| 3.1.1.2 | Padi Ladang | | 159,96 | ST | Melampaui | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.3 | Jagung | | 870,00 | ST | Melampaui | 4. Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian;<br>5. Teknologi pengolahan hasil pertanian masih minim;<br>6. Lebih mengutamakan produk-produk pertanian yang memenuhi kebutuhan ekspor tanpa memper-hatikan kebutuhan lokal; |
| 3.1.1.4 | Kedelai | | 456,18 | ST | Melampaui | |
| 3.1.1.5 | Kacang Tanah | | 759,23 | ST | Melampaui | |
| 3.1.1.6 | Kacang Hijau | | 55,84 | R | Belum Tercapai | |
| 3.1.1.7 | Ubi Kayu | | 838,43 | ST | Melampaui | |
| 3.1.1.8 | Ubi Jalar | | 354,51 | ST | Melampaui | |
| 3.1.2. | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | 37,27 | 101,55 | ST | Melampaui | |
| **3.2.** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | **1.** Kewenanagan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat, sehingga daerah Kabupaten sulit mengelola sumberdaya alam potensial dari sektor pertambangan**.** |
| 3.2.1 | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | 1,46 | 89,57 | T | Belum Tercapai | |
| **3.3** | **Pariwisata** | | | | | 1. Rendahnya kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Tojo Una-Una;<br>2. Revisi Dokumen Pariwisata dari Riparda ke riparkab belum dilakukan;<br>3. Pengembangan pariwisata belum sinergi antara pelaku pariwisata dan Pemerintah daerah; |
| 3.3.1. | Kunjungan wisata | 374 | 2,23 | SR | Belum Tercapai | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2. | Kontribusi Sektor Pariwisata (akomodasi & makan minum) | 0,69 | 97,18 | ST | Belum Tercapai | 4. Belum optimalnya penataan destinasi wisata karena keterbatasan anggaran pariwisata;<br>5. Infrastruktur dan aksesililitas terhadap destinasi unggulan masih terbatas baik di darat maupun di wilayah kepulauan Togean;<br>6. Perangkat Daerah (PD) belum terarah didalam program yang mendukung pengembangan Pariwsata;<br>7. SDM dan kelembagaan pariwisata belum memadai;<br>8. Pemasaran pariwisata termasuk didalamnya adalah promosi dan pengemasan produk wisata belum optimal;<br>9. Event-event pariwisata belum terjadwal secara regular dan kontinyu serta belum masuk dalam kelender ivent nasional;<br>10. Industri pariwisata belum optimal;<br>11. Belum terintegrasi pemasaran destinasi pariwisata antar daerah Kabupaten/Kota sesuai potensi. |
| | Jumlah restoran dan rumah makan | 145 | 90,06 | ST | Belum Tercapai | |
| **3.4.** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | |
| **3.4.1.** | **Produksi perikanan (ton)** | **22.916** | **654,74** | **ST** | **Melampaui** | 1. Rendahnya kesejahteraan nelayan;<br>2. Nelayan menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan; |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.4.2.** | **Produksi perikanan kelompok nelayan (%)** | **14,346** | **61,05** | **R** | **Belum Tercapai** | 3. Kurang optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan;<br>4. Maraknya *illegal fishing* (Bom Ikan) oleh masyarakat setempat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan habitat laut. |
| **3.5.** | **Perdagangan** | | | | | |
| **3.5.1.** | **Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB** | **8,13** | **83,81** | **T** | **Belum Tercapai** | 1. Ijin mendirikan bangunan dan infrastruktur yang belum memadai.<br>2. Rendahnya akses permodalan bagi pedagang/usaha mikro/informal dalam pemberdayaan dan penge-mbangan Sektor UMKM |
| **3.6.** | **Perindustrian** | | | | | |
| **3.6.1.** | **Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB** | **8,41** | **95,24** | **ST** | **Belum Tercapai** | 1. Belum berkembang baik skala industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Tojo Una-Una;<br>2. Rendahnya akses permodalan bagi IKM;<br>3. Rendahnya kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pelaku IKM |
| **3.6.2.** | **Pertumbuhan Industri** | **-0,9** | **(19,15)** | **SR** | **Belum Tercapai** | |
| **3.7.** | **Ketransmigrasian** | | | | | |
| 3.7.1. | Transmigran swakarsa per total transmigran | 52,46 | 138,86 | ST | Melampaui | 1. Tidak adanya pembangunan per-mukiman transmigrasi Baru selama periode Tahun 2016–2021<br>2. Belum tersedianya pembangunan dan Pembinaan Kawasan Permukiman transmigrasi baru |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Fokus Urusan Penunjang** | | | | | |
| **4.1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | |
| 4.1.1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada | 100,00 | ST | Sesuai | 1. Rendahnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan;<br>2. Tidak tersedianya data perencanaan yang akurat;<br>3. Belum optimalnya koordinasi dan implementasi perencanaan;<br>4. Perubahan aturan didalam implemtasi perencananan dan penganggaran yang terintegrasi masih sulit diterapkan |
| 4.1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | Ada | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 4.1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada | 100,00 | ST | Sesuai | |
| 4.1.2 | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | Ada | 100,00 | ST | Sesuai | |
| **4.2** | Sekretariat Daerah | | | | | |
| 4.2.1 | Bagian Organisasi dan Tata laksana | | | | | 1. Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi;<br>2. Rendahnya hasil penilaian EPPD Kabupaten Tojo Una-Una oleh Kemendagri Tahun 2019;<br>*3.* Belum optimalnya Kinerja Peme-rintahan Daerah dalam penge-lolaan Administrasi Kewilayahan;<br>*4.* Belum optimalnya pelaksanaan otonomi Daerah;<br>5. Nilai SAKIP Kabupaten dan Perangkat Daerah masih rendah. |
| 4.2.2 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 1. Terbatasnya aparatur UKPBJ;<br>2. Belum adanya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang (JF-PPBJ); |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang/jasa |
| 4.2.3 | Bagian Ekonomi terkait Stabilitas Harga Komoditi dan Layanan BUMD | | | | | 1. Belum stabilnya harga LPG;<br>2. Harga Kebutuhan bahan pokok meningkat tinggi utamanya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan pulau-pulau akibat biaya distrubusi yang tinggi;<br>3. Belum stabilnya harga komoditas Beras, buah-buahan dan sayur-sayuran karena masih dipasok dari wilayah Kabupaten sekitar;<br>4. Pelayanan BUMD (PDAM) masih belum optimal dan masih menga-lami kerugian setiap tahun<br>5. Kinerja BUMD belum optimal dan core bisnis yang belum focus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menunjang pengembangan Trisula Sektor Unggalan Tojo Una-Una. |
| **4.2.4** | Bagian Hukum | | | | | Belum optimalnya kordinasi dan tindak lanjut RANHAM serta penanganan kasus litigasi dan non litigasi |
| **4.2.5** | Bagian Humas | | | | | Belum optimalnya kordinasi penye-barluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.2.6** | Bagian Kesra | | | | | Belum optimalnya kordinasi dan fasilitasi pelayanan hidup beragama |
| **4.3** | Sekretariat DPRD | | | | | Belum optimalnya capaian Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda |
| **4.4** | Keuangan | | | | | 1. Kurang optimalnya capaian pe-ndapatan dari PAD di Kabupaten Tojo Una-Una<br>2. Terjadinya penurunan pendapatan Tahun 2020, karena adanya pandemi dan adanya perintah untuk melalukan *refocusing* anggaran akibat Covid-19 |
| | | | | | | |
| **4.5** | Kepegawaian | | | | | Belum optimalnya penegakan hukuman disiplin ASN |
| | | | | | | |
| **4.6** | Pendidikan Dan Pelatihan | | | | | Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural fungsional dan teknis |
| | | | | | | |
| **4.7** | Penelitian Dan Pengembangan | | | | | Rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una |
| | | | | | | |
| **4.8** | Inspektorat Daerah | | | | | 1. Kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan;<br>2. Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas standar auditor;<br>3. Belum sinkron dan sinergi pengukuran kinerja perangkat daerah; |
| | | | | | | |
| **4.9** | Kecamatan | | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian 2020 | Status Capaian RPJMD Tahun 2020 | Status Capaian Interpretasi Blm Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1. Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada wilayah kecamatan;<br>2. Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai;<br>3. Anggaran belanja kecamatan masih terbatas dibandingkan dengan tuigas dan fungsi kecamatan. |
| **4.10** | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 1. Adanya ancaman terorisme dan gangguan Kamtibmas;<br>2. Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat;<br>3. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarga-negaraan, dan kebangsaan;<br>4. Lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama;<br>5. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa;<br>6. Indeks Kerukunan Umat Beragama masih perlu ditingkatkan |
| | | | | | | |

Sumber: Hasil Pemetaan Masalah Kabupaten Tojo Una-Una Berdasarkan Urusan, 2021

## 4.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis *(strategic issues)* adalah isu-isu jika diprioritaskan penanganan, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini, tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPJMD, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, Provinsi dan daerah, serta pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sementara penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan, khususnya kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tojo Una-Una.

Melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, pada proses penyusunan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dilakukan juga penelaahan terhadap isu internasional (global) yang dapat mempengaruhi kondisi Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini dimaksudkan perencanaan yang dihasilkan holistik dan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika internasional, nasional, dan regional.

### 4.2.1 Isu Strategis di Tingkat Global

#### 1. Krisis Perekonomian Global

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi stabilitas perekonomian dunia menjadi stagnan dan negatif. Berdasarkan data dari OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), bahwa pandemi ini memicu resesi ekonomi paling parah dalam satu abad terakhir dan menyebabkan kerusakan pada bidang kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan manusia. Terdapat dua skenario global yang diproyeksikan terjadi dan skenario tersebut memprediksi perekonomian global jatuh pada penurunan ekonomi lebih dari 6 (enam) persen.

Menurut *International Monetary Fund*, pandemi Covid-19 telah menyebabkan resesi dunia yang ditandai dengan peningkatan angka penga-

ngguran dan kemiskinan setiap negara di dunia. *Lockdown* berskala besar menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia dan diproyeksikan pemulihan parsial dapat terealisasi pada Tahun 2021, tetapi kecenderungan PDB masih dibawah *trend* sebelum adanya virus.

Negara-negara berkembang memiliki keterpurukan kondisi keuangan yang lebih parah karena penutupan pusat-pusat kegiatan dan penambahan jumlah pengangguran. Proyeksi kedua lembaga ini memberikan peringatan pada dunia untuk mewaspadai segala risiko. Pertumbuhan ekonomi dunia pada Januari 2020 sebesar (-6,3) persen diperkirakan mengalami peningkatan secara umum pada Tahun 2020 menjadi (-3) persen pada Tahun 2020, dan memiliki pertumbuhan positif pada Januari Tahun 2021 menjadi 5,8 persen. Sedangkan laju pertumbuhan tersebut menurun menjadi 6,4 persen pada Oktober Tahun 2020. Kedua lembaga ini memperkirakan pada Januari 2021 dan Oktober 2020, laju pertumbuhan ekonomi tertahan pada angka 2,4 persen dan 2,2 persen. Amerika Serikat dan Zona Euro yang tumbuh (-7,9) persen dan (-8,8) persen pada Januari Tahun 2020; dan diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi (-8) persen; dan (-8,9) persen pada Oktober Tahun 2020. Pada 2021, Amerika dan Zona Euro diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi pada Januari 2021 menjadi 3,0 persen dan 3,3 persen. Dua negara yang ekonominya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yakni Tiongkok dan India yaitu (-4,8) persen dan (-3,9) persen pada Januari 2020, meskipun keduanya mengalami pertumbuhan ekonomi minus namun lebih baik dibandingkan negara-negara di dunia. Penurunan ekonomi diprediksi masih terjadi hingga Oktober 2020 menjadi (-4,6) persen dan (-5,1) persen dan mengalami kenaikan pada Januari 2021 menjadi 9,2 persen dan 7,4 persen dan diakhiri dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada oktober 2021 yaitu sebesar 3,3 persen dan 0 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi fenomena umum terjadi pada di saat negara-negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Amerika Serikat dan Tiongkok yang diharapkan pada 2020 menjadi motor penggerak ekonomi global mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19.

**2. Perilaku dan Kebiasaan Masyarakat akibat Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, ekonomi, dan banyak mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat. Berdasarkan data worldometers pada bulan Mei Tahun 2021, total kasus infeksi Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 153.469.682 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.215.686 orang meninggal dunia dan 130.788.629 orang dinyatakan sembuh.

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kebiasaan masyarakat untuk mencuci tangan, menggu-

nakan masker dan menjaga jarak harus selalu dilakukan. Hingga saat ini semua negara termasuk Indonesia sedang berupaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini diantaranya adalah dengan pemberian vaksin anti virus corona atau Covid-19.

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat di seluruh Indonesia lebih sadar tentang rentannya manusia terhadap penyakit. Oleh karena itu, perilaku hidup sehat akan menjadi berubah lebih baik, dengan mengkonsumsi makanan sehat secara seimbang, berolah raga dan jam tidur yang teratur, lebih rutin memeriksakan kondisi kesehatan, mencari asuransi kesehatan yang terpercaya, menjaga kebersihan, dan menggunakan alat atau mengkonsumsi suplemen untuk terhindar dari penyakit. Perilaku hidup sehat tidak terbatas pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental.

Teknologi memiliki peran penting dalam perubahan perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19. Pertemuan terpaksa dilakukan secara daring (*online*) yang memaksa masyarakat memiliki jaringan internet secara stabil. Belanja pulsa dan paket data menjadi pengeluaran utama masyarakat di masa pandemi.

### 3. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

SDGs atau TPB (Tujuan Pembangunan Berkelajutan) merupakan kesepakatan global untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara lebih baik dari berbagai aspek, baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs dideklarasikan pada Tahun 2015, berorientasi pada: (1) Perubahan konsep dan fokus isu yang mendasar secara signifikan terhadap isu-isu per-masalahan lingkungan; (2) Perkembangan pembangunan menjadi siklus yaitu *economic development - population development - environment development.*

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki 6 (lima) aspek yang perlu dicapai dalam dunia global antara lain: *thriving lives and livehoods* (kehidupan yang sehat dan layak), *sustainable food security* (keamanan dan ketahanan pangan), s*ecure sustainable water* (sumber air bersih), *universal clean energi* (energi yang aman), *healthty and productive ecosystems* (ekosistem yang produktif dan sehat), *governance for sustainable Societies* (kebijakan yang berpihak terhadap komunitas). Untuk mencapai tujuan SDGs Tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini dimulai dengan diintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tersusun Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Regulasi ini menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat *platform* partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi, dan pakar dalam menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Amanah aturan ini juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depan. Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. SDG's juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju.

Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una, menjadikan pencapaian tujuan SDG's sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah, dan masyarakat. Beberapa indikator yang masih menjadi masalah bagi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendukung Pencapaian RAD SDG's Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah TPB yang diintegrasikan dengan TPB kabupaten/kota.

**4. Degradasi Lingkungan Hidup**

Degradasi lingkungan hidup kondisi, dimana terjadi penurunan daya dukung, atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan. Degradasi lingkungan adalah salah satu ancaman yang dapat mengganggu kualitas hidup manusia. Olehnya itu degradasi lingkungan hidup ini menjadi isu penting di tingkat global yang perlu mendapat perhatian serius. Degradasi ini merupakan pengurangan kapasitas terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan tujuan ekologis. Jenis-jenis degradasi lingkungan diantaranya adalah kerusakan habitat alami, habisnya sumber daya alam dan rusaknya lingkungan. Upaya-upaya untuk mengatasi hal ini meliputi pengelolaan sumber daya dan perlindungan terhadap lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia diantaranya adalah kebakaran hutan Brasil Tahun 2019. Rusaknya hutan Amazon sebagai paru-paru Bumi, merupakan ancaman yang besar bagi lingkungan dan seluruh dunia. Efek deforestasi dan penebangan pohon secara terus menerus akan menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan di sekitar kita dengan

berkurangnya suplai oksigen dan penyerapan karbon dioksida, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Masalah lain terkait hal ini adalah konsumsi berlebih dan pemborosan penggunaan kertas yang bahan bakunya berasal dari hutan tersebut. Sejumlah besar limbah yang tidak dapat didaur ulang juga menyebabkan penimbunan limbah dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan degradasi tanah. Penebangan hutan secara terus menerus juga mengurangi unsur hara dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak dapat diberdayakan.

Isu global tentang lingkungan hidup adalah perubahan iklim *(climate change)* dan pemanasan global *(global warming)* sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Perubahan iklim menjadi agenda global akhir-akhir ini karena kegiatan manusia semakin banyak menggunakan energi yang terkait dengan bahan bakaryang berasal dari fosil dan alih guna lahan dari hutan menjadi permukiman. Perubahan iklim yang dikhawatirkan sejumlah pihak, terutama yang berasal dari kegiatan manusia (man-made/*anthopogenic*), bukan karena adanya fenomena alam seperti letusan gunung berapi dan sebagainya.

Masih banyak sejumlah pihak, baik dari kalangan pemerintah, pelaku bisnis dan industri, maupun masyarakat, yang belum menyadari bahwa fenomena degradasi lingkungan hidup telah terjadi seiring dengan intensitas kegiatan manusia di berbagai aspek kehidupan. Pengabaian *ecological/ environmental truth* sebagai fakta bahwa dunia alam semesta tempat kita bermukim akan rusak dan menimbulkan dampak bencana bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri terus terjadi. Kegiatan-kegiatan manusia tersebut, yang berakibat meningkatnya efek gas rumah kaca, diakibatkan karena adanya emisi gas-gas CO (karbon dioksida), CH (*metana*), N0 (*nitrogen oksida*), PFC (perflourokarbon), HFC (*hidroflourokarbon*), dan SF (*sulfur heksaflorida*). Gas-gas tersebut dapat mengakibatkan peningkatan suhu bumi, karena bersifat menahan radiasi gelombang panjang yang bersifat panas.

Fakta yang ditunjukkan Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terjadi anomali kenaikan suhu akibat adanya efek rumah kaca pada akhir abad ke-21, ada tren kenaikan 2-4,5 derajat celsius. Bila hal ini dibiarkan saja tanpa ada perubahan perilaku manusia, berbagai bencana besar akan terjadi karena anomali perubahan iklim akan memicu kekacauan pada keberlanjutan industri pangan, pertanian, dan kenaikan air permukaan laut karena mencairnya es di kutub. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming.

Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

Berbagai kerusakan lingkungan yang dirasakan saat ini ternyata memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masa kini, lalu kemudian muncul keinginan untuk memperbaiki. Hal ini terjadi silih berganti sesuai dengan zamannya yang merupakan siklus hidup dari masa ke masa, dari zaman ke zaman dan dari peradaban ke peradaban. Kondisi memasuki peralihan dari fase buruknya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menjadi fase positif terhadap lingkungan. Sekarang ini umumnya manusia telah menyadari pentingnya alam untuk kelangsungan hidup. Perlahan manusia memperbaiki alam yang telah rusak dan mengurangi hal-hal yang merugikan alam. Manusia melakukan upaya penyelamatan hutan dan makhluk hidup lain yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Namun, banyak pula manusia yang terus mencemari alam tanpa memikirkan risiko yang ditimbulkan ke depan.

Untuk membatasi peningkatan suhu global dilakukan berbagai upaya untuk melalukukan penurunan emisi gas rumah kaca oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan. Upaya mempertahankan lingkungan hidup agar kondisi lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi saat ini hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan *(SDG's).*

**5. Kemajuan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Perkembangannya telah berdampak pada peradaban dan kesejahteraan manusia secara global dalam segala aspek kehidupan mencakup sosial budaya, ekonomi, perdagangan, politik, pertahanan, keamanan dan aspek lainnya.

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital, yang tidak dapat dilepaskan pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif,

baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada, sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depan diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai tetapi mampu menjadi pembuat sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat alam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

Saat ini dunia berada pada Industri 4.0 dimana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Diksi "*smart factory*" menjadi keniscayaan di era Industri 4.0 sebagaimana munculnya istilah *smartphone, smartcard,* dan istilah-istilah lain. Istilah Industri 4.0 dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu. Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Ke-empat (*fourth industrial revolution*). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan, dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Ke-empat.

Merujuk pada hasil dari *World Economic Forum* (WE), Tahun 2020 dimana era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada sepuluh *soft-skill* yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri, yakni menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*complex problem solving*), berpikir kritis (*critical thinking*), kreatifitas (*creativity*), manajemen SDM (*people management*), koordinasi (*coordinating*), kecerdasan emosional (*emotional intelligence*), pengambilan keputusan (*judgment and decision making*), orientasi pada layanan (*service orientation*), negosiasi (*negotiation*) dan kelenturan berpikir (*cognitive flexibility*). Tujuan utama dari industri 4.0 ini adalah kestabilan distribusi barang dan kebutuhan. Industri 4.0 memungkinkan pendataan kebutuhan masyarakat secara *real-time*, dan

mengirim data tersebut ke produsen. Sehingga, para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Tentunya secara ekonomi, hal ini dapat menjaga kestabilan harga. Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar. Pelacakan produk dan transparansi akan semakin mengarah ke layanan baru. Hal ini dimungkinkan, karena mekanisme Industri 4.0 mengintegrasikan produsen dengan jalur pasokan tanpa batas geografis.

**6. Ketahanan Pangan**

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkekanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996).

Pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat begejolak secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Menurut FAO *Agricultural and Development Economics Division* (Juni 2006) tentang "*food security*", ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya.

Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan, jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan juga merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan dapat dilihat dari kacamata keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko yang dihadapi oleh suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini masih banyak orang lapar. Salah satu ancaman serius dan ditakuti oleh umat manusia di muka bumi ini adalah terjadinya kelangkaan akan kecukupan pangan. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika menjadi pengalaman yang berharga. Tingginya harga pangan menjadi salah satu sebab munculnya gerakan

reformasi yang radikal. Mozambique adalah salah satu negara contoh yang mengalami persoalan pangan dan berakhir pada ketidakstabilan politik.

Adanya dampak sosial yang cukup memprihatinkan dari meroketnya harga pangan dunia menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal dan sekaligus mengancam stabilitas keamanan negara itu. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin mahal mendorong permintaan akan peningkatan pendapatan demi bertahan dalam situasi ekonomi dan politik yang sulit. Berdasarkan laporan *Food Security Information Network* (FSIN), kemungkinan krisis pangan dunia semakin memburuk, dan tampaknya keadaan ini akan bertambah parah di sejumlah tempat di dunia, khususnya di beberapa negara yang ketahanan pangannya rendah, sehingga berpotensi menghadapi tingginya risiko kelaparan.

Wilayah dan negara yang disinyalir memiliki potensi kelaparan yang tinggi antara lain: beberapa wilayah di Timur Laut Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, dan Yemen. Penyebab kelaparan di beberapa negara ini yakni karena adanya konflik bersenjata, kekeringan, buruknya situasi ekonomi makro, dan politik. Sebagaimana yang diumumkan FSIN, bahwa terdapat 108 juta orang menghadapi tingkat kritis kerawanan pangan pada 2019, dan terus meningkat secara drastis dari angka di tahun sebelumnya yang tercatat sekitar hanya 80 juta orang. Penyebaran daerah rawan pangan akan terjadi di beberapa wilayah Asia lainnya menyusul Irak, Suriah, Malawi, dan Zimbabwe. Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), diestimasi sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan.

**7. Ancaman Krisis Energi Dunia**

Saat ini dunia sedang dilanda krisis dibidang energi, khususnya energi minyak bumi yang merupakan sumber energi utama dunia. Krisis ini terjadi akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran (*demand and supply*) yang didorong pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya industrialisasi dunia. Krisis energi dunia berdampak sangat signifikan bagi Indonesia mengingat di satu sisi Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil ini. Karena minyak bumi di Indonesia tidak sekedar dijadikan sumber energi untuk kendaraan dan pabrik industri, melainkan juga pembangkit listrik. Di sisi lain, pemerintah masih memberikan subsidi kepada bahan bakar minyak ini.

Selain itu, isu global terkait energi dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energi dan pengembangan energi baru terbarukan, pertambangan liar *(illegal mining)* dan pertambangan berkelanjutan. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding

dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud sejak tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga meng-agendakan isu energi dan ketahanan pangandisamping isu-isu perekonomian.

Sumberdaya hutan di Kabupaten Tojo Una-Una masih luas sehingga aktifitas pertanian dan kehutanan akan memberi pilihan antara kebutuhan energi dan pangan sebagai suatu subsitusi. Artinya adalah para pelaku ekonomi di bidang pertanian dituntut untuk cerdas memilih komoditi yang akan diproduksi. Jika pilihan pilihan ekonomi saja menjadi pertimbangan maka konflik kepentingan terjadi. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Isu global di atas akan menjadi konflik konflik lokal jika tidak diantisipasi dengan baik.

**8. Ancaman Bencana Alam Global**

Ancaman bencana alam di dunia makin meningkat dalam satu dekade terakhir, seiring dengan membesarnya level risiko bencana. Bencana hidrometeorologi merupakan yang paling banyak mengancam penduduk bumi. Sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi mereka. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan sang maha pencipta. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran.

Bencana yang dimaksud di atas mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar bahkan tsunami yang akan menghantam kawasan pantai. Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi. Tingkat karbon dioksida, gas methana dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia, akibat Perubahan Iklim Peningkatan suhu bumi memicu musim hujan yang sulit diprediksi, kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian USA, Eropa, dan Asia. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang

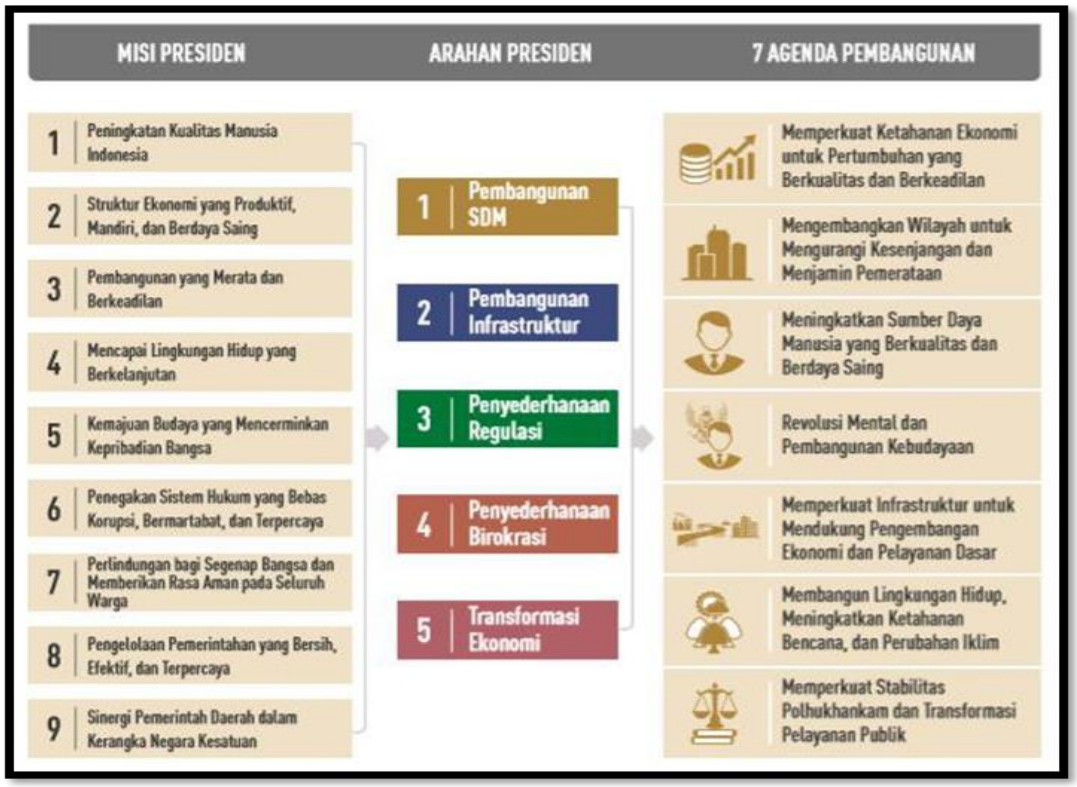
menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Sampai saat ini para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu per satu. Mereka belum mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini terjadi sekaligus. Tahun 2018, negara bagian Amerika dan sebagian Eropa mengalami musim kering panjang, suhu panas yang mencapai rekor, lebih dari 100 kebakaran hutan, dan badai (Badai Michael) yang paling kuat yang pernah menghantam kawasan itu. Kalau hanya memusatkan perhatian pada satu aspek saja dari bencana alam itu, mungkin kita tidak akan melihat bencana lain. Karenanya, perigatan dini membuat pernilaian menyeluruh tentang dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, perlu dilakukan untruk mengantisipasi jatuhnya korban yang banyak akibat bencana. Kemungkinan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus tergantung dari apakah manusia bisa mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan cepat.

Perjanjian iklim yang ditandatangani di Kota Paris Tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi diatas dua derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Jika emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota-kota di dunia kemungkinan akan dilanda empat jenis bencana alam sekaligus. Termasuk di antaranya adalah hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka kawasan-kawasan pantai di daerah tropis akan menghadapi bencana paling besar.

### 4.2.2 Telaahan Kebijakan Nasional

#### 1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

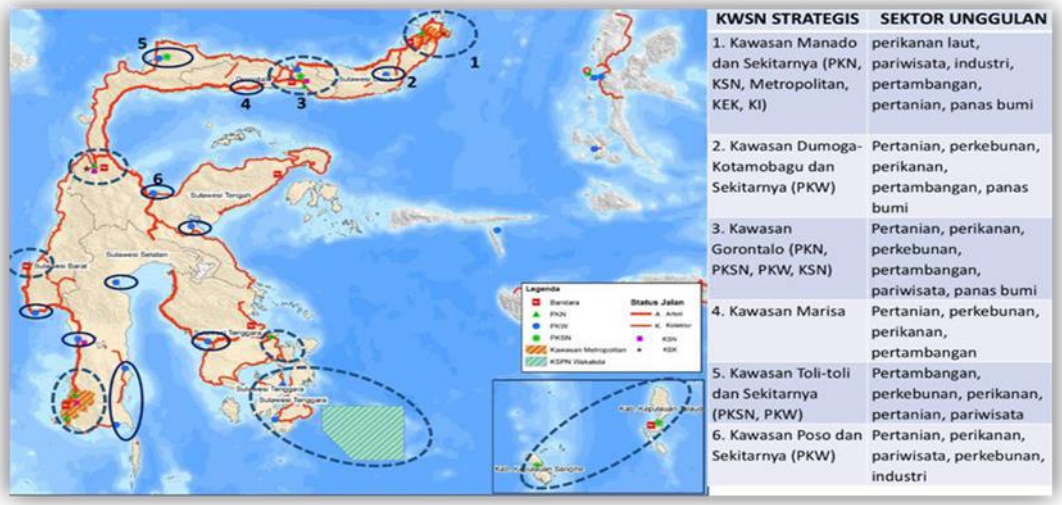
Arah kebijakan nasional ditujukan menuju masyarakat yang maju, berdaulat dan mandiri secara merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan hingga perdesaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 visi pembangunan nasional adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.




Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

**Gambar 4.3**
**Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**

Dalam 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dalam rancangan teknokratis RPJMN Tahun 2020-2024 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dimana tema pembangunan wilayah yaitu ***"Pusat lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan"*** dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi.



| KWSN STRATEGIS | SEKTOR UNGGULAN |
|---|---|
| 1. Kawasan Manado dan Sekitarnya (PKN, KSN, Metropolitan, KEK, KI) | perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan, pertanian, panas bumi |
| 2. Kawasan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (PKW) | Pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, panas bumi |
| 3. Kawasan Gorontalo (PKN, PKSN, PKW, KSN) | Pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, panas bumi |
| 4. Kawasan Marisa | Pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan |
| 5. Kawasan Toli-toli dan Sekitarnya (PKSN, PKW) | Pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata |
| 6. Kawasan Poso dan Sekitarnya (PKW) | Pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, industri |

**Gambar 4.4**
**Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi**

Berdasarkan tema pembangunan wilayah Sulawesi tersebut, skenario pengembangan wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kawasan Tolitoli, Poso dan sekitarnya serta Kawasan Tojo Una-Una dititik beratkan pada sektor pertambangan, perkebunan, perikanan peternakan, pariwisata dan pertambangan. Untuk arah kebijakan untuk pengembangan ***PKW Poso dan termasuk Kabupaten Tojo Una-Una dengan fokus pada kegiatan pertanian, perikanan, Pariwisata, perkebunan dan industri***. Hal ini sejalan dengan Trisula pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una yaitu *Pariwisata, Kelautan/Perikanan, dan Pertanian.*

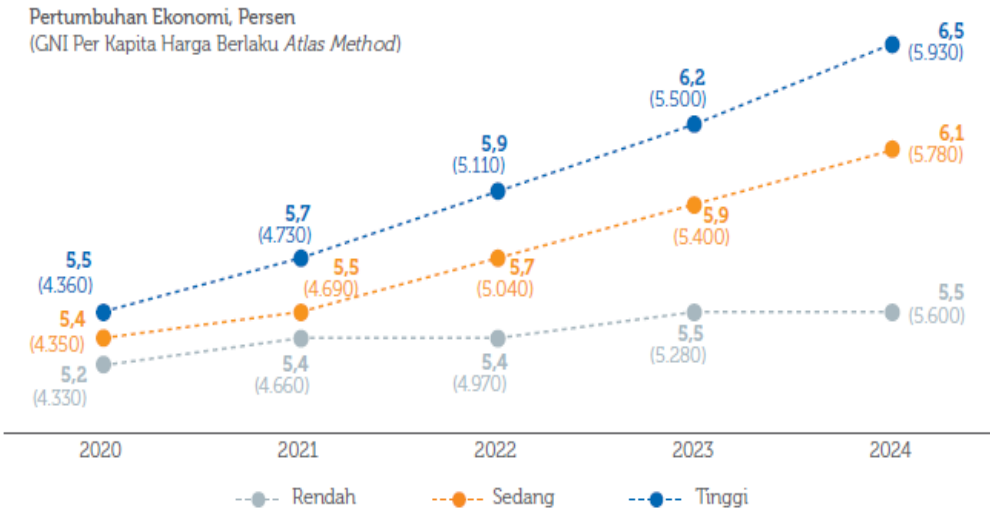
**2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Stagnan**

Pertumbuhan ekonomi yang stagnan disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) dampak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan bahkan tumbuh negatif akibat adanya pandemi global virus Covid-19. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020 berada di rentang minus 1,1 persen hingga 0,2 persen. Pada kuartal II 2020, BPS melaporkan, pertumbuhan ekono-mi nasional minus hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif

terkontraksi 1,26 persen. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar, maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3-4,8 persen. Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB ADHB kuartal II mencapai sebesar Rp3.687,7 triliun. Sementara itu, berdasarkan PDB ADHK 2010 sebesar Rp2.589,6 triliun.

Pemerintah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi lebih cepat pada tahun 2021. Pemerintah menargetkan pertumbu-han ekonomi Tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen. IMF memprediksi, pada Tahun 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina. Hingga saat ini, regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi. Target pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2020-2024: pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen; tingkat kemiskinan 6,5-7 persen; indeks gini rasio 0,370-0,374; tingkat pembangunan terbuka 4,0-4,6; dan IPM sebesar 75,54.




**Gambar 4.5**
**Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2024**

### 3. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi ter-sebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekono-mian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecer-dasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenya-manan bagi konsumen.

Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkemba-ngan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di

dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksitransaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

**4. Situasi Pangan Nasional**

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi (*basic needs*) dan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*), karena hal tersebut akan ikut menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Letak geografis dan luas wilayah Indonesia menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk sumber pangan yang dihasilkan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga ikut andil mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pangan yang akan di konsumsi.

Secara umum potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia sebagai pilihan konsumsi masyarakat terbilang cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempahan dan bumbu-bumbuan, 40 jenis bahan minuman serta 1.260 jenis tanaman obat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa kita sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya atau biasa disebut keanekaragaman hayati mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta ekosistem dengan proses ekologi dari bentuk kehidupan yang merupakan bagiannya.

Akibat belum maksimalnya pengelolaan hasil komoditas pangan menyebabkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun setiap tahunnya angka produktivitas padi Indonesia selalu ada peningkatan antara 1-3 persen atau selama 30 tahun terakhir produksi panen padi telah meningkat dua kali lipat, bahkan untuk produksi jagung bisa meningkat sampai empat kali lipat. Sehingga pencapaian prestasi tersebut masih dirasakan belum signifikan, mengingat berdasarkan hitungan angka yang dihasilkan dari impor beberapa komoditas bahan pangan yang masuk ke Indonesia, tercatat cukup tinggi angka peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan bangsa kita masih mengalami permasalahan di sektor ketahanan pangan.

**5. Pembangunan Belum Merata**

Pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan kepulauan. Namun demikian, pemerintah telah berupaya dalam kurun waktu lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Buruknya infrastruktur di Indonesia mengakibatkan daya saing *(competitiveness)* bangsa secara keseluruhan masih rendah. Infrastruktur berada di posisi ketiga sebagai masalah utama yang mengganggu kemudahan berbisnis (*doing business*) di samping birokrasi yang tak efisien dan korupsi. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Indonesia peringkat ke-82, Cina ke-74, Thailand ke-61, dan Malaysia ke-25. Indonesia pun jauh dari peringkat Singapura berada urutan ke-5.

Kendala dan permasalahan pembangunan infrastruktur secara nasional yakni ***Pertama***, tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72,95 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,58 persen. ***Ke-dua***, terbatasnya akses masyarakat ber-penghasilan rendah terhadap penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan perumahan. ***Ke-tiga***, aksesibilitas dan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi yang belum memadai. ***Ke-empat***, rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340 ribu ha/tahun. ***Ke-lima***, tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta perkebunan terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. ***Ke-enam***, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika belum memadai yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur *broadband* dan belum terhubungnya Pulau Maluku dan Papua dalam jaringan *backbone* serat optik nasional. Ke-tujuh, urbanisasi masih tinggi, sekitar 53 persen penduduk menetap di wilayah perkotaan. Padahal daya dukung infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya di perkotaan semakin sempit, lantaran pertambahan jumlah penduduk. Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkat-kan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur konektivitas dilaku-kan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

**6. Bonus Demografi**

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubah-nya struktur umur

penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan *(dependency ratio)* penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta, karena meningkatnya suplai angkatan kerja *(labor supply)*, tabungan *(saving),* dan kualitas sumber daya manusia *(human capital)*. Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada Tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara Tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional.

Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di seluruh Negara ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia.

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan *(trade openness)* dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

**7. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan dapat didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kondisi tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan mengingat sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama yang menentukan keberlanjutan pembangunan.

Ironisnya, luas tutupan hutan primer di Indonesia cenderung semakin menyusut. Walaupun laju deforestasi telah berhasil dikurangi secara signifikan dibandingkan pada masa sebelum tahun 2000, namun luas tutupan hutan primer semakin menyusut sehingga diproyeksikan hanya akan tinggal tersisa 18,4 persen dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) Tahun 2045 dibandingkan kondisi Tahun 2000 yang mencapai 27,7 persen dari total luas lahan nasional.

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi meningkatnya perusakan/ kebakaran hutan, terjadinya banjir/tanah longsor, musim kemarau yang panjang, terjadinya perburuan/perdagangan hewan dilindungi, aktivitas penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta RAN-GRK sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RAN-GRK merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di Tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia Tahun 2017 menjadi sekitar 45 persen  Tahun 2045. Penurunan tutupan hutan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, antara lain Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan luas habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di sebelah timur garis Wallacea khususnya wilayah Papua. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati, apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan *bioprospekting* dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. LIPI (2014) mencatat sebanyak 410 spesies mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi mikroba pada berbagai koleksi jaringan Indonesia dan hasil penelitian eksplorasi-bioprospeksi. Selain itu, hasil pengujian spons dan makroalgae menunjukkan potensi sebagai antitumor, antioksidan, antikanker dan

antibakteri. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi

Walaupun cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulau Jawa yang nilai ketersediaan air per kapitanya sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkan perhatian khusus.

**8. Potensi dan Ancaman Bencana Alam**

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam *(natural disaster)* maupun oleh ulah manusia *(man-made disaster)*. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam *(natural hazards)* dan bahaya karena ulah manusia *(man-made hazards)* yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi *(geological hazards)*, bahaya hidrometeorologi *(hydrometeorological hazards)*, bahaya biologi *(biological hazards)*, bahaya teknologi *(technological hazards)* dan penurunan kualitas lingkungan *(environmental degradation),* kerentanan *(vulnerability)* yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana, kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan Timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik *(volcanic arc)* yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa-Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986). Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik

aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu Tahun 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 (satu) persen tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai Selatan Pulau Jawa, pantai Utara dan Selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya, diakibatkan gempa bumi dan 4 (empat) erupsi gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang, dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan mayarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik, sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain, laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat.

Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.

Sepanjang Tahun 2018, terjadi lebih dari 2.564 bencana alam di Indonesia. Dampaknya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tren bencana Tahun 2018 didominasi angin puting beliung (799 kasus), banjir (677 kasus), dan longsor (472 kasus). Ketiga bencana tersebut disebut bencana hidrometeorologi dan menyumbang 97 persen dari total bencana alam. Tiga persen sisanya adalah bencana geologis. Meski begitu, bencana geologis berdampak lebih besar, terutama bencana geologis dipicu tsunami dan gempa bumi.

Diperkirakan pada Tahun 2020-2024 akan datang, bencana hidrometeorogi masih mendominasi 95 persen dari total bencana keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh luasnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, dan perubahan penggunaan lahan. BNPB melaporkan sekitar 110.000 hektar lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian sedang lahan kritis mencapai 14 juta hektar. Tidak ada potensi El-Nino dan La-Nina yang menguat, musim akan berjalan seperti normal baik musim penghujan juga musim kemarau. Puncak musim penghujan adalah Januari 2019, dengan potensi tinggi banjir besar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Gempa juga diprediksi sepanjang Tahun 2020-2024. BNPB memperkirakan sekitar 500 gempa akan terjadi setiap bulannya di Indonesia. Ini berkaitan dengan posisi geologis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik *(ring of fire)* dan pertemuan beberapa lempeng tektonik. Sejauh ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti dimana dan kapan akan terjadi. Namun ditekankan, Indonesia bagian timur perlu mewaspadai gempa karena kondisi geologisnya yang tergolong rumit.

Potensi tsunami disebutkan, tergantung pada gempa dan lokasi episentrumnya. Jika terjadi gempa berskala 7 SR atau lebih, dengan episentrum di kawasan laut atau samudra, maka potensi tsunami patut diwaspadai. Hampir seluruh tsunami diawali atau dipicu gempa kuat. Namun Tsunami Selat Sunda disebabkan oleh longsoran material yang dipicu Erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi ini tidaklah memicu monitor gempa secara signifikan.

Mitigasi bencana atau rangkaian pengurangan risiko bencana bisa dilakukan dengan dua hal, yakni dengan pembangunan struktural maupun

non struktural. Pembangunan struktural dimulai dengan pembangunan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, shelter tsunami, sumur resapan, bendungan, dan lainnya. Sedangkan pembangunan non struktural dimulai melalui lembaga, legislasi, penataan ruang, sosialisasi, diklat, penelitian, dan lainnya.

Indonesia juga tergolong sebagai negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami.

Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggi karena perkiraan tinggi gelombang di atas tiga meter. Ada empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Penduduk yang terdampak bahaya bencana tsunami pada tahun 2015 berjumlah 3,7 juta jiwa dan pada tahun 2030 diproyeksikan berpotensi bertambah menjadi 4,4 juta jiwa atau naik 19 persen (BNPB Tahun 2019).

Pemahaman informasi gempa bumi dan peringatan dini Tsunami di masyarakat belum optimal, sehingga menyebabkan tingginya potensi dampak akibat ancaman gempa bumi dan tsunami. Kurang optimalnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi produk informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat serta masih kurangnya penelitian ‘prekursor’ (pratanda) untuk peramalan kejadian gempa bumi pada sesar aktif di sekitar kota besar dengan penduduk dan infrastruktur yang padat. Jangkauan pelayanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Peningkatan frekuensi kejadian gempa bumi termasuk yang berpotensi tsunami menjadi peringatan bahwa keterpaparan masyarakat akan bencana tersebut masih tinggi.

### 4.2.3 Isu Regional Sulawesi

Salah satu upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat dan efektif telah ditetapkan melalui pendekatan baru yaitu perencanaan pembangunan yang terstruktur dengan basis wilayah. Isu mengenai pembangunan kawasan Kepulauan Sulawesi menjadi salah satu acuan penting

bagi pemngembangan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40 persen (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional.

Pulau Sulawesi merupakan pulau yang strategis. Dari aspek konektivitas, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai peran sebagai pusat perdagangan dan industri pengolahan di Kawasan Timur Indonesia. Kedua provinsi tersebut selain sebagai pusat perdagangan provinsi lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi juga berfungsi menjadi penghubung antara Pulau Maluku, Papua dan Nusa Tenggara dengan Pulau Kalimantan serta Pulau Jawa dan Bali. Isu pembangunan regional Sulawesi dititikberatkan pada peningkatan keterkaitan arus komoditas ekonomi antarwilayah provinsi dalam Pulau Sulawesi dan keterkaitan antara Pulau Sulawesi dengan Enam Pulau Besar lainnya melalui penyediaan infrastruktur wilayah, guna pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan di wilayah Pulau Sulawesi.

Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dimana tema pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi ***"Pusat lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan"*** dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi. Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Indonesia Timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam, peningkatan konektivitas sentra industri, dan sebagai pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia.

Isu strategis utama kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antara wilayah yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kawasan timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hamper du kali lipat dari rata-rata Kawasan barat Indonesia (KBI) sebsar 10,30 persen; terbatasnya sarana parasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawsan transmigrasi dan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi: juga belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, transmigrasi dan kawsan perbatasan. Pembangunan wilayah Sulawesi masih mengalami permasalahan menyangkut:

a. Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
b. Belum terwujudnya pengembangan hubungan international untuk kawsan timur Indonesia;
c. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi bencana;
d. Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
e. Belum optimalnya peninghkatan produktivitas sektor tanaman pangan untuk mendukung peran Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional;

f. Belum optimalnya tatakelola dan kelembagaan pengelola Kawasan metropolitan;
g. Masih rentannya ketahanan fisik dan social atas perubahan iklim, bencana, populasi dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenja-ngan sosial dan kemiskinan masih menjadi masalah utama.

Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, maka pembangunan wilayah Sulawesi perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi akan mengutamakan pemerataan, pertumbu-han, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut.

1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; (c) pembinaan dan keberpiha-kan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain: (a) penge-mbangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi yaitu kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan ber-

basis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infra-struktur pada KEK dan KI; dan (g) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) penge-mbangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (i) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;

3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan dae-rah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat penge-lolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antardaerah otonom di wilayah metropolitan, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan kepulauan;
4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terinte-grasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapaitas masyara-kat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Sulawesi Tengah dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengura-ngan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;
7) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

### 4.2.4 Isu Provinsi Sulawesi Tengah

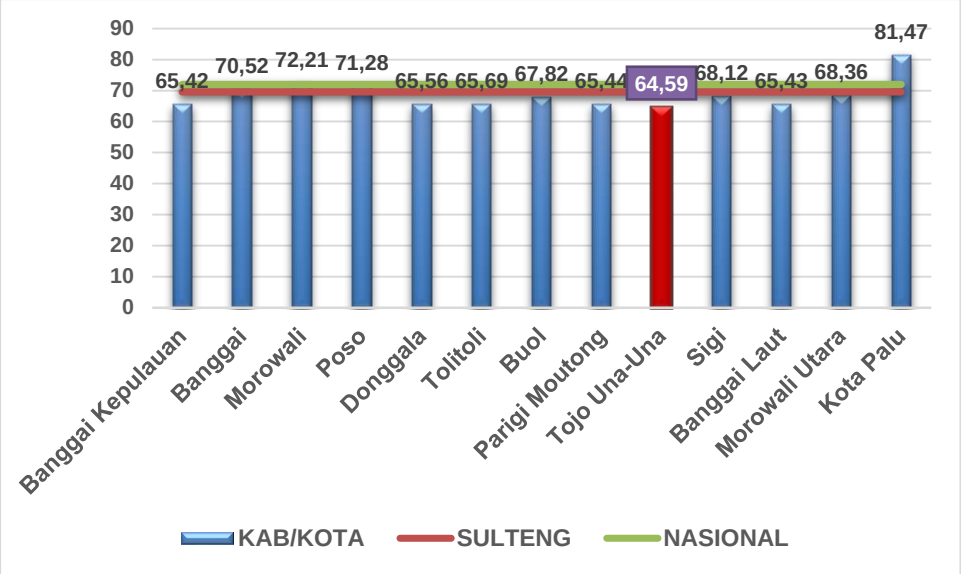
Identifikasi isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan sebagai panduan dan *bridge* antara pembangunan pada skala nasional dan Kabupaten Tojo Una-Una. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya, juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah. Isu-isu strategis di Provinsi Sulawesi Tengah diidentifikasi sebagai berikut.

**1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kondisi empiris ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2016, IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 67,47 serta pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 68,11 hingga tahun 2019 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 69,50 kemudian pada tahun 2020 meningkat sedikit menjadi 69,55. Pembangunan mutu modal manusia di Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan, ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Sulawesi Tengah selama 2012-2020, dengan status kategori tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Berdasarkan metode baru IPM, terlihat pada Tahun 2012, IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 65,00 poin pada tahun 2012, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahun hingga menjadi 69,50 poin tahun 2019 dan kemudian pada tahun 2020 menjadi 69,55. Angka IPM ini masih berada di bawah rata-rata Nasional mencapai 71,94. Dalam perspektif regional Sulampua Tahun 2020, IPM Sulawesi Tengah menempati ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 72,93; Sulawesi Selatan sebesar 71,93; dan Sulawesi Tenggara sebesar 71,45.

IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdapat satu daerah yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Kota Palu. Untuk daerah kabupaten/kota, Tahun 2020 pada umumnya termasuk dalam kategori menengah ke atas. IPM Kota Palu mencapai 81,47; Kabupaten Morowali sebesar 72,21; dan Kabupaten Poso 71,28. Selanjutnya, Kabupaten Banggai 70,52; Kabupaten Morowali Utara 68,36; Kabupaten Sigi 68,12; Kabupaten Buol 67,82; Kabupaten Donggala 65,56. Kabupaten Tolitoli 65,69; Kabupaten Parigi Moutong 65,44; Kabupaten Banggai Laut 65,43; Kabupaten Banggai Kepulauan 65,42; Sementara itu, ***Kabupaten Tojo Una-una dengan nilai IPM 64,59*** *berada pada posisi terakhir pencapaian IPM 2020*. Berdasarkan pencapaiannya, untuk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan capaian IPM 69,55 masih lebih rendah dari capaian nasioan sebesar 71,94., Dimana peningkatan tertinggi pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. Indikator (indeks) ini

mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada aspek pendidikan dan ekonomi di kabupaten/kota maupun Provinsi Sulawesi Tengah.




Sumber: BPS, 2020

**Gambar 4.6**
**Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota**
**Tahun 2020**

**2. Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi**

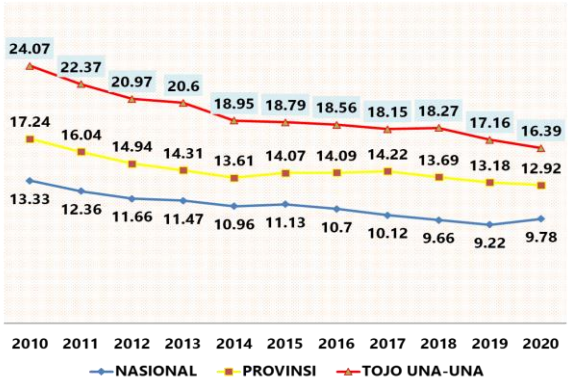
Perkembangan positif beberapa indikator makro perekonomian Sulawesi Tengah juga berpengaruh positif terhadap kondisi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang berakibat pada peningka-tan taraf hidup masyarakat merupakan bebe-rapa komponen yang mendukung perbaikan dan penurunan angka kemiski-nan di Sulawesi Tengah.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami penu-runan periode 2013-2020. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan, data perkembangan menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami fluktuatif, dimana pada Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 400,40 jiwa atau sebesar 14,32 persen menurun menjadi sebanyak 387,06 jiwa atau sebesar 13,61 persen Tahun 2014, namun Tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebanyak 420.52 jiwa atau sebesar 14,45 persen dan menurun pada Tahun 2017 sebanyak 417,87 jiwa atau sebesar 14,14 persen.

Pada Maret Tahun 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tengah mencapai sebanayak 410,36 ribu orang atau sebesar 13,48 persen, berkurang sebesar 3,13 ribu orang dibandingkan dengan September Tahun

2018 yang sebesar 413,49 ribu orang atau sebesar 13,69 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September Tahun 2018 sebesar 9,50 persen turun menjadi 9,32 persen pada Maret Tahun 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September tahun 2018 sebesar 15,41 persen turun menjadi sebesar 15,26 persen pada Maret Tahun 2019. Sementara capaian penurunan kemiskinan pada Maret Tahun 2020 turun menjadi sebesar 12,92.

Jumlah penduduk miskin Sulawesi tengah pada Maret Tahun 2020 mencapai sebanyak 398,73 ribu orang. Angka kemiskinan ini menunjukan penurunan sebesar 5,30 ribu orang dibandingkan September Tahun 2019, sementara dibandingkan Maret Tahun 2018 jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sebanyak 11,63 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan di Sulawesi Tengah turun sebesar 0,73 ribu orang dan daerah di perdesaan turun sebesar 4,57 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun 8,90 persen menjadi 8,76 persen, sedangkan di perdesaan turun dari sebesar 15,01 persen menjadi sebesar 14,69 persen. Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah Maret Tahun 2020 turun menjadi sebesar 12,92 persen.




1) Penurunan Kemiskinan tahun 2010-2020 (7,68%)
2) Rata-rata penurunan 10 Tahun terakhir 0,77%
3) Penurunan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun terakhir lebih baik dari Nasional (3,14%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (4,32%).
4) Lebih tinggi dari rata-rata Nasional dan Provinsi Sulteng
5) GAP dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,47%
6) GAP dengan rata-rata Nasional sebesar 6,20%

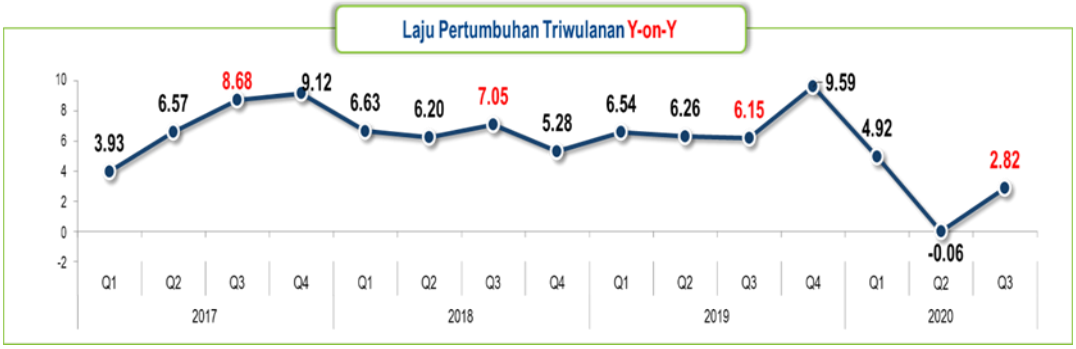
**Gambar 4.7**
**Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional Tahun 2010-2020**

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah, selain ada faktor jumlah penduduk. Semakin tinggi angka jumlah penduduk miskin maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan, tetapi tingginya tingkat kemiskinan, tidak berarti bahwa jumlah penduduk miskin di suatu daerah itu lebih banyak dari pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, namun tergantung dari jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam daerah tersebut.

**3. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas**

Upaya pengembangan Ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkeadilan. Meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di atas rata-rata nasional, namun masih bertumpu pada Sektor Pertanian (Sektor Primer) dimana pertumbuhannya tinggi tetapi relatif belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masya-rakat secara langsung, sehingga diharapkan ke depan berangsur–angsur beralih ke sektor Sekunder Industri, Perdagangan dan Jasa.

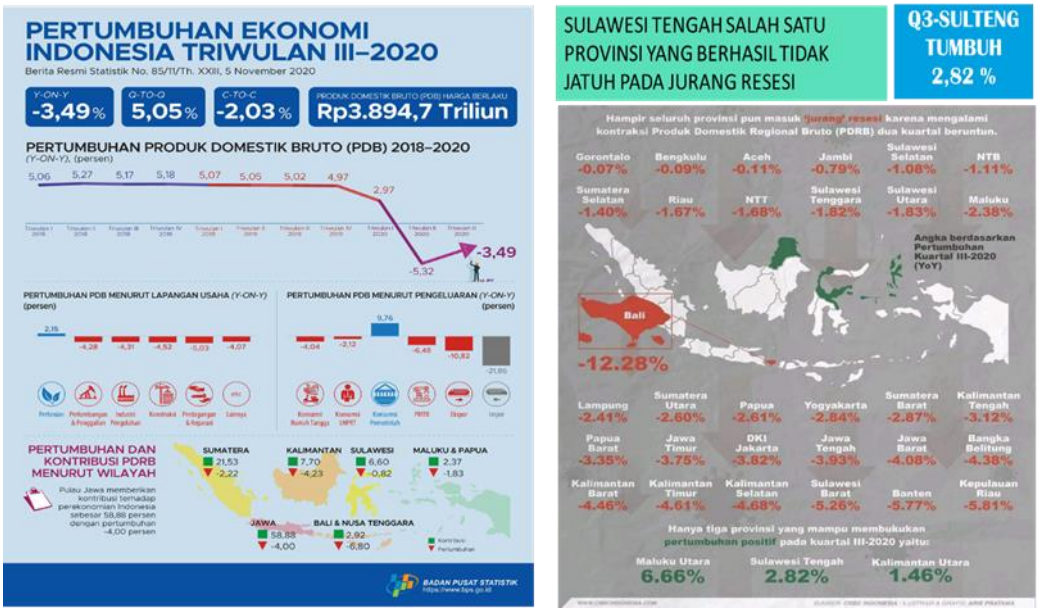
Perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah masih menunjukkan kinerja yang positif yakni pada triwulan III-2020 tumbuh sebesar 2,82 persen (yoy), lebih lebih rendah dari triwulan sebelumnya 6,15 persen (yoy). Namun demikian pertumbuhan ekonomi Sulawesi tengah masih lebih baik dari provinsi di sulawesi tengah yang sebagain besar mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus. Dari sisi penawaran, kenaikan pertumbuhan didorong meningkatnya pertumbuhan di Sektor Industri Pengolahan, yang berimbas pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai penyedia input *(raw material).* Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ditopang dari konsumsi rumah tangga dan sektor pemerintah, serta meningkatnya kinerja ekspor. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, pertumbuhan investasi mulai mengalami deselerasi.




**Gambar 4.8**
**Capaian Pertumbuhan Ekonomi**
**Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020 (Y on Y)**

Sementara itu, dari sisi ukuran ekonomi, Sulawesi Tengah menempati peringkat ketiga di Sulampua setelah Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua. Nilai PDRB Sulawesi Tengah terus meningkat menjadi indikasinya, yang berasal dari kinerja ekspor. Nilai ekspor Sulawesi Tengah yang terbesar di Sulampua. Pada periode Januari-Oktober Tahun 2018, total ekspor men-capai USD 4.116.30 juta, atau 30 persen dari total ekspor. Tingginya ekspor tersebut terutama ditopang oleh komoditas olahan nikel dan gas, yang pangsanya mencapai 96,71 persen. Di sisi lain, impor hanya USD 1.906.16

juta, sehingga neraca perdagangan tercatat surplus sebesar USD 2.207,14 juta. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang relatif tinggi di beberapa tahun terakhir, secara struktural juga diikuti dengan proses transformasi. Dimana, pangsa Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada Tahun 2013 hanya 5,67 persen, sudah mencapai sebesar 12,09 persen Tahun 2019. Sementara, pangsa Sektor Pertanian menurun dari sebesar 34,36 persen pada Tahun 2013 menjadi sebesar 28,75 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, proses transformasi sektor tersebut juga diikuti penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi di Sektor Industri Pengolahan. Pada Tahun 2013 hanya sebesar 5,04 persen, namun sudah mencapai 7,57 persen Tahun 2019. Namun, akibat pendemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi nasional dan daerah ikut berimbas pada menurunnya ekonomi Sulawesi Tengah pada Q-3 Oktober Tahun 2020 menjadi sebesar 2,64 persen, lebih baik dari kondisi nasional pada Q-3 Oktober Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (-3,49) persen dan masuk pada jurang resesi.




**Gambar 4.9**
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi**
**Nasional dan antar Provinsi Kuartal-3 tahun 2020**

Dalam konteks ekonomi, tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah saat ini adalah permasalahan pengendalian harga-harga barang dan jasa. Inflasi pada November 2019 tercatat 7,27 persen (yoy), atau secara akumulatif telah mencapai 5,29 persen (ytd), menurun pada Oktober Tahun 2020 menjadi 0,41 persen. Inflasi terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara dan harga barang danjasa konstruksi, seperti; jasa tukang bukan mandor, besi beton, seng, dan semen, yang disebabkan oleh tingginya permintaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk renovasi atau

pembangunan infrastruktur pasca bencana, dan infrastruktur pasca terjadi-nya bencana alam. Sementara dari sisi penawaran, terdapat hambatan dalam proses distribusi barang dikarenakan bongkar muat barang di pelabuhan masih terkendala karena kerusakan beberapa fasilitas penunjang bongkar muat akibat tsunami.

Sementara itu, stabilitas keuangan di Sulteng masih terjaga baik. Dari sisi keuangan korporasi, potensi sumber kerentanan terpantau aman, yang terindikasi dan perkembangan harga komoditas andalan Sulteng di pasar global (nikel dan gas) dan kondisi negara mitra dagang cukup stabil. Dengan demikian, kinerja ekspor ke depan diperkirakan tetap positif. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan menurunnya harga komoditas di sektor pertanian seperti kelapa sawit dan kakao. Sementara itu, dari sisi sektor rumah tangga, kondisinya terpantau sedikit mengalami pelemahan seiring dengan terjadinya bencana. Hal ini tercermin dari hasil survei Bank Indonesia dimana indeks keyakinan konsumen Sulteng diindikasikan menurun. Sedangkan, sisi Sektor Perbankan kondisinya tetap terjaga baik. Per November Tahun 2018, aset Perbankan tumbuh sebesar 9,09 persen (yoy), DPK tumbuh 14,59 persen (yoy) dan kredit tumbuh 9,16 persen (yoy), sementara *non performing loan (NPL)* dalam batas aman sebesar 2,33 persen. Namun demikian, kalangan perbankan ke depan tampaknya perlu melaku-kan penanganan ekstra terutama dalam memperbaiki NPL di Sektor Perdagangan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berjalannya proses transformasi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Berdasarkan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dan 3,81 persen pada Agustus Tahun 2017 menjadi 3,43 persen pada Agustus Tahun 2018 sementara pada Agustus Tahun 2020, TPT menurun dan 3,77 persen. Tingkat kemiskinan juga mengalami sedikit penurunan dari 14,14 persen pada Maret Tahun 2017 menjadi sebesar 14,01 persen pada Maret Tahun 2018, dan Tahun 2020 menjadi sebesar 12,92 persen, seiring dengan terkendalinya inflasi (inflasi Oktober 2020: 0,41 persen (yoy). Indeks Gini Sulawesi Tengah juga semakin membaik dari 0,355 Maret Tahun 2017 menjadi 0,346 Maret Tahun 2018. Hal yang perlu mendapat perhatian NTP November 2018 masih berada di angka 95,70 sampai dengan Oktober Tahun 2020 berada pada 94,90. Artinya tingkat kesejahteraan petani masih rendah, karena biaya produksi masih lebih besar dari nilai jual produk pertanian karena masih di bawah 100.

**4. Pembangunan Infrastruktur**

Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah–daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari

penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infra-struktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan.

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013-2017 berdasarkan kondisi jalan mengalami perkembangan fluktuatif. Pembangunan di bidang infra-struktur jalan kewenangan Provinsi periode Tahun 2013-2016 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 kondisi jalan mantap Provinsi mencapai 47,70 persen dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1.643,74 km meningkat menjadi 52,04 persen pada Tahun 2014; Tahun 2015 kondisi jalan mantap meningkat menjadi 57,70 persen; Tahun 2016 meningkat menjadi 58,85 persen; selanjutnya meningkat menjadi 60,89 persen Tahun 2019. Di sisi lain, perkembangan jalan nasional dari sepanjang 2.373,40 km yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah kondisi jalan dalam status Kondisi Jalan Mantap pada Tahun 2019 sebesar 95,01 persen.

Kondisi ketersediaan sumber energi listrik belum mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat dan Sektor Industri, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah. Kota Palu sebagai titik simpul Pembangunan Sistim Kelistrikan Sulawesi dan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan, yang ditargetkan akan tercapaipada Tahun 2020 melalui kegiatan 31 proyek pembangkit listrik.

Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data, menunjukkan daya terpasang sebesar 203.077 MW, daya mampu 143.893 MW, beban puncak 118.120 MW, sedangkan daya tersambung sebesar 193.297 MVA dengan jumlah pelanggan sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen. Jika kita melihat data rasio elektrifikasi desa, maka dapat disimpulkan masih cukup banyak desa yang belum dialiri listrik, salah satu kabupaten yang rasio elektrifikasinya sangat rendah adalah Kabupaten Banggai laut, dimana dari 66 desa baru 25 desa yang dialiri listrik

**5. Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum Dan HAM Belum Optimal**

Dari sisi tata kelola pemerintahan, upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara men-dasar, terencana dan sistematis. Kondisi kelembagaan pemerintah daerah dari aspek struktur maupun fungsi belum efektif dan efesien, sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, di samping itu masih rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip *good governance*. Di samping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2016 tentang perangkat daerah memerlukan berbagai penyesuaian termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah.

Dari sisi hukum dan penegakkan hak asasi manusia, masih adanya budaya hukum masyarakat rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyara-kat, serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah di bidang pembinaan tertib hukum dalam usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai kasus hukum sehingga perlu upaya yang terus menerus untuk memperbaikinya.

**6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan Dan Berkelanjutan Belum Optimal**

Pengelolaan sumberdaya alam yang belum memperhatikan fungsi dan tata kelola lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin berkurang. Penurunan kualitas sumberdaya alam ditunjukan dengan tingkat eksploitasi hutan (*deforestasi*), akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan liar (*illegal mining*), rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak, selain itu meningkatnya konservasi hutan dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibanding potensinya.

**7. Potensi Bencana Sulawesi Tengah**

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki resiko tinggi akan multi ancaman, termasuk juga epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang extrem dan abrasi, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki resiko ancaman sedang dan tinggi,

termasuk juga di antaranya: Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Sigi serta Kabupaten Parigi Moutong. Wilayah yang terkena dampak akan gempa bumi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018, yakni: Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Moutong dikategorikan sebagai Kota dan Kabupaten dengan risiko multi ancaman tinggi. Pasca kejadian gempa bumi, tsunami dan likuifaksi *(triple disaster)* yang melanda wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan masyarakat dan wilayah Sulawesi Tengah.

**a. Gempa Bumi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat risiko tinggi akan ancaman gempa bumi. Penyebab utama adanya Patahan Palu Koro (Sesar Palu Koro) yang memanjang dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone dengan panjang sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada di sekitar jalur patahan sangat rawan terhadap goncangan gempa bumi yang umumya relatif dangkal. Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, yakni:

1. Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara Kota Palu;
5. 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;
6. 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.
7. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR (*scala richter*). Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian gempa bumi lainnya, sebagai berikut:

**b. Tsunami**

Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki ancaman risiko tinggi akan tsunami, beberapa *peristiwa* tsunami yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. 30 Januari 1930, gempa di Pantai Barat Kabupaten Donggala yang disertai tsunami setinggi dua meter;
2. 14 Agustus 1938, gempa berkekuatan 6 SR berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala dan menyebabkan tsunami setinggi 8 hingga 10 meter di Pantai Barat Kabupaten Donggala. Akibat dari kejadian ini ratusan orang meninggal dunia dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam;
3. 1 Januari 1996, gempa berkekuatan 7,4 SR berpusat di Selat Makassar sehingga mengakibatkan tsunami di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala dan Toli-Toli.

**c. Likuifaksi**

Bencana Alam Gempa Bumi dengan magnitude 7,4 SR menyebabkan kerusakkan yang parah di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Gempa Bumi tersebut menyebabkan terjadinya Likuifaksi. Wilayah Balaroa dan Patobo di Kota Palu, Desa Jono Oge dan Desa Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi mengalami likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblasnya wilayah tersebut. Terjadinya likuifaksi dimana hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa dan tidak memiliki daya ikat.

Sementara penghitungan dan pendataan terkait dengan wilayah terdampak yang juga termasuk jumlah bangunan yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi, masih dan sedang dilakukan oleh lembaga terkait BNPB, pada saat rencana induk ini disiapkan, data dan informasi terkait wilayah dan jumlah bangunan terdampak bencana yang dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang dilakukan oleh LAPAN dan beberapa mitra terkait lainnya termasuk komunitas pemetaan *Open Street Map (OSM)*, bisa memberikan gambaran secara spasial mengenai wilayah dan jumlah bangunan terdampak. Penting untuk dijadikan catatan bahwa data tentang jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit tersebut adalah data indikatif yang perlu dilakukan verikasi dengan data yang dilaporkan oleh BNPB sebagai lembaga terkait yang melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak.

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26 Km utara Kab. Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 Km. Gempa

bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-3 m. Tidak hanya itu, guncangan gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuifaksi di empat tempat yaitu Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya Selatan.

Berdasarkan perhitungan BNPB di tanggal 26 Oktober 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp.18,48 Triliun, khususnya di 4 kabupaten/kota terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. Dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi *(in-situ)*, serta relokasi dan pembangunan kawasan baru *(ex-situ).*

Sementara itu Kabupaten Tojo Una-Una juga mengalami Gempa bumi berkekuatan 5,7 SRpada Maret 2019. Akibat dari gempa tersebut, puluhan rumah warga dan sejumlah rumah ibadah di beberapa desa di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan. Disusul kemudian pada bulan April 2019 terjadi Gempa berkekuatan 6,9 SR mengguncang Tojo Una-Una, Jumat (12/4) sekitar jam 7.40 malam waktu Indonesia Tengah.

Juga pada wilayah lainnya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 Gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebuah gempa bermagnitudo 6,8 yang melanda perairan Teluk Tolo,tercatat pada tanggal 12 April 2019 Pukul 18.40 WIB. Pusat gempa berada di 85 km barat daya Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kedalaman 17 km. Guncangan gempa ini dirasakan hingga Gorontalo, Palu bahkan Makassar. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami.

### 4.2.5 Isu Strategis Daerah Lainnya

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan;

4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Identifikasi kebijakan daerah lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.9**
**Identifikasi RPJMD Daerah Lain**

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Poso | 2021-2026 | 7 (Tujuh) Program Unggulan Kabupaten Poso tahun 2021-2026, meliputi:<br>- Membangun Dari Desa<br>- Penyelenggran Kesehatan Gratis<br>- Penyelanggaran Pendidikan Gratis<br>- Mempersiapkan 500 UMKM Bangkit Mandiri<br>- Program Bunga Desa<br>- Bantuan rumah Ibadah, Imam, Pendeta, Mangku, Lembaga Adat, Lansia dan Santunan Duka.<br>- Penyedian Wifi Gratis<br>- Konektivitas Pengembangan pari-wisata Toraja – Tentena – Togean (3T) |
| 2 | Kabupaten Banggai | 2016-2021 | Prioritas Kabupaten Banggai periode 2016-2021 yaitu:<br>- Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan<br>- Peningkatan Kualitas Layanan Publik<br>- Pemerataan Infrastruktur dan Perhubungan<br>- Pemerataan, Akses dan Mutu Pendidikan Dasar<br>- kualitas pembangunan kesehatan<br>- Pengurangan Kemiskinan<br>- Pengurangan Pengangguran<br>- Ketahanan Pangan dan Pertanian<br>- Pengelolaan Persampahan<br>- Pariwisata<br>- Pengendalian Pemanfaatan Ruang<br>- *Smart Regency* |

### 4.2.6 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's)

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan TPB bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesi-nambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kuali-

tas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, meng-hentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

### 4.2.7 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. RPJPD merupakan dokumen yang sangat penting dalam pelaksanan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJPD merupakan pedoman penyusunan RPJMD dan bahkan merupakan pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Mengingat peran penting dari RPJPD, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021, harus dilakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005–2025, dalam mewujudkan visi yaitu:

**"*Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Yang Sejahtera Dan Berbudaya, Didukung Oleh Sumber Daya Serta Mampu Bersaing*"** yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu

1. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjuta;*
2. *Membangun komunitas wilayah melalui pengembangan kota, kecamatan, kelurahan dan desa;*
3. *Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya melalui pelayanan prima yang berkeadilan;*
4. *Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional;*
5. *Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan*

Adapun Amanat skala prioritas pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukkan untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang aman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan* ***terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.***

*Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum,* ***terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat****. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan,* ***terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta***

***birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.***

*Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningktanya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagamaan, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.*

*Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah.*

### 4.2.8 Penelaahan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una

Dalam penjelasan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bagian perumusan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam upaya penyusunan skenario adalah kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Dikarenakan tidak semua indikator terkait isu strategis memliki keterkaitan dengan maka perlu dilakukan penapisan yaitu memilih dan memilah indikator TPB terkait isu strategis yang juga memiliki keterkaitan ataupun indikator yang tidak terkait D3TLH.

Hasil evaluasi pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS-RPJMD). Dimana berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 19 indikator atau 8,6% dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Kabupaten Tojo Una-Una masih menghadapi tantangan yang sangat panjang dalam pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional

sangat kecil. Capaian indikator TPB Kabupaten Tojo Una-Una terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar berikut.

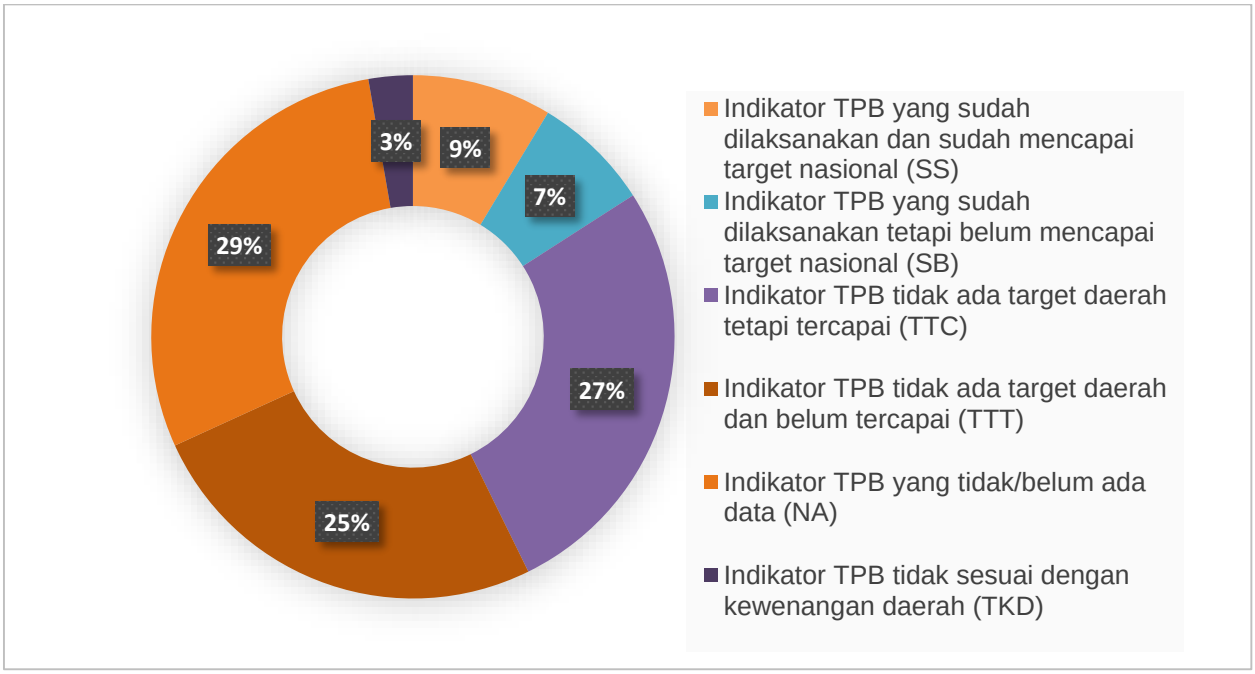
**Tabel 4.10**

**Capaian TPB Kabupaten Tojo Una-Una terhadap Target Nasional**

| No | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Indikator | Dilaksana-kan Mencapai Target (SS) | Dilaksanakan Belum Target (SB) | Tidak Ada Target tetapi Tercapai (TTC) | Tidak Ada Target Belum Tercapai (TTT) | Tidak ada data (NA) | Tidak sesuai kewenangan daerah (TKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | 24 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Menjamin Hidup yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 34 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meingkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 6 | Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 7 | Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | 19 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatakan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 12 | Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Semudera untuk Pembangunan Berkelanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 |

| No | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Indikator | Dilaksana-kan Mencapai Target (SS) | Dilaksanakan Belum Target (SB) | Tidak Ada Target tetapi Tercapai (TTC) | Tidak Ada Target Belum Tercapai (TTT) | Tidak ada data (NA) | Tidak sesuai kewenangan daerah (TKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | | | | | | |
| 17 | Menguatkan Sarana Pelaksana dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| **Jumlah** | | **220** | **19** | **16** | **59** | **56** | **64** | **6** |
| **Persentase** | | | **8,6%** | **7,3%** | **26,8%** | **25,5%** | **29,1%** | **2,7%** |

*Sumber: Analisis Analisis dokumen KLHS-RPJMD, 2021.*

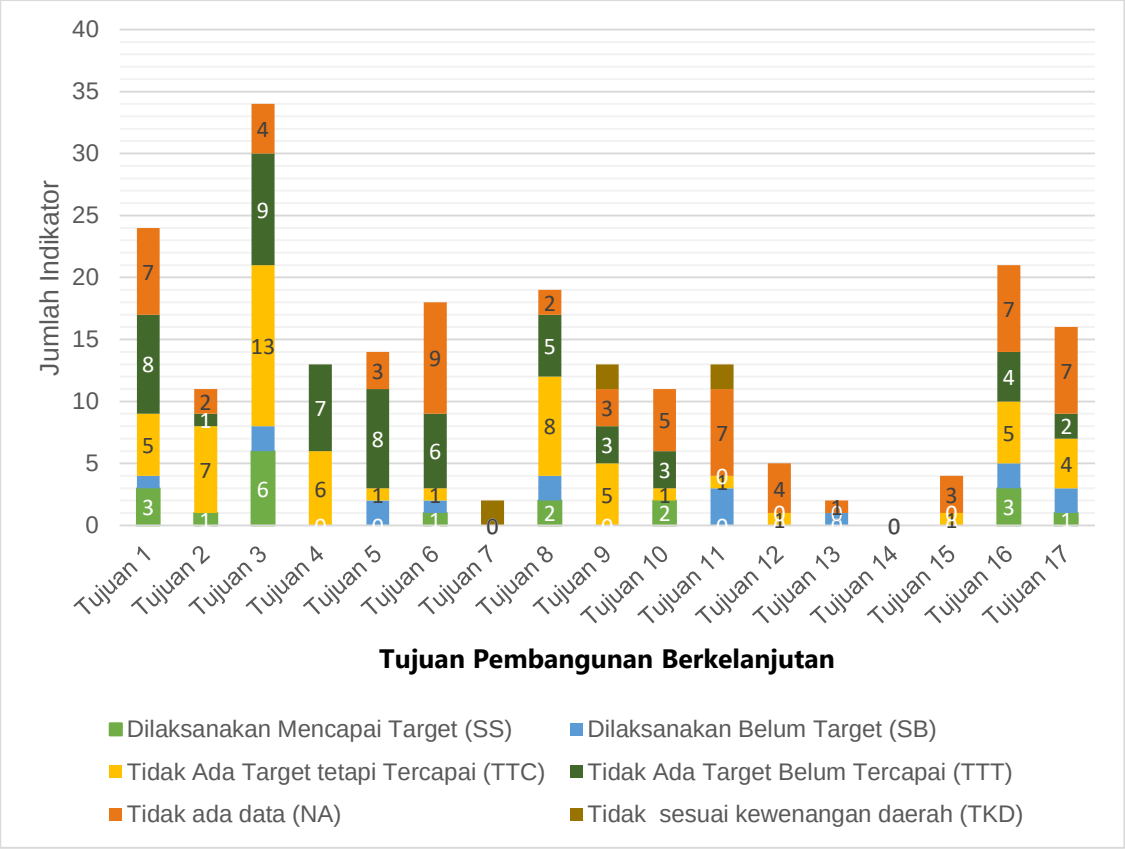



Sumber: Analisis Analisis dokumen KLHS-RPJMD, 2021.

**Gambar 4.10**
**Komposisi Capaian TPB Kabupaten Tojo Una-Una**

Hasil pengukaran dari 220 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, indikator TPB yang telah dilaksanakan sebanyak 35 indikator dalam RPJMD, sebanyak 19 indikator (8,6 persen) sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 16 indikator (7,3 persen) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 115 indikator (52,3 persen) terdapat data dari OPD namun hanya digunakan untuk pertimbangan ketercapaian karena tidak ada target daerah dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, yaitu 59 indikator (26,8 persen) telah dianggap tercapai dan 56 indikator (25,5 persen) dianggap belum tercapai. Sisanya 70 indikator (31,8 persen) tidak terdapat data dengan rincian 6 indikator (2,7 persen) tidak sesuai kewenangan Kabupaten Tojo Una-Una dan sisanya 64 indikator (29,1 persen) tidak ditemukan data dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai *baseline* penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Tojo Una-Una.




**Gambar 4.11**
**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**
**di Kabupaten Tojo Una-Una**

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una terhadap target nasional, maka terdapat 2 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- Tujuan 3 yaitu *kehidupan yang sehat dan sejahtera* dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 6 indikator telah dilaksanakan dan

mencapai target nasional dan 13 indikator walaupun tidak memiliki target tetapi dianggap sudah tercapai;

- Tujuan 1 yaitu *tanpa kemiskinan* dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 3 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan 5 indikator walaupun tidak memiliki target tetapi dianggap sudah tercapai;

Sedangkan tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (TTC) yaitu tujuan 1 (mengakhiri kemiskinan), tujuan 2 (mencapai gizi yang baik), tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan 4 (pendidikan yang berkualitas), tujuan 5 (kesetaraan *gender* dan memberdayakan kaum perempuan), tujuan 6 (pengelolaan air bersih), tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi), tujuan 9 (industri inovasi dan infrastruktur), tujuan 10 (berkurangnya kesenjangan), tujuan 11 (kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan), tujuan 12 (menjamin pola produksi dan konsumsi), tujuan 15 (memulihkan degradasi lahan), tujuan 16 (perdamaian dan kelembagaan yang tangguh) dan tujuan 17 (menguatkan sarana pelaksana).

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD yang telah disusun sebelumnya skenario rekomendasi penyempurnaan KLHS merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Tojo Una-Una, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021–2026.

Rekomendasi untuk diintegrasikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan alur penyusunan diawali dari menindaklanjuti hasil rumusan skenario KLHS RPJMD, dimana pengelompokan indikator TPB dengan upaya tambahan akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan isu-isu strategis di Kabupaten Tojo Una-Una. Isu strategis yang dirumuskan sejumlah 18 isu strategis disamping mempertimbangkan hasil perumusan skenario tetapi juga berdasarkan masukan dan saran yang disepakati pada kegiatan uji publik 1 yang sudah dilakukan.

Dari hasil penyusunan isu strategis maka dapat dibuat rekomendasi dengan cara ditingkatkan dan ditambahkan. Rekomendasi ditingkatkan adalah menyusun rekomendasi berupa program pada setiap indikator TPB tercapai maupun belum tercapai di Kabupaten Tojo Una-Una namun memiliki keterkaitan dengan isu strategis. Dasar dari penyusunan program sebagai rekomendasi diantaranya berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, kajian ilmiah, usulan masyarakat (melalui uji publik 2), program non- pemerintah yang sudah berjalan, serta hasil proyeksi indikator TPB yang sudah dilakukan.

Rekomendasi dengan cara ditambahkan dimaksudkan pada indikator-indikator TPB yang tidak ada data serta memiliki keterkaitan dengan isu strategis. Rekomendasi pada indikator TPB tersebut adalah perlunya prioritas penyediaan data supaya ukuran ketercapaian target indikator TPB bisa diukur dan jika tercapai

akan berimplikasi positif pada penyelesaian isu-isu strategis di Kabupaten Tojo Una-Una. Rekomendasi berupa penyusunan program pada isu-isu strategis berdasarkan Program Permendagri 90 Tahun 2019.

Rekomendasi bagi indikator TPB yang tidak memiliki data adalah dengan rekomendasi “ditambahkan”. Artinya indikator TPB ini perlu ditambahkan dalam hal penyediaan datanya untuk mengukur ketercapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tojo Una-Una. Indikator TPB tersebut juga mewakili isu strategis di Kabupaten Tojo Una-Una diantaranya tentang isu tingkat pendidikan rendah, banyak kasus gizi buruk dan stunting, tingkat kesehatan rendah, rawan pangan, kemiskinan yang tinggi, daerah tertinggal dan lain-lain. Harapannya dengan merekomendasikan indikator TPB ini untuk disediakan datanya di masa yang akan datang dapat membantu ketercapaian penyelesaian isu-isu strategis di Kabupaten Tojo Una-Una. Rekomendasi umum dimana Penyusunan isu strategis menggu-nakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan saran. Adapun Isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una sebagai rekomendasi adalah 1) Tingkat Pendidikan Rendah; 2) Banyak Kasus Gizi Buruk Dan Stunting; 3) Tingkat Kesehatan Rendah; 4) Rawan Pangan; 5) Kemiskinan Yang Tinggi; 6) Produksi Pertanian Belum Optimal; 6) Iklim Investasi Dan Penanaman Modal Belum Kondusif; 7) Pengelolaan Pariwisata Belum Optimal,; 8) Tingkat Pengangguran Tinggi; 9) Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah Rendah; 10) Daerah Tertinggal; 10) Tingkat Alih Fungsi Lahan Tinggi; 11) Degradasi Lingkungan Tinggi; 12) Pengelolaan Sampah Belum Maksimal; 13) Rawan Bencana; 14) Air Bersih Dan Sanitasi Lingkungan Terbatas; 15) Kualitas Pelayanan Publik Belum Maksimal; 16) Rawan Konflik Sosial.

Rekomendasi berupa program disusun untuk setiap indikator TPB tercapai maupun belum tercapai di Kabupaten Tojo Una Una yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis. Dasar dari penyusunan program sebagai rekomendasi diantaranya berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, kajian ilmiah, usulan masyarakat (melalui uji publik 2), program non-pemerintah yang sudah berjalan, serta hasil proyeksi indikator TPB yang sudah dilakukan.

Rekomendasi bagi indikator TPB yang tidak memiliki data adalah dengan ditambahkan penyediaan datanya untuk mengukur ketercapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tojo Una Una. Indikator TPB tersebut juga mewakili isu strategis di Kabupaten Tojo Una Una diantaranya tentang isu tingkat pendidikan rendah, banyak kasus gizi buruk dan stunting, tingkat kesehatan rendah, rawan pangan, kemiskinan yang tinggi, daerah tertinggal dan lain-lain. Harapannya dengan merekomendasikan indikator TPB ini untuk disediakan datanya di masa yang akan datang dapat membantu ketercapaian penyelesaian isu-isu strategis di Kabupaten Tojo Una Una.

### 4.2.9 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan meng-integrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, sesuai permendagri 86 tahun 2017 penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Pene-laahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangkapemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya.

Dokumen RTRW Kabupaten Tojo Una-Una merupakan acuan penge-mbangan tata ruang dan wilayah secara keseluruhan di Kabupaten Tojo Una-Una, dokumen ini diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031. Rencana kawasan yang diprioritaskan meliputi kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penangannya serta memerlukan dukungan rencana secara rinci dan program sebagai upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pemanfaatan Ruang. Berikut meruapakan kawasan prioritas beserta bentuk arahan pengembangannya.

#### 4.2.9.1 Penetapan Kawasan Sebagai Sentra Produksi Prioritas

Dengan adanya pengembangan berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan dan buah-buahan ini, maka dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dikembang-kan berdasarkan sentra jenis komoditi yang dihasilkan, yaitu:

- Kecamatan Tojo Barat, sentra pengembangan tomat, kangkung, pepaya, mangga dan cengkeh Kecamatan Tojo, sentra pengembangan ketela pohon, ketela rambat, jeruk, langsat, dan pepaya;
- Kecamatan Ulubongka, sentra pengembangan jagung, ketela rambat, jambu, pepaya dan kopi;
- Kecamatan Ampana Kota, sentra pengembangan padi, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele, tomat, kangkung, nanas, mangga, jambu, alpukat, kelapa, cengkeh dan coklat;
- Kecamatan Ampana Tete, sentra pengembangan padi, ketela pohon, kacang tanah, kacanghijau, kacang kedele, terung, pisang, mangga, jambu, kelapa, kopi dan coklat;
- Kecamatan Una-Una, sentra pengembangan padi, kacang tanah, tomat, kangkung dan cengkeh;
- Kecamatan Togean, sentra pengembangan padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat dan bayam;
- Kecamatan Walea Kepulauan, sentra pengembangan padi, kacang kedele, bayam dan cengkeh;
- Kecamatan Walea Besar, sentra pengembangan jagung, kelapa dan

kopi

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi di berbagai sektor adalah dengan menentukan pos-pos atau adanya sentra pengembangan komoditi prioritas yang dapat dikontrol sesuai dengan sektor pengembangan masing-masing. Adapun kawasan yang memiliki potensi sebagai pusat/sentra pengembangan produksi prioritas adalah:

**1. PKL Ampana**

Komoditi unggulan pilihan di wilayah PKL Ampana dan wilayah pelayanan-nya mencakup jagung,ketela pohon, ketela rambat untuk jenis komoditi tanaman pangan, sedangkan untuk sektor sayuran mencakup jenis bayam. Dari sektor petenakan komoditi unggulan terpilih adalah itik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada komoditi unggulan terpilih pada masing-masing wilayah pendukung PKL Ampana dan dan wilayah pelayanannya berikut:

a. Kecamatan Ampana Kota
- Tanaman pangan: jagung, ketela pohon, ketela rambat
- Sayur-sayuran: terung
- Perkebunan: kopi
- Buah-buahan: pisang, pepaya
- Peternakan: itik

b. Kecamatan Ampana Tete
- Sayur-sayuran: tomat, bayam
- Perkebunan: cengkeh
- Buah-buahan: nanas, mangga

**2. PKLp Una-Una**

Untuk PKLp Una-Una dan wilayah pelayanannya jenis produk unggulan terpilih mencakup jenis padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang kedele, kacang tanah pada sektor pertanian tanaman pangan, pada sektor holtikultura sayur-sayuran mencakup jenisterung. Dari sektor perkebunan jenis komoditi yang berkembang adalah kelapa, kopi, coklat. Sedangkan dari sektor peternakan jenis hewan sapi, Kambing, ayam kampung.

a. Kecamatan Una-Una
- Tanaman pangan: padi, ketela pohon
- Sayur-sayuran: terung, bayam
- Perkebunan: kelapa, kopi, coklat
- Buah-buahan: jeruk, nanas, pisang, jambu, mangga
- Peternakan: sapi, ayam kampung

b. Kecamatan Togean
- Tanaman pangan: ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang kedele
- Sayur-sayuran: tomat, terung, kangkung

- Perkebunan: kelapa, kopi, coklat
- Buah-buahan: nanas
- Peternakan: sapi, kambing

c. Kecamatan Walea kepulauan
- Tanaman pangan: jagung, ketela pohon, kacang tanah
- Sayur-sayuran: tomat, terung
- Perkebunan: kelapa, kopi, coklat
- Peternakan: kambing, ayam kampong

d. Kecamatan Walea Besar
- Buah-buahan: nanas

**3. PKLp Tojo**

Komoditi unggulan terpilih di wilayah PKLp Tojo dan Wilayah Pelayanannya secara umum terdiri atas Sektor Pertanian Tanaman Pangan, buah-buahan, sayur-sayuran, perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan. Secara detail mengenai komoditi unggulan terpilih pada PKLp Tojo dan Wilayah Pelayanannya ini adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Tojo
- Tanaman pangan: padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau
- Sayur-sayuran: tomat, terung, bayam, kangkung
- Perkebunan: kelapa, cengkeh, coklat
- Buah-buahan: pisang, jambu, durian, mangga

b. Peternakan: sapi, kambing, itik Kecamatan Tojo Barat
- Tanaman pangan: padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah
- Sayur-sayuran: terung, bayam
- Perkebunan: kelapa, coklat
- Buah-buahan: jeruk, nanas, pisang, jambu
- Peternakan: sapi, ayam kampung, itik

c. Kecamatan Ulubongka
- Tanaman pangan: padi, ketela pohon, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele
- Sayur-sayuran: tomat, terung, bayam, kangkung
- Perkebunan: kelapa, cengkeh, coklat
- Buah-buahan: nanas, pisang, jambu, mangga
- Peternakan: itik

#### 4.2.9.2 Wilayah Bermasalah

Wilayah bermasalah di Kabupaten Tojo Una-Una dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pengembangan kegiatan kawasan terbangun disekitar lahan pertanian potensial, dikhawatirkan akan mempersempit lahan potensial dan ber-

pengaruh terhadap produktifitas hasil pertanian;

b. Pengembangan kegiatan budidaya disekitar kawasan lindung, terutama terdapat di sekitar Kecamatan Tojo, Tojo Barat, Ulubongka, Ampana Tete bagian daerah pegunungan, sehingga dikhawatirkan terjadinya erosi dan pengrusakan tanah serta berpengaruh terhadap sistem pengairan bagi wilayah yang ada dibawahnya;
c. Mixing/percampuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan kegiatan transportasi, menyebabkan kemacetan disekitar pusat kegiatan tersebut. Pola mixing kegiatan ini ditemukan pada pasar induk Kecamatan Ampana Kota;
d. Distribusi sistem pengairan yang belum merata, terutama ke wilayah Kabupaten Tojo Una-Una bagian utara, seperti ke wilayah Kecamatan Walea Kepulauan yang secara notabene selalu kekurangan suplai air pada musim kemarau untuk kegiatan pertanian sehingga berpengaruh terhadap produktivitas kegiatan pertanian di wilayah ini;
e. Distribusi air bersih yang belum menjangkau seluruh wilayah Kebupaten Tojo Una-Una,terutama ke wilayah Kecamatan yang minus air bersih. Suplai air bersih diambilkan dari wilayah kecamatan yang memiliki banyak sumber air, melalui sistem pengelolaan yang dilaksanakan oleh jawatan pemerintah atau melalui kerjasama dengan swasta, sehingga permasalahan air bersih di beberapa kawasan dapat teratasi. Wilayah kecamatan yang rawan kekeringan mencakup wilayah Kecamatan Walea Kepulauan dan Walea Besar;
f. Pemerataan pembangunan dalam upaya memperkecil kesenjangan antar wilayah. Faktor keterlambatan pengembangan beberapa wilayah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una lebih disebabkan oleh kondisi alam dan geografis wilayah yang terlalu bergelombang/terjal, sehingga menghambat pergerakan masyarakat dan sistem distribusi ke wilayah yang bersangkutan. Adapun wilayah yang bermasalah ini di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Kecamatan Ulubongka bagian selatan, Kecamatan Ampana Tete bagian selatan, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar. Terhadap wilayah ini diperlukan penanganan khusus untuk memacu perkembangan potensi yang dimiliki;
g. Terkait dengan faktor diatas, permasalahan lainnya adalah pengembangan sistem transportasi yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk prasarana dan infrastruktur lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan distribusi barang dan jasa, seperti di Kecamatan Walea Kepulauan dan Walea Besar;
h. Penanganan yang belum menyeluruh terhadap pola konservasi kawasan sekitar daerah pantai termasuk sistem pengontrolan terhadap kegiatan budidaya disekitar kawasan ini, menyebabkan kerusakan secara pelahan terhadap kawasan konservasi. Terhadap kawasan konservasi di Kabu-

paten Tojo Una-Una ini pola penanganannya berbeda-beda pada masing-masing kawasan, hal ini terkait dengan kondisi geografis dan pola vegetasi yang dapatdikembangkan pada wilayah yang bersangkutan

Wilayah bermasalah lainnya adalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una bebe-rapa lokasi yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan akibat penambangan ini adalah sekitar Kecamatan Tojo, Ulubongka, dan Ampana Tete, akibat adanya penambangan sirtu. Aktivitas penambangan yang tidak terkontrol ini berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan lainnya. Potensi kandungan bahan tambang di Kabupaten Tojo Una-Una cukup besar antara lain bahan galian B dan bahangalian C. Bahan galian B seperti tambang emas terdapat di Kepulauan Una-Una, Kepulauan Togean, dan Pegunungan Pompangeo. Tembaga terdapat di Kepulauan Una-Una, Kepulauan Colo serta bijih besi dan pasir besi tersebar di Marowo, Kecamatan Tojo dan Kecamatan Ampana Tete.

Bahan galian C seperti batu gamping terdapat di Desa Tanamawu, Sansarino dan Uebone. Marmer yang dimanfaatkan untuk ornament, ubin atau dinding terdapat di Desa Uekuli dan Malewa. Batu apung sebagai bahan amplas dan plester banyak terdapat di kepulauan una- una. Bahan tambang di Tojo Una-Una yang diusahakan oleh masyarakat masih bersifat bahan baku/mentah yang sampai saat ini belum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Terkait dengan aktivitas penambangan, hal yang harus diwaspadai adalah kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan yang dibeberapa tempat masih mengabaikan aspek konservasi, sehingga jika tidak ditangani rawan terjadi erosi dan tanah longsor semakin banyak lahan dan lingkungan yang rusak;

i. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana penunjang sebagai upaya pemerataan pembangunan namun wilayah kecamatan yang berada pada kelerengan >30 persen. Dalam pengembangan infrastruktur mengalami hambatan, seperti pada wilayah KecamatanUlubongka sebelah selatan dan Ampana Tete sebelah selatan. Terhadap kawasan ini diperlukan suatu kajian lebih lanjut mengenai pengembangan sistem prasana jalan yang mampu mencapai kawasan tersebut dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan karakteristik tanah dan penetapan garis konservasi lahan untuk mencegah terjadinya longsor serta mempertimbangkan nilai ekonomis dalam pengembangannya;

j. Infrastruktur utilitas yang sangat penting adalah komunikasi. Daerah yang perlu penanganan tentang infrastruksur komunikasi ini adalah Kecamatan Togean, Walea Kepulauan dan Walea Besar. Dengan terhampatnya komuni-kasi ini, maka daerah tersebut akan terhambat perkembangan-nya dan menjadikan daerah terisolasi. Untuk pengembangan yang lebih diprioritaskan adalah pengembangan sarana komunikasi agar informasi

dari pusat Pelayanan maupun dari pusat Kabupaten Tojo Una-Una yang ada dapat tersampaikan;

k. Penanggulangan kawasan longsor yang akan dijabarkan berikut.
   1. Kondisi Lereng Saat Ini
      Lereng terjal dengan kemiringan yang hampir tegak, didominasi material lepas berupatanah dan batuan rapuh.
   2. Potensi Bencana yang Dapat Timbul
      Lonsor dapat terjadi sewaktu-waktu, yang dipicu oleh gempa, tanah jenuh saat hujan.
   3. Analisa dan Evaluasi Kondisi
      Struktur batuan Sulawesi yang tergolong batuan tua memang dalam kondisi pelapukan hebat, rapuh. Untuk lereng tanah, kelongsoran dipicu oleh komposisi tanah berupa material lepas (*loose soil*) yang mudah jatuh saat jenuh.
   4. Saran dan Rekomendasi
      a. Secara umum, sebaiknya lereng dibuat landai dan dibuatkan drainase lereng berupa jalur-jalur air tertanam di dalam dinding lereng.
      b. Untuk lereng dinding batu, dapat diproteksi dengan menutup celah / merekatkan antar bauan dengan teknik *"Shoot Concrete",* yaitu dengan melapisi dinding batu dengan beton semprot *(concrete encapsulated).*
      c. Untuk lereng dinding tanah, dapat diproteksi dengan membuat dinding penahan tanah *(retaining wall)* dari susunan batu.

#### 4.2.9.3 Rencana Kawasan Perbatasan

Pada kawasan-kawasan perbatasan, terdapat indikasi perkembangan yang saling terkait, baik dalam pola pemanfaatan lahan dan infrastruktur sehingga perlu adanya perencanaan yang saling terintegrasi (sinkronisasi penataan kawasan). Penanganan kawasan perbatasan antar wilayah kabupaten ini lebih ditekankan pada kawasan - kawasan yang perkembangan-nya cepat, yakni:

- Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Poso;
- Perbatasan kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara;
- Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Banggai;
- Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo;

Kerjasama ini didasarkan atas keterkaitan fungsional wilayah yang terdapat dalam duadaerah otonom, dengan demikian akan dicapai sinergi penge-mbangan wilayah yang optimal atasdasar kompetisi dalam sistem. Kerja-sama tersebut didasarkan dalam keterkaitan konteksfungsional alam seperti daerah aliran sungai, hutan lindung, dan keterkaitan fungsi sosial ekonomi.

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah, harus didasarkan pada prinsip:

1. Saling menguntungkan dalam arti saling menghidupi/simbiose mutualistis. Pelaksanaan kerjasama hanya dapat dicapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya/win-win solution.
2. Menciptakan efisiensi dalam proses pembangunan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam memanfaatkan sumber daya, bersifat keterkaitan dan ketergantungan tanpa memperhatikan batas-batas wilayah administratif, meningkatkan sinergi kebersamaan, saling menunjang dan adanya kejelasan atas pembagian porsi tugas dan tanggung jawab serta adanya *take and give* atau *mutual gain*/saling memiliki peroleh bersama.

Setiap kawasan perbatasan di Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda beda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek pertimbangan seperti aspek fisik, komoditi unggulan, karakteristik masyarakat maupun sarana dan prasarana pendukung yang ada. Adapun tujuan dari pengembangan kawasan perbatasan secara umum adalah agar penduduk yang mendiami daerah tersebut tidak melakukan pergerakan ke Kabupaten lain yang notabene dalam tingkat pencapaian lebih mudah dibandingkan aksesbilitas ke dalam wilayah pusat Ibukota Kabupaten Tojo Una-Una itu sendiri.

## A. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Poso

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang berbatasan dengan Kabupaten Poso adalah Kecamatan Tojo Barat. Kecamatan Tojo Barat termasuk kedalam pelayanan PKLp Tojo dengan pusat pelayanan di Kecamatan Tojo. Sesuai dengan potensi yang dimiliki PKLp Tojo, maka akan dikembangkan sebagai sentra pengembangan aktifitas pertanian dan agricultural termasuk sebagai kawasan agrowisata dan agribisnis.

- **Potensi Wilayah**

  Kecamatan Tojo Barat memiliki potensi ekonomi wilayah sebagai daerah penghasil komoditas pertanian baik pertanian tanaman pangan, palawija, holtikultura maupun perkebunan. Adapun komoditas unggulan dan potensial Kecamatan Tojo Barat meliputi:

  - Tanaman Pangan: Padi
  - Palawija: Ketela Pohon, Ketela Rambat.
  - Holtikultura: Tomat, kangkung, Papaya, Mangga.
  - Perkebunan: Cengkeh.

- **Pengembangan Potensi**

  Pengembangan potensi ekonomi wilayah meliputi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam jangka panjang diharapkan dapat terbentuk kawasan agrowisata maupun agribisnis. Dengan demikian, tarikan masyarakat kearah kabupaten Tojo Una-Una sendiri akan lebih besar bahkandapat pula menimbulkan pergerakan dari arah luar kabupaten menuju kedalam kabupaten. Adapun pemasaran hasil produksi pertanian diarahkan ke ibu kota kecamatan yakni Kecamatan Tojo. Pengembangan wilayah ini menjadi kawasan induatri pengolahan hasil pertanian, didukung pula oleh keberadaan wilayah sekitar dalan satu wilayah pengembangan yang memiliki potensi serupa.

- **Pengembangan Fasilitas Pendukung**

  Fasilitas pendukung yang dikembangkan di Kecamatan Tojo Barat sebagai wilayah perbatasan adalah fasilitas yang mendukung kegiatan perekonomian di wilayah tersebut yakni homeindustri pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, pengembangan fasilitas pendukung tersebut meliputi:

  - Peningkatan kualitas pasar desa sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli hasil pertanian;
  - Penambahan fasilitas pengolahan hasil pertanian baik alat, bahan maupun ruangnya;
  - Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, untuk mengantisipasi pergerakan penduduk kearahluar kabupaten;
  - Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan yang berbentuk konsentrasi kurikulum studi kepada teknologi hasil pertanian.

- **Pengembangan Infrastruktur Pendukung**

  Pengembangan infrastruktur pendukung meliputi penge-mbangan jaringan jalan, penyediaan air bersih, pengembangan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Penjabaran penge-mbangan infrastruktur tersebut meliputi:

  - Pengembangan jaringan jalan yaitu dengan meningkatkan kualitas jalan menuju kantong produksi dan menuju lokasi pemasaran yaitu jalan menuju ibukota kecamatan dan pusat pelayanan.
  - Penyediaan dan peningkatan jaringan air bersih untuk mendukung keberadaan home industri pengolahan hasil pertanian.
  - Penyediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi untuk mendukung keberadaan home industri pengolahan hasil pertanian.

- Penyediaan dan peningkatan jaringan listrik untuk mendukung keberadaan home industri pengolahan hasil pertanian.

## B. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara

Wilayah perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara meliputi dua kecamatan yakni kecamatan Tojo Barat dan Kecamatan Ulubongka. Bagian paling selatan dari kedua kecamatan tersebut dikembangkan sebagai unit permukiman transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una.

### Potensi Wilayah

Potensi wilayah perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara adalah keberadaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang tengah dikembangkan oleh pemerintah daerah dan berhasil dengan baik.

### Pengembangan Potensi Wilayah

Kegiatan perekonomian penduduk di wilayah perbatasan ini cenderung bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga untuk peningkatan potensi ekonomi wilayah adalah dengan meningkatkan hasil produksi pertanian serta peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

### Pengembangan Fasilitas Pendukung

Pengembangan fasilitas pendukung kawasan perbatasan tersebut adalah fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Adapun pengembangan fasilitas tersebut meliputi:

- Peningkatan kualitas fasilitas perdagangan untuk penyediaan peralatan dan bahan untuk operasional kegiatan perekonomian.
- Penyediaan pasar desa untuk menjual hasi pertanian.
- Penyediaan fasilitas dan utilitas yang lebih memadai untuk kebutuhan masyarakat transmigrasi
- Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan infra-struktur pendukung meliputi:
- Pengembangan jaringan jalan dengan meningkatkan dan membentuk jalan baru menuju kantong-kantong produksi dan lokasi pemasaran yakni ibukota kecamatan, pusat pelayanan maupun Ibukota Kabupaten.
- Pengembangan Jaringan irigasi sebagai penyedia air untuk pertanian dan perkebunan.

## C. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Banggai

Wilayah perbatasan kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Banggai meliputi Kecamatan Ampana Tete dan sebagian Kecamatan Ulubongka. Secara umum, pengembangan wilayah perbatasan ini adalah untuk pengembangan. Pengembangan kawasan perbatasan ini meliputi:

- **Potensi Wilayah**

  Kecamatan Ampana Tete memiliki potensi ekonomi wilayah sebagai daerah penghasil komoditas pertanian baik pertanian tanaman pangan, palawija, holtikultura maupun perkebunan. Adapun komoditas unggulan dan potensial Kecamatan Ampana Tete meliputi:
  - Tanaman Pangan: Padi.
  - Tanaman Palawija: Ketela Pohon, Kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele.
  - Tanaman Holtikultura:Terung, Pisang, Jambu.
  - Perkebunan: Kelapa, Kopi, Coklat.
- **Pengembangan Potensi Wilayah**

  Pengembangan potensi wilayah dapat berbentuk peningkatan hasil pertanian serta pembentukan sentra pengolahan hasil pertanian.
- **Pengembangan Fasiitas Pendukung**

  Pengembangan fasilitas pendukung antara lain dengan:
  - Peningkatan kualitas pasar desa sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli hasilpertanian.
  - Penambahan fasilitas pengolahan hasil pertanian baik alat, bahan maupun ruangnya.
- **Pengembangan Infrastruktur Pendukung**

  Pengembangan infrastruktur pendukung meliputi pengembangan jaringan jalan, penyediaan air bersih, pengembangan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Penjabaran pengembangan infrastruktur tersebut meliputi :
  - Pengembangan jaringan jalan yaitu dengan meningkatkan kualitas jalan menuju kantong produksi dan menuju lokasi pemasaran yaitu jalan menuju ibukota kecamatan dan pusat Pelayanan.
  - Penyediaan dan peningkatan jaringan air bersih untuk mendukung keberadaan industri pengolahan hasil pertanian.
  - Penyediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi untuk mendukung keberadaan industry pengolahan hasil pertanian.
  - Penyediaan dan peningkatan jaringan listrik untuk mendukung keberadaan industripengolahan hasil pertanian.

## D. Perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo

Wilayah perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo meliputi seluruh kecamatan yang terdapat di Kepulauan Togian

yaitu Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togian, Kecamatan Walea Besar, dan kecamatan Walea Kepulauan.

- **Potensi Wilayah**
  Wilayah Perbatasan ini berpotensi dalam sektor pariwisata. Kepulauan Togian yang telah dijabarkan sebelumnya memiliki objek wisata yang terbagi dalam zona pesisir dan zonakepulauan.
- Pengembangan Potensi Wilayah
  Pengembangan potensi wilayah Kepulauan Togian diarahkan pada pengembangan pariwisata kepulauan dengan membentuk linkage sistem pariwisata antara pulau-pulau kecil yang terdpatdi Kepulauan tersebut.
- Pengembangan Fasilitas Pendukung
  Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata antara lain dengan:
  - Peningkatan dan penambahan fasilitas jasa pariwisata.
  - Membentuk linkage sistem pariwisata.
  - Manajemen Kepariwisataan.
- Pengembangan Infrastruktur Pendukung
  Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, meliputi:
  - Peningkatan aksesbilitas antar pulau-pulau kecil di Kepulauan Togian.
  - Peningkatan akses menuju Kepulauan Togian melalui jalur laut dan udara.
  - Penyediaan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih sertamendukung aktivitas ekonomi.
  - Penyediaan dan peningkatan prasarana listrik.

Untuk lebih jelas mengenai perencanaan kawasan perbatasan, dapat dilihat pada Peta Rencana Kawasan Perbatasan Kawasan Pengendalian Ketat. Kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pengendalian terhadap kawasan-kawasan yang dianggap mempunyai kecenderungan perkembangan kegiatan budidaya yang sangat tinggi, pengendalian tersebut digunakan untukmenghindari terjadinya konflik dengan kawasan konservasi yang lokasinya berdekatan dengan kawasan pengendalian ketat. Adapun kawasan yang dikendalikan, dan memiliki kecenderungan sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan dimungkinkan dapat menggangu fungsi utama adalah:

1. **Pengendalian kawasan di sekitar pertambangan,**
   Pengendalian kawasan sekitar pertambangan adalah untuk menghambat eksploitasi kegiata pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk tetap menjaga kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan agar kegiatan pertambangan dan sektor lain di sekitarnya bisa tetap saling mendukung dan berkelanjutan. Pengawasan terutama meliputi kesela-

matan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yangmenyangkut kepentingan umum. Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian ada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

2. **Pengendalian kawasan di sekitar bandara udara,**

Fasilitas bandara udara merupakan fasilitas trasnportasi yang tidak dapat di pandang dalam perspektif lokal. Bandara udara memerlukan perencanaan khusus, baik perencanaan ruang maupun manajemen penerbangannya. Bandara udara satu dengan yang lain sangat terkait. Bandara udara juga merupakan prasarana angkutan yang sangat strategis dan merupakan isu nasional terutama masalah kelayakannya.

Kelayakan yang dimaksud adalah kelayakan terkait lokasi geografis dan perencanaan ruangnya, kelayakan terkait efektifitas keberadaan sebuah bandara dalam mengakomodasi kebutuhan transport regional yang cepat dan efisien, keamanan penerbangan, juga terkait masalah kelayakan dari sisi bisnis penerbangan dan masalah pengembangan wilayah.

Pembangunan bandara udara memerlukan perencanaan ruang khusus. Kawasan disekitar bandara udara hingga beberapa kilometer, merupakan wilayah yang berinteraksi langsungdengan kawasan bandara udara. Sehingga menata kawasan bandara adalah merencanakanruang lebih luas dari kawasan bandara itu sendiri.

Memperhatikan peran Bandara Udara yang sangat strategis maka perencanaan bandara udara dikategorikan dalam perencanaan kawasan pengendalian ketat. RTRW mengarahkan untukdiatur dalam peraturan khusus. Peran dan skala fasilitas yang regional, maka perenacanaann kawasan bandara diarahkan melalui perijinan pemerintah propinsi.

Perencanaan kawasan bandara meliputi pengaturaan terhadap kawasan bandara dan kawasan disekitar bandara. Type bandara akan menyangkut jumlah, jenis dan frekuensi penerbangan. Tipe bandara berpengaruh terhadap ruang di sekitar kawasan bandara, yang memerlukan pengendalian secara ketat. Pengaturan kawasan bandara termasuk ruang di sekitar kawasan bandara yang harus dikendalikan, secara garis besar harus merencanakan komponen berikut:

1. **Kawasan bandara**

   Kawasan bandara merupakan kawasan bandara itu sendiri yang meliputi ruang landasan pacu dan ruang untuk kebutuhan fasilitas sebuah bandara. Ruang kawasan bandara tergantung dari tipe yang akan direncanakan.

2. Pengaturan kawasan di sekitar bandara pada dasarnya mengatur

peruntukan lahan, ketinggian bangunan yang dijinkan dan perlindungan terhadap kebisingan. Kawasan disekitar bandara meliputi:

- **Ruang bebas hambatan**

  Ruang bebas hambatan merupakan ruang yang diperlukan untuk manuver pesat ketika akan mendarat (*landing*) dan mengudara (*take off*). Jarak minimum ruang bebas hambatan dari ujung landasan pacu adalah 15 km. Kondisi ini menyesuaikan dengan ketentuan *ICAO Annex 14 aerodromes*. Pada jarak 15 sampai dengan 2 km darilandasan pacu, pesawat mempunyai kemiringan 2,5 persen. Pada jarak 3 km hingga landasan pacuk, sudut pesawat 2 persen. Pada jarak 900 meter darilandasan tidak boleh ada benda yang menonjol (ketinggian 0 meter).

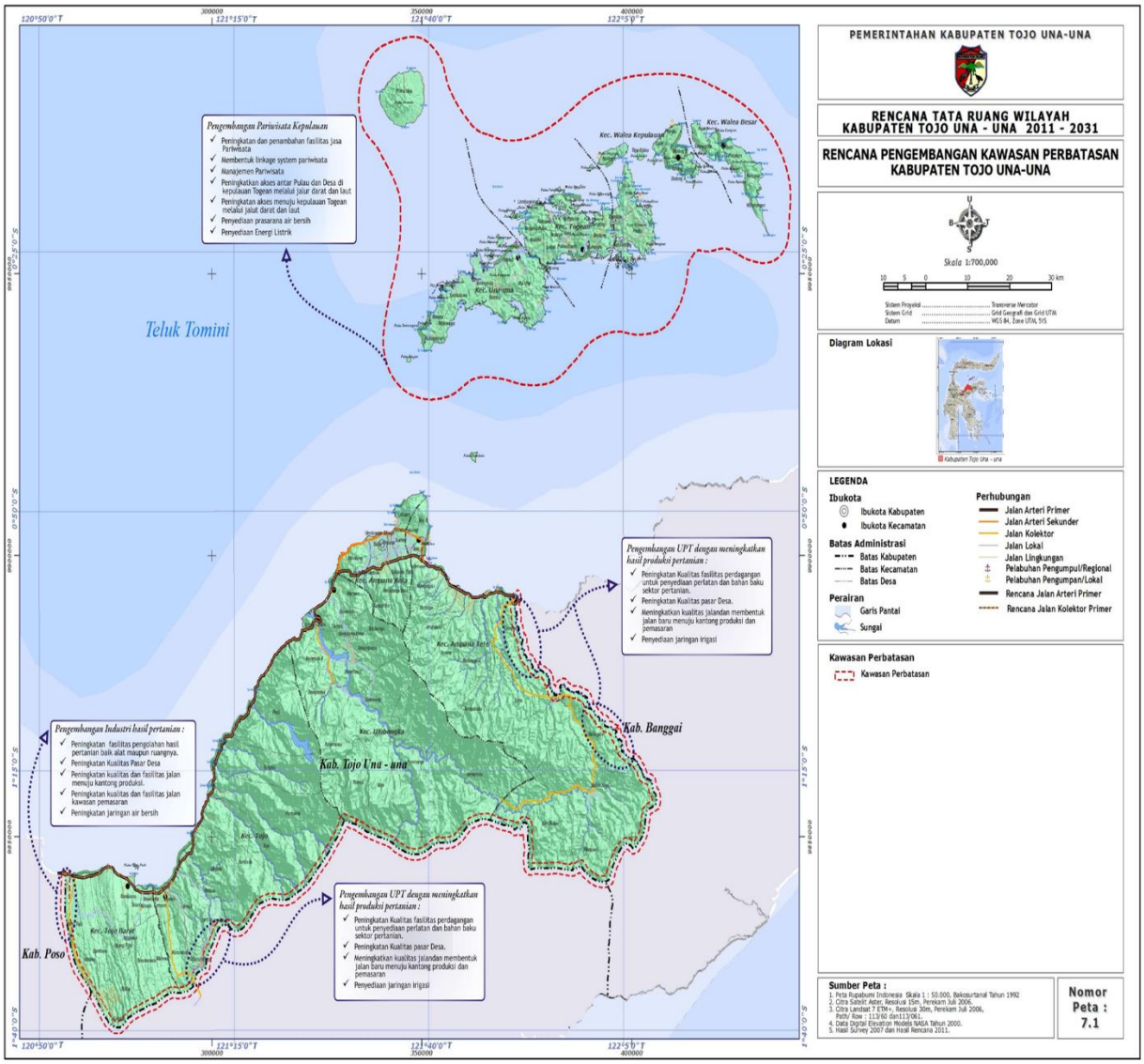
  Aspek pengendalian dan pengawasan harus memperhatikan sebesar besarnya kepentingan umum, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan wilayah. Dengan demikian area disekitar bandara udara, terutama kawasan di depan landasan pacu harus memiliki jarak yang tepat dan diperhitungkan untuk kepentingan keselamatan penerbangan dan area diluar bandara sebagi antisipasi terjadinya kecelakaan penerbangan saat tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan alam pendaratan.

- **Kawasan kebisingan**

  Kawasan kebisingan merupakan kawasan yang terkena dampak langsung dari suara mesin pesawat. Ruang kebisingan merupakan ruang yang memerlukan pengaturan khusus. Satuan pengukuran kebisingan yang harus diatur dalam toleransi tertentu adalah dalam NEF. Pengaturan jarak ruang kebisingan terluar diatur minimal berdasrkan pada frekuensi pesawat yang masuk ke bandara. Pengaturan lebih detail dikaitkan dengan jenis pesawat secara Kawasan transisi (*transitional surface*) Adalah kawasan peralihan diluar bandara. Kawasan transi ditetapkan minimum denganradius 4 km. Ketinggian bangunan di tetapkan maksimal 25 meter

- **Kawasan bidang kerucut**

  Bidang kerucut merupakan batas terluar kawasan yang berinteraksi dengan kawasan bandara. Bidang kerucut di tetapkan minimal hingga 2,1, km dari garis terluar kawasan transisi. Kawasan yang merupakan bidang kerucut di ijinkan ada bangunan hingga maksimum 45 meter.




**Gambar 4.12**
**Peta Kawasan Sekitar Bandara**

## 4.3 Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi Kabupaten Tojo Una-Una dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat Global, Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Tojo Una-Una. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Sesuai permendagri 86 tahun 2017, dijelaskan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1) Merupakan isu utama yang sementara ditangani atau dipecahkan bersama baik ditingkat global, nasional dan Sulawesi Tengah secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dan prioritas Nasional;
2) Merupakan isu utama sebagai urusan kewenangan yang dilimpahkan pada Kabupaten dan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una di berbagai bidang;
3) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dalam tahapan penyusunan RPJMD dan menjadi prioritas bagi mayoritas dan pemangku kepentingan utama pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una serta Memiliki Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una;
5) Merupakan pernyataan isu utama dimana Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
6) Prioritas janji politik Bupati dan wakil bupati terpilih yang menjadi komitmen untuk diwujudkan dalam target indikator dan program unggulan hingga tahun 2026;
7) Isu Utama yang memiliki pengaruh besar atausignifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kabupaten Tojo Una-Una;

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan pendekatan tehnokraktik berdasarkan hasil rumusan Konsultasi Publik yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat Kabupaten untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis serta memperhatikan Isu global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi perumusan prioritas pembangunan daerah.

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026, karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang ditetapkan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang keliru dimasa yang akan datang. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran pada Bab selanjutnya.

**Tabel 4.11**
**Hasil Penapisan dan Pemilihan Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-Una**

| No. | Isu Strategis Utama | Total Skor * Bobot | Rata-Rata Skor | Prioritas Isu Strategis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 merupakan Prioritas Daerah | 475 | 67,86 | 1 |
| 2 | Angka Kemiskinan Masih Sangat Tinggi | 465 | 66,43 | 2 |
| 3 | Kabupaten Tojo Una-Una masih dalam Kelompok Kabupaten Tertinggal di Sulawesi Tengah | 465 | 66,43 | 2 |
| 4 | Sumber daya manusia (SDM) Unggul dan Berdaya Saing Rendah, mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih Rendah. | 460 | 65,71 | 3 |
| 5 | Ketimpangan infrastruktur Antar Wilayah Kecamatan | 450 | 64,29 | 4 |
| 6 | Pengembangan Trisula Sektor Unggulan Daerah Belum Optimal (pariwisata, pertanian, dan Perikanan Kelauatan) | 440 | 62,86 | 5 |
| 7 | Pertumbuhan ekonomi belum Inklusif - (Belum dinikmati secara merata, masih byk masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan) | 380 | 54,29 | 6 |
| 8 | Penurunan DTDD Lingkungan Hidup dan Wilayah Rawan Bencana | 364 | 52,00 | 7 |
| 9 | Dukungan Kabupaten Tojo Una-Una dalam pencapaian target SDGs/TPB malalui percepatan pembangunan dan perbaikan pencapaian indikator Tujuan | 360 | 51,43 | 8 |
| 10 | Pelayanan Publik berbasis Tehnologi Informasi (IT) - smart Governance belum optimal | 352 | 50,29 | 9 |
| 11 | Pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan Desa/Kelurahan dengan memanfaatkan belum optimal. | 344 | 49,14 | 10 |

Sumber : Hasil Analisis Pembobotan Worksheet Isu Strategis, 2021.

Pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah, baik itu wilayah daratan dan kepulauan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Tojo Una-Una mempunyai kekuatan/kelebihan, kelemahan, dikategorikan sebagai lingkungan internal juga peluang dan ancaman yang dikategorikan sebagai lingkungan eksternal. Salah satu kekuatan atau keunggulan Tojo Una-Una adalah di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian sebagai trisula sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan hingga saat ini, dapat diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut.

1. Pemulihan dari Pandemi Covid-19
2. Kabupaten Tertinggal Dan Kemiskinan Tinggi
3. SDM Unggul Dan Berdaya Saing
4. Ketimpangan Infrastruktur Antara Wilayah
5. Pengembangan Trisula Sektor Unggulan Daerah
6. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif
7. Lingkungan Hidup Dan Daerah Rawan Bencana
8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS)

Kedelapan isu-isu strategis tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

**1. Pemulihan dari Pandemi Covid-19**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan dengan merekolasi dan merefokusing APBD. Fokus perhatian pada fase pemulihan pandemi Covid-19 ini, adalah alokasi anggaran yang ditujukan untuk menggerakan ekonomi produktif masyarakat dan bermuara pada pemulihan ekonomi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha dan stakeholers sektor pariwista terus berbenah dan segera ingin bangkit agar kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tojo Una-Una kembali meningkat. Hotel, akomodasi, café, restoran, dan UMKM yang hidup dari datangnya tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Tojo Una-Una akibat pandemic mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Berbagai event yang disebut MICE (*meetings, incentives, conferences, exhibitions*) terpaksa harus ditunda yang direncanakan sepanjang tahun 2020 sampai pertengahan 2021 di Kabupaten Tojo Una-Una dibatalkan, juga program kerjasama untuk mendatangkan Turis mancanegara secara berkala di kepulauan Togean sebagian besar dibatalkan. Tentunya kondisi ini membuat para penyedia jasa pariwisata harus merumahkan dan bahkan memberhentikan (PHK) karyawannya. Jika dilihat dari data secara nasional, sebanyak limabelas juta pekerja langsung di sektor pariwisata diprediksi terancam kehilangan pekerjaan hingga akhir Tahun 2020, begitupun di kabupaten Tojo Una-Una. Sementara itu, terdapat banyak tenaga kerja tidak langsung yang terdampak termasuk di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu para pekerja UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif, toko souvenir, *tour guide*, dan lainnya.

Kemampuan daya beli masyarakat cenderung menurun akibat pandemi Covid-19. Masyarakat lebih memprioritaskan belanja pengeluaran untuk membeli produk baik itu barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan pokok. Sedangkan pariwisata merupakan produk jasa yang dianggap sebagai kebutuhan yang sifatnya bisa ditunda dan tidak mendesak harus dipenuhi. Penurunan daya beli masyarakat inilah yang turut menyebabkan sektor pariwisata semakin terpuruk pada saat

pandemi. Penurunan daya beli juga diakibatkan dari menurunnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 mengalami kontraksi -3,21 akibat pandemi Covid-19. Pada sisi lain untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tojo Una-Una maka dilakukan refocusing anggaran pembangunan yang lebih mempriotitaskan penangganan pemulihan kesehatan dan pencegahan penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Untuk berikutnya sejalan dengan upaya pemulihan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi masyarakat. Pemulihan ini tentunya akan disesuaikan dengan struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu, kebijakan APBD disinergikan dan dilakukan *refocusing* untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Tidak kalah penting, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat hidup berdampingan dengan virus corona Covid-19. Hal ini karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. Hal ini memberikan sinyal bahwa hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis. Justru kondisi ini merupakan titik tolak menuju tatanan kehidupan baru dimana pemerintah dan masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah yang sensitif, responsif dengan dinamika serta menentapkan isu utama melawan dan upaya pemulihan pasca pendemi Covid-19 menjadi perhatian utama didalam melasanakan pembangunan pada masa saat ini dan masa yang akan datang.

**2. Kabupaten Tertinggal dan Kemiskinan Tinggi**

Salah satu isu penting dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah upaya untuk dapat keluar dari daerah tertinggal. Ada tiga indicator penting untuk keluar dari daerah tertinggal, yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 mengalami kontraksi minus 3,21; IPM masih sangat rendah yaitu 64,59 pada Tahun 2020; dan tingkat kemiskinan juga masih tinggi yaitu 16,39 persen pada Tahun 2020.

Ketertinggalan daerah dapat dipicu oleh beberapa hal diantaranya adalah pada akses yang sulit secara fisik, baik itu karena kondisi alami daerah maupun karena infrastruktur pendukung seperti sarana dan prasarana transportasi belum memadai. Ketertinggalan juga dapat terjadi karena kualitas sumber daya manusia yang rendah (IPM 64,59 pada Tahun 2020) oleh karena keterbatasan dalam mendapatkan akses belajar maupun informasi. Namun demikian pada era teknologi

informasi dan komunikasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat ditekan dengan mengupayakan akses terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan akses terhadap informasi serta keterhubungan daerah dengan daerah lain maupun secara nasional dan internasional.

Pada sisi lain kemiskinan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 masih sangat tinggi yaitu sebesar 16,39 persen. Angka ini diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah (12,92 persen) dan rata-rata nasional (9,78 persen). Dari angka tersebut, Tojo Una-Una menempati urutan kedua tertinggi angka kemiskinannya di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Donggala (17,39 persen). Jumlah penduduk miskin masih tinggi sebesar 25.430 jiwa masih lebih rendah dari Kabupaten lainnya. Namun dari sisi persentase penduduk miskin kabupaten Tojo Una-Una konsisten menunjukkan masih sangat tinggi. Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah.

Walaupun program bantuan pemerintah untuk penduduk miskin telah berjalan selama tahun 2016-2021. Namun masih belum optimal dan masih dijumpai program yang belum tepat sasaran. Disamping itu garis kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan lainnya masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una cenderung disebabkan kondisi geografis yang sulit dijangkau (khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil), dan masih adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan infrastruktur wilayah yang terbatas sehingga desa-desa terpencil sulit diakses. Selain itu trisula unggulan daerah belum dikelola secara optimal dan profesional yaitu pariwisata, kelautan-perikanan, dan pertanian. Sehingga hal ini menjadi isu utama didalam perencanaan pembangunan pada masa-masa mendatang di Kabupaten Tojo Una-Una.

### 3. SDM Unggul Dan Berdaya Saing

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dari kemajuan suatu daerah. Sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki, jika SDMnya tidak berkompeten maka akan sulit untuk maju dan mengejar ketertinggalan. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dan tujuan dalam pembangunan nasional yang harus diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Pembangunan SDM sangat penting karena merekalah yang menjadi pionir pembangunan. Pembangunan SDM saat ini diarahkan kepada terbentuknya insan yang memiliki kecerdasan pendidikan, intelektual, spiritual serta mental dan karakter yang baik. Kabupaten Tojo Una-Una juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten lain yang telah lebih dahulu maju. Hal ini menjadi sangat krusial karena saat ini IPM Kabupaten Tojo Una-Una masih rendah yaitu 64,59 dan menduduki urutan terakhir dari 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una bersama dengan seluruh stakeholders harus berupaya sungguh-sungguh dan fokus dalam mengalokasikan anggaran sesuai amanat *mandatory spending*, khususnya pendidikan dan kesehatan. Hal ini mengingat

bahwa permasalahan pendidikan dan kesehatan masih sangat kompleks dan perlu mendapat intervensi khusus. UHH penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 hanya 65,67 tahun, masih di bawah rata-rata provinsi yakni 68,69 tahun dan rata-rata nasional selama 71,47 tahun. UHH Kabupaten Tojo Una-Una menempati urutan ke-3 dari bawah setelah Kabupaten Banggai Laut selama 65,38 tahun dan Parigi Moutong selama 64,3 tahun.

Isu tentang kesehatan, khususnya *stunting* juga perlu mendapat penanganan yang serius, dimana prevalensi stunting masih tinggi yaitu 22,68 persen pada Tahun 2020. Angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi yaitu 16,24 dan rata-rata nasional yaitu 27,00. Jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, prevalensi stunting di Kabupaten Tojo Una-Una adalah yang ketiga tertinggi setelah Kabupaten Donggala yakni 27,15 dan Banggai Kepulauan yakni 22,96. Tingginya prevalensi stunting dan permasalahan kesehatan lainnya seperti gizi buruk, kematian bayi, kematian ibu diantaranya disebabkan terbatasnya aksesibilitas masyarakat di wilayah kepulauan dan terpencil, layanan kesehatan yang belum berkualitas, tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang belum memadai.

Selain kesehatan, isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius adalah pendidikan. Indikator pendidikan yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). RLS Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 mencapai 8,39 tahun. Rendahnya RLS ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah program wajib belajar 9 tahun yang belum tuntas, masih ada penduduk usia lebih dari 25 tahun yang tidak sekolah, dan masih banyaknya anak yang putus sekolah. Masalah pendidikan menjadi semakin kompleks akibat adanya pandemi Covid-19. Siswa dituntut untuk belajar di rumah secara daring. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah tidak semua siswa memiliki perangkat *smartphone* atau laptop dan akses jaringan internet yang belum stabil dan belum merata di seluruh wilayah.

**4. Ketimpangan Infrastruktur Antara Wilayah**

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang masih umum terjadi di Indonesia. Beberapa wilayah mengalami kemajuan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami ketertinggalan terutama di wilayah kepulauan yang sering terisolir karena pebedaan karakteristik wilayah dengan daerah daratan. Ketimpangan wilayah antara wilayah kepulauan dan daratan di Kabupaten Tojo Una-Una tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi, serta infrastruktur.

Wilayah daratan meliputi kecamatan yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir pantai. Kecamatan di wilayah daratan terdiri atas Kecamatan Tojo Barat, Tojo, Ulubongka, Ampana Kota, Ampana Tete, Batudaka, Ratolindo. Sedangkan wilayah

kepulauan yang terdiri dari Kecamatan Una-Una, Togean, Walea Kepulauan, Talatako, dan Walea Besar.

Wilayah kepulauan di Kabupaten Tojo Una-Una yang terkenal sampai tingkat internasional adalah Kepulauan Togean (*Togean Islands*) yang memiliki potensi pariwisata dan mampu menarik wisatawan mancanegara khususnya wisatawan dari Eropa dan Amerika. Namun demikian disisi lain, kemiskinan sangat tinggi di wilayah kepulauan karena infrastruktur yang masih minim. Apabila infrastruktur khususnya transportasi dan telekomunikasi dibangun dengan memadai maka akan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

**5. Pengembangan Trisula Sektor Unggulan Daerah**

Tiga sektor unggulan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una adalah pariwisata, perikanan, dan pertanian. Dari tiga sektor tersebut, jika ingin fokus, maka satu unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata akan dibarengi dengan pengembangan sektor perikanan dan pertanian yang mendukung sektor pariwisata.

Sektor pertanian sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tojo Una-Una. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 sebesar 38,68 persen. Sektor pertanian tersebut mencakup sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Sektor ini merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah karena mampu menyerap banyak tenaga kerja di sektor non formal. Sektor Partanian sebagai sektor unggulan daerah dengan kontribusi terhadap PDRB. Komoditi pertanian tanaman pangan di kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari berbagai jenis seperti komoditi padi sawah dan padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacau hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Komoditi yang menjadi unggulan adalah komoditi jagung dan kedelai. Untuk kedua jenis komoditi ini setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

Selain pertanian, sektor perikanan adalah salah satu sektor dari trisula pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten Tojo Una-Una termasuk wilayah maritim disekitaran Teluk Tomini, maka letak geografis ini memberikan dampak positif bagi sumber daya laut khususnya perikanan. wilayah yang paling banyak menghasilkan produksi perikanan tangkap ini adalah kecamatan Talatako. Rumah tangga di sektor perikanan mencakup pembudidaya, penangkapan, pengolahan, dan pengumpul. Komposisi rumah tangga nelayan di Kabupaten Tojo Una-Una masih didominasi oleh penangkapan yaitu lebih dari 80 persen. Jenis komoditas unggulan dari perikanan ini diantaranya ikan Kerapu, ikan Boronang, ikan Kuwe, ikan Selar, ikan Cakalang, ikan Tongkol, ikan Tuna ekor kuning, ikan Kerapu, dan ikan Kakap. Permasalahn utama sektor perikanan adalah belum ada industri pengolahan yaitu

produk olahan hasil perikanan kelautan yang dapat meningkat nilai tambah dan produk derivatif lainnya.

Sektor yang sangat diunggulkan dan sangat potensial untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2020 sebesar 10,95 persen. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki destinasi wisata dan yang cukup banyak dan indah, terletak di Wilayah Kepulauan diantaranya adalah Pulau Malenge, Pulau Poyalisa, Pulau Paladan, Kadidiri, Pulau Papan, dan lainnya. Selain itu, Tojo Una-Una juga memiliki destinasi wisata yang menarik di wilayah daratan. Sektor yang berkaitan langsung dengan pariwisata seperti kerajinan, sanggar seni budaya, usaha kuliner khas ekonomi kreatif serta sektor pendukung lainnya; perdagangan, industri dan transportasi. Selain itu, infrastruktur jalan dan fasilitas publik sebagai bagian untuk menunjang pariwisata perlu ditingkatkan.

Destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una masih kurang dikunjungi olehnya dibutuhkan strategi promosi untuk mendorong peningkatan kunjungan pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una. Kondisi penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una dihadapkan pada beberapa kenyataan yaitu: 1) Pelayanan industri pariwisata masih relatif rendah, 2) Sadar wisata masyarakat masih relatif kurang, 3) Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih terbatas, 4) Masih lemahnya konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi dan inovatif di lingkungan pariwisata, 5) Desain Kampanye wisata masih belum optimal, 6) Peran aktif masyarakat lokal dalam pengembangan wisata masih kurang.

**6. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una saat ini banyak didorong oleh kontribusi sektor pertanian, yaitu 38,68 persen pada Tahun 2020. Meskipun kontribusinya besar, namun cenderung mengalami penurunan setiap tahun, dimana pada Tahun 2016 kontribusi sektor pertanian 39,86 persen menurun menjadi 39,73 persen pada Tahun 2017, dan menurun lagi pada Tahun 2017 dan 2018, masing-masing menjadi 38,93 dan 38,29 persen. Sementara itu kontribusi sektor industri cenderung stagnan berada dikisaran angka 8 persen, dimana pada Tahun 2020 kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 8,41 persen. Yang sangat menggembirakan adalah sektor perdagangan dimana kontribusi sektor ini terhadap PDRB Tojo Una-Una mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pada Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan 7,82 persen meningkat setiap tahun hingga mencapai 8,13 persen pada Tahun 2020.

Meskipun sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, tetapi produktivitas tenaga kerja di sektor ini sangat rendah, sehingga masyarakat miskin. Olehnya itu Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus berupaya untuk mendorong sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor industri, pengolahan, dan

pariwisata agar produktivitas tenaga kerja meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, dan pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

**7. Lingkungan Hidup dan Daerah Rawan Bencana**

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tojo Una-Una harus memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Olehnya itu, dokumen RPJMD harus dibarengi dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Masih ada tindakan masyarakat yang mengeksploitasi sumberdaya alam melalui *illegal logging*, *illegal mining* maupun penggunaan cara instan dalam menangkap ikan seperti penggunaan bom ikan yang telah merusak terumbu karang disepanjang Kepulauan Togean dan habitat ikan. Hal ini menjadi ancaman serius di Kabupaten Tojo Una-Una karena eksploitasi sumberdaya alam ini berlangsung di daerah *hinterland* yang subur di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai akibat yang ditimbulkan dari eksploitasi masal adalah adanya masalah kerusakan terumbu karang, banjir, longsor, degradasi lahan kritis, abrasi pantai, pendangkalan sungai. Demikian pula penggunaan bom ikan dapat menghancur biota laut terutama terumbu karang yang berfungsi multiguna bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Selain isu strategis tersebut di atas, masih terdapat isu alih fungsi lahan seperti pertanian dan hutan. Isu ini perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak bagi ketahanan pangan dan kondisi lingkungan di Tojo Una-Una. Alih fungsi lahan pertanian akan semakin menurunkan tingkat daya dukung untuk pangan, mengurangi fungsi lindung hutan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Disamping itu Perubahan iklim dan Bencana alam yang terjadi dikabupaten Tojo Una-Una secara beruntun pada bulan Juli-Agustus 2021 akibat deformasi sesar lokal tanpa nama wilayah kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Geofisika Palu serta adanya perubahan iklim yang berdampak pada naiknya temperatur, curah hujan atau angin mengakibatkan perubahan pola tanam serta terjadi peningkatan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga hal-hal tersebut menjadi bagian penting dari Perencanaan yang sensitif bencana. Oleh karena itu, Penyusunan RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una.

Akibat dari perubahan iklim yang begitu cepat dunia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi. Tingkat karbon dioksida, gas methana dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada umat manusia, akibat Perubahan Iklim Peningkatan suhu bumi memicu musim hujan yang sulit diprediksi, kemarau panjang, banjir, peningkatan curah hujan, tanah longsor, abrasi pantai, peningkatan permukaan air laut, gelombang panas, dan kebakaran hutan.

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daerah rawan bencana. Bencana yang mengancam Kabupaten Tojo Una-Una antara lain tanah longsor; banjir, abrasi pantai, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pengendalian perusakan lingkungan dan hutan lindung juga harus diperhatikan untuk mencegah bencana akibat ulah manusia seperti longsor atau banjir. Selain itu juga terdapat masalah untuk antisipasi penyebaran virus Corona yang melanda seluruh dunia. Persiapan mitigasi dengan menyiapkan Kabupaten dan Desa Tangguh Bencana menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak kerugian dari kejadian bencana baik bencana alam maupun non alam. Penyiapan sarana prasarana, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu dilakukan. Selain itu bencana alam Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una masih akan menghadapi bencana sosial kemanusiaan yang di picu konflik pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak beraturan serta berbagai konflik lahan juga menunjukan kerentanan pada masalah bencana. Atas berbagai kejadian dan kerentanan bencana itu, pemerintahan dan masyarakat perlu melakukan mitigasi mellaui upaya memyiapkan masyarakat untuk memiliki kesiapan yang memadai dalam meng-hadapinya, sehingga dapat terlihat secara nyata ketika terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana sosial lainnya, adanya respon yang cepat dan memadai serta pengeloaan manajemen pasca bencana yang lebih baik.

**8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dicapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan pertama dalam SDGs adalah mengentaskan segala bentuk kemiskinan. Hal ini menjadi isu strategis sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi yaitu 16,39 persen pada Tahun 2020. Tujuan kedua dalam SDGs yang perlu mendapat perhatian serius adalah ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian berkelanjutan. Tujuan yang lain termasuk isu pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi, pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, kelestarian lingkungan, dan perdamaian menjadi target yang akan dicapai dalam pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Tojo Una-Una.

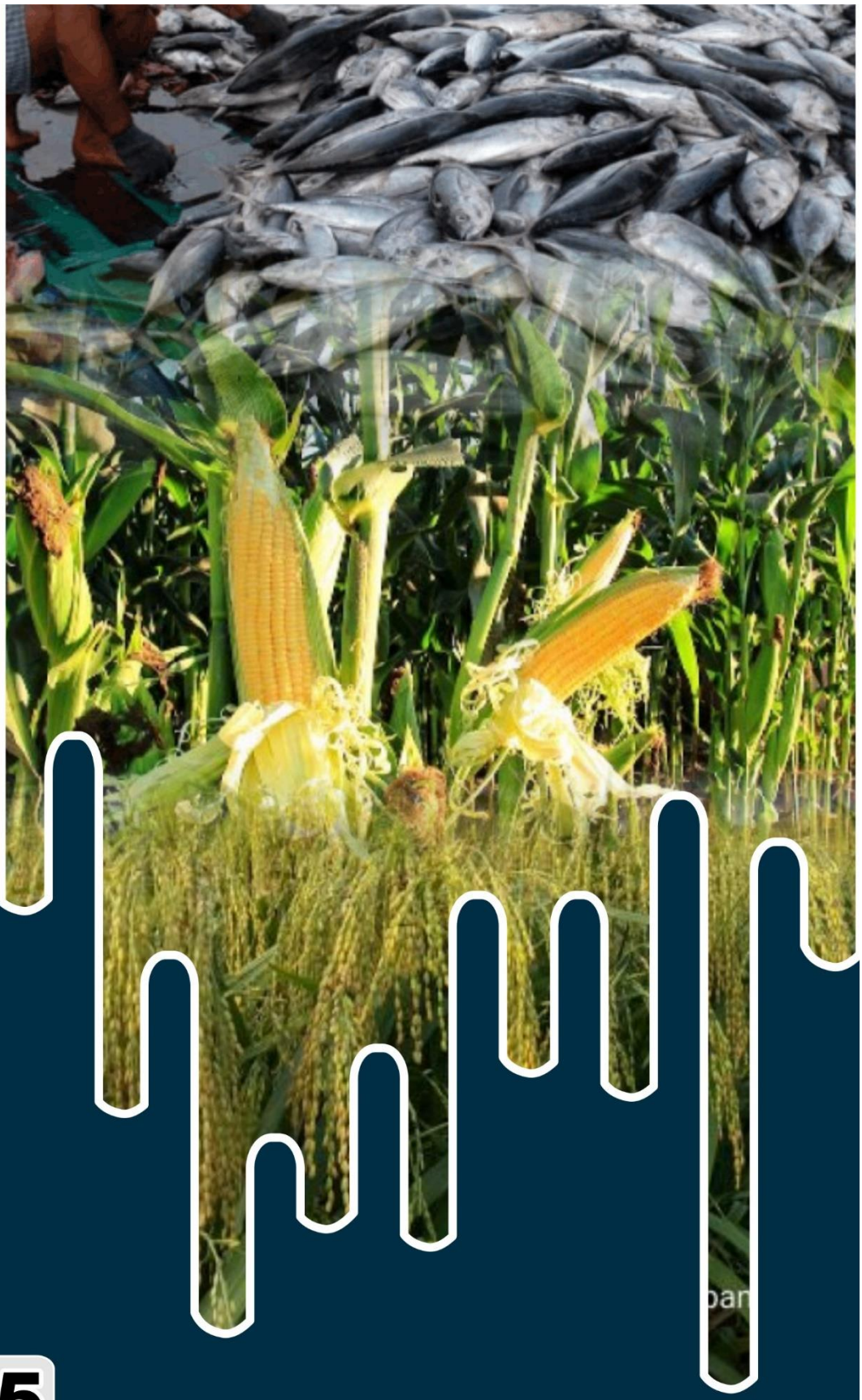
Sampai dengan tahun 2020, Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak total 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten

Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una telah melaksanakan 23 indikator dalam RPJMD karena beberapa indikator secara geografis tidak terdapat di wilayah Kabupaten Tojo Una Una. Pencapaian 23 indikator TPB terdiri atas 9 indikator (4,1 persen) sudah tercapai dan 14 indikator (6,4 persen) belum tercapai. Serta terdapat 108 indikator TPB (49,1 persen) yang tidak/belum ada data dan 6 indikator TPB (2,7 persen) yang tidak sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga perlu peningkatan perhatian dan komitmen kabupaten didalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun keterkaitan antar isu strategis baik isu Global, Isu Strategis Nasional, Regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-Una.




**Gambar 4.13**
**Keterkaitan Isu-Isu Strategis Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**



# BAB 5

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 merupakan gambaran kondisi Kabupaten Tojo Una-Una periode lanjutan kepemimpinan Bupati ***Muhammad Lahay, SE, MM*** dengan wakil Bupati ***Ilham, SH*** dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD mendtang. Implementasi tentang visi dan misi secara lebih aplikatif dituangkan ke tujuan, sasaran, dan indikator-indikator yang ingin dicapai diakhir periode, melalui berbagai strategi dan arah kebijakan dengan berpedoman dan merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami penguatan, pendalaman dan penajaman dengan mempertimbangkan dan mensinkronisasikan pada berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

## 5.1 VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan untuk dapat diwujukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pemba-ngunan sesuai misi yang diemban. Visi tersebut menjadi visi Kabupaten Tojo Una-Una yang dicapai pada akhir periode perencanaan Tahun 2026, juga untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama DPRD, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

Visi Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una ini diharapkan mampu mengejawantahkan dan memenuhi amanah masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, sekaligus beriringan dengan pencapaian tujuan nasional di daerah, sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, dengan konsisten dan terpadu memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RPJPD Kabupaten. Adapun Visi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA**
**TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)**

Makna dari Visi tersebut adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan sosial, budaya, ekonomi maupun bencana. Berbagai hal tersebut menjadi modal dasar menuju wilayah yang maju dan keluar dari ketertinggalan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat *(society welfare)* yang berkeadilan, serta terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi tersebut dengan spirit (jargon) adalah **GAPAI TAMARA.**

**TAMARA** adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan semangat dan motivasi kebaikan bersama di semua komponen dan elemen masyarakat, dan aparatur Pemerintah daerah Kabupaten TojoUna-Una secara

sinergi, terpadu, dan harmonis. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan (rujukan) untuk menjabarkan misi pembangunan daerah. Pokok-pokok visi pembangunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.1**
**Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**

| No. | Pokok Visi | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | **TANGGUH** | • Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mem-bangun masyarakat Tojo Una-Una yang **Tangguh,** dimana masyarakat berpikir positif dan optimis dalam meraih masa depan, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat Tojo Una-Una yang Tangguh, Maju dan Sejahtera (TAMARA).<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam meraih kemajuan di semua bidang pembangunan itu harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan dan mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Tojo Una-Una tidak sekedar Maju dan Sejahtera, tetapi juga **Tangguh** menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakan potensi yang dimiliki secara Bersama.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menyiapkan ketahanan dan ketangguhan masyara-kat dalam menghadapi krisis, yakni bencana alam dan non-alam termasuk pandemi Covid-19, serta perubahan iklim *(climate change)* yang sulit diprediksi namun dengan adanya mitigasi dan antisipasi yang baik maka masya-rakat Kabupaten Tojo Una-Una mampu meng-hadapinya.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga memaknai **ketangguhan berkelanjutan,** adanya roda pemerintahan daerah yang ber-kesinambungan dan melanjutkan kinerja-kinerja positif yang sudah dicapai, dalam mewujudkan sistem pemerin-tahan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi krisis pembangunan daerah.<br>• Pemerintah daerah dan masyarakat Tojo Una-Una sebagai satu kesatuan yang terikat secara sosial, budaya dan ekonomi. Dimana, adanya akar budaya yang hidup masyarakat setempat |

| No. | Pokok Visi | Penjelasan |
|---|---|---|
| | | *(local wisdom)* berada dalam ikatan sosial *(social-capital),* memiliki keterkaitan saling membantu, dan bekerjasama dalam melahirkan ketangguhan masyarakat *(social-resilience)*. Ketangguhan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una merupakan suatu kapasitas dan kapabilitas yang berkelanjutan dalam suatu masya-rakat, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, serta cepat dalam pemulihan menghadapi bencana alam dan non-alam.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam membangun ketangguhan masyarakat sebagai strategi kesiapsiagaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu perspektif, ketangguhan masyarakat memiliki potensi untuk mengatasi masalah umum dan khusus. Perspektif ini membingkai kegiatan sebagai sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Ketangguhan masyarakat menyedia-kan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kesiapsiagaan darurat dan upaya pemulihan secara cepat baik dari sisi Kesehatan, Pendidikan maupun pembangunan ekonomi daerah.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memaknai **Tangguh** juga dalam melaksanakan pembangunan bersama masyarakat secara berkelanjutan menciptakan dan membangun dengan **Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan dan Kabupaten tertinggal**, Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi *(economic development)*, pembangunan sosial *(social development),* dan perlindungan lingkungan *(environmental protection)*. |
| 2 | **MAJU** | • Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memaknai dan memahami, **Maju** dalam pengertian terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan juga menjelaskan sebuah transformasi pengelolaan |

| No. | Pokok Visi | Penjelasan |
|---|---|---|
| | | kehidupan bersama yang diarahkan untuk mencapai keada-an yang lebih baik, melalui upaya-upaya ter-organisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki dan ingin dicapai adalah Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang lebih Maju dalam semua bidang sehingga terantaskan dari posisi salah satu Kabupaten tertinggal di Sulawesi Tengah dan Berkurangnya angka kemiskinan secara signifikan.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga mengartikan **Maju**, sebagai Gerakan pembangunan untuk menjadi lebih baik (lebih terdepan), atau telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Pemerintah menetapkan target untuk mencapai Kabupaten Tojo Una-Una dengan standar hidup *(living standard)* yang lebih baik (kesejahteraan tinggi) dibanding kondisi sebelumnya di wilayah daratan maupun Kepulauan secara merata. Indikator kemajuan dapat diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dan terpenuhi-nya kebutuhan dasar, kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mewujukan **Maju** yang ditandai hadirnya pelayanan publik *(public services)* yang maju dan mampu melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. **Maju** juga sebagai upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkembang dan keluar dari ketertinggalan daerah (kabupaten tertinggal). |
| 3 | **SEJAHTERA** | • Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan pembangunan daerah berorientasi pada kemandirian ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan ***kesejahteraan masyarakat*** yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una akan mengembangkan dan mengelola trisula sektor unggulan daerah (Pertanian, Perikanan/ Kelautan, Pariwisata) sehingga berdampak pada meningkatnya ***Kesejahteraan Masyara-kat***.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen mewujudkan daerah Tojo Una- |

| No. | Pokok Visi | Penjelasan |
|---|---|---|
| | | Una, khususnya Pulau Togean sebagai Kawasan destinasi pariwisata nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan **kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan** melalui pengembangan inovasi tekno-logi dan sistem kelembagaan untuk pening-katan produksi dan ketahanan pangan *(food security)*.<br>• Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, menekana **Sejahtera** dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi *(economy inclusive)*, meningkatkan pendapatan perkapita yang meningkat dan terus bertumbuh *(income generate)*, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses masyarakat ter-hadap pelayanan dasar, meningkatkan perlindu-ngan dan kesejateraan sosial, meningkatkan kesejahteraan petani *(farmer welfare)* dan nelayan *(fishermen walfare)*, peningkatan partisi-pasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pemba-ngunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat. |

Sumber: Hasil rumusan FGD penajaman Visi Misi Bupati/Wakil Bupati Tojo Una-Una, 2021

## 5.2 MISI

Misi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam mewujudkan visi diuraikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai, dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun dan dimaknai untuk memberikan kerangka logis *(logical framework)* bagi tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan peta jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut.

Misi memuat langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mewujud-kanVisi. Dalam implementasinya, sebuah pernyataan misi merupakan hasil kompromi interpretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk (garis besar) cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju, serta memberikan arah bagaimana cara bekerja, sehingga memuat

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pernyataan misi harus sederhana, ringkas dan mudah dipahami, tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Rumusan misi yang baik dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai serta menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi memiliki urgensi dalam meletakan kerangka berfikir dan bertindak melalui tujuan, sasaran, dan arah kebijakan, serta peta jalan yang akan dilalui. Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi, dan dinamika di Kabupaten Tojo Una-Una, dan sebagai penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una: ***Mohammad Lahay**, **S.E., M.M.** dan **Ilham Lawidu, S.H***. Dokumen RPJMD merupakaan hasil penelaan terhadap misi kepala daerah dan makna, serta implikasi bagi perencanaan pembangunan, menerjemahkan ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yaitu:




**Gambar 5.1**
**Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**



**Misi 1: Touna Tangguh**
**Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan Berkelanjutan**

Misi ini mengandung makna sebagai upaya sistimatis, terukur, dan terencana di dalam mengentaskan kemiskinan dengan tetap menerapkan *triple track strategy*, yakni strategi pembangunan yang *pro-poor* (mengatasi kemiskinan), *pro-job* (penciptaan lapangan kerja), dan pembangunan yang *pro-environment* untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana. Strategi ini sebagai afirmasi atau keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan *(poverty line)*, belum mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, karena masyarakat miskin berhak untuk terpenuhi kebutuhan dasar *(basic needs),* sebagaimana warga negara lainnya. Misi ini juga mengandung makna komitmen dan konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup pada wilayah daratan dan kepulauan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam daerah, dengan memperhatikan kehidupan generasi mendatang. Juga mewujudkan masyarakat yang tangguh dan memiliki daya tahan terhadap bencana baik alam maupun non alam. Dimana Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daerah rawan bencana, karena dilintasi sesar aktif dan keberadaan gunung berapi vulkanik (Gunung Colo), gelombang laut, abrasi, banjir, dan tanah longsor. Untuk itu pemerintah daerah menyadari perlunya kesipsiagaan dan mitigasi bencana, karena masyarakat sebagaian besar bermata pencaharian dan hidup di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat mempersiapkan diri, sehingga diharapkan memiliki kesadaran dan kepekaan untuk mampu mengantisipasi dan mengurangi ancaman bencana dan korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur. Selain itu, adanya ancaman bencana non alam antara lain pendemi Virus Covid-19 saat ini, menuntut masyarakat untuk mampu hidup berdampingan dengan virus dengan menerapkan budaya hidup sehat dan standar protokol kesehatan.

Pendekatan dan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Kesadaran ini sebagai upaya yang lebih sistimatis dan terpadu dalam memandang bencana sebagai bagian yang tidak dapat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, namun membangun kemampuan untuk selalu antisipatif, responsif dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian. Kemampuan ini bermakna kesiapan menghadapi dan kesanggupan untuk pulih dengan kondisi yang lebih baik (*build back better*) pasca bencana. Kemampuan ini disebut masyarakat tangguh bencana.




**Misi 2: Touna Maju**

**Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal**

Pengembangan wilayah (regional development) melalui percepatan pembangunan infrastruktur, merupakan upaya memacu keluar dari ketertinggalan

daerah, mengatasi kesulitan aksesibilitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan antar wilayah daratan maupun kepulauan. Kebijakan pengembangan wilayah sangat ditentukan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang sangat berbeda, antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu harus disesuaikan dengan realitas, potensi dan isu permasalahan di masing-masing wilayah tersebut. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas 5721,51 km2 terdiri atas 12 kecamatan yang terbagi menjadi dua kategori yaitu wilayah daratan 6 kecamatan, dan kepulauan 6 kecamatan.

Sistem konektivitas antar wilayah ditingkatkan melalui pengembangan infrastruktur transportasi laut, untuk kecamatan di wilayah kepulauan dan untuk membuka keterisolasian untuk wilayah daratan dengan karakteristik topografi wilayah, umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan landai menjadi prioritas untuk dapat keluar dari kabupaten tertinggal. Meningkatkan sarana prasarana sosial dasar, dan penataan **Kota Ampana** sebagai Ibukota Kabupaten, untuk meningkatkan pelayanan serta fasilitasi aksesibilitas destinasi wisata melalui pembangunan infrastruktur yang memadai baik di wilayah darat maupun gugusan kepulauan Togean. Fokus pembangunan infrastruktur yang mendukung Pertanian, Perikanan/Kelautan dan Pariwisata menjadi prioritas utama pembangunan.



**Misi 3: Touna Sejahtera**
**Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-Kelautan dan Pariwisata yang Berkelanjutan**

Misi ini mengandung makna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkulitas *(quality of pro-growth)* dan berkelanjutan bertumpu pada sektor unggulan daerah (trisula pembangunan) yaitu Pertanian, Perikanan-Kelautan dan Pariwisata. Sektor Pertanian digerakan melalui peningkatan nilai tambah berbasis bisnis dan industri (agrobisnis dan agroindustri) yang maju, dan mampu mendorong peningkatan taraf ekonomi masyarakat, sehingga petani dapat sejahtera *(farmer welfare)*, mengerakkan sektor perikanan dan kelautan yang maju dan mendorong peningkatan taraf perekonomian nelayan lebih sejahtera *(fishermen walfare)*, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi Kepulana Togean sebagai Kawasan destinasi pariwisata nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Misi ini juga dimaksudkan sebagai usaha nyata meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan Sektor Pertanian dan Perikanan-Kelautan untuk menguatkan ketahanan pangan lokal,

meningkatkan kontribusi komoditas pertanian unggulan sebagai basis bahan baku industri, untuk penyangga bagi wilayah-wilayah utama pusat pertumbuhan, menjalin kerjasama kemitraan *(partnership)* yang saling menguntungkan dengan pelaku-pelaku usaha industrial (investor) guna meningkatkan kapasitas SDM, permodalan dan pemasaran, mengembang-kan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan, meningkatkan peran masyarakat pariwisata dan *stakeholders* sadar wisata untuk mengembangkan inovasi dan kreatiftas pariwisata, dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, dengan mengoptimalkan semua potensi pendapatan dari pengembangan sektor unggulan daerah tersebut.



**Misi 4: Touna Berdaya Saing**
**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan**

Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una menghadapi kendala dan masalah dalam pembangunan daerah, adalah rendahnya akses masyakarat ke pelayanan dasar, khususnya Pendidikan dan Kesehatan. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pemerintah daerah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat mengenyam Pendidikan yang layak dan layanan Kesehatan yang berkualitas, untuk dapat menghasilkan kualitas Sumberdaya manusia yang memiliki berdaya saing *(competitiveness)*. Mewujudkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar mutu pendidikan, mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan keluarga, mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, antara wilayah daratan dan kepulauan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan berkelanjutan berbasis Pendidikan dan Kesehatan dapat tercapai. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas Pendidikan, meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kualitas pemberdayaan keluarga. Langkah-langkah strategis dalam memperbaiki Sektor Kesehatan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melalui antara lain: aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan Kesehatan baik di wilayah daratan maupun di kepulauan. Upaya-upaya peningkatan daya saing sumberdaya manusia di Kabupaten Tojo Una-Una tersebut diharapkan bermuara dan akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas modal manusia yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



**Misi 5: Touna *Smart***

**Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance.***

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diemban berdasarkan undang-undang otonomi daerah, merancang dan melaksanakan pelayanan publik, sejalan dengan regulasi terhadap masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Tojo Una-Una. Konsep dan pendekatan *smart governance*, dipilih sebagai strategi pelayanan yang lebih ditekankan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga terdapat peran masyarakat sebagai partisipan dan objek pembangunan *(konsep kota/kabupaten madani)*. Pemerintahan daerah yang cerdas, adalah pemerintah yang dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan mengurangi kendala, atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal (local wisdom) yang berkembangan dalam masyarakat dapat menjadi bagian dalam mendukung implementasi pendekatan *smart governance*, sehingga pemerintahan bersifat inklusif dengan kondisi daerah setempat.

Adanya prakarsa, inovasi dan kreativitas Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan swasta, untuk menciptakan kerjasama yang harmonis dan sinergi untuk membangun Kelembagaan pemerintah daerah yang handal, profesional, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik *(public services oriented)* dari Pemerintah Kabupaten hingga Desa. Pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, masyarakat dan lembaga masyarakat, serta media massa, adalah lima pilar utama *(pentahelix)* dalam mengimplementasikan konsep dan pendekatan *smart governance*. Aparatur birokrasi sebagai organisasi formal pemerintah daerah memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan regulasi, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang di dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan, harus didukung seluruh pemangku kepentingan lainnya.

*Smart governance* merupakan indikator penting bagi pemerintah daerah Kabupaten untuk mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mengharuskan adanya beberapa aspek penting dalam pemerintahan. Implementasi *smart governance,* mensyaratkan adalah adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan,

mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga melalui optimalisasi penggunaan teknologi dan adanya Inovasi pembangunan yang diinisiasi perangkat daerah, dan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

## 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yangdiformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, uraian tujuan dan sasaran terdapat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.2**
**Uraian Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**

| Tujuan | | | | Sasaran | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | |
| **MISI PERTAMA : Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan BerkelanjutanMewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| 1,1 | Meninghkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat | 1.1.1 | **Angka Kemiskinan** | 1.1.1.1 | Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat | 1.1.1.1.1 | Garis Kemiskinan |
| | | | | | | 1.1.1.1.2 | Indeks Kedalaman Kemiskinan |
| | | | | | | 1.1.1.1.3 | Indeks Keparahan Kemiskinan |
| | | | | | | 1.1.1.1.4 | Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | |
| | | | | | | 1.1.1.1.5 | Pendapatan perkapita |
| | | | | 1.1.1.2 | Meningkatnya Ketersedian Lapangan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan | 1.1.1.2.1 | Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) |
| | | | | | | 1.1.1.2.2 | Indeks Gini Rasio |
| | | | | 1.1.1.3 | Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan | 1.1.1.3.1 | Nilai Tukar Petani (NTP) |
| | | | | | | 1.1.1.3.2 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) |
| 1,2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Ketanguhan Masyarakat Mengahadapi bencana | 1.2.1 | **Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)** | 1.2.1.1 | Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan | 1.2.1.1.1 | Indeks kualitas Air (IKA) |
| | | | | | | 1.2.1.1.2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) |
| | | | | | | 1.2.1.1.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |
| | | | | | | 1.2.1.1.4 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) |
| | | | | 1.2.1.2 | Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota Ampana | 1.2.1.2.1 | Cakupan Pelayanan Persampahan |
| | | | | 1.2.1.3 | Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten | 1.2.1.3.1 | Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten |
| | | | | 1.2.1.4 | Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana | 1.2.1.4.1 | Indeks Resiko Bencana Daerah |
| | | | | | | 1.2.1.4.2 | Persentase Desa Tangguh Bencana |
| **MISI KE-DUA : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal** | | | | | | | |
| 2,1 | Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan | 2.1.1 | **Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah** | 2.1.1.1 | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | 2.1.1.1.1 | Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | |
| | Wilayah untuk Keluar dari Kabupaten Tertinggal | | | 2.1.1.2 | Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air | 2.1.1.2.1 | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun |
| | | | | 2.1.1.3 | Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi | 2.1.1.3.1 | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan |
| | | | | 2.1.1.5 | Menurunya Desa Blankspot koneksi internet | 2.1.1.5.1 | Presentase Koneksi Internet Desa |
| | | | | 2.1.1.6 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) | 2.1.1.6.1 | Presentase Rumah Layak Huni |
| | | | | 2.1.1.7 | Meninmgkatnya ketersedian air bersih | 2.1.1.7.1 | Presentase ketersedian air minum layak |
| **MISI KE-TIGA : Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan** | | | | | | | |
| 3,1 | Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas bertumpu pada Trisula Sektor Unggulan Daerah | 3.1.1 | **Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif** | 3.1.1.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah | 3.1.1.1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Daerah |
| | | | | 3.1.1.2 | Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah | 3.1.1.2.1 | Realisasi Investasi daerah sektor Unggulan |
| | | | | | | 3.1.1.2.2 | Nilai Kontribusi sektor Pertanian Dalam PDRB |
| | | | | | | 3.1.1.2.3 | Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB |
| | | | | | | 3.1.1.2.4 | Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata |
| | | | | 3.1.1.3 | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat | 3.1.1.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) |
| **MISI KE-EMPAT : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan** | | | | | | | |
| 4,1 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una- | 4.1.1 | **Indeks Pemangunan Manusia (IPM)** | 4.1.1.1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 4.1.1.1.1 | Indeks Pendidikan |
| | | | | | | 4.1.1.1.2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | |
| | Una Yang Unggul dan Berdaya Saing | | | | | 4.1.1.1.3 | Harapan Lama Sekolah (HLS) |
| | | | | 4.1.1.2 | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat | 4.1.1.2.1 | Indeks Kesehatan |
| | | | | | | 4.1.1.2.2 | Usia Harapan Hidup (UHH) |
| | | | | | | 4.1.1.2.3 | Angka Stanting |
| | | | | 4.1.1.3 | Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan | 4.1.1.3.1 | Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat Provinsi |
| | | | | 4.1.1.4 | Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah | 4.1.1.4.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |
| **MISI KE-LIMA : Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance** | | | | | | | |
| 5,1 | Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi | 5.1.1 | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** | 5.1.1.1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik | 5.1.1.1.1 | Indek Kepuasan Pelayanan Publik |
| | | | | 5.1.1.2 | Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah | 5.1.1.2.1 | Nilai SAKIP Daerah |
| | | | | 5.1.1.3 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 5.1.1.3.1 | Opini hasil pemeriksaan oleh BPK |
| | | | | 5.1.1.4 | Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa | 5.1.1.4.1 | Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una-Una |
| | | | | | | 5.1.1.4.2 | Persentase Status Desa Maju |
| | | | | | | | |

Sumber: Rumusan FGD Bapelitbangda dan Konsultasi Publik, 2021

## Tabel 5.3
## Visi Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Dan Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah
## Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

### VISI: "TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNATANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)"

| No | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Indikator | | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan | 1,1 | Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat | | | 1.1.1 | **Angka Kemiskinan** | 16,39 | 16,60 | 16,60-16,00 | 16,00-15,10 | 15,10-14,10 | 14,10-13,40 | 13,40-9,80 | 13,40-9,80 |
| | | | | 1.1.1.1 | Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat | 1.1.1.1.1 | Garis Kemiskinan | 504.889 | 521.534 | 538.352 | 555.171 | 571.989 | 588.808 | 605.626 | 605.626 |
| | | | | | | 1.1.1.1.2 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | 3,27 | 3,25 | 3,23 | 3,19 | 3,16 | 3,13 | 3,10 | 3,10 |
| | | | | | | 1.1.1.1.3 | Indeks Keparahan Kemiskinan | 1,03 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | 1.1.1.1.4 | Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | NA | 70,00-72,5 | 72,50-75,00 | 75,00-77,50 | 77,50-80,00 | 80,00-82,50 | 82,50-85,00 | 82,50-85,00 |
| | | | | | | 1.1.1.1.5 | Pendapatan perkapita | 30,10 | 30,10 | 31,30 | 32,90 | 34,50 | 36,10 | 36,10-38,00 Juta | 36,10-38,00 Juta |
| | | | | 1.1.1.2 | Meningkatnya Ketersedian Lapangan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan | 1.1.1.2.1 | Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) | 2,84 | 3,44 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
| | | | | | | 1.1.1.2.2 | Indeks Gini Rasio | 0,313 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 |
| | | | | 1.1.1.3 | Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan | 1.1.1.3.1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | NA | 98-100 | 100-102 | 100-102 | 102-105 | 105-107 | 107-109 | 107-109 |
| | | | | | | 1.1.1.3.2 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | NA | 98-100 | 100-102 | 100-102 | 102-105 | 105-107 | 107-109 | 107-109 |
| | | 1,2 | Terwujudnya kualitas lingkungan | | | 1.2.1 | **Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)** | NA | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |

| No | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Indikator | | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | hidup dan Ketanguhan Masyarakat Mengahadapi bencana | 1.2.1.1 | Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan | 1.2.1.1.1 | Indeks kualitas Air (IKA) | NA | 0,62-0,59 | 0,59-0,54 | 0,53-0,45 | 0,44-0,38 | 0,37-0,32 | 0,31-0,27 | 0,31-0,27 |
| | | | | | | 1.2.1.1.2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | NA | 85,00-86,00 | 87,00-88,00 | 88,00-89,00 | 89,00-90,00 | 90,00-91,00 | 91,00-92,00 | 91,00-92,00 |
| | | | | | | 1.2.1.1.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | NA | 80,00-81,00 | 81,00-82,00 | 82,00-83,00 | 83,00-84,00 | 84,00-85,00 | 85,00-86,00 | 85,00-86,00 |
| | | | | | | 1.2.1.1.4 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | NA | 68,00-69,00 | 69,00-70,00 | 70,00-71,00 | 71,00-72-00 | 72,00-73,00 | 73,00-74,00 | 73,00-74,00 |
| | | | | 1.2.1.2 | Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota Ampana | 1.2.1.2.1 | Cakupan Pelayanan Persampahan | 61,45 | 62,95 | 64,45 | 65,95 | 67,45 | 68,95 | 70,45 | 70,45 |
| | | | | 1.2.1.3 | Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten | 1.2.1.3.1 | Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten | NA | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 40-45 |
| | | | | 1.2.1.4 | Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana | 1.2.1.4.1 | Indeks Resiko Bencana Daerah | 137,60 | 137,60 | 137,6-132,0 | 137,6-132,0 | 132,0-130 | 132,0-130 | 130-128,0 | 130-128,0 |
| | | | | | | 1.2.1.4.2 | Persentase Desa Tangguh Bencana | 7,46 | 7,46 | 7,46-10,0 | 10,0-12,5 | 12,5-15,00 | 15,00-17,25 | 17,25-200 | 17,25-200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal | 2,1 | Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah untuk Keluar dari | | | 2.1.1 | **Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah** | NA | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 55-60 |
| | | | | 2.1.1.1 | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | 2.1.1.1.1 | Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap | 21,91 | 21,91-22,00 | 22,00-24,00 | 24,00-26,00 | 26,00-28,00 | 28,00-30,00 | 30,00-35,00 | 30,00-35,00 |

| No | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Indikator | | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | Kabupaten Tertinggal | 2.1.1.2 | Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air | 2.1.1.2.1 | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun | NA | 20-22,65 | 22,65-24,00 | 24,00-26,65 | 26,65-29,00 | 29,00-31,65 | 31,65-33,45 | 31,65-33,45 |
| | | | | 2.1.1.3 | Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi | 2.1.1.3.1 | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan | 0,98 | 0,98-0,91 | 0,91-0,83 | 0,83-0,75 | 0,75-0,67 | 0,67-0,59 | 0,59-0,51 | 0,59-0,51 |
| | | | | 2.1.1.4 | Meningkatnya akses listrik terhadap rumah tangga | 2.1.1.4.1 | Konsumsi listrik (Rasio Elektrifikasi) | 94,89 | 94,89-95,09 | 95,09-95,59 | 95,59-96,00 | 96,00-96,50 | 96,50-97,0 | 97,00-97,50 | 97,00-97,50 |
| | | | | 2.1.1.5 | Menurunya Desa Blankspot koneksi internet | 2.1.1.5.1 | Presentase Koneksi Internet Desa | 67,16 | 67,16-70,00 | 70,00-73,00 | 73,00-76,00 | 76,00-79,00 | 79,00-82,00 | 82,00-85,00 | 82,00-85,00 |
| | | | | 2.1.1.6 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) | 2.1.1.6.1 | Presentase Rumah Layak Huni | 75,55 | 75,55-77,05 | 77,05-78,55 | 78,55-80,05 | 80,05-81,55 | 81,55-83,05 | 83,05-84,55 | 83,05-84,55 |
| | | | | 2.1.1.7 | Meninmgkatnya ketersedian air bersih | 2.1.1.7.1 | Presentase ketersedian air minum layak | 91,14 | 91,84-92,54 | 92,54-93,24 | 93,24-93,94 | 93,94-94,64 | 94,64-95,34 | 95,34-97,00 | 95,34-97,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, | 3,1 | Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas bertumpu pada Trisula Sektor | | | 3.1.1 | **Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif** | 4,69 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| | | | | 3.1.1.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah | 3.1.1.1.1 | Pertumbuhan Ekonomi | -3,21 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |

| No | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Indikator | | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan | | Unggulan Daerah | 3.1.1.2 | Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah | 3.1.1.2.1 | Realisasi Investasi daerah sektor Unggulan | NA | 10-20 Miliar | 20-30 Miliar | 30-40 Miliar | 40-60 Miliar | 60-80 Miliar | 60-80 Miliar | 60-80 Miliar |
| | | | | | | 3.1.1.2.2 | Nilai Kontribusi sektor Pertanian Dalam PDRB | 25,70 | 25,7-26,10 | 26,10-26,5 | 26,50-26,9 | 26,90-27,30 | 27-30-27,70 | 27-30 | 27-30 |
| | | | | | | 3.1.1.2.3 | Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB | 11,23 | 11,23-11,27 | 11,27-11,31 | 11,31-11,35 | 11,35-11,39 | 11,39-11,43 | 11,43-11,47 | 11,43-11,47 |
| | | | | | | 3.1.1.2.4 | Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata | 1,96 | 1,80-1,96 | 1,80-1,96 | 1,96-2,00 | 2,00-2,15 | 2,15-2,25 | 2,25-2,35 | 2,25-2,35 |
| | | | | 3.1.1.3 | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat | 3.1.1.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) | NA | 75-76,5 | 76,5-77,5 | 77,5-78,50 | 78,50-79,50 | 79,5-80,5 | 80,5-81,5 | 80,5-81,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan | 4,1 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing | | | 4.1.1 | **Indeks Pemangunan Manusia (IPM)** | 64,59 | 64,74 | 64,74-66,04 | 66,04-66,89 | 66,89-67,74 | 67,74-68,59 | 68,50-70 | 68,50-70 |
| | | | | 4.1.1.1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 4.1.1.1.1 | Indeks Pendidikan | NA | 0,2-0,25 | 0,2-0,25 | 0,25-0,30 | 0,30-0,35 | 0,35-0,40 | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 |
| | | | | | | 4.1.1.1.2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | 8,39 | 8,39-8,59 | 8,59-8,79 | 8,79-8,99 | 8,99-9,19 | 9,19-9,39 | 9,39-12,00 | 9,39-12,00 |
| | | | | | | 4.1.1.1.3 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 12,28 | 12,28-12,48 | 12,48-12,68 | 12,68-12,88 | 12,88-13,08 | 13,08-13,28 | 13,28-15,20 | 13,28-15,20 |
| | | | | 4.1.1.2 | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat | 4.1.1.2.1 | Indeks Kesehatan | NA | 0,2-0,25 | 0,2-0,25 | 0,25-0,30 | 0,30-0,35 | 0,35-0,40 | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 |
| | | | | | | 4.1.1.2.2 | Usia Harapan Hidup (UHH) | 65,67 | 65,90 | 65,90-66,13 | 66,13-66,63 | 66,63-67,50 | 67,50-68,00 | 68,00-69,00 | 68,00-69,00 |
| | | | | | | 4.1.1.2.3 | Angka Stunting | 22,68 | 22,68-20,18 | 20,18-17,68 | 17,68-15,18 | 15,18-12,68 | 12,68-10,18 | 10,00-7,00 | 10,00-7,00 |
| | | | | 4.1.1.3 | Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan | 4.1.1.3.1 | Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat Provinsi | 0,00 | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 8-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |

| No | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Indikator | | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | 4.1.1.4 | Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah | 4.1.1.4.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 91,22 | 91,92 | 92,62 | 93,32 | 94,02 | 94,72 | 94,22-96,70 | 94,22-96,70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance* | 5,1 | Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi | | | 5.1.1 | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** | NA | C | C | C | B | B | B | B |
| | | | | 5.1.1.1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik | 5.1.1.1.1 | Indek Kepuasan Pelayanan Publik | NA | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 85-90 | 85-90 |
| | | | | 5.1.1.2 | Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah | 5.1.1.2.1 | Nilai SAKIP Daerah | CC | CC | B | B | BB | BB | BB-A | BB-A |
| | | | | 5.1.1.3 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 5.1.1.3.1 | Opini hasil pemeriksaan oleh BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | 5.1.1.4 | Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa | 5.1.1.4.1 | Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una-Una | 0,6064 | 0,6154 | 0,6244 | 0,6334 | 0,6424 | 0,6514 | 0,650-0,7100 | 0,650-0,7100 |
| | | | | | | 5.1.1.4.2 | Persentase Status Desa Maju | 6,72 | 8,21 | 11,19 | 14,93 | 17,91 | 22,39 | 24,63 | 24,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Hasil Analisis dan FGD, 2021

## 5.4. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan Dokumen perencanaan Terkait.

### 5.4.1 Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, sebagai penjabaran tahapan, arah dan kebijakan untuk mencapai Visi, harus pula menjadi bagian dari arah, kebijakan dan tahapan dalam pencapaian Misi RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2005–2025, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.4**
**Keselarasan Misi RPJMD Periode 2021–2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2005–2025**

| Misi RPJPD Tojo Una-Una Periode Tahun 2005–2025 | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 |
|---|---|
| ***Misi Pertama:*** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. | ***Misi Pertama:*** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan. |
| ***Misi Ke-Dua:*** Membangun komunitas wilayah melalui pengembangan kota, kecamatan, kelurahan dan desa. | ***Misi Ke-Dua:*** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| ***Misi Ke-Tiga:*** Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya melalui pelayanan prima yang berkeadilan. | ***Misi Ke-Lima:*** Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance. |
| ***Misi Ke-Empat:*** Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. | ***Misi Ke-Empat:*** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan |
| ***Misi Ke-Lima:*** Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan | ***Misi Ke-Tiga:*** Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan |

Sumber: Visi Misi RPJPD periode 2005-2025, Diselaraskan dan diolah Kembali 2021.

### 5.4.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menegaskan bahwa Gubernur bersama-sama dengan para Bupati/Walikota dalam pelaksanaan TPB/SDG's yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan Pembangunan daerah telah menjadikan TPB sebagai tujuan akhir pembangunan. Untuk itu, dalam perumusan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una, maka Tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dan selaras sekaligus berkomitmen melaksanakan TPB/SDG's dalam upaya transformasi peradaban global dan nasional yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini, mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDG's tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang terefleksikan dari sinergitas dan konektivitas antara Program prioritas daerah dengan TPB/SDG's, namun juga merupakan wujud kontribusi Kabupaten Tojo Una-Una dalam pencapaian SDG's Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, TPB/SDG's juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kerjasama dengan melibatkan seluruh potensi pembangunan demi ***Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, Dan Sejahtera.***

Di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 dengan memperhatikan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disinergikan dengan Pencapaian Visi Misi RPJMD, agar selaras dan sejalan sehingga pencapaian Target Tujuan dan sasaran RPJMD juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan periode Tahun 2021-2026, sehingga alokasi Dana Desa dipastikan dapat diarahkan tidak hanya pada pencapaian SDGs Desa akan tetapi juga pada pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun penyelarasan dari Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

**Tabel 5.5**
**Keselarasan Misi RPJMD Tojo Una-Una 2021–2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**

| No. | *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB/SDG's) | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| 1 | Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |

| No. | *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB/SDG's) | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan<br><br>**Misi Ke-Tiga:** Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan |
| 3 | Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | **Misi Ke-Empat:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan. |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua | **Misi Ke-Empat:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan. |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan<br><br>**Misi Ke-Empat:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan |
| 6 | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan. |

| No. | *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB/SDG's) | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| | | **Misi Ke-Dua:**<br>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| 7 | Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua | **Misi Pertama:**<br>Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan<br><br>**Misi Ke-Dua:**<br>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | **Misi Ke-Tiga:**<br>Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan |
| 9 | Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | **Misi Ke-Dua:**<br>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| 10 | Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara | **Misi Ke-Dua:**<br>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertingga |
| 11 | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan | **Misi Pertama:**<br>Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |

| No. | *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB/SDG's) | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| 12 | Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan.<br><br>**Misi Ke-Tiga:** Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan. |
| 13 | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Ik-lim dan Dampaknya | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan. |
| 14 | Melestarikan dan Memanfaatkan secara secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |
| 15 | Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |
| 16 | Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan.<br><br>**Misi Ke-Lima:** Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang |

| No. | *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB/SDG's) | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| | | Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance* |
| 17 | Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | **Misi Ke-Lima:** Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance.* |

Sumber: Perpres Nomor 59 Thn 2017, diolah Kembali 2021

### 5.4.3 Keselarasan SDGs Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebut ***Sustainable Development Goals*** disingkat **SDGs. SDGs Desa** merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa.

Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merujuk pada perpres tersebut maka disusun SDGs Desa, tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut. Jadi SDGs Desa Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dengan 17 Tujuan sementara SDGs Desa berisi 18 Tujuan pembangunan. SDGs Desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat Desa dan akan berkontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Olehnya didalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 memperhatikan implememtasi SDGs Desa yang disinergikan dengan Pencapaian Visi Misi RPJMD, agar selaras dan sejalan. Adapun penyelarasan SDGs Desa sebagai turunan dari Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional dengan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, sebagai berikut.

**Tabel 5.6**
**Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021–2026 dan Pencapaian Tujuan SDGs Desa**

| No. | Tujuan SDG's Desa | MISI RPJMD Kab. Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| 1 | Desa Tanpa Kemiskinan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan. |
| 2 | Desa Tanpa Kelaparan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |
| 3 | Desa Sehat Dan Sejahtera | **Misi Ke-Empat:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan |
| 4 | Pendidikan Desa Berkualitas | **Misi Ke-Empat:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan |
| 5 | Desa Berkesetaraan Gender | **Misi Ke-Empat:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan. |
| 6 | Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi | **Misi Ke-Dua:** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| 7 | Desa Yang Berenergi Bersih Dan Terbarukan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh |

| No. | Tujuan SDG's Desa | MISI RPJMD Kab. Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| | | Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |
| 8 | Pekerjaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Desa | **Misi Ke-Tiga:** Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan |
| 9 | Inovasi Dan Infrastruktur Desa | **Misi Ke-Dua:** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| 10 | Desa Tanpa Kesenjangan | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |
| 11 | Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan | **Misi Ke-Dua:** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| 12 | Konsumsi Dan Produksi Desa Yang Sadar Lingkungan | **Misi Ke-Tiga:** Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan |
| 13 | Pengendalian Dan Perubahan Iklim Oleh Desa | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |
| 14 | Ekosistem Laut Desa | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan |

| No. | Tujuan SDG's Desa | MISI RPJMD Kab. Tojo Una-Una 2021-2026 |
|---|---|---|
| 15 | Ekosistem Daratan Desa | **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan. |
| 16 | Desa Damai Dan Berkeadilan | **Misi Ke-Lima:** Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance*. |
| 17 | Kemitraan Untuk Pembangunan Desa | **Misi Ke-Lima:** Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance*. |
| 18 | Kelembagaan Desa Dinamis Dan Budaya Desa Adaptif. | **Misi Ke-Lima:** Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance*. |

Sumber: Permendes PDTT No. 13 Thn 2020, diolah Kembali 2021.

### 5.4.4 Keselarasan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021–2026 juga menjadi bagian dari pencapaian RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, sehingga antara perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dengan perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah terjadi keselarasan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021–2026 dengan mengedepankan penyelarasan Visi Misi, prioritas-prioritas; sasaran program yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :

***"Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"***

Adapun Misi didalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5) Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6) Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7) Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8) Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9) Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

**Tabel 5.7**
**Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021–2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026**

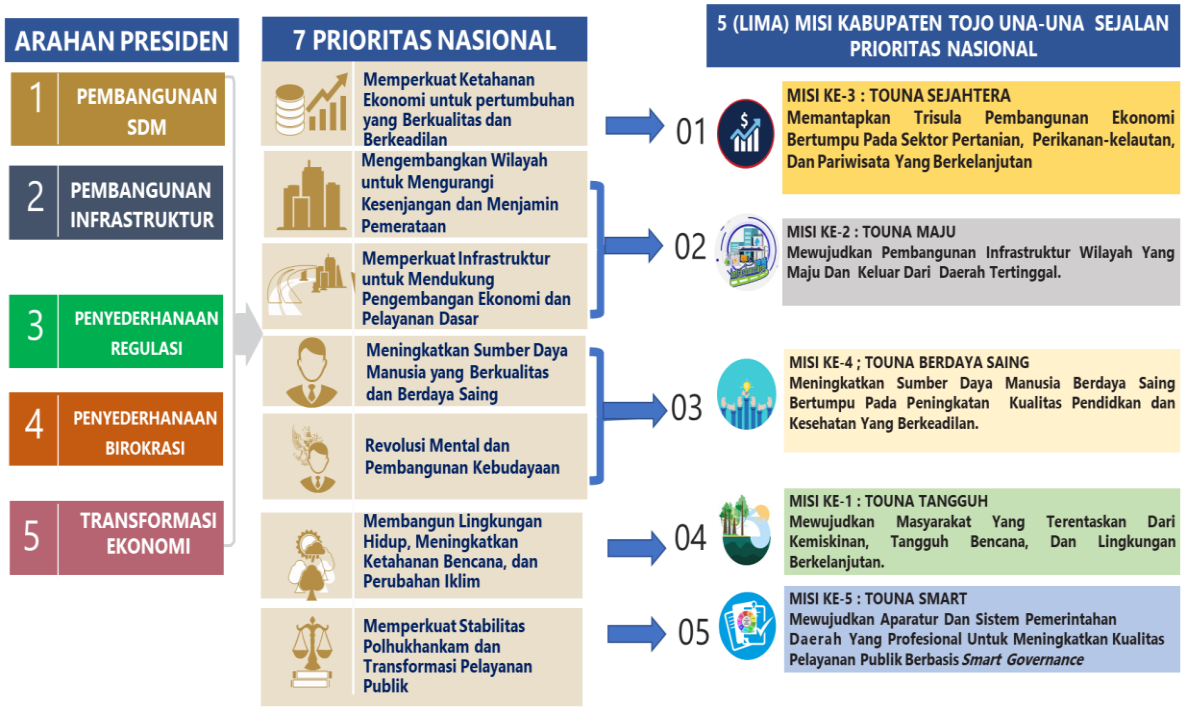
| Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 |
|---|---|
| **Misi 1:**<br>Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar. | **Misi Ke-Empat:**<br>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Pening-katan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan. |
| **Misi 2:**<br>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM. | **Misi Ke-Lima:**<br>Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance* |

| Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 | Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 |
|---|---|
| **Misi 3:**<br>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. | **Misi Ke-Tiga:**<br>Memantapkan Trisula Pembangunan Eko-nomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan |
| **Misi 4:**<br>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. | **Misi Ke-Dua:**<br>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |
| **Misi 5:**<br>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan. | **Misi Ke-Dua:**<br>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal. |
| **Misi 6:**<br>Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. | ***Misi Pertama:***<br>Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan. |
| **Misi 7:**<br>Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga. | ***Misi Pertama:***<br>Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan. |
| **Misi 8:**<br>Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital. | **Misi Ke-Empat:**<br>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan |
| **Misi 9 :**<br>Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. | **Misi Ke-Tiga:**<br>Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, dan Pariwisata Yang Berkelanjutan.<br><br>**Misi Ke-Dua:**<br>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal |

Sumber: Visi Misi Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2024, diolah Kembali 2021.

### 5.4.5 Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan RPJMNasional tahun 2020-2024.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota, di samping berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten, perlu pula memperhatikan RPJM Nasional, dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 diperlukan harmonisasi dan menyelaraskan dengan dokumen tersebut sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una menjadi bagian integral dari program nasional periode 2020-2024. Dengan demikian, maka misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang tertuang dalam dokumen RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional. Keselarasan antara misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021–2026, dengan misi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya secara normatif sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021–2026 telah memperhatikan rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.




**Gambar 5.2.**
**Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan RPJMNasional Tahun 2020-2024**

Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 selain diselaraskan dengan Visi, Misi yang dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional. Juga dalam rangka pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 secara efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka dilakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyusunan serta penyelarasan dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: 050/3499/Sj Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Adapun Ruang lingkup penyelarasan RPJMD kabupaten Tojo Una-Una dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud menyangkut Penyelarasan Target lndikator Makro (sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020) dan Penyelarasan Program Prioritas.

**Tabel 5.8**

**Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMNasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**

| No | Indikator | TARGET RPJM NASIONAL 2020-2024 | | | | TARGET RPJMD SULAWESI TENGAH 2021-2026 | | | | | | TARGET RPJMD KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2021-206 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,7 | 8 | 8,83 | 8,6 | 5,03 | 5,88 | 6,56 | 7,08 | 7,92 | 8,77 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 | 5-7 |
| 2. | Kemiskinan (%) | 12,79 | 12,35 | 11,85 | 11,45 | 13,00 | 12,18 | 10,88 | 9,65 | 8,69 | 7,90 | 16,60 | 16,60-16,00 | 16,00-15,10 | 15,10-14,10 | 14,10-13,40 | 13,40-9,80 |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 3,76 | 3,07 | 2,84 | 2,54 | 2,08 | 1,47 | 3,44 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
| 4. | Rasio Gini (Indeks) | 0,377-0,379 | 0,376-0,378 | 0,375-0,377 | 0,360-0,474 | 0,32 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 73,26 | 74,01 | 74,77 | 75,54 | 69,68 | 69,74 | 69,87 | 70 | 70,26 | 70,36 | 64,74 | 64,74-66,04 | 66,04-66,89 | 66,89-67,74 | 67,74-68,59 | 68,50-70 |




# BAB 6

# STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang holistik dan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang holistic dan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik dan tepat, termasuk upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintah daerah.

## 6.1 STRATEGI

Merujuk pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi-strategi pada tiap sasaran RPJMD, dan terjadi proses *cascading* antara rumusan visi, misi, tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan rumusan strategi pilihan. Beberapa rumusan strategis tersebut terdapat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 6.1**
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tojo Una-Una**
**Tahun 2021-2026**

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MISI PERTAMA : Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan BerkelanjutanMewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan** | | | | | |
| 1,1 | Meninghkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat | 1.1.1.1 | Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat | 1.1.1.1.1.1 | Mengoptimalkan Koordinasi Upaya Penurunan Garis Kemiskinan |
| | | | | 1.1.1.1.1.2 | Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Kedalaman Kemiskinan |
| | | | | 1.1.1.1.1.3 | Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Keparahan Kemiskinan |
| | | | | 1.1.1.1.1.4 | Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup PMKS |
| | | | | 1.1.1.1.2.1 | Mengoptimalkan Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1.2 | Meningkatnya Ketersedian Lapangan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan | 1.1.1.2.1.1 | Peningkatan dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Investasi |
| | | | | 1.1.1.2.2.1 | Menurunkan disparitas ekonomi melalui peningkatan kesejahteran dan penciptaan usaha serta penyedian infrastruktur ekonomi |
| | | 1.1.1.3 | Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan | 1.1.1.3.1.1 | Mengembangkan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan |
| 1,2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Ketanguhan Masyarakat Mengahadapi bencana | 1.2.1.1 | Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan | 1.2.1.1.1.1 | Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan |
| | | 1.2.1.2 | Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota Ampana | 1.2.1.2.1.1 | Optimalisasi system pengolahan sampah yang terpadu dan penangganan layanan persampahan |
| | | 1.2.1.3 | Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten | 1.2.1.3.1.1 | Mengoptimalkan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran |
| | | 1.2.1.4 | Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana | 1.2.1.4.1.1 | Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| **MISI KE-DUA : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal** | | | | | |
| 2,1 | Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah untuk Keluar dari Kabupaten Tertinggal | 2.1.1.1 | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | 2.1.1.1.1.1 | Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas |
| | | 2.1.1.2 | Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air | | |
| | | 2.1.1.3 | Meningkatnya | 2.1.1.3.1.1 | Meningkatkan Kelancaran |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi | | dan Keselamatan Lalu Lintas jalan dan laut |
| | | 2.1.1.5 | Menurunya Desa Blankspot koneksi internet | 2.1.1.5.1.1 | Optimalisasi Dana Desa mengentaskan Desa Blankspot koneksi internet |
| | | 2.1.1.6 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) | 2.1.1.6.1.1 | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perumahan pemukiman, tata bangunan dan air minum layak |
| | | 2.1.1.7 | Meninmgkatnya ketersedian air bersih | | |
| **MISI KE-TIGA : Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan** | | | | | |
| 3,1 | Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas bertumpu pada Trisula Sektor Unggulan Daerah | 3.1.1.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah | 3.1.1.1.1.1 | Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha Trisula komuditas unggulan Pertanian, Perikanan kelautan dan Pariwisata Berkelanjutan |
| | | 3.1.1.2 | Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah | 3.1.1.2.1.1 | Mengoptimalkan pelayanan Investasi dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau |
| | | | | 3.1.1.2.2.1 | Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate dan Pengembangan kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan komoditi unggulan Pertanian |
| | | | | 3.1.1.2.3.1 | Peningkatan nilai tambah sektor perikanan kelautan |
| | | | | 3.1.1.2.4.1 | Peningkatan daya tarik pariwisata dan event pariwisata serta mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.1.3 | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat | 3.1.1.3.1.1 | Penyediaan Pangan harapan disertai perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat |
| **MISI KE-EMPAT : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan** | | | | | |
| 4,1 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing | 4.1.1.1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 4.1.1.1.1.1 | Meningkatkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar nasional |
| | | | | 4.1.1.1.2.1 | Meningkatkan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas pendidikan serta ketersedian guru |
| | | 4.1.1.2 | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat | 4.1.1.2.1.1 | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata |
| | | 4.1.1.3 | Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan | 4.1.1.3.1.1 | Optimalisasi peran pemuda dalam mengisi pembangunan |
| | | 4.1.1.4 | Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah | 4.1.1.4.1.1 | Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder |
| **MISI KE-LIMA : Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance** | | | | | |
| 5,1 | Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi | 5.1.1.1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik | 5.1.1.1.1.1 | Meningkatkan kualitas Layanan Publik dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten (Smart Governance) melalui melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan |
| | | 5.1.1.2 | Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah | 5.1.1.2.1.1 | Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Governance) |
| | | 5.1.1.3 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 5.1.1.3.1.1 | Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah |
| | | 5.1.1.4 | Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa | 5.1.1.4.1.1 | Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa |
| | | | | | |

## 6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Rumusan arah kebijakan yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan mempertimbangkan urgensi per-masalahan. serta berbagai kewenangan yang menjadi tanggungjawab daerah kabupaten dan penjabaran dari tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan arah kebijakan terdapat pada table sebagai berikut.

**Tabel 6.2**
**Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan Disertai Perangkat Daerah Penanggungjawab**

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| **MISI PERTAMA : Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan BerkelanjutanMewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan** | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Mengoptimalkan Koordinasi Upaya Penurunan Garis Kemiskinan | 1.1.1.1.1.1.1 | Optimalisasi Pemantauan Garis Kemiskinan Melalui Peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten | Sekretariat Daerah |
| 1.1.1.1.1.2 | Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Kedalaman Kemiskinan | 1.1.1.1.1.1.2 | Optimalisasi Pemantauan Indeks Kedalaman Kemiskinan Melalui Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten | Bapelitbangda |
| 1.1.1.1.1.3 | Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Keparahan Kemiskinan | 1.1.1.1.1.1.3 | Optimalisasi Pemantauan Indeks Keparahan Kemiskinan Melalui Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten | Bapelitbangda |
| 1.1.1.1.1.4 | Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup PMKS | 1.1.1.1.1.1.4 | Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantunan Tepat Sasaran bagi PMKS | Dinas Sosial |
| | | 1.1.1.1.1.1.5 | Mendorong Desa tertinggal yang berbasis Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk ditetapkan sebagai Desa Adat | Dinas Sosial |

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.2.1 | Mengoptimalkan Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan | 1.1.1.1.2.1.1 | Menjaga stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, Koperasi dan BumDes | Bidang Ekonomi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | 1.1.1.1.2.1.2 | Meningkatkan peran Koperasi, UMKM Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan kesejahteran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1.1.1.2.1.1 | Peningkatan dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Investasi | 1.1.1.2.1.1.1 | Mendorong Investasi Trisula Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru | |
| | | 1.1.1.2.1.1.2 | Mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi unggulan lokal desa dalam pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | 1.1.1.2.1.1.3 | Optimalisasi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 1.1.1.2.1.1.4 | Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi UMKM melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan serta bantuan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1.1.1.2.2.1 | Menurunkan disparitas ekonomi melalui peningkatan kesejahteran dan penciptaan usaha serta penyedian infrastruktur ekonomi | 1.1.1.2.2.1.1 | Meningkatkan peran Industri Kecil Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 1.1.1.2.2.1.2 | Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat | |
| 1.1.1.3.1.1 | Mengembangkan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan | 1.1.1.3.1.1.1 | Pembangunan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan pengawasan pola distribusi pupuk bersubsidi dan membangun pola kemitraan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 1.1.1.3.1.1.2 | Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penciptaan lapangan kerja dan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 1.1.1.3.2.1.1 | Mewujudkan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang maju dan mendorong peningkatan taraf perekonomian nelayan | Dinas Perikanan |

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.1.1 | Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan | 1.2.1.1.1.1.1 | Peningkatan manajeman dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas air | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | 1.2.1.1.2.1 | Peningkatan manajeman dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas Udara | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | 1.2.1.1.3.1 | Meningkatkan pengelolaan hutan yang berkualitas | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | 1.2.1.1.4.1 | Peningkatan manajeman dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas air Laut | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| 1.2.1.2.1.1 | Optimalisasi system pengolahan sampah yang terpadu dan penangganan layanan persampahan | 1.2.1.1.1.2.1 | Peningkatan kebersihan dan keindahan kota melalui layanan persampahan yang terintegrasi serta Penataan system persampahan Ampana Kota | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | 1.2.1.1.1.2.2 | Mengembangkan dan meningkatkan tata bangunan dan lingkungan hidup | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, |
| 1.2.1.3.1.1 | Mengoptimalkan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 1.2.1.3.1.1.1 | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.2.1.4.1.1 | Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana | 1.2.1.4.1.1.1 | Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | 1.2.1.4.1.1.2 | Menigkatkan peran serta masyarakat Desa didalam menghadapi bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **MISI KE-DUA : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal** | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas | 2.1.1.1.1.1.1 | Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | 2.1.1.1.1.1.2 | Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan, talud dan drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2.1.1.3.1.1 | Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas jalan dan laut | 2.1.1.3.1.1.1 | Penataan Perhubungan darat, udara dan Laut | Dinas Perhubungan |
| | | 2.1.1.3.1.1.2 | Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah. | Dinas Perhubungan |

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.5.1.1 | Optimalisasi Dana Desa mengentaskan Desa Blankspot koneksi internet | 2.1.1.5.1.1.1 | Meningkatkan aksesibilitas Jaringan Telekomunikasi pada seluruh wilayah. | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.1.1.6.1.1 | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perumahan pemukiman, tata bangunan dan air minum layak | 2.1.1.6.1.1.1 | Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | 2.1.1.6.1.1.2 | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| **MISI KE-TIGA : Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan** | | | | |
| 3.1.1.1.1.1 | Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha Trisula komuditas unggulan Pertanian, Perikanan kelautan dan Pariwisata Berkelanjutan | 3.1.1.1.1.1.1 | Percepatan pemulihan ekonomi dengan menggerakan Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas pertanian, dinas Perikanan kelautan |
| | | 3.1.1.1.1.1.2 | Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan sistem serta jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 3.1.1.1.1.1.3 | Percepatan pembangunan dan pemerataan industri kabupaten melalui pemberdayaan industri dan penyiapan kawasan industri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.1.1.2.1.1 | Mengoptimalkan pelayanan Investasi dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau | 3.1.1.2.1.1.1 | Peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan kolaborasi dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3.1.1.2.2.1 | Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate dan Pengembangan kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan komoditi unggulan Pertanian | 3.1.1.2.2.1.1 | Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate Tojo Una Una | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.1.1.2.2.1.2 | Pengawasan distribusi Pupuk dan dukungan alsintan, Saprodi guna mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.1.1.2.2.1.3 | Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian melalui Inovasi serta peningkatan kapasitas SDM pertanian | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.1.2.2.1.4 | Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknologi budidaya peternakan secara periodik dan upaya penyediaan petugas pendamping tingkat desa | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.1.1.2.2.1.5 | Meningkatkan ketersedian pangan melalui pemberdayaan usaha pertenakan rakyat | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.1.1.2.3.1 | Peningkatan nilai tambah sektor perikanan kelautan | 3.1.1.2.3.1.1 | Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan fasilitasi sapras perikanan tangkap dan budidaya untuk | Dinas Perikanan |
| | | 3.1.1.2.3.1.2 | Peningkatan kualitas SDM perikanan | Dinas Perikanan |
| 3.1.1.2.4.1 | Peningkatan daya tarik pariwisata dan event pariwisata serta mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat | 3.1.1.2.4.1.1 | Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.1.1.2.4.1.2 | Peningkatan peran masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pengembangan, memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap menerapkan kebersihan, kesehatan dan keselamatan CHS (Cleanliness, Healt and Safety) disetiap destinasi dan amenitas. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.1.1.2.4.1.3 | Peningkatan promosi dan Event Pariwisata serta pemberdayaan industri kretif, perdagangan dan jasa mendukung pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.1.1.3.1.1 | Penyediaan Pangan harapan disertai perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat | 3.1.1.3.1.1.1 | Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan melalui penguatan kelembagaan pangan sampai tingkat Kelurahan/Desa. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **MISI KE-EMPAT : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan** | | | | |

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1.1.1 | Meningkatkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar nasional | 4.1.1.1.1.1.1 | Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 4.1.1.1.1.1.2 | Peningkatan Minat dan budaya baca dan peningkatan layanan kepustakaan berbasis tehnologi Informasi | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 4.1.1.1.1.1.3 | Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4.1.1.1.2.1 | Meningkatkan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas pendidikan serta ketersedian guru | 4.1.1.1.2.1.1 | Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan literasi, mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 4.1.1.1.2.1.2 | Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 4.1.1.2.1.1 | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata | 4.1.1.2.1.1.1 | Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan secara merata di daratan maupun kepulauan | Dinas Kesehatan |
| | | 4.1.1.2.1.1.2 | Konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta identifikasi sasaran utama pelayanan kesehatan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu | Dinas Kesehatan, RSU Ampana, RSU Wakai dan RS Pratama Togean |

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.1.1.2.1.1.3 | Penguatan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan, RSU Ampana,RSU Wakai dan RS Pratama Togean |
| | | 4.1.1.2.1.1.4 | Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting | Dinas Kesehatan, RSU Ampana,RSU Wakai dan RS Pratama Togean, puskesmas dan pustu |
| 4.1.1.3.1.1 | Optimalisasi peran pemuda dalam mengisi pembangunan | 4.1.1.3.1.1.1 | Fasilitasi Peran dan kepeloporan pemuda dalam mengisi pembangunan serta peninglatan prestasi keolahragaan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesbangpol |
| 4.1.1.4.1.1 | Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder | 4.1.1.4.1.1.1 | Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **MISI KE-LIMA : Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance** | | | | |
| 5.1.1.1.1.1 | Meningkatkan kualitas Layanan Publik dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten (Smart Governance) melalui melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan | 5.1.1.1.1.1.1 | Mengoptimalkan pelayanan administrasi Kependudukan secara cepat dan mudah berbasis kecamatan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 5.1.1.1.1.1.2 | Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat | Pemerintah Kecamatan dan Desa |
| | | 5.1.1.1.1.1.3 | Evaluasi kinerja aparatur Daerah dan aparatur pelayanan publik melalui pengukuran indeks kepuasan Masyarakat. | Sekretariat daerah |
| | | 5.1.1.1.1.1.4 | Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban memalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait serta penegakan Perda | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 5.1.1.1.1.1.5 | Pemantapan kondisi sosial dan politik serta keamanan melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa serta upaya dini pencegahan konflik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 5.1.1.2.1.1 | Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance) | 5.1.1.2.1.1.1 | Percepatan pengelolaan satu data dan Persandian daerah berbasis Informasi tehnologi serta peningkatan kualitas SDM IT dan persandian | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.1.1.2.1.1.2 | Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT. | Bapelitbangda |
| | | 5.1.1.2.1.1.3 | Megoptimalkan pelayanan kearsipan daerah berbasis IT | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 5.1.1.2.1.1.4 | Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Eksekutif dan Legislatif. | Sekretariat DPRD |
| | | 5.1.1.2.1.1.5 | Meningkatnya kualitas manajemen ASN melalui pendidikan dan penjejangan serta penerapan fungsionalisasi peran ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5.1.1.3.1.1 | Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 5.1.1.3.1.1.1 | Pengintensifkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Sekda, Inspektorat dan Bapelitbangda |
| | | 5.1.1.3.1.1.2 | Peningkatan Kinerja pembangunan daerah dan Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan | Sekda, Inspektorat dan Bapelitbangda |
| | | 5.1.1.3.1.1.3 | Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta penerapan pembayaran pajak dan restribusi daerah secara online | Badan Pendapatan Daerah |
| | | 5.1.1.3.1.1.4 | Perbaikan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| 5.1.1.4.1.1 | Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa | 5.1.1.4.1.1.1 | Meningkatkan kemajuan desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | 5.1.1.4.1.1.2 | Harmonisasi dan integrasi Perencanaan dan penggagaran desa dengan arah pembnagunan Kabupaten | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | |

## Tabel 6.3
## Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| **MISI PERTAMA : Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan BerkelanjutanMewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Meninghkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat | 1.1.1 | **Angka Kemiskinan** | 1.1.1.1 | Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat | 1.1.1.1.1 | Garis Kemiskinan | 1.1.1.1.1.1 | Mengoptimalkan Koordinasi Upaya Penurunan Garis Kemiskinan | 1.1.1.1.1.1.1 | Optimalisasi Pemantauan Garis Kemiskinan Melalui Peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | 1.1.1.1.2 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | 1.1.1.1.1.2 | Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Kedalaman Kemiskinan | 1.1.1.1.1.2 | Optimalisasi Pemantauan Indeks Kedalaman Kemiskinan Melalui Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten | Bapelitbangda |
| | | | | | | 1.1.1.1.3 | Indeks Keparahan Kemiskinan | 1.1.1.1.1.3 | Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Keparahan Kemiskinan | 1.1.1.1.1.3 | Optimalisasi Pemantauan Indeks Keparahan Kemiskinan Melalui Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten | Bapelitbangda |
| | | | | | | 1.1.1.1.4 | Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1.1.1.1.1.4 | Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup PMKS | 1.1.1.1.1.4 | Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantunan Tepat Sasaran bagi | Dinas Sosial |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PMKS | |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.1.1.1.5 | Mendorong Desa tertinggal yang berbasis Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk ditetapkan sebagai Desa Adat | Dinas Sosial |
| | | | | | | 1.1.1.1.5 | Pendapatan perkapita | 1.1.1.1.2.1 | Mengoptimalkan Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan | 1.1.1.1.2.1.1 | Menjaga stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, Koperasi dan BumDes | Bidang Ekonomi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.1.2.1.2 | Meningkatkan peran Koperasi, UMKM Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan kesejahteran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 1.1.1.2 | Meningkatnya Ketersedian Lapangan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan | 1.1.1.2.1 | Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) | 1.1.1.2.1.1 | Peningkatan dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Investasi | 1.1.1.2.1.1.1 | Mendorong Investasi Trisula Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru | |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.1.1.2 | Mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi unggulan lokal desa dalam | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja | |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.1.1.3 | Optimalisasi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.1.1.4 | Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi UMKM melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan serta bantuan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | 1.1.1.2.2 | Indeks Gini Rasio | 1.1.1.2.2.1 | Menurunkan disparitas ekonomi melalui peningkatan kesejahteran dan penciptaan usaha serta penyedian infrastruktur ekonomi | 1.1.1.2.2.1.1 | Meningkatkan peran Industri Kecil Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.2.1.2 | Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat | |
| | | | | 1.1.1.3 | Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan | 1.1.1.3.1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 1.1.1.3.1.1 | Mengembangkan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi, ketahanan pangan | 1.1.1.3.1.1.1 | Pembangunan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan pengawasan pola distribusi pupuk bersubsidi dan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | dan kesejahteraan petani dan nelayan | | membangun pola kemitraan | |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.1.1.2 | Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penciptaan lapangan kerja dan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | | 1.1.1.3.2 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | | | 1.1.1.3.2.1.1 | Mewujudkan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang maju dan mendorong peningkatan taraf perekonomian nelayan | Dinas Perikanan |
| 1,2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Ketanguhan Masyarakat Mengahadapi bencana | 1.2.1 | **Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)** | 1.2.1.1 | Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan | 1.2.1.1.1 | Indeks kualitas Air (IKA) | 1.2.1.1.1.1 | Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan | 1.2.1.1.1.1.1 | Peningkatan manajeman dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas air | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | 1.2.1.1.2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | | | 1.2.1.1.2.1 | Peningkatan manajeman dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas Udara | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | 1.2.1.1.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | | | 1.2.1.1.3.1 | Meningkatkan pengelolaan hutan yang berkualitas | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | 1.2.1.1.4 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | | | 1.2.1.1.4.1 | Peningkatan manajeman dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas air Laut | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | | | 1.2.1.2 | Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota Ampana | 1.2.1.2.1 | Cakupan Pelayanan Persampahan | 1.2.1.2.1.1 | Optimalisasi system pengolahan sampah yang terpadu dan penangganan layanan persampahan | 1.2.1.1.1.2.1 | Peningkatan kebersihan dan keindahan kota melalui layanan persampahan yang terintegrasi serta Penataan system persampahan Ampana Kota | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | 1.2.1.1.1.2.2 | Mengembangkan dan meningkatkan tata bangunan dan lingkungan hidup | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, |
| | | | | 1.2.1.3 | Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten | 1.2.1.3.1 | Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten | 1.2.1.3.1.1 | Mengoptimalkan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 1.2.1.3.1.1.1 | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 1.2.1.4 | Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana | 1.2.1.4.1 | Indeks Resiko Bencana Daerah | 1.2.1.4.1.1 | Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana | 1.2.1.4.1.1.1 | Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | 1.2.1.4.2 | Persentase Desa Tangguh Bencana | | | 1.2.1.4.1.1.2 | Menigkatkan peran serta masyarakat Desa didalam menghadapi bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| **MISI KE-DUA : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal** | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah untuk Keluar dari Kabupaten Tertinggal | 2.1.1 | **Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah** | 2.1.1.1 | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | 2.1.1.1.1 | Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik | 2.1.1.1.1.1 | Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas | 2.1.1.1.1 .1.1 | Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | 2.1.1.2 | Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air | 2.1.1.2.1 | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun | | | 2.1.1.1.1 .1.2 | Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan, talud dan drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | 2.1.1.3 | Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi | 2.1.1.3.1 | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan | 2.1.1.3.1.1 | Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas jalan dan laut | 2.1.1.3.1 .1.1 | Penataan Perhubungan darat, udara dan Laut | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | | | | 2.1.1.3.1 .1.2 | Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah. | Dinas Perhubungan |
| | | | | 2.1.1.5 | Menurunya Desa Blankspot koneksi internet | 2.1.1.5.1 | Presentase Koneksi Internet Desa | 2.1.1.5.1.1 | Optimalisasi Dana Desa mengentaskan Desa Blankspot koneksi internet | 2.1.1.5.1 .1.1 | Meningkatkan aksesibilitas Jaringan Telekomunikasi pada seluruh wilayah. | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | 2.1.1.6 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) | 2.1.1.6.1 | Presentase Rumah Layak Huni | 2.1.1.6.1.1 | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perumahan pemukiman, tata bangunan dan air minum layak | 2.1.1.6.1 .1.1 | Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan permukiman kumuh yang berkualitas | |
| | | | | 2.1.1.7 | Meninmgkatnya ketersedian air bersih | 2.1.1.7.1 | Presentase ketersedian air minum layak | | | 2.1.1.6.1.1.2 | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| **MISI KE-TIGA : Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas bertumpu pada Trisula Sektor Unggulan Daerah | 3.1.1 | **Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif** | 3.1.1.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah | 3.1.1.1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 3.1.1.1.1.1 | Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha Trisula komuditas unggulan Pertanian, Perikanan kelautan dan Pariwisata Berkelanjutan | 3.1.1.1.1.1.1 | Percepatan pemulihan ekonomi dengan menggerakan Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas pertanian, dinas Perikanan kelautan |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.1.1.1.2 | Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan sistem serta jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.1.1.1.3 | Percepatan pembangunan dan pemerataan industri kabupaten melalui pemberdayaan industri dan penyiapan kawasan industri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | 3.1.1.2 | Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah | 3.1.1.2.1 | Realisasi Investasi daerah sektor Unggulan | 3.1.1.2.1.1 | Mengoptimalkan pelayanan Investasi dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau | 3.1.1.2.1.1.1 | Peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan kolaborasi dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | 3.1.1.2.2 | Nilai Kontribusi sektor Pertanian Dalam PDRB | 3.1.1.2.2.1 | Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate dan Pengembangan kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan komoditi unggulan Pertanian | 3.1.1.2.2.1.1 | Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate Tojo Una Una | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.2.2.1.2 | Pengawasan distribusi Pupuk dan dukungan alsintan, Saprodi guna mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.2.2.1.3 | Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian melalui Inovasi serta peningkatan kapasitas SDM pertanian | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.2.2.1.4 | Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknologi budidaya peternakan secara periodik dan upaya penyediaan petugas pendamping tingkat desa | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.2.2.1.5 | Meningkatkan ketersedian pangan melalui pemberdayaan usaha pertenakan rakyat | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | 3.1.1.2.3 | Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB | 3.1.1.2.3.1 | Peningkatan nilai tambah sektor perikanan kelautan | 3.1.1.2.3.1.1 | Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan fasilitasi sapras perikanan tangkap dan budidaya untuk | Dinas Perikanan |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.2.3.1.2 | Peningkatan kualitas SDM perikanan | Dinas Perikanan |
| | | | | | | 3.1.1.2.4 | Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata | 3.1.1.2.4.1 | Peningkatan daya tarik pariwisata dan event pariwisata serta mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif | 3.1.1.2.4.1.1 | Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat | 3.1.1.2.4.1.2 | Peningkatan peran masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pengembangan, memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap menerapkan kebersihan, kesehatan dan keselamatan CHS (Cleanliness, Healt and Safety) disetiap destinasi dan amenitas. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | | | | 3.1.1.2.4.1.3 | Peningkatan promosi dan Event Pariwisata serta pemberdayaan industri kretif, perdagangan dan jasa mendukung pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | 3.1.1.3 | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat | 3.1.1.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) | 3.1.1.3.1.1 | Penyediaan Pangan harapan disertai perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat | 3.1.1.3.1.1.1 | Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan melalui penguatan kelembagaan pangan sampai tingkat Kelurahan/Desa. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| **MISI KE-EMPAT : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan** | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing | 4.1.1 | **Indeks Pemangunan Manusia (IPM)** | 4.1.1.1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 4.1.1.1.1 | Indeks Pendidikan | 4.1.1.1.1.1 | Meningkatkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar nasional | 4.1.1.1.1.1 | Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | | | | 4.1.1.1.1.2 | Peningkatan Minat dan budaya baca dan peningkatan layanan kepustakaan berbasis tehnologi Informasi | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | | | | 4.1.1.1.1.3 | Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter | |
| | | | | | | 4.1.1.1.2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | 4.1.1.1.2.1 | Meningkatkan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas pendidikan serta ketersedian guru | 4.1.1.1.2.1.1 | Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan literasi, mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | 4.1.1.1.3 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | | | 4.1.1.1.2.1.2 | Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | 4.1.1.2 | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat | 4.1.1.2.1 | Indeks Kesehatan | 4.1.1.2.1.1 | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang | 4.1.1.2.1.1.1 | Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan secara merata di daratan maupun kepulauan | Dinas Kesehatan |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | 4.1.1.2.2 | Usia Harapan Hidup (UHH) | | berkualitas dan merata | 4.1.1.2.1.1.2 | Konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta identifikasi sasaran utama pelayanan kesehatan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu | Dinas Kesehatan, RSU Ampana, RSU Wakai dan RS Pratama Togean |
| | | | | | | 4.1.1.2.3 | Angka Stanting | | | 4.1.1.2.1.1.3 | Penguatan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan, RSU Ampana,RSU Wakai dan RS Pratama Togean |
| | | | | | | | | | | 4.1.1.2.1.1.4 | Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting | Dinas Kesehatan, RSU Ampana,RSU Wakai dan RS Pratama Togean, puskesmas dan pustu |
| | | | | 4.1.1.3 | Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan | 4.1.1.3.1 | Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat Provinsi | 4.1.1.3.1.1 | Optimalisasi peran pemuda dalam mengisi pembangunan | 4.1.1.3.1.1.1 | Fasilitasi Peran dan kepeloporan pemuda dalam mengisi pembangunan serta peninglatan prestasi keolahragaan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesbangpol |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | 4.1.1.4 | Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah | 4.1.1.4.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 4.1.1.4.1.1 | Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder | 4.1.1.4.1.1.1 | Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **MISI KE-LIMA : Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance** | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi | 5.1.1 | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** | 5.1.1.1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik | 5.1.1.1.1 | Indek Kepuasan Pelayanan Publik | 5.1.1.1.1.1 | Meningkatkan kualitas Layanan Publik dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten (Smart Governance) melalui melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan | 5.1.1.1.1.1.1 | Mengoptimalkan pelayanan administrasi Kependudukan secara cepat dan mudah berbasis kecamatan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.1.1.1.2 | Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat | Pemerintah Kecamatan dan Desa |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.1.1.1.3 | Evaluasi kinerja aparatur Daerah dan aparatur pelayanan publik melalui pengukuran indeks kepuasan Masyarakat. | Sekretariat daerah |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.1.1.1.4 | Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban memalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | terkait serta penegakan Perda | |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.1.1.1.5 | Pemantapan kondisi sosial dan politik serta keamanan melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa serta upaya dini pencegahan konflik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | 5.1.1.2 | Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah | 5.1.1.2.1 | Nilai SAKIP Daerah | 5.1.1.2.1.1 | Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance) | 5.1.1.2.1.1.1 | Percepatan pengelolaan satu data dan Persandian daerah berbasis Informasi tehnologi serta peningkatan kualitas SDM IT dan persandian | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.2.1.1.2 | Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT. | Bapelitbangda |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.2.1.1.3 | Megoptimalkan pelayanan kearsipan daerah berbasis IT | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.2.1.1.4 | Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Eksekutif dan Legislatif. | Sekretariat DPRD |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.2.1.1.5 | Meningkatnya kualitas manajemen ASN melalui pendidikan dan penjejangan serta penerapan fungsionalisasi peran ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | 5.1.1.3 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 5.1.1.3.1 | Opini hasil pemeriksaan oleh BPK | 5.1.1.3.1.1 | Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 5.1.1.3.1.1.1 | Pengintensifkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Sekda, Inspektorat dan Bapelitbangda |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.3.1.1.2 | Peningkatan Kinerja pembangunan daerah dan Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan | Sekda, Inspektorat dan Bapelitbangda |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.3.1.1.3 | Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta penerapan pembayaran pajak dan restribusi daerah secara online | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | | | | | 5.1.1.3.1.1.4 | Perbaikan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |

| Tujuan | | | | Sasaran | | | | Strategi | | Arah Kebijakan | | OPD PENAGGUN-GUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | | Uraian | | Indikator | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.4 | Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa | 5.1.1.4.1 | Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una-Una | 5.1.1.4.1.1 | Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa | 5.1.1.4.1.1.1 | Meningkatkan kemajuan desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | 5.1.1.4.2 | Persentase Status Desa Maju | | | 5.1.1.4.1.1.2 | Harmonisasi dan integrasi Perencanaan dan penggagaran desa dengan arah pembnagunan Kabupaten | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | | | | |

## 6.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota dimana pada pasal 5 ayat 1, TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah. Pada pasal 20 dijelaskan RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. RPKD juga menjadibagian dari dokumen RPJMD.

Keberhasilan Penaggulangan kemiskinan di daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan OPD terkait dengan melaksanakan program-program yang terpadu dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sesuai amanat Permendagri 53 tahun 2020 bahwa disetiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu mengefektifkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemikinan (TKPK). Salah satu tugas dan fungsi TKPK adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. Agenda kerja tahunan memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

RPKD berjangka waktu 5 (lima) Tahun, kemudian ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Untuk Kelembagaan di tingkat Kabupaten/Kota, telah dibentuk TKPK Kabupaten Tojo Una-Una, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati, Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tojo Una-Una dan Keanggotaan TKPK Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten Tojo Una-Una diatur dengan Surat Keputusan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kebupaten/Kota dan Permendagri 53 Tahun 2020.

Pengentasan kemiskinan ke depan harus lebih sistematis, terarah dan terintegrasi. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mewujudkan sinergi antara Target Indikator Pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 dan Target SDGs Kabupaten Tojo Una-Una, diperlukan arah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pembangunan yang dituju tidak

hanya diartikan sebatas pada pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam konteks pertumbuhan kesejahteraan setiap individu yang berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan kabupaten. Untuk itu, rangkaian target dan indikator di dalam kerangka waktu sinergi antara dokumen RPJMD dan RPKD kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yang ditetapkan.

Kemiskinan juga berkaitan erat dengan permasalahan lokal Kabupaten Tojo Una-Una saat ini, di mana kondisi kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki masalah kemiskinan dan akar masalah yang berbeda karena konsentrasi kemiskinan berada di wilayah *Kecamatan Pulau-Pulau khususnya Kecamatan Togean sebagai konsentrasi kemiskinan parah dan Pesisir serta daratan khususnya wilayah pegunungan yang mendiami wilayah kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka*, sehingga kebijakan dan intervensi yang disiapkan pun berbeda. Selain itu, RPKD sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una juga menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan daerah ke dalam konteks penyelesaian masalah secara lokal daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Kabupaten yang sebagian memiliki wilayah pulua-pulau dan sebagian berada di daratan (pesisir dan pegunungan) serta adanya prioritas intervensi yang harus dilakukan dalam satu waktu tertentu, maka RPKD Kabupaten Tojo Una-Una diperlukan untuk memastikan indikator-indikator prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 sejalan dan menjadi prioritas intervensi kebijakan Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una yang termuat dalam RPKD Tahun 2021-2026.

Perumusan RPKD Kabupaten Tojo Una-Una memuat dan meng-uraikan secara utuh dan rinci sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD tentang penanga-nan masalah kemiskinan, identifikasi akar masalah kemiskinan, identifikasi wilayah prioritas, serta mendorong penggunaan data penduduk miskin dan rentan miskin menjadi sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten Tojo Una-Una maupun yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah melalui Strategi dan Program yang tepat. Adapun Strategi dan program sebagaimana termuat dalam Permendagri 53 tahun 2020 pasal 17 dilakukan dengan upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan sinergi kebijakan dan program penanggulangankemiskinan.

Lebih lanjut pada Pasal 18 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas : *program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin* terkait sebagaimana

dimuat dalam permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah termasuk programdengan dana desa/dana kelurahan.

### 6.3.1 Pendekatan Spasial didalam Pengentasan Kemiskinan

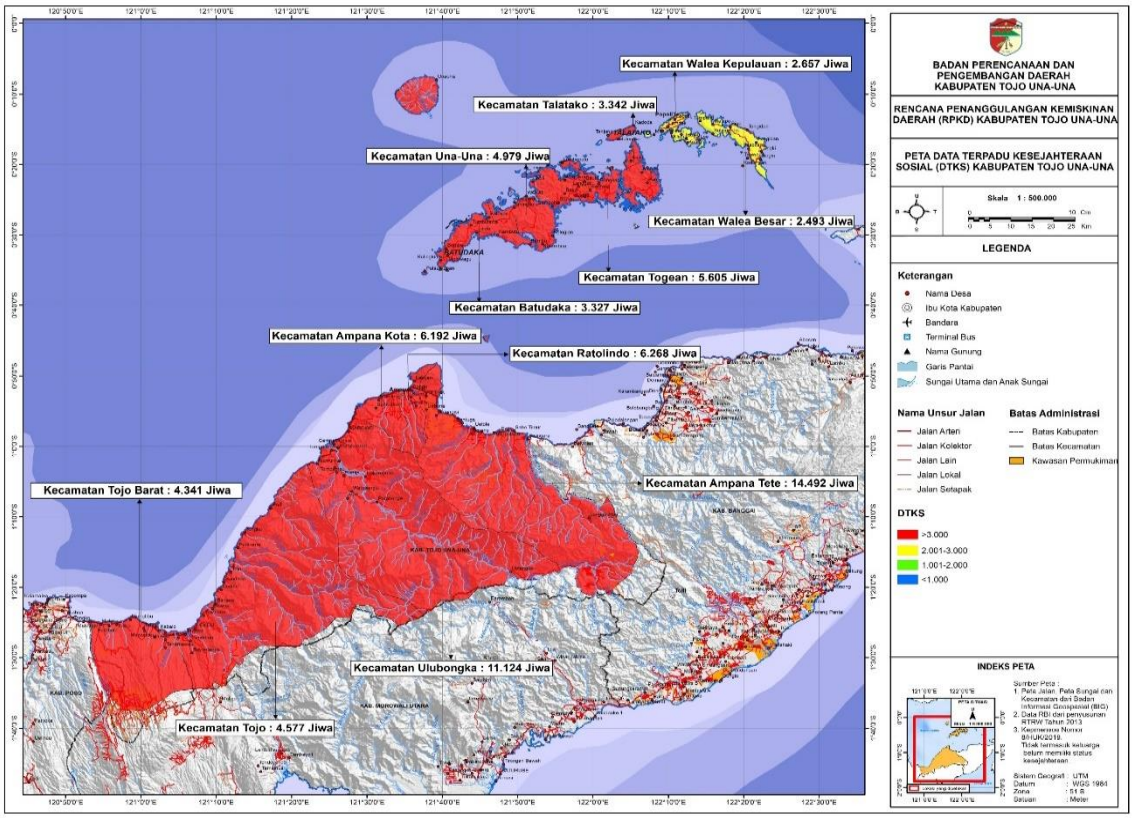
Perencanaan Pembangunan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran prioritas pembangunan. Pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana termuat dalam RPKD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 juga memuat Kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis spasial (keruangan).

Perencanaan Pembangunan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran prioritas pengentasan kemiskinan. Pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai program dan kegiatan intervensi yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Kebijakan spasial percepatan pengentasan kemiksinan dalam dokumen RPKD perlu diintegrasikan dalam RPJMD khususnya untuk acuan program/ kegiatan yang perlu mendapatkan arahan lokasi. RPJMD perlu memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah, kebijakan pengembangan struktur ruang (sistem dan jaringan sarana prasarana intervensi berbasis spasial), dengan memperhatikan kebijakan struktur ruang dan pola ruang dalam dokumen RTRW kabupaten Tojo Una-Una, dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan sistem informasi kesejahteraan *sosial next-generation* yang terintegrasi berdasarkan data sebaran penduduk miskin merujuk pada DTKS pada Tahun 2020. Dimana, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 69.397 jiwa, di mana jumlah terbesar berada di ***Kecamatan Ampana Tete*** sebanyak 14.492 jiwa atau sebesar 20,88 persen; ***Kecamatan Ulubongka*** sebanyak 11.124 jiwa atau sebesar 16,03 persen; ***Kecamatan Ratolindo*** sebanyak 6.268 jiwa atau sebesar 9,03 persen; dan ***Kecamatan Ampana Kota*** sebanyak 6.192 jiwa atau sebesar 8,92 persen; ***Kecamatan Togean*** sebanyak 5.605 jiwa atau sebesar 8,08 persen; ***Kecamatan Una-Una*** dengan jumlah sebanyak 4.979 jiwa atau sebesar 7,17 persen; ***Kecamatan Tojo*** dengan jumlah sebanyak 4.577 jiwa atau sebesar 6,60 persen; ***Kecamatan Tojo Barat*** dengan jumlah sebanyak 4.341 jiwa atau sebesar 6,24 persen; ***Kecamatan Talatako*** dengan jumlah sebanyak 3.342 jiwa atau sebesar 4,82 persen; ***Kecamatan Batudaka*** dengan jumlah sebanyak 3.327 jiwa atau sebesar 4,79 persen; sementara kecamatan lebih rendah DTKS berada

***Kecamatan Walea Kepulauan*** dengan jumlah sebanyak 2.657 jiwa atau sebesar 3,83 persen; dan **Kecamatan *Walea Besar*** dengan jumlah sebanyak 2.493 jiwa atau sebesar 3,59 persen. Data peta sebaran DTKS di Kabupaten Tojo Una-Una terdapat pada gambar berikut.




Sumber : Dokumen RPKD Kab. Tojo Una-Una 2021-2026, diolah 2021

**Gambar 6.1**
**Peta Sebaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021**

Daerah **Warna Merah** menjelaskan jumlah DTKS di atas 3.000 jiwa sebagai wilayah konsentrasi kemiskinan masing-masing di Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ratolindo, dan Kecamatan Ampana Tete sebagai wilayah yang berada di daratan. Sementara itu, Kecamatan Batudaka, Kecamatan Togean, dan Kecamatan Una-Una sebagai wilayah konsentrasi kemiskinan di wilayah kepulauan. Terdapat Kecamatan Walea kepulauan dan Walea besar di tandai dengan **Warna Kuning** dimana kondisi kemiskinan relatif sedang.

Berdasarkan analisis prioritas wilayah *intermediate outcome* perbaikan/ pemutakhiran data penerima manfaat dengan persentase *progress up-dating* DTKS sebagai satu diantara indikator, maka dapat ditentukan wilayah Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah data yang tingkat kemiskinan tertinggi dengan *progress updating* DTKS pada ***Kecamatan Ampana Tete*** sebanyak 14.492 jiwa atau sebesar 20,88 persen;

***Kecamatan Ulubongka*** sebanyak 11.124 jiwa atau sebesar 16,03 persen; ***Kecamatan Ratolindo*** sebanyak 6.268 jiwa atau sebesar 9,03 persen; ***Kecamatan Ampana Kota*** sebanyak 6.192 jiwa atau sebesar 8,92 persen; ***Kecamatan Tojo*** dengan jumlah sebanyak 4.577 jiwa atau sebesar 6,60 persen; ***Kecamatan Tojo Barat*** dengan jumlah sebanyak 4.341 jiwa atau sebesar 6,24 persen untuk wilayah daratan. Untuk wilayah ***Kecamatan Togean*** sebanyak 5.605 jiwa atau sebesar 8,08 persen; ***Kecamatan Una-Una*** dengan jumlah sebanyak 4.979 jiwa atau sebesar 7,17 persen; ***Kecamatan Talatako*** dengan jumlah se-banyak 3.342 jiwa atau sebesar 4,82 persen; ***Kecamatan Batudaka*** dengan jumlah sebanyak 3.327 jiwa atau sebesar 4,79 persen untuk wilayah kepulauan sebagai wilayah prioritas. Maka, upaya pengentasan kemiskian akan berbasis wilayah spasial yang memeliki angka kemimsinan tertinggi agar percepatan penurunan tingkat kemiskinan lebih fokus dan tetap sasaran.

## 6.4 TEMA PEMBANGUNAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 sebagai landasan penyusunan RKPD tahunan selama periode berkenaan yang berlandaskan RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2005-2025.

Analisis terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una bertujuan untuk merencanakan pembangunan lima tahunan ke IV dengan jangka waktu 2020-2025. Adapun Amanat skala prioritas pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut.

*Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukkan untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang aman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan* menekankan ***terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.***

*Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya* konsolidasi *demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum,* ***terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat****. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan,* ***terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.***

*Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya*

*manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningktanya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan* perlindungan *anak. Sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagamaan, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.*

*Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian* yang *kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah.*

Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tema, atau fokus pembangunan tahap ke-empat pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan periode Tahun 2021-2026 disajikan pada gambar berikut ini.




Sumber: Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik, 2021

**Gambar 6.2**
**Tema/Tahapan Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**

Prioritas pembangunan yang ditetapkan pada gambar di atas walaupun berbeda pada setiap periodenya namun memiliki kesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran tahapan lima tahun dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

## 6.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mendasari pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, maka program Perangkat Daerah dijabarkan pada setiap misi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut.

# Tabel 6.4
# Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
# Kabupaten Tojo Una-Una

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan 1.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat** | **Angka Kemiskinan** | **16,39** | **16,39-16,20** | **0** | **16,20-15,80** | | **15,80-14,30** | | **14,30-13,80** | | **13,80-13,40** | | **13,40-9,80** | | **13,40-9,80** | | |
| | **Sasaran 1.1.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat** | **Garis Kemiskinan** | **504.889,00** | **521.534** | | **538.352** | | **555.171** | | **571.989** | | **588.808** | | **605.626** | | **605.626** | | |
| | | **Indeks Kedalaman Kemiskinan** | **3,27** | **3,25** | | **3,23** | | **3,19** | | **3,16** | | **3,13** | | **3,1** | | **3,1** | | |
| | | **Indeks Keparahan Kemiskinan** | **1,03** | **0,95** | | **0,93** | | **0,92** | | **0,91** | | **0,9** | | **0,89** | | **0,89** | | |
| | | **Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | **NA** | **70,00-72,5** | **0** | **72,50-75,00** | | **75,00-77,50** | | **77,50-80,00** | | **80,00-82,50** | | **82,50-85,00** | | **82,50-85,00** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Kelompok di berdayakan | 100,00% | 100,00 % | 692,05 | 100,00 % | 505,29 | 100,00 % | 542,54 | 100,00 % | 524,36 | 100,00 % | 554,1 | 100,00 % | 559,87 | 100,00 % | 2.686,17 | Dinas Sosial |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 46,2 | 100,00 % | 49,61 | 100,00 % | 47,95 | 100,00 % | 50,66 | 100,00 % | 51,19 | 100,00 % | 245,62 | |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin) | NA | 0,50% | 438,51 | 0,50% | 266,7 | 0,50% | 286,36 | 0,50% | 276,77 | 0,50% | 292,46 | 0,50% | 295,51 | 0,50% | 1.417, 79 | |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 35,20% | 40,20% | 277,55 | 43,70% | 168,8 | 47,20% | 181,25 | 50,70% | 175,18 | 54,20% | 185,11 | 56,70% | 187,04 | 56,70% | 897,37 | |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara | NA | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR (Angka Kelahiran Total) | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 34,65 | 0 | 34,3 | 0 | 33,95 | 0 | 33,6 | 0 | 33,6 | 0 | Dinas Pemberdayaan Pemermpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 25 | 25,5 | 0 | 26 | 0 | 26,5 | 0 | 27 | 0 | 27,5 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 0,83 | 0,8 | 0 | 0,77 | 0 | 0,74 | 0 | 0,71 | 0 | 0,68 | 0 | 0,65 | 0 | 0,65 | 0 | |
| | | Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age SpeciicFertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun | 24 | 23 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan peserta KB aktif MKJP | 24 | - | 4.330,75 | - | 4.240,99 | - | 4.553,62 | - | 4.401,05 | - | 4.650,60 | - | 4.699,09 | - | 22.545,34 | |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 35 | 35,5 | 9,5 | 36 | 9,3 | 36,5 | 9,99 | 37 | 9,65 | 37,5 | 10,2 | 38 | 10,31 | 38 | 49,46 | |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 10,00% | 11,32% | 61,96 | 12,64% | 21,99 | 13,96% | 23,61 | 15,28% | 22,82 | 16,60% | 24,11 | 17,92% | 24,37 | 17,92% | 116,9 | Disperindag |
| 3.32.02 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan | 25,00% | 28,00% | 220 | 29,50% | 206,24 | 32,50% | 221,44 | 35,50% | 214,02 | 38,50% | 226,16 | 41,50% | 228,52 | 41,50% | 1.096,38 | |
| 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Nilai rata- rata indeks perekembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang di revitalisasi | 25,00% | 25,50% | 0 | 25,75% | 0 | 26,25% | 0 | 26,75% | 0 | 27,25% | 0 | 27,75% | 0 | 27,75% | 0 | Disnakertrans |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementrian yang di revitalisasi | 25,00% | 25,50% | 0 | 25,75% | 0 | 26,25% | 0 | 26,75% | 0 | 27,25% | 0 | 27,75% | 0 | 27,75% | 0 | |
| | **Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat** | **Pendapatan perkapita** | **30,1** | **30,1** | | **31,3** | | **32,9** | | **34,5** | | **36,1** | | **36,10-38,00 Juta** | | **36,10-38,00 Juta** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Tertib Usaha | NA | 12,84% | 0 | 14,18% | 0 | 15,52% | 0 | 16,86% | 0 | 18,20% | 0 | 19,54% | 0 | 19,54% | 0 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 11,50% | 12,84% | 0 | 14,18% | 0 | 15,52% | 0 | 16,86% | 0 | 18,20% | 0 | 19,54% | 0 | 19,54% | 0 | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | 90,00% | 90,46% | 2.743,71 | 91,80% | 461,86 | 93,14% | 495,91 | 94,48% | 479,29 | 95,82% | 506,47 | 97,16% | 511,75 | 97,16% | 2.455,27 | |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | NA | 50,00% | 312,22 | 52,50% | 110,81 | 55,00% | 118,98 | 56,50% | 114,99 | 59,00% | 121,51 | 61,50% | 122,78 | 61,50% | 589,07 | |
| | **Sasaran 1.1.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **Meningkatnya Ketersedian Lapngan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan** | **Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)** | **2,84** | **3,44** | | **03-02** | | **03-02** | | **03-02** | | **03-02** | | **03-02** | | **03-02** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 0,85% | 1,60% | 93,67 | 2,10% | 87,81 | 2,85% | 94,29 | 3,60% | 91,13 | 4,35% | 96,29 | 5,10% | 97,3 | 5,10% | 466,82 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta) | 4,57 | 4,62 | 0 | 4,64 | 0 | 4,69 | 0 | 4,74 | 0 | 4,79 | 0 | 4,84 | 0 | 4,84 | 0 | |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | 30,00% | 30,00% | 45,71 | 30,00% | 42,85 | 31,50% | 46,01 | 33,00% | 44,47 | 34,50% | 46,99 | 36,00% | 47,48 | 36,00% | 227,8 | |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 20,55% | 22,55% | 115,78 | 24,05% | 108,53 | 26,05% | 116,53 | 28,05% | 112,63 | 30,05% | 119,02 | 32,05% | 120,26 | 32,05% | 576,97 | |
| | **Meningkatnya Ketersedian Lapngan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan** | **Indeks Gini Rasio** | **0,31** | **0,300-0,200** | **0** | **0,300-0,200** | | **0,300-0,200** | | **0,300-0,200** | | **0,300-0,200** | | **0,300-0,200** | | **0,300-0,200** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | NA | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | Disperindag |
| | | Persentase penanganan pengaduan konsumen | NA | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%) | 8,82% | 10,32% | 79,13 | 11,82% | 28,08 | 13,32% | 30,15 | 14,82% | 29,14 | 16,32% | 30,79 | 17,82% | 31,12 | 17,82% | 149,29 | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | NA | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | - | 10,00% | 106,63 | 15,00% | 107,12 | 20,00% | 115,02 | 25,00% | 111,17 | 30,00% | 117,47 | 35,00% | 118,69 | 35,00% | 569,47 | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | 1,56% | 1,81% | 216,13 | 2,06% | 76,71 | 2,31% | 82,36 | 2,56% | 79,6 | 2,81% | 84,12 | 3,06% | 84,99 | 3,06% | 407,78 | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil | NA | 2,50% | 547,87 | 4,00% | 540,84 | 5,50% | 580,71 | 7,00% | 561,25 | 8,50% | 593,08 | 10,00% | 599,26 | 10,00% | 2.875, 14 | |
| | **Sasaran 1.1.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan** | **Nilai Tukar Petani (NTP)** | **NA** | **98-100** | **0** | **100-102** | | **100-102** | | **102-105** | | **105-107** | | **107-109** | | **107-109** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan | - | - | 1.750,00 | - | 1.667,19 | - | 1.790,08 | - | 1.730,11 | - | 1.828,21 | - | 1.847,27 | - | 8.862,86 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 1. Padi | 44,2 | 44,24 | 0 | 44,28 | 0 | 44,32 | 0 | 44,36 | 0 | 44,4 | 0 | 44,44 | 0 | 44,44 | 0 | |
| | | 2. Jagung | 15,78 | 15,82 | 0 | 15,86 | 0 | 15,9 | 0 | 15,94 | 0 | 15,98 | 0 | 16,02 | 0 | 16,02 | 0 | |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | 1. Bawang Merah | 35,22 | 35,26 | 0 | 35,3 | 0 | 35,34 | 0 | 35,38 | 0 | 35,42 | 0 | 35,46 | 0 | 35,46 | 0 | |
| | | 2. Cabe | 20,29 | 20,33 | 0 | 20,37 | 0 | 20,41 | 0 | 20,45 | 0 | 20,49 | 0 | 20,53 | 0 | 20,53 | 0 | |
| | | 3. Tomat | 145,57 | 145,61 | 0 | 145,65 | 0 | 145,69 | 0 | 145,73 | 0 | 145,77 | 0 | 145,81 | 0 | 145,81 | 0 | |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | 1. Nilam | 0,05 | 0,07 | - | 0,09 | - | 0,11 | - | 0,13 | - | 0,15 | - | 0,17 | - | 0,17 | - | |
| | | 2. Kelapa | 14,02 | 14,04 | - | 14,06 | - | 14,08 | - | 14,1 | - | 14,12 | - | 14,14 | - | 14,14 | - | |
| | | 3. Kakao | 4,34 | 4,36 | - | 4,38 | - | 4,4 | - | 4,42 | - | 4,44 | - | 4,46 | - | 4,46 | - | |
| | | 4. Kopi | 5,8 | 5,82 | - | 5,84 | - | 5,86 | - | 5,88 | - | 5,9 | - | 5,92 | - | 5,92 | - | |
| | | 5. Cengkeh | 3,7 | 3,72 | - | 3,74 | - | 3,76 | - | 3,78 | - | 3,8 | - | 3,82 | - | 3,82 | - | |
| | | 6. Pala | 0,02 | 0,04 | - | 0,06 | - | 0,08 | - | 0,1 | - | 0,12 | - | 0,14 | - | 0,14 | - | |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | 1. Sapi | 40.324,00 | 40.524,00 | 0 | 40.724,00 | 0 | 40.924,00 | 0 | 41.124,00 | 0 | 41.324,00 | 0 | 41.524,00 | 0 | 41.524,00 | 0 | |
| | | 2. Kambing | 39.016,00 | 39.616,00 | 0 | 40.216,00 | 0 | 40.816,00 | 0 | 41.416,00 | 0 | 42.016,00 | 0 | 42.616,00 | 0 | 42.616,00 | 0 | |
| | | 3. Babi | 10.208,00 | 10.408,00 | 0 | 10.608,00 | 0 | 10.808,00 | 0 | 11.008,00 | 0 | 11.208,00 | 0 | 11.408,00 | 0 | 11.408,00 | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | NA | 50 | 144,14 | 51,54 | 137,94 | 53,08 | 148,1 | 54,62 | 143,14 | 56,16 | 151,26 | 57,7 | 152,83 | 57,7 | 733,27 | |
| 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Areal pengendalian dan penaggulangan Bencana OPT | NA | 75,00% | 200,48 | 76,50% | 191,85 | 78,00% | 206 | 79,50% | 199,09 | 81,00% | 210,38 | 82,50% | 212,58 | 82,50% | 1.019, 90 | |
| | | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | 0 | 78,00% | 0 | 79,50% | 0 | 81,00% | 0 | 82,50% | 0 | 82,50% | 0 | |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas | NA | 1-2% | 94,16 | 1-2% | 90,11 | 1-2% | 96,75 | 1-2% | 93,51 | 1-2% | 98,81 | 1-2% | 99,84 | 1-2% | 479,02 | |
| | **Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan** | **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** | **NA** | **98-100** | **0** | **100-102** | | **100-102** | | **102-105** | | **105-107** | | **107-109** | | **107-109** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan Tangkap (Ton) | 15.655,00 | 15.905, 00 | 1.970,2 7 | 16.255, 00 | 1.570, 40 | 16.605, 00 | 1.686, 17 | 16.955, 00 | 1.629, 67 | 17.305, 00 | 1.722, 08 | 17.655, 00 | 1.740, 03 | 17.655, 00 | 8.348, 36 | Dinas Perikanan |
| | **Tujuan 1.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Ketanguhan Masyarakat Mengahadapi bencana** | **Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)** | **NA** | **65-70** | | **70-75** | | **75-80** | | **75-80** | | **80-85** | | **80-85** | | **80-85** | | |
| | **Sasaran 1.2.1.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan** | **Indeks kualitas Air (IKA)** | **NA** | **0,62-0,59** | | **0,59-0,54** | | **0,53-0,45** | | **0,44-0,38** | | **0,37-0,32** | | **0,31-0,27** | | **0,31-0,27** | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **lingkungan secara berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Indeks Kualitas Udara (IKU)** | **NA** | **85,00-86,00** | | **87,00-88,00** | | **88,00-89,00** | | **89,00-90,00** | | **90,00-91,00** | | **91,00-92,00** | | **91,00-92,00** | | |
| | | **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)** | **NA** | **80,00-81,00** | | **81,00-82,00** | | **82,00-83,00** | | **83,00-84,00** | | **84,00-85,00** | | **85,00-86,00** | | **85,00-86,00** | | |
| | | **Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)** | **NA** | **68,00-69,00** | | **69,00-70,00** | | **70,00-71,00** | | **71,00-72-00** | | **72,00-73,00** | | **73,00-74,00** | | **73,00-74,00** | | |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup | 75,00% | 75,00% | 167,63 | 75,00% | 57,45 | 78,50% | 61,69 | 82,00% | 59,62 | 85,50% | 63 | 89,00% | 63,66 | 89,00% | 305,42 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air | NA | 70 | 187,04 | 72,5 | 64,1 | 75 | 68,83 | 77,5 | 66,52 | 80 | 70,3 | 82,5 | 71,03 | 82,5 | 340,78 | |
| | | Indeks Kualitas Udara | NA | 65 | - | 67,5 | - | 70 | - | 72,5 | - | 75 | - | 77,5 | - | 77,5 | - | |
| | | Indeks Tutupan Lahan | NA | 50 | - | 52,5 | - | 55 | - | 57,5 | - | 60 | - | 62,5 | - | 62,5 | - | |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Ruang Terbuka Hijau | NA | 5,00% | 223,01 | 7,50% | 76,43 | 10,00% | 82,07 | 12,50% | 79,32 | 15,00% | 83,81 | 17,50% | 84,69 | 17,50% | 406,31 | |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B) | Presentase Pengelolaan Limbah B3 | NA | 05-Oct | 0 | 05-Oct | 0 | 05-Oct | 0 | 05-Oct | 0 | 10-Dec | 0 | 10-Dec | 0 | 10-Dec | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi | 20 | 22 | 155 | 24 | 53,12 | 26 | 57,04 | 28 | 55,13 | 30 | 58,25 | 32 | 58,86 | 32 | 282,4 | |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup | NA | 5 | 0 | 5 | 0 | 6,5 | 0 | 8 | 0 | 9,5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| | **Sasaran 1.2.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota Ampana** | **Cakupan Pelayanan Persampahan** | **61,45** | **62,95** | | **64,45** | | **65,95** | | **67,45** | | **68,95** | | **70,45** | | **70,45** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan | NA | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota | 61,45 | 62,95 | 2.377,99 | 64,45 | 815 | 65,95 | 875,08 | 67,45 | 845,76 | 68,95 | 893,71 | 70,45 | 903,03 | 70,45 | 4.332,58 | |
| | **Sasaran 1.2.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten** | **Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten** | **NA** | **20-25** | | **20-25** | | **25-30** | | **30-35** | | **35-40** | | **40-45** | | **40-45** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 15 Menit | 15 Menit | 220 | 15 Menit | 217,65 | 15 Menit | 233,7 | 15 Menit | 225,87 | 15 Menit | 238,67 | 15 Menit | 241,16 | 15 Menit | 1.157, 05 | |
| | **Sasaran 1.2.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana** | **Indeks Resiko Bencana Daerah** | **137,6** | **137,6** | | **137,6-132,0** | | **137,6-132,0** | | **132,0-130** | | **132,0-130** | | **130-128,0** | | **130-128,0** | | |
| | | **Persentase Desa Tangguh Bencana** | **7,46** | **7,46** | | **7,46-10,0** | | **10,0-12,5** | | **12,5-15,00** | | **15,00-17,25** | | **17,25-200** | | **17,25-200** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase potensi bencana alam yang diantisipasi | 50,00% | 53,50% | 237,62 | 57,00% | 248,33 | 60,50% | 266,63 | 64,00% | 257,7 | 67,50% | 272,31 | 71,00% | 275,15 | 71,00% | 1.320, 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | **Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan 2.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah untuk Keluar dari Kabupaten Tertinggal** | **Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah** | **NA** | **30-35** | | **35-40** | | **40-45** | | **45-50** | | **50-55** | | **55-60** | | **55-60** | | |
| | **Sasaran 2.1.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah** | **Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik** | **21,91** | **21,91-22,00** | | **22,00-24,00** | | **24,00-26,00** | | **26,00-28,00** | | **28,00-30,00** | | **30,00-35,00** | | **30,00-35,00** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 100,00% | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik | 90,00% | 90,00% | - | 91,50% | - | 93,00% | - | 94,50% | - | 96,00% | - | 97,50% | - | 97,50% | - | |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | 22,25 | 24,25 | 25.281,23 | 26,25 | 18.232,34 | 28,25 | 19.576,34 | 30,25 | 18.920,43 | 32,25 | 19.993,27 | 34,25 | 20.201,73 | 34,25 | 96.924,11 | |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Setifikat Kompetensi | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%) | NA | 25,00% | 2.867,04 | 27,50% | 2.067,65 | 30,00% | 2.220,07 | 32,50% | 2.145,69 | 35,00% | 2.267,35 | 37,50% | 2.290,99 | 37,50% | 10.991,76 | |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) | NA | 5,00% | 3.015,71 | 7,50% | 2.174,87 | 10,00% | 2.335,20 | 12,50% | 2.256,95 | 15,00% | 2.384,93 | 17,50% | 2.409,80 | 17,50% | 11.561,75 | |
| 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan | 0,00% | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| 2.10.08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan dan/ Terkelola | - | - | 0 | - | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | |
| 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 0,00% | 5,00% | 1.500,00 | 7,50% | 514,09 | 10,00% | 551,98 | 12,50% | 533,49 | 15,00% | 563,74 | 17,50% | 569,62 | 17,50% | 2.732,92 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Sasaran 2.1.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air** | **Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun** | **NA** | **20-22,65** | | **22,65-24,00** | | **24,00-26,65** | | **26,65-29,00** | | **29,00-31,65** | | **31,65-33,45** | | **31,65-33,45** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 46,15% | 48,65% | 5.783,91 | 51,15% | 4.171,25 | 53,65% | 4.478,73 | 56,15% | 4.328,67 | 58,15% | 4.574,12 | 60,65% | 4.621,81 | 60,65% | 22.174,58 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | NA | 15,00% | 0 | 17,50% | 0 | 20,00% | 0 | 22,50% | 0 | 24,50% | 0 | 27,00% | 0 | 27,00% | 0 | |
| | | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | NA | 10,00% | 0 | 12,50% | 0 | 15,00% | 0 | 17,50% | 0 | 19,50% | 0 | 22,00% | 0 | 24,50% | 0 | |
| | **Sasaran 2.1.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi** | **Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan** | **0,98** | **0,98-0,91** | | **0,91-0,83** | | **0,83-0,75** | | **0,75-0,67** | | **0,67-0,59** | | **0,59-0,51** | | **0,59-0,51** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio konekvitas kabupaten / kota | 75,6 | 77,35 | 888,04 | 79,1 | 477,43 | 80,85 | 512,63 | 82,6 | 495,45 | 84,35 | 523,54 | 86,1 | 529 | 86,1 | 2.538,06 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (%) | 0,00% | 2,50% | 0 | 4,50% | 0 | 6,50% | 0 | 8,00% | 0 | 10,00% | 0 | 12,00% | 0 | 12,00% | 0 | |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan | 0,98% | 0,91% | 0 | 0,83% | 0 | 0,75% | 0 | 0,67% | 0 | 0,59% | 0 | 0,51% | 0 | 0,51% | 0 | |
| | | Meningkatnya Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan | 70,00% | 72,50% | 1.041,61 | 75,00% | 559,99 | 77,50% | 601,27 | 80,00% | 581,13 | 82,50% | 614,08 | 85,00% | 620,48 | 85,00% | 2.976,96 | |
| 2.15.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | Persentase Pengelolaan Penerbangan | 20,00% | 20,50% | 0 | 21,00% | 0 | 21,50% | 0 | 22,00% | 0 | 22,50% | 0 | 23,00% | 0 | 23,00% | 0 | |
| | **Sasaran 2.1.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya akses listrik terhadap rumah tangga** | **Konsumsi listrik (Rasio Elektrifikasi)** | **94,89** | **94,89-95,09** | | **95,09-95,59** | | **95,59-96,00** | | **96,00-96,50** | | **96,50-97,0** | | **97,00-97,50** | | **97,00-97,50** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 0,27% | 1,14% | 20,91 | 2,01% | 7,17 | 2,88% | 7,7 | 3,75% | 7,44 | 4,62% | 7,86 | 5,29% | 7,94 | 5,29% | 38,1 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hidup |
| | **Sasaran 2.1.5** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Menurunya Desa Blankspot koneksi internet** | **Presentase Koneksi Internet Desa** | **67,16** | **67,16-70,00** | | **70,00-73,00** | | **73,00-76,00** | | **76,00-79,00** | | **79,00-82,00** | | **82,00-85,00** | | **82,00-85,00** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Presentase Bumdes yang Dibina (%) | 10,00% | 15,00% | 986,48 | 20,00% | 671,53 | 25,00% | 721,03 | 30,00% | 696,87 | 35,00% | 736,39 | 40,00% | 744,07 | 40,00% | 3.569,89 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%) | NA | 25,00% | 0 | 27,50% | 0 | 30,00% | 0 | 32,50% | 0 | 35,00% | 0 | 37,50% | 0 | 37,50% | 0 | |
| | **Sasaran 2.1.6** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)** | **Presentase Rumah Layak Huni** | **75,55** | **75,55-77,05** | | **77,05-78,55** | | **78,55-80,05** | | **80,05-81,55** | | **81,55-83,05** | | **83,05-84,55** | | **83,05-84,55** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100,00% | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | 100,00 % | - | Hidup |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha | 15,00% | 16,50% | - | 18,00% | - | 19,50% | - | 21,00% | - | 22,50% | - | 24,00% | - | 24,00% | - | |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | NA | 7,00% | 3.987,48 | 9,50% | 1.366,61 | 12,00% | 1.467,35 | 14,50% | 1.418,19 | 17,00% | 1.498,60 | 19,50% | 1.514,23 | 22,00% | 7.264,98 | |
| | | Persentase RTLH | 24,45% | 25,95% | - | 27,45% | - | 28,95% | - | 30,45% | - | 31,95% | - | 33,45% | - | 33,45% | - | |
| | **Sasaran 2.1.7** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya ketersedian air bersih** | **Presentase ketersedian air minum layak** | **91,14** | **91,84-92,54** | | **92,54-93,24** | | **93,24-93,94** | | **93,94-94,64** | | **94,64-95,34** | | **95,34-97,00** | | **95,34-97,00** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak | 22,69 | 27,69 | 5.783,91 | 32,69 | 4.171,25 | 37,69 | 4.478,73 | 42,69 | 4.328,67 | 45,69 | 4.574,12 | 50,69 | 4.621,81 | 50,69 | 22.174,58 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 2,12 | 2,39 | 14.752,04 | 2,66 | 10.638,89 | 2,93 | 11.423,14 | 3,2 | 11.040,40 | 3,47 | 11.666,42 | 3,74 | 11.788,06 | 3,74 | 56.556,90 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **Misi 3 Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan 3.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas bertumpu pada Trisula Sektor Unggulan Daerah** | **Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif** | **4,69** | **02-03** | | **03-05** | | **03-05** | | **05-07** | | **05-07** | | **05-07** | | **05-07** | | |
| | **Sasaran 3.1.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah** | **Pertumbuhan Ekonomi** | **-3,21** | **01-02** | | **02-03** | | **03-04** | | **04-05** | | **05-07** | | **05-07** | | **05-07** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten | -36,17% | -1,17% | 0 | -1,17% | 96,3 | -0,17% | 103,4 | 0,08% | 99,93 | 0,08% | 105,6 | 0,08% | 106,7 | 0,08% | 511,92 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| - | - | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait. | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| | **Sasaran 3.1.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah** | **Realisasi Investasi daerah sektor Unggulan** | **NA** | **10-20 Miliar** | | **20-30 Miliar** | | **30-40 Miliar** | | **40-60 Miliar** | | **60-80 Miliar** | | **60-80 Miliar** | | **60-80 Miliar** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor) | 20 | 20 | 92,24 | 20 | 98,39 | 23 | 105,64 | 26 | 102,1 | 29 | 107,89 | 32 | 109,02 | 32 | 523,04 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | 5,57% | 2,00% | 147,59 | 2,73% | 0 | 2,65% | 0 | 2,59% | 0 | 2,52% | 0 | 2,46% | 0 | 2,46% | 0 | |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar) | 91,67 | 91,67 | 61,47 | 94,17 | 69,65 | 96,67 | 74,79 | 99,17 | 72,28 | 101,67 | 76,38 | 104,17 | 77,18 | 104,17 | 370,28 | |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%) | 40,00% | 45,00% | 0 | 50,00% | 102,57 | 55,00% | 110,13 | 60,00% | 106,44 | 65,00% | 112,48 | 70,00% | 113,65 | 70,00% | 545,27 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah** | **Nilai Kontribusi sektor Pertanian Dalam PDRB** | **25,7** | **25,7-26,10** | | **26,10-26,5** | | **26,50-26,9** | | **26,90-27,30** | | **27-30-27,70** | | **27-30** | | **27-30** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan | NA | 5 | 0 | 7 | 204,8 | 9 | 219,89 | 11 | 212,53 | 13 | 224,58 | 15 | 226,92 | 15 | 1.088,72 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah |
| 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | a. Pertanian | NA | 62,5 | 0 | 65 | 0 | 67,5 | 0 | 70 | 0 | 72,5 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | |
| | | b. Perkebunan | NA | 55 | 0 | 57,5 | 0 | 60 | 0 | 62,5 | 0 | 65 | 0 | 67,5 | 0 | 67,5 | 0 | |
| | | c. Peternakan | NA | 45 | 0 | 47,5 | 0 | 50 | 0 | 52,5 | 0 | 55 | 0 | 57,5 | 0 | 57,5 | 0 | |
| | **Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah** | **Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB** | **11,23** | **11,23-11,27** | | **11,27-11,31** | | **11,31-11,35** | | **11,35-11,39** | | **11,39-11,43** | | **11,43-11,47** | | **11,43-11,47** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi perikananBudidaya (Ton) | 7.270,80 | 7.520,80 | 1.434,36 | 7.870,80 | 908,38 | 8.220,80 | 975,34 | 8.570,80 | 942,66 | 8.920,80 | 996,11 | 9.270,80 | 1.006,50 | 9.270,80 | 4.828,99 | Dinas Perikanan |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan | NA | 2,18 | 0 | 2,99 | 0 | 2,9 | 0 | 2,82 | 0 | 2,74 | 0 | 2,67 | 0 | 2,67 | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi | - | 5,00% | 286 | 10,00% | 208,22 | 15,00% | 223,57 | 20,00% | 216,08 | 25,00% | 228,33 | 30,00% | 230,71 | 30,00% | 1.106, 93 | |
| | **Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah** | **Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata** | **1,96** | **1,80-1,96** | | **1,80-1,96** | | **1,96-2,00** | | **2,00-2,15** | | **2,15-2,25** | | **2,25-2,35** | | **2,25-2,35** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) | -108,09 | -78,09 | 698,7 | -48,09 | 597,72 | -18,09 | 641,78 | 11,91 | 620,28 | 15,41 | 655,45 | 18,91 | 662,28 | 18,91 | 3.177, 52 | Dinas Pariwisata |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (%) | -39,2 | -9,2 | 0 | 0,8 | 0 | 1,8 | 0 | 3,3 | 0 | 4,8 | 0 | 6,3 | 0 | 6,3 | 0 | |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%) | 1,66 | 1,66 | 403,31 | 1,71 | 390,69 | 1,76 | 504,29 | 1,84 | 487,4 | 1,92 | 515,03 | 2 | 520,4 | 2 | 2.417, 82 | |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Tingkat hunian akomodasi | 63,7 | 63,7 | 617,13 | 63,95 | 676,7 | 64,2 | 641,78 | 64,45 | 620,28 | 64,7 | 655,45 | 64,7 | 662,28 | - | 3.256, 49 | |
| | | Lama Tinggal Wisatawan (Length of stay) | 2 | 02-03 | 0 | 02-03 | 0 | 02-03 | 0 | 03-04 | 0 | 03-04 | 0 | 03-04 | 0 | 03-04 | 0 | |
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Kebudayaan yang di Kembangkan | 50 | 51,14 | 157,1 | 52,38 | 152,55 | 53,62 | 163,8 | 54,86 | 158,31 | 56,1 | 167,29 | 57,34 | 169,03 | 57,34 | 810,98 | |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan | 16,67 | 16,67 | 0 | 16,67 | 0 | 33,33 | 0 | 33,33 | 0 | 50 | 0 | 66,67 | 0 | 66,67 | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan | 50 | 51,14 | 0 | 52,38 | 0 | 53,62 | 0 | 54,86 | 0 | 56,1 | 0 | 57,34 | 0 | 57,34 | 0 | |
| | **Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat** | **Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)** | **NA** | **75-76,5** | | **76,5-77,5** | | **77,5-78,50** | | **78,50-79,50** | | **79,5-80,5** | | **80,5-81,5** | | **80,5-81,5** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianyan Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan) | 39,96 | 41,96 | 0 | 43,96 | 0 | 45,96 | 0 | 47,96 | 0 | 49,96 | 0 | 51,96 | 0 | 51,96 | 0 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat | NA | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | NA | 5-3% | 63,68 | 5-3% | 68,27 | 5-3% | 73,3 | 5-3% | 70,84 | 5-3% | 74,86 | 5-3% | 75,64 | 5-3% | 362,91 | |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan | NA | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | |
| | **Misi 4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan 4.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing** | **Indeks Pemangunan Manusia (IPM)** | **64,59** | **64,74** | | **64,74-66,04** | | **66,04-66,89** | | **66,89-67,74** | | **67,74-68,59** | | **68,50-70** | | **68,50-70** | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **Sasaran 4.1.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat** | **Indeks Pendidikan** | **NA** | **0,2-0,25** | | **0,2-0,25** | | **0,25-0,30** | | **0,30-0,35** | | **0,35-0,40** | | **0,40-0,45** | | **0,40-0,45** | | |
| | | **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** | **8,39** | **8,39-8,59** | | **8,59-8,79** | | **8,79-8,99** | | **8,99-9,19** | | **9,19-9,39** | | **9,39-12,00** | | **9,39-12,00** | | |
| | | **Harapan Lama Sekolah (HLS)** | **12,28** | **12,28-12,48** | | **12,48-12,68** | | **12,68-12,88** | | **12,88-13,08** | | **13,08-13,28** | | **13,28-15,20** | | **13,28-15,20** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 99,6 | 99,65 | 74.358,33 | 99,7 | 66.671,26 | 99,75 | 71.596,60 | 99,77 | 69.187,44 | 99,82 | 73.110,53 | 99,87 | 73.872,82 | 99,87 | 354.438,64 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 99,37 | 99,41 | 0 | 99,45 | 0 | 99,49 | 0 | 99,53 | 0 | 99,57 | 0 | 99,61 | 0 | 99,61 | 0 | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 99,37 | 95,64 | 0 | 96,09 | 0 | 96,54 | 0 | 96,99 | 0 | 97,44 | 0 | 97,89 | 0 | 97,89 | 0 | |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs | NA | 0,65 | 0 | 0,68 | 0 | 0,7 | 0 | 0,73 | 0 | 0,75 | 0 | 0,78 | 0 | 0,78 | 0 | |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000) | 84,9 | 86,4 | 0 | 87,9 | 724,75 | 89,4 | 778,29 | 90,9 | 752,11 | 92,4 | 794,75 | 93,9 | 803,04 | 93,9 | 3.852,94 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.01.05 | PRORGAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10.000) | 81,25 | 82,75 | 0 | 83,2 | 0 | 83,65 | 0 | 84,1 | 0 | 84,55 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | 4,88 | 4,9 | 293,69 | 4,92 | 251,31 | 4,94 | 269,84 | 4,96 | 260,8 | 4,98 | 275,59 | 5 | 278,46 | 5 | 1.336,00 | Dinas Perpustakaan Daerah |
| | **Sasaran 4.1.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat** | **Indeks Kesehatan** | **NA** | **0,2-0,25** | | **0,2-0,25** | | **0,25-0,30** | | **0,30-0,35** | | **0,35-0,40** | | **0,40-0,45** | | **0,40-0,45** | | |
| | | **Usia Harapan Hidup (UHH)** | **66,67** | **65,9** | | **65,90-66,13** | | **66,13-66,63** | | **66,63-67,50** | | **67,50-68,00** | | **68,00-69,00** | | **68,00-69,00** | | |
| | | **Angka Stunting** | **22,68** | **22,68-20,18** | | **20,18-17,68** | | **17,68-15,18** | | **15,18-12,68** | | **12,68-10,18** | | **10,00-7,00** | | **10,00-7,00** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH | 7 | 6 | 144.820,26 | 5 | 47.928,59 | 4 | 51.457,52 | 3 | 49.742,90 | 2 | 52.563,44 | - | 53.111,49 | - | 254.803,94 | Dinas Kesehatan |
| | | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH | 147 | 137 | 0 | 127 | 0 | 117 | 0 | 109 | 0 | 99 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) | 13,00% | 15,00% | 686,47 | 17,00% | 231,97 | 19,00% | 249,04 | 21,00% | 240,75 | 23,00% | 254,4 | 25,00% | 257,05 | 25,00% | 1.233,20 | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar | 44,00% | 48,00% | 1.474,00 | 52,00% | 498,08 | 56,00% | 534,75 | 60,00% | 516,93 | 64,00% | 546,24 | 68,00% | 551,94 | 68,00% | 2.647,94 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Posyandu Aktif | 26,11% | 27,61% | 0 | 29,11% | 0 | 30,61% | 0 | 32,11% | 0 | 33,61% | 0 | 35,11% | 0 | 35,11% | 0 | |
| | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | 84,83 | 85,58 | 0 | 86,33 | 0 | 87,08 | 0 | 87,83 | 0 | 88,58 | 0 | 89,33 | 0 | 89,33 | 0 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase pemenuhan layanan pasien | 80,00% | 83,25% | 7.782,65 | 86,50% | 6.475,13 | 89,75% | 6.952,45 | 93,00% | 6.719,50 | 96,25% | 7.100,52 | 99,50% | 7.174,55 | 99,50% | 34.422,15 | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar | 33,3 | 36,8 | 15.565,30 | 40,3 | 9.913,43 | 43,8 | 10.644,20 | 47,3 | 10.287,56 | 50,8 | 10.870,89 | 54,3 | 10.984,24 | 54,3 | 52.700,31 | RSUD Ampana |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi | 80 | 84,5 | 15.565,30 | 87 | 9.712,70 | 89,5 | 10.428,67 | 92 | 10.079,26 | 95,5 | 10.650,77 | 100 | 10.761,82 | 100 | 51.633,23 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 100 | 7.782,65 | 100 | 6.475,13 | 100 | 6.952,45 | 100 | 6.719,50 | 100 | 7.100,52 | 100 | 7.174,55 | 100 | 34.422,15 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase pemenuhan layanan pasien | 80,00% | 82,50% | 1.336,57 | 85,00% | 1.144,66 | 87,50% | 1.229,04 | 90,00% | 1.187,86 | 92,50% | 1.255,22 | 95,00% | 1.268,30 | 95,00% | 6.085,08 | RSUD Wakai |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar | 20,8 | 21,62 | 2.673,13 | 22,44 | 2.289,32 | 23,26 | 2.458,08 | 24,08 | 2.375,72 | 24,9 | 2.510,43 | 25,72 | 2.536,61 | 25,72 | 12.170,17 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi | NA | 65,00% | 2.673,13 | 66,72% | 2.289,32 | 68,44% | 2.458,08 | 70,16% | 2.375,72 | 71,88% | 2.510,43 | 73,60% | 2.536,61 | 73,60% | 12.170,17 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | 100,00% | 100,00 % | 1.336,57 | 100,00 % | 1.144,66 | 100,00 % | 1.229,04 | 100,00 % | 1.187,86 | 100,00 % | 1.255,22 | 100,00 % | 1.268,30 | 100,00 % | 6.085,08 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase pemenuhan layanan pasien | 37,00% | 38,50% | 0 | 40,00% | 0 | 41,50% | 0 | 43,00% | 0 | 44,50% | 0 | 46,00% | 0 | 46,00% | 0 | RS Pratama Togean |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar | 7,6 | 8,1 | 0 | 8,6 | 0 | 9,1 | 0 | 9,6 | 0 | 10,1 | 0 | 10,6 | 0 | 10,6 | 0 | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi | 40 | 41,5 | 0 | 43 | 0 | 44,5 | 0 | 46 | 0 | 47,5 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | - | 50,00% | 0 | 52,50% | 0 | 55,00% | 0 | 57,50% | 0 | 60,00% | 0 | 62,50% | 0 | 62,50% | 0 | |
| | **Sasaran 4.1.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan** | **Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat Provinsi** | **0** | **0-4** | | **04-Aug** | | **08-Dec** | | **08-Dec** | | **Dec-15** | | **Dec-15** | | **Dec-15** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | - | 0,00% | 0 | 2,50% | 1.087,13 | 5,00% | 1.167,44 | 6,50% | 1.128,16 | 9,00% | 1.192,13 | 11,50% | 1.204,56 | 11,50% | 5.779,41 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 0,18% | 1,68% | 0 | 3,18% | 0 | 4,68% | 0 | 6,18% | 0 | 7,68% | 0 | 9,18% | 0 | 9,18% | 0 | |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Peningkatan Prestasi Olahraga | - | 05-Oct | 1.220,82 | 05-Oct | 1.116,86 | Oct-15 | 1.199,37 | 15-18 | 1.159,01 | 18-23 | 1.224,73 | 23-26 | 1.237,50 | 23-26 | 5.937,47 | |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | 0 | 78,00% | 0 | 79,50% | 0 | 81,00% | 0 | 82,50% | 0 | 82,50% | 0 | Badan Kesbangpol |
| | | Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | 0 | 78,00% | 0 | 79,50% | 0 | 81,00% | 0 | 82,50% | 0 | 82,50% | 0 | |
| | **Sasaran 4.1.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah** | **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** | **91,22** | **91,92** | | **92,62** | | **93,32** | | **94,02** | | **94,72** | | **94,22-96,70** | | **94,22-96,70** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indeks Pembangunan Gender | 91,22% | 91,72% | 0 | 92,22% | 0 | 92,72% | 0 | 93,22% | 0 | 93,72% | 0 | 94,22% | 0 | 94,22% | 0 | Dinas Pemberdayaan Pemermpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 3,47 | 3,22 | 193,9 | 3,07 | 189,88 | 2,87 | 203,88 | 2,67 | 197,04 | 2,47 | 208,22 | 2,27 | 210,39 | 2,27 | 1.009,41 | |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera | 0,77% | 1,62% | 0 | 2,47% | 0 | 3,32% | 0 | 4,17% | 0 | 5,02% | 0 | 5,87% | 0 | 5,87% | 0 | |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Jumlah Dokumen Data anak perempuan dan data terpilah gender yng tersedia | NA | 02-Apr | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak | 67,00% | 68,50% | 0 | 70,00% | 0 | 71,50% | 0 | 73,00% | 0 | 74,50% | 0 | 76,00% | 0 | 76,00% | 0 | |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 75,00% | 76,24% | 64,58 | 77,48% | 63,24 | 78,72% | 67,9 | 79,96% | 65,62 | 81,20% | 69,34 | 82,44% | 70,07 | 82,44% | 336,17 | |
| | **Misi 5 Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan 5.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi** | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** | **NA** | **C** | | **C** | | **C** | | **B** | | **B** | | **B** | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | **Sasaran 5.1.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik** | **Indek Kepuasan Pelayanan Publik** | **NA** | **75-80** | | **75-80** | | **75-80** | | **80-85** | | **80-85** | | **85-90** | | | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Perekaman KTP elektronik | 92,42% | 92,92% | 79,43 | 93,42% | 99,91 | 93,92% | 107,27 | 94,17% | 103,68 | 94,67% | 109,55 | 95,17% | 110,7 | 95,67% | 531,1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 48,53% | 50,28% | 0 | 52,03% | 0 | 53,78% | 0 | 54,53% | 0 | 56,28% | 0 | 58,03% | 0 | 58,03% | 0 | |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun | 99,01% | 99,16% | 741,56 | 99,31% | 932,78 | 99,46% | 1.001, 54 | 99,61% | 967,98 | 99,76% | 1.022, 87 | 99,91% | 1.033, 53 | 99,91% | 4.958, 70 | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan | NA | 85,00% | 0 | 86,50% | 0 | 88,00% | 0 | 89,50% | 0 | 91,00% | 0 | 92,50% | 0 | 92,50% | 0 | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | 0 | 78,00% | 0 | 79,50% | 0 | 81,00% | 0 | 82,50% | 0 | 82,50% | 0 | |
| | | Presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | NA | 87,00% | 0 | 88,50% | 0 | 90,00% | 0 | 91,50% | 0 | 93,00% | 0 | 94,50% | 0 | 94,50% | 0 | |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Presentase Pemanfaatan Data | 50,00% | 52,43% | 50,75 | 54,86% | 63,84 | 57,29% | 68,54 | 58,72% | 66,25 | 61,15% | 70 | 63,58% | 70,73 | 63,58% | 339,36 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%) | 100,00% | 100,00 % | - | 100,00 % | 98,39 | 100,00 % | 105,64 | 100,00 % | 102,1 | 100,00 % | 107,89 | 100,00 % | 109,02 | 100,00 % | 523,04 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | 25,00% | 27,50% | 331,48 | 30,00% | 295,59 | 32,50% | 317,38 | 35,00% | 306,75 | 37,50% | 324,14 | 40,00% | 327,52 | 40,00% | 1.571, 38 | |
| | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah | 53,66% | 58,66% | 0 | 63,66% | 0 | 68,66% | 0 | 73,66% | 0 | 78,66% | 0 | 83,66% | 0 | 83,66% | 0 | |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan | 25,00% | 27,50% | 243,5 | 30,00% | 1.097, 20 | 32,50% | 1.178, 08 | 35,00% | 1.138, 60 | 37,50% | 1.203, 17 | 40,00% | 1.215, 71 | 40,00% | 5.832, 75 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/ replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan | 0,00% | 5,00% | 0 | 7,44% | 0 | 9,88% | 0 | 12,32% | 0 | 14,76% | 0 | 17,20% | 0 | 17,20% | 0 | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah | NA | 80,00% | 64,35 | 82,50% | 0 | 85,00% | 0 | 87,50% | 0 | 90,00% | 0 | 92,50% | 0 | 73,18% | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB | NA | 75,00% | 1.139,00 | 76,50% | 1.143,39 | 78,00% | 1.227,68 | 79,50% | 1.186,54 | 81,00% | 1.253,82 | 82,50% | 1.266,90 | 82,50% | 6.078,33 | BKD |
| | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 44,00% | 47,54% | 0 | 51,08% | 0 | 54,62% | 0 | 58,16% | 0 | 61,70% | 0 | 65,24% | 0 | 65,24% | 0 | |
| | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 3,08 | 8,73 | 0 | 14,38 | 0 | 20,03 | 0 | 25,68 | 0 | 31,33 | 0 | 36,98 | 0 | 36,98 | 0 | |
| | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 3,01 | 3,76 | 0 | 4,51 | 0 | 5,26 | 0 | 6,01 | 0 | 6,76 | 0 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 136,45 | 75,00% | 120,48 | 77,00% | 129,36 | 78,00% | 125,02 | 80,00% | 132,11 | 82,00% | 133,49 | 82,00% | 640,47 | Kecamatan Tojo |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 25 | 100,00 % | 22,07 | 100,00 % | 23,7 | 100,00 % | 22,91 | 100,00 % | 24,21 | 100,00 % | 24,46 | 100,00 % | 117,34 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 116,45 | 75,00% | 99,78 | 77,00% | 107,13 | 78,00% | 103,54 | 80,00% | 109,41 | 82,00% | 110,55 | 82,00% | 530,42 | Kecamatan Tojo Barat |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 25 | 100,00 % | 21,42 | 100,00 % | 23 | 100,00 % | 22,23 | 100,00 % | 23,49 | 100,00 % | 23,73 | 100,00 % | 113,87 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 122,45 | 75,00% | 84,36 | 77,00% | 90,58 | 78,00% | 87,54 | 80,00% | 92,5 | 82,00% | 93,47 | 82,00% | 448,45 | Kecamatan Ulubongka |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 24,11 | 100,00 % | 25,89 | 100,00 % | 25,02 | 100,00 % | 26,44 | 100,00 % | 26,72 | 100,00 % | 128,18 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | 68,73% | 82,50% | 252,45 | 85,00% | 403,01 | 87,50% | 432,72 | 90,00% | 418,22 | 92,50% | 441,93 | 95,00% | 446,54 | 95,00% | 2.142, 42 | Kecamatan Ampana Kota |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 55 | 100,00 % | 87,8 | 100,00 % | 94,27 | 100,00 % | 91,12 | 100,00 % | 96,28 | 100,00 % | 97,29 | 100,00 % | 466,76 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 122,45 | 75,00% | 84,82 | 77,00% | 91,08 | 78,00% | 88,03 | 80,00% | 93,02 | 82,00% | 93,99 | 82,00% | 450,93 | Kecamatan Ampana Tete |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 24,25 | 100,00 % | 26,03 | 100,00 % | 25,16 | 100,00 % | 26,59 | 100,00 % | 26,86 | 100,00 % | 128,89 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | 82,16 | 84,16 | 95 | 86,16 | 40,17 | 88,16 | 43,13 | 91 | 41,68 | 93 | 44,04 | 95 | 44,5 | 95 | 213,52 | Kecamatan Ratolindo |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 55 | 100,00 % | 23,25 | 100,00 % | 24,97 | 100,00 % | 24,13 | 100,00 % | 25,5 | 100,00 % | 25,77 | 100,00 % | 123,62 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 0,65 | 122,45 | 0,68 | 120,63 | 0,7 | 129,52 | 0,73 | 125,18 | 0,75 | 132,28 | 0,78 | 133,66 | 0,78 | 641,28 | Kecamatan Una-Una |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 | 1 | 35 | 1 | 34,48 | 1 | 37,02 | 1 | 35,78 | 1 | 37,81 | 1 | 38,2 | 1 | 183,3 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 0,65 | 122,45 | 0,68 | 91,76 | 0,7 | 98,52 | 0,73 | 95,22 | 0,75 | 100,62 | 0,78 | 101,67 | 0,78 | 487,79 | Kecamatan Togean |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 26,23 | 100,00 % | 28,16 | 100,00 % | 27,22 | 100,00 % | 28,76 | 100,00 % | 29,06 | 100,00 % | 139,43 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 0,65 | 102,45 | 0,68 | 84,33 | 0,7 | 90,55 | 0,73 | 87,51 | 0,75 | 92,48 | 0,78 | 93,44 | 0,78 | 448,3 | Kecamatan Walea Kepulauan |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 28,81 | 100,00 % | 30,93 | 100,00 % | 29,9 | 100,00 % | 31,59 | 100,00 % | 31,92 | 100,00 % | 153,15 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 0,67 | 102,45 | 0,7 | 65,99 | 0,72 | 70,86 | 0,75 | 68,48 | 0,77 | 72,37 | 0,8 | 73,12 | 0,8 | 350,83 | Kecamatan Walea Besar |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 22,55 | 100,00 % | 24,21 | 100,00 % | 23,4 | 100,00 % | 24,72 | 100,00 % | 24,98 | 100,00 % | 119,85 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 0,65 | 102,45 | 0,68 | 80,08 | 0,7 | 85,98 | 0,73 | 83,1 | 0,75 | 87,81 | 0,78 | 88,73 | 0,78 | 425,7 | Kecamatan Talatako |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 27,36 | 100,00 % | 29,37 | 100,00 % | 28,39 | 100,00 % | 30 | 100,00 % | 30,31 | 100,00 % | 145,43 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 0,65 | 102,45 | 0,68 | 89,63 | 0,7 | 96,24 | 0,73 | 93,01 | 0,75 | 98,29 | 0,78 | 99,31 | 0,78 | 476,49 | Kecamatan Batudaka |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 30,62 | 100,00 % | 32,88 | 100,00 % | 31,78 | 100,00 % | 33,58 | 100,00 % | 33,93 | 100,00 % | 162,78 | |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prsentase penyelesaian pelanggaran K3 | 100,00% | 100,00 % | 3.851,88 | 100,00 % | 3.810,76 | 100,00 % | 4.091,67 | 100,00 % | 3.954,58 | 100,00 % | 4.178,81 | 100,00 % | 4.222,38 | 100,00 % | 20.258,19 | Satpol PP dan Damkar |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 15,91% | 22,16% | - | 28,41% | - | 34,66% | - | 40,91% | - | 47,16% | - | 53,41% | - | 53,41% | - | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kepuasan Masyarakat | 0,00% | 65 | 0 | 67,5 | 776,98 | 70 | 827,56 | 72,5 | 799,83 | 75 | 845,19 | 77,5 | 854 | 77,5 | 4.103,56 | RS Pratama Togean |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 67,46 | 100,00 % | 72,43 | 100,00 % | 70 | 100,00 % | 73,97 | 100,00 % | 74,74 | 100,00 % | 358,6 | Kec. Tojo |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 65,46 | 100,00 % | 70,29 | 100,00 % | 67,93 | 100,00 % | 71,78 | 100,00 % | 72,53 | 100,00 % | 347,99 | Kec. Tojo Barat |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 52,63 | 100,00 % | 56,51 | 100,00 % | 54,62 | 100,00 % | 57,72 | 100,00 % | 58,32 | 100,00 % | 279,8 | Kec. Ulubongka |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 121,96 | 100,00 % | 130,95 | 100,00 % | 126,57 | 100,00 % | 133,74 | 100,00 % | 135,14 | 100,00 % | 648,37 | Kec. Ampana Kota |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 52,92 | 100,00 % | 56,83 | 100,00 % | 54,92 | 100,00 % | 58,04 | 100,00 % | 58,64 | 100,00 % | 281,35 | Kec. Ampana Tete |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 32,3 | 100,00 % | 34,68 | 100,00 % | 33,52 | 100,00 % | 35,42 | 100,00 % | 35,79 | 100,00 % | 171,72 | Kec. Ratolindo |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 75,26 | 100,00 % | 80,81 | 100,00 % | 78,11 | 100,00 % | 82,53 | 100,00 % | 83,39 | 100,00 % | 400,11 | Kec. Una-Una |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 57,25 | 100,00 % | 61,47 | 100,00 % | 59,41 | 100,00 % | 62,78 | 100,00 % | 63,43 | 100,00 % | 304,35 | Kec. Togean |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 62,89 | 100,00 % | 67,52 | 100,00 % | 65,26 | 100,00 % | 68,96 | 100,00 % | 69,68 | 100,00 % | 334,31 | Kec. Wakep |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 49,21 | 100,00 % | 52,84 | 100,00 % | 51,07 | 100,00 % | 53,97 | 100,00 % | 54,53 | 100,00 % | 261,62 | Kec. Wabes |
| 7.01.05 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 35 | 100,00 % | 27,36 | 100,00 % | 29,37 | 100,00 % | 28,39 | 100,00 % | 30 | 100,00 % | 30,31 | 100,00 % | 145,43 | Kec. Talatako |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 76,4 | 100,00 % | 66,84 | 100,00 % | 71,77 | 100,00 % | 69,36 | 100,00 % | 73,3 | 100,00 % | 74,06 | 100,00 % | 355,33 | Kec. Batudaka |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik. | 100,00% | 100,00 % | 108,5 | 100,00 % | 143,11 | 100,00 % | 153,66 | 100,00 % | 148,51 | 100,00 % | 156,93 | 100,00 % | 158,57 | 100,00 % | 760,79 | Kesbangpol |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 12 kecamatan. | NA | 10,00% | 0 | 12,50% | 0 | 15,00% | 0 | 17,50% | 0 | 20,00% | 0 | 22,50% | 0 | 22,50% | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani | 100,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| | **Sasaran 5.1.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah** | **Nilai SAKIP Daerah** | **CC** | **CC** | | **B** | | **B** | | **BB** | | **BB** | | **BB-A** | | **BB-A** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 3.642,00 | B | 3.153,31 | B | 3.386,26 | BB | 3.272,32 | BB | 3.457,86 | BB-A | 3.493,92 | BB-A | 16.763,67 | Dikpora |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 20.502,96 | B | 11.738,42 | B | 12.482,40 | BB | 12.066,47 | BB | 12.750,67 | BB-A | 12.883,62 | BB-A | 61.921,58 | Dinkes |
| 1.02.02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 5.346,26 | B | 4.578,65 | B | 4.916,16 | BB | 4.751,45 | BB | 5.020,86 | BB-A | 5.073,21 | BB-A | 24.340,33 | RSUS Ampana |
| 1.02.03 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 5.346,26 | B | 4.578,65 | B | 4.916,16 | BB | 4.751,45 | BB | 5.020,86 | BB-A | 5.073,21 | BB-A | 24.340,33 | RSUD Wakai |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 1.02.04 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 5.346,26 | B | 4.578,65 | B | 4.916,16 | BB | 4.751,45 | BB | 5.020,86 | BB-A | 5.073,21 | BB-A | 24.340,33 | RSU Pratama Togean |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 4.131,41 | B | 3.370,08 | B | 3.618,51 | BB | 3.497,27 | BB | 3.695,57 | BB-A | 3.734,11 | BB-A | 17.915,55 | Dinas PUPR |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 9.577,69 | B | 1.843,44 | B | 1.979,33 | BB | 1.913,02 | BB | 2.021,49 | BB-A | 2.042,57 | BB-A | 9.799,85 | Dinas Perumahan dan LH |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.897,12 | B | 1.876,86 | B | 2.015,22 | BB | 1.947,70 | BB | 2.058,14 | BB-A | 2.079,59 | BB-A | 9.977,51 | Satpol PP dan Damkar |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 741,53 | B | 644,4 | B | 691,9 | BB | 668,72 | BB | 706,64 | BB-A | 714 | BB-A | 3.425,66 | BPBD |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.124,13 | B | 762,15 | B | 818,33 | BB | 790,91 | BB | 835,76 | BB-A | 844,47 | BB-A | 4.051,62 | Dinsos |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 918,2 | B | 860,77 | B | 924,23 | BB | 893,26 | BB | 943,91 | BB-A | 953,75 | BB-A | 4.575,92 | Disanakertrans |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.060,60 | B | 1.038,62 | B | 1.115,18 | BB | 1.077,81 | BB | 1.138,93 | BB-A | 1.150,80 | BB-A | 5.521,35 | Dukcapil |
| 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.404,17 | B | 1.766,25 | B | 1.896,45 | BB | 1.832,91 | BB | 1.936,84 | BB-A | 1.957,03 | BB-A | 9.389,47 | DP3A dan KB |
| 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 755,8 | B | 514,5 | B | 552,43 | BB | 533,92 | BB | 564,19 | BB-A | 570,07 | BB-A | 2.735,10 | DPMD |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 3.030,53 | B | 3.030,53 | B | 1.749,39 | BB | 1.690,78 | BB | 1.786,65 | BB-A | 1.805,28 | BB-A | 8.661,38 | Dishub |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 2.713,51 | B | 801,61 | B | 860,7 | BB | 831,86 | BB | 879,03 | BB-A | 888,2 | BB-A | 4.261,41 | Diskominfo |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 2.439,01 | B | 865,64 | B | 929,45 | BB | 898,31 | BB | 949,24 | BB-A | 959,14 | BB-A | 4.601,78 | Disperindag |
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 783,98 | B | 860,9 | B | 924,36 | BB | 893,39 | BB | 944,05 | BB-A | 953,89 | BB-A | 4.576,60 | DPM dan PTSP |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 808,28 | B | 691,65 | B | 742,64 | BB | 717,75 | BB | 758,45 | BB-A | 766,36 | BB-A | 3.676,86 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.300,10 | B | 946,54 | B | 1.016,32 | BB | 982,27 | BB | 1.037,96 | BB-A | 1.048,79 | BB-A | 5.031,88 | Dinas Perikanan |
| 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.607,77 | B | 1.557,49 | B | 1.672,30 | BB | 1.616,27 | BB | 1.707,92 | BB-A | 1.725,72 | BB-A | 8.279,70 | Diasparbud |
| 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 4.881,10 | B | 3.153,31 | B | 4.795,50 | BB | 4.634,83 | BB | 4.897,63 | BB-A | 4.948,70 | BB-A | 22.429,96 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 15.833,25 | B | 20.206,48 | B | 21.696,01 | BB | 20.969,08 | BB | 22.158,07 | BB-A | 22.389,10 | BB-A | 107.418,74 | Setda |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 100,00% | 100,00 % | 1.612,45 | 100,00 % | 3.325,12 | 100,00 % | 3.570,23 | 100,00 % | 3.450,61 | 100,00 % | 3.646,26 | 100,00 % | 3.684,28 | 100,00 % | 17.676,50 | Setda |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100,00% | 100,00 % | 894,62 | 100,00 % | 2.046,23 | 100,00 % | 2.197,06 | 100,00 % | 2.123,45 | 100,00 % | 2.243,86 | 100,00 % | 2.267,25 | 100,00 % | 10.877,85 | Setda |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 9.365,63 | B | 10.428,21 | B | 11.196,92 | BB | 10.821,77 | BB | 11.435,39 | BB-A | 11.554,62 | BB-A | 55.436,90 | Sekwan |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.760,99 | B | 0 | B | 0 | BB | 0 | BB | 0 | BB-A | 0 | BB-A | 0 | Bappelitbangda |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.680,10 | B | 1.006,16 | B | 1.080,33 | BB | 1.044,13 | BB | 1.103,34 | BB-A | 1.114,84 | BB-A | 5.348,79 | Bapenda |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 5.124,14 | B | 3.276,15 | B | 3.517,65 | BB | 3.399,79 | BB | 3.592,57 | BB-A | 3.630,02 | BB-A | 17.416,18 | BPKAD |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.133,08 | B | 1.137,45 | B | 1.221,30 | BB | 1.180,38 | BB | 1.247,31 | BB-A | 1.260,32 | BB-A | 6.046,77 | BKD dan PSDM |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 728,91 | B | 496,96 | B | 533,6 | BB | 515,72 | BB | 544,96 | BB-A | 550,64 | BB-A | 2.641,89 | Insektorat Daerah |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 410,26 | C | 362,24 | CC | 388,94 | CC | 375,91 | CC | 397,22 | B | 401,36 | B | 1.925,67 | Kec. Tojo |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 412,26 | C | 353,23 | CC | 379,27 | CC | 366,56 | CC | 387,35 | B | 391,39 | B | 1.877,81 | Kec. Tojo Barat |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 412,26 | C | 284,01 | CC | 304,95 | CC | 294,73 | CC | 311,44 | B | 314,69 | B | 1.509,81 | Kec. Ulubongka |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 578,26 | CC | 923,13 | CC | 991,18 | B | 957,97 | B | 1.012,29 | BB | 1.022,84 | BB | 4.907,40 | Kec. Ampana Kota |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | CC | 416,26 | CC | 288,35 | CC | 309,61 | B | 299,24 | B | 316,2 | B | 319,5 | B | 1.532,91 | Kec. Ampana Tete |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 608,26 | C | 257,17 | CC | 276,13 | CC | 266,87 | B | 282,01 | BB | 284,95 | BB | 1.367,12 | Kec. Ratolindo |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 411,26 | C | 405,15 | C | 435,01 | CC | 420,44 | CC | 444,28 | CC | 448,91 | CC | 2.153,79 | Kec. Una-Una |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 401,26 | C | 300,69 | C | 322,85 | CC | 312,03 | CC | 329,73 | CC | 333,16 | CC | 1.598,46 | Kec. Togean |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 401,26 | C | 330,29 | C | 354,64 | C | 342,76 | CC | 362,19 | CC | 365,97 | CC | 1.755,85 | Kec. Wakep |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 401,26 | C | 258,47 | C | 277,53 | CC | 268,23 | CC | 283,44 | CC | 286,39 | CC | 1.374,06 | Kec. Wabes |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 366,26 | C | 286,28 | C | 307,39 | CC | 297,09 | CC | 313,93 | CC | 317,2 | CC | 1.521,89 | Kec. Talatako |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 386,26 | C | 337,93 | C | 362,84 | CC | 350,69 | CC | 370,57 | CC | 374,43 | CC | 1.796,46 | Kec. Batudaka |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 466,8 | B | 615,72 | B | 661,1 | BB | 638,95 | BB | 675,18 | BB-A | 682,22 | BB-A | 3.273,18 | Kesbangpol |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | 75,00% | 77,85% | 1.936,59 | 82,85% | 2.006,35 | 87,85% | 2.154,25 | 92,85% | 2.082,07 | 97,85% | 2.200,13 | 100,00 % | 2.223,07 | 100,00 % | 10.665,88 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |
| | | Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |
| | | Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |
| | | Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 75,00% | 77,00% | 0 | 79,00% | 0 | 81,00% | 0 | 83,00% | 0 | 85,00% | 0 | 87,00% | 0 | 87,00% | 0 | |
| | | Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan | 70,00% | 72,00% | 0 | 74,00% | 0 | 76,00% | 0 | 78,00% | 0 | 80,00% | 0 | 82,00% | 0 | 82,00% | 0 | |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan | 100,00% | 100,00 % | 790 | 100,00 % | 818,46 | 100,00 % | 878,79 | 100,00 % | 849,35 | 100,00 % | 897,51 | 100,00 % | 906,86 | 100,00 % | 4.350, 96 | |
| 4.02.02 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Cakupan pelayanan kesejahteraan dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan | 100,00% | 100,00 % | 957,5 | 100,00 % | 1.066, 13 | 100,00 % | 1.144, 72 | 100,00 % | 1.106, 37 | 100,00 % | 1.169, 10 | 100,00 % | 1.181, 29 | 100,00 % | 5.667, 62 | Sekretariat DPRD |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan | 100,00% | 100,00 % | 5.016,44 | 100,00 % | 5.585,58 | 100,00 % | 5.997,32 | 100,00 % | 5.796,38 | 100,00 % | 6.125,05 | 100,00 % | 6.188,91 | 100,00 % | 29.693,25 | Sekretariat DPRD |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM | 100,00% | 100,00 % | 64,4 | 100,00 % | 64,65 | 100,00 % | 69,41 | 100,00 % | 67,09 | 100,00 % | 70,89 | 100,00 % | 71,63 | 100,00 % | 343,67 | BKD |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM | 62,34% | 64,79% | 0 | 67,24% | 0 | 69,69% | 0 | 72,14% | 0 | 74,59% | 0 | 77,04% | 0 | 77,04% | 0 | |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM | NA | 36,00% | 0 | 38,50% | 0 | 41,00% | 0 | 43,50% | 0 | 46,00% | 0 | 48,50% | 0 | 48,50% | 0 | Dinas Perpustakaan Daerah |
| | | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Ada | Ada | 56,24 | Ada | 48,13 | Ada | 51,67 | Ada | 49,94 | Ada | 52,77 | Ada | 53,32 | Ada | 255,84 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbagsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemeintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Ada | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 43,90% | 48,78% | 64,35 | 53,66% | 0 | 58,54% | 0 | 63,42% | 0 | 68,30% | 0 | 73,18% | 0 | 73,18% | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | **Sasaran 5.1.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah** | **Opini hasil pemeriksaan oleh BPK** | **WTP** | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD | 15,00% | 15,00% | 1.847,35 | 14,88% | 1.106,32 | 15,38% | 1.187,87 | 15,53% | 1.148,07 | 16,03% | 1.213,17 | 16,53% | 1.225,82 | 16,53% | 5.881,23 | Bapenda |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase realisasi penerimaan pajak daerah | 115,00% | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 100 | 100 | 2.046,60 | 100 | 1.308,50 | 100 | 1.404,96 | 100 | 1.357,89 | 100 | 1.434,88 | 100 | 1.449,84 | 100 | 6.956,07 | BKAD |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | 16,78 | 16,76 | 0 | 16,76 | 0 | 16,74 | 0 | 16,74 | 0 | 16,72 | 0 | 16,7 | 0 | 16,68 | 0 | |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) | 59,17 | 58,92 | 0 | 58,67 | 0 | 58,42 | 0 | 58,17 | 0 | 57,92 | 0 | 57,67 | 0 | 57,67 | 0 | |
| | | Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik | NA | 85,00% | 1.060,07 | 87,50% | 677,76 | 90,00% | 727,72 | 92,50% | 703,34 | 95,00% | 743,22 | 97,50% | 750,97 | 97,50% | 3.603,01 | |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase OPD yang memenuhi maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | 1.230,00 | Level 3 | 838,6 | Level 3 | 900,42 | Level 3 | 870,25 | Level 4 | 919,6 | Level 4 | 929,19 | Level 4 | 4.458,06 | Insektorat |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase OPD yang tertib administrasi Keuangan | 100,00% | 100,00 % | 73,5 | 100,00 % | 50,11 | 100,00 % | 53,81 | 100,00 % | 52 | 100,00 % | 54,95 | 100,00 % | 55,52 | 100,00 % | 266,4 | |
| | **Sasaran 5.1.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa** | **Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una-Una** | **0,6064** | **0,6154** | | **0,6244** | | **0,6334** | | **0,6424** | | **0,6514** | | **0,650-0,7100** | | **0,650-0,7100** | | |
| | | **Persentase Status Desa Maju** | **6,72** | **8,21** | | **11,19** | | **14,93** | | **17,91** | | **22,39** | | **24,63** | | **24,63** | | |
| | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%) | 6,72 | 22,22 | 0 | 36,36 | 0 | 33,33 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang tertib administrasi (%) | 90,00% | 91,50% | 138,35 | 93,00% | 168,49 | 94,50% | 180,91 | 96,00% | 174,85 | 97,50% | 184,76 | 97,50% | 186,69 | 97,50% | 895,7 | |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%) | 100,00% | 100,00 % | 247,59 | 100,00 % | 94,17 | 100,00 % | 101,11 | 100,00 % | 97,72 | 100,00 % | 103,26 | 100,00 % | 104,34 | 100,00 % | 500,61 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6549 | 0,6619 | 10 | 0,6689 | 8,83 | 0,6759 | 9,48 | 0,6829 | 9,16 | 0,6899 | 9,68 | 0,6969 | 9,78 | 0,6969 | 46,94 | Kecamataan Tojo |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
| | | Status Desa Berkembang | 10 | 11 | - | 10 | - | 10 | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 5 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6644 | 0,6714 | 20 | 0,6784 | 17,14 | 0,6854 | 18,4 | 0,6924 | 17,78 | 0,6994 | 18,79 | 0,7064 | 18,99 | 0,7064 | 91,1 | Kecamataan Tojo Barat |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | |
| | | Status Desa | 11 | 11 | - | 10 | - | 9 | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | Berkembang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Status Desa Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5638 | 0,5658 | 20 | 0,5728 | 13,78 | 0,5798 | 14,79 | 0,5868 | 14,3 | 0,5938 | 15,11 | 0,6008 | 15,27 | 0,6008 | 73,25 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Kecamatan Ulubongka |
| | | Status Desa Berkembang | 5 | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 11 | 10 | - | 9 | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6873 | 0,6913 | 90 | 0,6953 | 143,68 | 0,6993 | 154,27 | 0,7033 | 149,1 | 0,7073 | 157,55 | 0,7113 | 159,19 | 0,7113 | 763,79 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | Kecamatan Ampana Kota |
| | | Status Desa Berkembang | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | - | -1 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6355 | 0,6435 | 20 | 0,6475 | 13,85 | 0,6555 | 14,88 | 0,6635 | 14,38 | 0,6715 | 15,19 | 0,6795 | 15,35 | 0,6795 | 73,65 | Kecamatan Ampana Tete |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | |
| | | Status Desa Berkembang | 16 | 16 | - | 16 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 16 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,7008 | 0,7088 | 2.590,00 | 0,7168 | 1.095,03 | 0,7248 | 1.175,75 | 0,7328 | 1.136,36 | 0,7408 | 1.200,79 | 0,7488 | 1.213,31 | 0,7488 | 5.821,26 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | Kecamatan Ratolindo |
| | | Status Desa Berkembang | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6149 | 0,6219 | 0 | 0,6289 | 0 | 0,6359 | 0 | 0,6429 | 0 | 0,6499 | 0 | 0,6569 | 0 | 0,6569 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | 20 | 2 | 19,7 | 3 | 21,16 | 3 | 20,45 | 4 | 21,61 | 4 | 21,83 | 4 | 104,74 | Kecamatan Una-Una |
| | | Status Desa Berkembang | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 5 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5603 | 0,5683 | 20 | 0,5763 | 14,99 | 0,5843 | 16,09 | 0,5923 | 15,55 | 0,6003 | 16,43 | 0,6083 | 16,61 | 0,6083 | 79,67 | Kecamatan Togean |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | | Status Desa Berkembang | 3 | 4 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 11 | - | 13 | - | 13 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 13 | 12 | - | 11 | - | 9 | - | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5532 | 0,5612 | 20 | 0,5692 | 16,46 | 0,5772 | 17,68 | 0,5852 | 17,08 | 0,5932 | 18,05 | 0,6012 | 18,24 | 0,6012 | 87,52 | Kecamatan Walea Kepulauan |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | | Status Desa Berkembang | 2 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5706 | 0,5786 | 20 | 0,5866 | 12,88 | 0,5946 | 13,83 | 0,6026 | 13,37 | 0,6026 | 14,13 | 0,6026 | 14,27 | 0,6026 | 68,49 | Kecamatan Walea Besar |
| 7.01.06 | PROGRAM | Status Desa Maju | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Target Capaian | | | | | | | | | | | | Opd Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 5 | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5754 | 0,5762 | 20 | 0,5842 | 15,63 | 0,5922 | 16,79 | 0,6002 | 16,22 | 0,6082 | 17,14 | 0,6162 | 17,32 | 0,6162 | 83,1 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Kecamatan Talatako |
| | | Status Desa Berkembang | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5567 | 0,5647 | 20 | 0,5727 | 17,5 | 0,5807 | 18,79 | 0,5887 | 18,16 | 0,5967 | 19,19 | 0,6047 | 19,39 | 0,6047 | 93,02 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | Kecamatan Batudaka |
| | | Status Desa Berkembang | 2 | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | |
| | | Status Desa Tertinggal | 7 | 7 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |





# BAB 7

# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pembahasan pada bab ini diuraikan program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada satu urusan yang diampu, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**. Program tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan tidak hanya didukung pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2021 sebesar Rp438.948.298.318,00, diproyeksikan hingga Tahun 2026 mencapai Rp406.665.844.182,26. Nilai kapasitas riil fiskal diperoleh dari besarnya total pendapatan dikurangi belanja rutin, wajib, dan mengikat setiap tahun. Untuk itu, kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil fiskal, menjadi bagian penting untuk diperhatikan dan dicermati terkait dengan penguatan kapasitas riil fiskal *(fiscal real capacity)*.

Visi yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una adalah Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, Dan Sejahtera (TAMARA), yang muat ke dalam 5 (lima) misi. Dalam mencapai visi misi tersebut ditetapkan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan periode Tahun 2021-2026, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati. Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una ke depan juga memperhatikan perhitungan kapasitas riil fiskal, sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 di bawah. Hal ini dimaksudkan untuk penentuan target dan anggaran ke depan akan dapat diukur secara proprosional dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil hasil verifikasi dan validasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Penyajian secara detail program-program RPJMD yang selaras dengan program perangkat daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.2 di bawah ini. Penyusunan program perangkat daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Mendayagunakan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Mampu mengatasi permasalahan pokok dan isu-isu strategis daerah;
4. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pada setiap urusan;
5. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Gambaran Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan program Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung program disajikan pada tabel 7.1 pada halaman 4 dan 7.2 pada halaman 5 berikut ini:

**Tabel 7.1**
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**
**Tahun 2021-2026 Kabupaten Tojo Una-Una**

| Kode | Kapasitas Rill/Belanja | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| | **KAPASITAS RIIL KEUANGAN** | **438.948.298.318,00** | **367.021.668.176,70** | **394.076.741.482,47** | **380.873.109.049,06** | **402.469.476.615,66** | **406.665.844.182,26** |
| **5** | **BELANJA** | | | | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **685.093.682.874,00** | **663.390.151.893,85** | **682.391.705.500,17** | **688.469.841.875,46** | **689.569.686.124,99** | **691.397.596.912,60** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 384.906.743.916,00 | 391.477.505.222,15 | 391.613.822.641,17 | 392.788.664.109,10 | 393.963.505.577,02 | 395.138.347.044,94 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 258.712.695.913,00 | 245.556.753.176,70 | 250.646.882.858,99 | 243.596.507.266,99 | 255.475.180.547,97 | 256.128.249.867,66 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 300.000.000,00 | 525.000.000,00 | 531.000.000,00 | 531.000.000,00 | 531.000.000,00 | 531.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 24.823.435.995,00 | 25.523.643.495,00 | 24.600.000.000,00 | 42.000.000.000,00 | 24.600.000.000,00 | 24.600.000.000,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 16.350.807.050,00 | 307.250.000,00 | 15.000.000.000,00 | 9.553.670.499,38 | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **158.861.248.089,00** | **120.428.365.000,00** | **127.700.558.623,47** | **126.925.427.415,48** | **131.128.588.333,26** | **134.603.682.712,96** |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **2.250.000.000,00** | **34.500.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | **5.000.000.000,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 2.250.000.000,00 | 34.500.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **184.489.601.000,00** | **184.474.601.000,00** | **185.412.226.799,93** | **186.257.392.947,56** | **187.102.559.095,18** | **187.947.725.242,81** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.422.000.000,00 | 1.422.000.000,00 | 1.444.287.794,93 | 1.553.582.186,54 | 1.662.876.578,14 | 1.772.170.969,75 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 183.067.601.000,00 | 183.052.601.000,00 | 183.967.939.005,00 | 184.703.810.761,02 | 185.439.682.517,04 | 186.175.554.273,06 |

Sumber: Hasil Analisis dan FGD 2021

# Tabel 7.2
# Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
# Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01** | **Urusan Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 3.642,00 | B | 3.153,31 | B | 3.386,26 | BB | 3.272,32 | BB | 3.457,86 | BB-A | 3.493,92 | BB-A | 16.763,67 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 99,6 | 99,65 | 74.358,33 | 99,7 | 66.671,26 | 99,75 | 71.596,60 | 99,77 | 69.187,44 | 99,82 | 73.110,53 | 99,87 | 73.872,82 | 99,87 | 354.438,64 | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 99,37 | 99,41 | | 99,45 | | 99,49 | | 99,53 | | 99,57 | | 99,61 | | 99,61 | | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 99,37 | 95,64 | | 96,09 | | 96,54 | | 96,99 | | 97,44 | | 97,89 | | 97,89 | | |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs | NA | 0,65 | 0 | 0,68 | 0 | 0,7 | 0 | 0,73 | 0 | 0,75 | 0 | 0,78 | 0 | 0,78 | 0 | |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000) | 84,9 | 86,4 | 0 | 100% | 724,75 | 100% | 778,29 | 100% | 752,11 | 100% | 794,75 | 100% | 803,04 | 93,9 | 3.852,94 | |
| 1.01.05 | PRORGAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10.000) | 81,25 | 82,75 | 0 | 83,2 | 0 | 83,65 | 0 | 84,1 | 0 | 84,55 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | |
| **1.02** | **Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 20.502,96 | B | 11.738,42 | B | 12.482,40 | BB | 12.066,47 | BB | 12.750,67 | BB-A | 12.883,62 | BB-A | 61.921,58 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH | 7 | 6 | 144.820,26 | 41% | 47.928,59 | 50% | 51.457,52 | 58% | 49.742,90 | 66% | 52.563,44 | 75% | 53.111,49 | - | 254.803,94 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH | 147 | 137 | | 127 | | 117 | | 109 | | 99 | | 89 | | 89 | | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) | 13,00% | 15,00% | 686,47 | 25% | 231,97 | 31,30% | 249,04 | 37,50% | 240,75 | 43,80% | 254,4 | 50% | 257,05 | 25,00% | 1.233,20 | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar | 44,00% | 48,00% | 1.474,00 | 40% | 498,08 | 45% | 534,75 | 50% | 516,93 | 55% | 546,24 | 60% | 551,94 | 68,00% | 2.647,94 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Posyandu Aktif | 26,11% | 27,61% | 0 | 60,00% | 0 | 80% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 35,11% | 0 | |
| | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | 84,83 | 85,58 | - | 86,33 | - | 87,08 | - | 87,83 | - | 88,58 | - | 89,33 | - | 89,33 | - | |
| | **Rumah Sakit Umum Daerah Ampana** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 31.130,60 | B | 31.130,60 | B | 33.425,40 | BB | 32.305,47 | BB | 34.137,27 | BB | 34.493,20 | BB-A | 165.491,93 | RSUD Ampana |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase pemenuhan layanan pasien | 80,00% | 83,25% | 7.782,65 | 86,50% | 6.475,13 | 89,75% | 6.952,45 | 93,00% | 6.719,50 | 96,25% | 7.100,52 | 99,50% | 7.174,55 | 99,50% | 34.422,15 | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar | 33,3 | 36,8 | 15.565,30 | 40,3 | 9.913,43 | 43,8 | 10.644,20 | 47,3 | 10.287,56 | 50,8 | 10.870,89 | 54,3 | 10.984,24 | 54,3 | 52.700,31 | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi | 80 | 84,5 | 15.565,30 | 87 | 9.712,70 | 89,5 | 10.428,67 | 92 | 10.079,26 | 95,5 | 10.650,77 | 100 | 10.761,82 | 100 | 51.633,23 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 100 | 7.782,65 | 100 | 6.475,13 | 100 | 6.952,45 | 100 | 6.719,50 | 100 | 7.100,52 | 100 | 7.174,55 | 100 | 34.422,15 | |
| | **Rumah Sakit Umum Daerah Wakai** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 5.346,26 | B | 4.578,65 | B | 4.916,16 | BB | 4.751,45 | BB | 5.020,86 | BB-A | 5.073,21 | BB-A | 24.340,33 | RSUD Wakai |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN | Persentase pemenuhan layanan pasien | 80,00% | 82,50% | 1.336,57 | 85,00% | 1.144,66 | 87,50% | 1.229,04 | 90,00% | 1.187,86 | 92,50% | 1.255,22 | 95,00% | 1.268,30 | 95,00% | 6.085,08 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar | 20,8 | 21,62 | 2.673,13 | 22,44 | 2.289,32 | 23,26 | 2.458,08 | 24,08 | 2.375,72 | 24,9 | 2.510,43 | 25,72 | 2.536,61 | 25,72 | 12.170,17 | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi | NA | 65,00% | 2.673,13 | 66,72% | 2.289,32 | 68,44% | 2.458,08 | 70,16% | 2.375,72 | 71,88% | 2.510,43 | 73,60% | 2.536,61 | 73,60% | 12.170,17 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | 100,00% | 100,00% | 1.336,57 | 100,00% | 1.144,66 | 100,00% | 1.229,04 | 100,00% | 1.187,86 | 100,00% | 1.255,22 | 100,00% | 1.268,30 | 100,00% | 6.085,08 | |
| | **Rumah Sakit Pratama Togean** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kepuasan Masyarakat | - | 65 | 0 | 67,5 | 776,98 | 70 | 827,56 | 72,5 | 799,83 | 75 | 845,19 | 77,5 | 854 | 77,5 | 4.103,56 | Rumah Sakit Pratama Togean |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase pemenuhan layanan pasien | 0,37 | 0,39 | 0 | 0,4 | 0 | 0,42 | 0 | 0,43 | 0 | 0,45 | 0 | 0,46 | 0 | 0,46 | 0 | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar | 7,6 | 8,1 | 0 | 8,6 | 0 | 9,1 | 0 | 9,6 | 0 | 10,1 | 0 | 10,6 | 0 | 10,6 | 0 | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi | 40 | 41,5 | 0 | 43 | 0 | 44,5 | 0 | 46 | 0 | 47,5 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | - | 50,00% | 0 | 52,50% | 0 | 55,00% | 0 | 57,50% | 0 | 60,00% | 0 | 62,50% | 0 | 62,50% | 0 | |
| **1.03** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 4.131,41 | B | 3.370,08 | B | 3.618,51 | BB | 3.497,27 | BB | 3.695,57 | BB-A | 3.734,11 | BB-A | 17.915,55 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 46,15% | 48,65% | 5.783,91 | 51% | 4.171,25 | 54% | 4.478,73 | 56% | 4.328,67 | 58% | 4.574,12 | 61% | 4.621,81 | 60,65% | 22.174,58 | |
| | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh | NA | 15,00% | 0 | 18% | | 20% | | 23% | | 25% | | 27% | | 27,00% | | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | NA | 10,00% | 0 | 13% | | 15% | | 18% | | 20% | | 22% | | 24,50% | | |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak | 22,69 | 27,69 | 5.783,91 | 32,69 | 4.171,25 | 37,69 | 4.478,73 | 42,69 | 4.328,67 | 45,69 | 4.574,12 | 50,69 | 4.621,81 | 50,69 | 22.174,58 | |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 2,12 | 2,39 | 14.752,04 | 2,66 | 10.638,89 | 2,93 | 11.423,14 | 3,2 | 11.040,40 | 3,47 | 11.666,42 | 3,74 | 11.788,06 | 3,74 | 56.556,90 | |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) | NA | 5,00% | 3.015,71 | 8% | 2.174,87 | 10% | 2.335,20 | 13% | 2.256,95 | 15% | 2.384,93 | 18% | 2.409,80 | 17,50% | 11.561,75 | |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik | 90,00% | 90,00% | 0 | 92% | 0 | 93% | 0 | 95% | 0 | 96,00% | 0 | 98% | 0 | 97,50% | 0 | |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | 22,25 | 24,25 | 25.281,23 | 26,25 | 18.232,34 | 28,25 | 19.576,34 | 30,25 | 18.920,43 | 32,25 | 19.993,27 | 34,25 | 20.201,73 | 34,25 | 96.924,11 | |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Setifikat Kompetensi | 100% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%) | NA | 25,00% | 2.867,04 | 28% | 2.067,65 | 30% | 2.220,07 | 33% | 2.145,69 | 35% | 2.267,35 | 38% | 2.290,99 | 37,50% | 10.991,76 | |
| **1.04** | **Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 9.577,69 | B | 1.843,44 | B | 1.979,33 | BB | 1.913,02 | BB | 2.021,49 | BB-A | 2.042,57 | BB-A | 9.799,85 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | 100% | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha | 15,00% | 16,50% | 0 | 18,00% | 0 | 19,50% | 0 | 21,00% | 0 | 22,50% | 0 | 24,00% | 0 | 24,00% | 0 | |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | NA | 7,00% | 3.987,48 | 9,50% | 1.366,61 | 12,00% | 1.467,35 | 14,50% | 1.418,19 | 17,00% | 1.498,60 | 19,50% | 1.514,23 | 22,00% | 7.264,98 | |
| | | Persentase RTLH | 24,45% | 25,95% | 0 | 27,45% | 0 | 28,95% | 0 | 30,45% | 0 | 31,95% | 0 | 33,45% | 0 | 33,45% | 0 | |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 0,27% | 1,14% | 20,91 | 2,01% | 7,17 | 2,88% | 7,7 | 3,75% | 7,44 | 4,62% | 7,86 | 5,29% | 7,94 | 5,29% | 38,1 | |
| **1.05** | **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.897,12 | B | 1.876,86 | B | 2.015,22 | BB | 1.947,70 | BB | 2.058,14 | BB-A | 2.079,59 | BB-A | 9.977,51 | Satpol PP |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prsentase penyelesaian pelanggaran K3 | 100,00% | 100,00% | 3.851,88 | 100,00% | 3.810,76 | 100,00% | 4.091,67 | 100,00% | 3.954,58 | 100,00% | 4.178,81 | 100,00% | 4.222,38 | 100,00% | 20.258,19 | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 15,91% | 22,16% | - | 28,41% | - | 34,66% | - | 40,91% | - | 47,16% | - | 53,41% | - | 53,41% | - | |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 15 Menit | 15 Menit | 220 | 15 Menit | 217,65 | 15 Menit | 233,7 | 15 Menit | 225,87 | 15 Menit | 238,67 | 15 Menit | 241,16 | 15 Menit | 1.157,05 | |
| | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 741,53 | B | 644,4 | B | 691,9 | BB | 668,72 | BB | 706,64 | BB-A | 714 | BB-A | 3.425,66 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase potensi bencana alam yang diantisipasi | 50,00% | 53,50% | 237,62 | 57,00% | 248,33 | 60,50% | 266,63 | 64,00% | 257,7 | 67,50% | 272,31 | 71,00% | 275,15 | 71,00% | 1.320,12 | |
| **1.06** | **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.124,13 | B | 762,15 | B | 818,33 | BB | 790,91 | BB-A | 835,76 | BB-A | 844,47 | BB-A | 4.051,62 | Dinas Sosial |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Kelompok di berdayakan | 100,00% | 100,00% | 692,05 | 20% | 505,29 | 21% | 542,54 | 22% | 524,36 | 23% | 554,1 | 24% | 559,87 | 100,00% | 2.686,17 | |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 100,00% | 100,00% | 0 | 30% | 46,2 | 32% | 49,61 | 34% | 47,95 | 36% | 50,66 | 38% | 51,19 | 100,00% | 245,62 | |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin) | NA | 0,50% | 438,51 | 40% | 266,7 | 45% | 286,36 | 50% | 276,77 | 55% | 292,46 | 60% | 295,51 | 0,50% | 1.417,79 | |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 35,20% | 40,20% | 277,55 | 100% | 168,8 | 100% | 181,25 | 100% | 175,18 | 100% | 185,11 | 100% | 187,04 | 56,70% | 897,37 | |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara | NA | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | |
| **2.07** | **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 918,2 | B | 860,77 | B | 924,23 | BB | 893,26 | BB | 943,91 | BB-A | 953,75 | BB-A | 4.575,92 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | NA | - | 0 | 10,00% | 0 | 15,00% | 0 | 20,00% | 0 | 25,00% | 0 | 30,00% | 0 | 30,00% | 0 | |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 0,85% | 1,60% | 93,67 | 2,10% | 87,81 | 2,85% | 94,29 | 3,60% | 91,13 | 4,35% | 96,29 | 5,10% | 97,3 | 5,10% | 466,82 | |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta) | 4,57 | 4,62 | - | 4,64 | - | 4,69 | - | 4,74 | - | 4,79 | - | 4,84 | - | 4,84 | - | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | 30,00% | 30,00% | 45,71 | 30,00% | 42,85 | 31,50% | 46,01 | 33,00% | 44,47 | 34,50% | 46,99 | 36,00% | 47,48 | 36,00% | 227,8 | |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 20,55% | 22,55% | 115,78 | 24,05% | 108,53 | 26,05% | 116,53 | 28,05% | 112,63 | 30,05% | 119,02 | 32,05% | 120,26 | 32,05% | 576,97 | |
| **2.08** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.060,60 | B | 1.038,62 | B | 1.115,18 | BB | 1.077,81 | BB | 1.138,93 | BB-A | 1.150,80 | BB-A | 5.521,35 | p, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indeks Pembangunan Gender | 91,22% | 91,72% | 0 | 92,22% | 0 | 92,72% | 0 | 93,22% | 0 | 93,72% | 0 | 94,22% | 0 | 94,22% | 0 | |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 3,47 | 3,22 | 193,9 | 3,07 | 189,88 | 2,87 | 203,88 | 2,67 | 197,04 | 2,47 | 208,22 | 2,27 | 210,39 | 2,27 | 1.009,41 | |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera | 0,77% | 1,62% | 0 | 2,47% | 0 | 3,32% | 0 | 4,17% | 0 | 5,02% | 0 | 5,87% | 0 | 5,87% | 0 | |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Jumlah Dokumen Data anak perempuan dan data terpilah gender yng tersedia | NA | 02-Apr | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | 03-May | 0 | |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak | 67,00% | 68,50% | 0 | 70,00% | 0 | 71,50% | 0 | 73,00% | 0 | 74,50% | 0 | 76,00% | 0 | 76,00% | 0 | |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 75,00% | 76,24% | 64,58 | 77,48% | 63,24 | 78,72% | 67,9 | 79,96% | 65,62 | 81,20% | 69,34 | 82,44% | 70,07 | 82,44% | 336,17 | |
| **2.09** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianyan Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan) | 39,96 | 41,96 | 0 | 43,96 | 0 | 45,96 | 0 | 47,96 | 0 | 49,96 | 0 | 51,96 | 0 | 51,96 | 0 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat | NA | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | NA | 5-3% | 63,68 | 5-3% | 68,27 | 5-3% | 73,3 | 5-3% | 70,84 | 5-3% | 74,86 | 5-3% | 75,64 | 5-3% | 362,91 | |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan | NA | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | 75-90% | 0 | |
| **2.10** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan | 0,00% | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | 95,00% | 0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| 2.10.08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan dan/ Terkelola | - | - | 0 | - | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | 2-5 Ha | 0 | |
| 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 0,00% | 5,00% | 1.500,00 | 7,50% | 514,09 | 10,00% | 551,98 | 12,50% | 533,49 | 15,00% | 563,74 | 17,50% | 569,62 | 17,50% | 2.732,92 | |
| **2.11** | **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup | 0,75 | 75,00% | 167,63 | 75,00% | 57,45 | 78,50% | 61,69 | 82,00% | 59,62 | 85,50% | 63 | 89,00% | 63,66 | 89,00% | 305,42 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air | NA | 70 | 187,04 | 72,5 | 64,1 | 75 | 68,83 | 77,5 | 66,52 | 80 | 70,3 | 82,5 | 71,03 | 82,5 | 340,78 | |
| | | Indeks Kualitas Udara | NA | 65 | 0 | 67,5 | 0 | 70 | 0 | 72,5 | 0 | 75 | 0 | 77,5 | 0 | 77,5 | 0 | |
| | | Indeks Tutupan Lahan | NA | 50 | 0 | 52,5 | 0 | 55 | 0 | 57,5 | 0 | 60 | 0 | 62,5 | 0 | 62,5 | 0 | |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Ruang Terbuka Hijau | NA | 5,00% | 223,01 | 7,50% | 76,43 | 10,00% | 82,07 | 12,50% | 79,32 | 15,00% | 83,81 | 17,50% | 84,69 | 17,50% | 406,31 | |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B) | Presentase Pengelolaan Limbah B3 | NA | 5-10 | 0 | 5-10 | 0 | 5-10 | 0 | 5-10 | 0 | 10-12 | 0 | 10-12 | 0 | 10-12 | 0 | |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN | Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi | 20 | 22 | 155 | 24 | 53,12 | 26 | 57,04 | 28 | 55,13 | 30 | 58,25 | 32 | 58,86 | 32 | 282,4 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup | NA | 5 | 0 | 5 | 0 | 6,5 | 0 | 8 | 0 | 9,5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan | NA | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota | 61,45 | 62,95 | 2.377,99 | 64,45 | 815 | 65,95 | 875,08 | 67,45 | 845,76 | 68,95 | 893,71 | 70,45 | 903,03 | 70,45 | 4.332,58 | |
| **2.12** | **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.404,17 | B | 1.766,25 | B | 1.896,45 | BB | 1.832,91 | BB | 1.936,84 | BB-A | 1.957,03 | BB-A | 9.389,47 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Perekaman KTP elektronik | 92,42% | 92,92% | 79,43 | 93,42% | 99,91 | 93,92% | 107,27 | 94,17% | 103,68 | 94,67% | 109,55 | 95,17% | 110,7 | 95,67% | 531,1 | |
| | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 48,53% | 50,28% | 0 | 52,03% | | 53,78% | | 54,53% | | 56,28% | | 58,03% | | 58,03% | | |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun | 99,01% | 99,00% | 741,56 | 96,00% | 932,78 | 96,80% | 1.001,54 | 97,80% | 967,98 | 98,80% | 1.022,87 | 90,00% | 1.033,53 | 99,91% | 4.958,70 | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan | NA | 85,00% | 0 | 55,00% | | 57,00% | | 65,00% | | 70,00% | | 75,00% | | 92,50% | | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | | 78,00% | | 79,50% | | 81,00% | | 82,50% | | 82,50% | | |
| | | Presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | NA | 87,00% | 0 | 88,50% | | 90,00% | | 91,50% | | 93,00% | | 94,50% | | 94,50% | | |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Presentase Pemanfaatan Data | 50,00% | 52,43% | 50,75 | 54,86% | 63,84 | 57,29% | 68,54 | 58,72% | 66,25 | 61,15% | 70 | 63,58% | 70,73 | 63,58% | 339,36 | |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL | Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.13** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 755,8 | B | 514,5 | B | 552,43 | BB | 533,92 | BB | 564,19 | BB-A | 570,07 | BB-A | 2.735,10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%) | 6,72 | 22,22 | 0 | 36,36 | 0 | 33,33 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Presentase Bumdes yang Dibina (%) | 10,00% | 15,00% | 986,48 | 20,00% | 671,53 | 25,00% | 721,03 | 30,00% | 696,87 | 35,00% | 736,39 | 40,00% | 744,07 | 40,00% | 3.569,89 | |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%) | NA | 0,25 | 0 | 0,28 | 0 | 0,3 | 0 | 0,33 | 0 | 0,35 | 0 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang tertib administrasi (%) | 90,00% | 91,50% | 138,35 | 93,00% | 168,49 | 94,50% | 180,91 | 96,00% | 174,85 | 97,50% | 184,76 | 97,50% | 186,69 | 97,50% | 895,7 | |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%) | 100,00% | 100,00% | 247,59 | 100,00% | 94,17 | 100,00% | 101,11 | 100,00% | 97,72 | 100,00% | 103,26 | 100,00% | 104,34 | 100,00% | 500,61 | |
| **2.14** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR (Angka Kelahiran Total) | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 34,65 | 0 | 34,3 | 0 | 33,95 | 0 | 33,6 | 0 | 33,6 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 25 | 25,5 | 0 | 26 | 0 | 26,5 | 0 | 27 | 0 | 27,5 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 0,83 | 0,8 | 0 | 0,77 | 0 | 0,74 | 0 | 0,71 | 0 | 0,68 | 0 | 0,65 | 0 | 0,65 | 0 | |
| | | Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age SpeciicFertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun | 24 | 23 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
| | | Cakupan peserta KB aktif MKJP | 24 | - | 4.330,75 | - | 4.240,99 | - | 4.553,62 | - | 4.401,05 | - | 4.650,60 | - | 4.699,09 | - | 22.545,34 | |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 35 | 35,5 | 9,5 | 36 | 9,3 | 36,5 | 9,99 | 37 | 9,65 | 37,5 | 10,2 | 38 | 10,31 | 38 | 49,46 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.15** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 3.030,53 | CC | 3.030,53 | B | 1.749,39 | B | 1.690,78 | BB | 1.786,65 | A | 1.805,28 | A | 8.661,38 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio konekvitas kabupaten / kota | 75,6 | 77,35 | 888,04 | 79,1 | 477,43 | 80,85 | 512,63 | 82,6 | 495,45 | 84,35 | 523,54 | 86,1 | 529 | 86,1 | 2.538,06 | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (%) | 0,00% | 2,50% | 0 | 4,50% | | 6,50% | | 8,00% | | 10,00% | | 12,00% | | 12,00% | | |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan | 0,98% | 0,91% | 0 | 0,83% | | 0,75% | | 0,67% | | 0,59% | | 0,51% | | 0,51% | | |
| | | Meningkatnya Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan | 70,00% | 72,50% | 1.041,61 | 21,00% | 559,99 | 21,50% | 601,27 | 22,00% | 581,13 | 22,50% | 614,08 | 23,00% | 620,48 | 85,00% | 2.976,96 | |
| 2.15.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | Persentase Pengelolaan Penerbangan | 20,00% | 20,50% | 0 | 21,00% | 0 | 21,50% | 0 | 22,00% | 0 | 22,50% | 0 | 23,00% | 0 | 23,00% | 0 | |
| **2.16** | **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 2.713,51 | B | 801,61 | B | 860,7 | BB | 831,86 | BB | 879,03 | BB-A | 888,2 | BB-A | 4.261,41 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | 25,00% | 27,50% | 331,48 | 30,00% | 295,59 | 32,50% | 317,38 | 35,00% | 306,75 | 37,50% | 324,14 | 40,00% | 327,52 | 40,00% | 1.571,38 | |
| 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah | 53,66% | 58,66% | 0 | 63,66% | 0 | 68,66% | 0 | 73,66% | 0 | 78,66% | 0 | 83,66% | 0 | 83,66% | 0 | |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan | 25,00% | 27,50% | 243,5 | 30,00% | 1.097,20 | 32,50% | 1.178,08 | 35,00% | 1.138,60 | 37,50% | 1.203,17 | 40,00% | 1.215,71 | 40,00% | 5.832,75 | |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan | 0,00% | 5,00% | 0 | 7,44% | 0 | 9,88% | 0 | 12,32% | 0 | 14,76% | 0 | 17,20% | 0 | 17,20% | 0 | |
| **2.17** | **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 2.439,01 | B | 865,64 | B | 929,45 | BB | 898,31 | BB | 949,24 | BB-A | 959,14 | BB-A | 4.601,78 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%) | 8,82% | 10,32% | 79,13 | 11,82% | 28,08 | 13,32% | 30,15 | 14,82% | 29,14 | 16,32% | 30,79 | 17,82% | 31,12 | 17,82% | 149,29 | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | NA | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | 10,32% | 0 | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | 0,00% | 10,00% | 106,63 | 15,00% | 107,12 | 20,00% | 115,02 | 25,00% | 111,17 | 30,00% | 117,47 | 35,00% | 118,69 | 35,00% | 569,47 | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | 1,56% | 1,81% | 216,13 | 2,06% | 76,71 | 2,31% | 82,36 | 2,56% | 79,6 | 2,81% | 84,12 | 3,06% | 84,99 | 3,06% | 407,78 | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil | NA | 2,50% | 547,87 | 4,00% | 540,84 | 5,50% | 580,71 | 7,00% | 561,25 | 8,50% | 593,08 | 10,00% | 599,26 | 10,00% | 2.875,14 | |
| **2.18** | **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 783,98 | C | 860,9 | C | 924,36 | B | 893,39 | BB | 944,05 | BB-A | 953,89 | BB-A | 4.576,60 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor) | 20 | 20 | 92,24 | 35 | 98,39 | 37 | 105,64 | 39 | 102,1 | 41 | 107,89 | 43 | 109,02 | 32 | 523,04 | |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | 5,57% | 2,00% | 147,59 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 2,46% | 0 | |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%) | 100% | 100% | 0 | 100% | 98,39 | 100% | 105,64 | 100% | 102,1 | 100% | 107,89 | 100% | 109,02 | 100% | 523,04 | |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar) | 91,67 | 91,67 | 61,47 | 92,5 | 69,65 | 95 | 74,79 | 97,5 | 72,28 | 100 | 76,38 | 100 | 77,18 | 104,17 | 370,28 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%) | 40,00% | 45,00% | 0 | 100% | 102,57 | 100% | 110,13 | 100% | 106,44 | 100% | 112,48 | 100% | 113,65 | 70% | 545,27 | |
| **2.19** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 0,00% | 0,00% | 0 | 2,50% | 1.087,13 | 5,00% | 1.167,44 | 6,50% | 1.128,16 | 9,00% | 1.192,13 | 11,50% | 1.204,56 | 11,50% | 5.779,41 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 0,18% | 1,68% | 0 | 3,18% | 0 | 4,68% | 0 | 6,18% | 0 | 7,68% | 0 | 9,18% | 0 | 9,18% | 0 | |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Peningkatan Prestasi Olahraga | 0,00% | 05-Oct | 1.220,82 | 05-Oct | 1.116,86 | Oct-15 | 1.199,37 | 15-18 | 1.159,01 | 18-23 | 1.224,73 | 23-26 | 1.237,50 | 23-26 | 5.937,47 | |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | |
| **2.20** | **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 43,90% | 48,78% | 64,35 | 53,66% | 0 | 58,54% | 0 | 63,42% | 0 | 68,30% | 0 | 73,18% | 0 | 73,18% | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2.21** | **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah | NA | 80,00% | 64,35 | 82,50% | 0 | 85,00% | 0 | 87,50% | 0 | 90,00% | 0 | 92,50% | 0 | 73,18% | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2.22** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Kebudayaan yang di Kembangkan | 50 | 51,14 | 157,1 | 52,38 | 152,55 | 53,62 | 163,8 | 54,86 | 158,31 | 56,1 | 167,29 | 57,34 | 169,03 | 57,34 | 810,98 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan | 16,67 | 16,67 | 0 | 16,67 | 0 | 33,33 | 0 | 33,33 | 0 | 50 | 0 | 66,67 | 0 | 66,67 | 0 | |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan | 50 | 51,14 | 0 | 52,38 | 0 | 53,62 | 0 | 54,86 | 0 | 56,1 | 0 | 57,34 | 0 | 57,34 | 0 | |
| **2.23** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 808,28 | B | 691,65 | B | 742,64 | BB | 717,75 | BB | 758,45 | BB-A | 766,36 | BB-A | 3.676,86 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | 4,88 | 4,9 | 293,69 | 4,92 | 251,31 | 4,94 | 269,84 | 4,96 | 260,8 | 4,98 | 275,59 | 5 | 278,46 | 5 | 1.336,00 | |
| **2.24** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Ada | Ada | 56,24 | Ada | 48,13 | Ada | 51,67 | Ada | 49,94 | Ada | 52,77 | Ada | 53,32 | Ada | 255,84 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbagsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemeintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Ada | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | Ada | 0 | |
| 2.24.04 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase naskah kuno yang dilestarikan | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 2,50% | 0 | 2,75% | 0 | 3,00% | 0 | 3,25% | 0 | 3,25% | 0 | |
| **3.25** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.300,10 | B | 946,54 | B | 1.016,32 | BB | 982,27 | BB | 1.037,96 | BB-A | 1.048,79 | BB-A | 5.031,88 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan Tangkap (Ton) | 15.655,00 | 15.905,00 | 1.970,27 | 16.255,00 | 1.570,40 | 16.605,00 | 1.686,17 | 16.955,00 | 1.629,67 | 17.305,00 | 1.722,08 | 17.655,00 | 1.740,03 | 17.655,00 | 8.348,36 | |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi perikananBudidaya (Ton) | 7.270,80 | 7.520,80 | 1.434,36 | 7.870,80 | 908,38 | 8.220,80 | 975,34 | 8.570,80 | 942,66 | 8.920,80 | 996,11 | 9.270,80 | 1.006,50 | 9.270,80 | 4.828,99 | |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan | NA | 2,18 | 0 | 2,99 | 0 | 2,9 | 0 | 2,82 | 0 | 2,74 | 0 | 2,67 | 0 | 2,67 | 0 | |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL | Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi | 0,00% | 5,00% | 286 | 10,00% | 208,22 | 15,00% | 223,57 | 20,00% | 216,08 | 25,00% | 228,33 | 30,00% | 230,71 | 30,00% | 1.106,93 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.26** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.607,77 | B | 1.557,49 | B | 1.672,30 | BB | 1.616,27 | BB | 1.707,92 | BB-A | 1.725,72 | BB-A | 8.279,70 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) | -108,09 | -78,09 | 698,7 | -48,09 | 597,72 | -18,09 | 641,78 | 11,91 | 620,28 | 15,41 | 655,45 | 18,91 | 662,28 | 18,91 | 3.177,52 | |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (%) | -39,2 | -9,2 | 0 | 0,8 | | 1,8 | | 3,3 | | 4,8 | | 6,3 | | 6,3 | | |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%) | 1,66 | 1,66 | 403,31 | 1,71 | 390,69 | 1,76 | 504,29 | 1,84 | 487,4 | 1,92 | 515,03 | 2 | 520,4 | 2 | 2.417,82 | |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Tingkat hunian akomodasi | 63,7 | 63,7 | 617,13 | 63,95 | 676,7 | 64,2 | 641,78 | 64,45 | 620,28 | 64,7 | 655,45 | 64,7 | 662,28 | - | 3.256,49 | |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Lama Tinggal Wisatawan (Length of stay) | 2 | 2-3 | 0 | 2-3 | 0 | 2-3 | 0 | 3-4 | 0 | 3-4 | 0 | 3-4 | 0 | 3-4 | 0 | |
| **3.27** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 4.881,10 | CC | 3.153,31 | B | 4.795,50 | BB | 4.634,83 | BB | 4.897,63 | BB-A | 4.948,70 | BB-A | 22.429,96 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan | - | | 1.750,00 | | 1.667,19 | - | 1.790,08 | - | 1.730,11 | - | 1.828,21 | - | 1.847,27 | - | 8.862,86 | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1. Padi | 44,2 | 44,24 | - | 44,28 | | 44,32 | | 44,36 | | 44,4 | | 44,44 | | 44,44 | | |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 2. Jagung | 15,78 | 15,82 | - | 15,86 | | 15,9 | | 15,94 | | 15,98 | | 16,02 | | 16,02 | | |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Bawang Merah | 35,22 | 35,26 | - | 35,3 | | 35,34 | | 35,38 | | 35,42 | | 35,46 | | 35,46 | | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Cabe | 20,29 | 20,33 | - | 20,37 | | 20,41 | | 20,45 | | 20,49 | | 20,53 | | 20,53 | | |
| | | 3. Tomat | 145,57 | 145,61 | - | 145,65 | | 145,69 | | 145,73 | | 145,77 | | 145,81 | | 145,81 | | |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Nilam | 0,05 | 0,07 | - | 0,09 | - | 0,11 | - | 0,13 | - | 0,15 | - | 0,17 | - | 0,17 | - | |
| | | 2. Kelapa | 14,02 | 14,04 | - | 14,06 | - | 14,08 | - | 14,1 | - | 14,12 | - | 14,14 | - | 14,14 | - | |
| | | 3. Kakao | 4,34 | 4,36 | - | 4,38 | - | 4,4 | - | 4,42 | - | 4,44 | - | 4,46 | - | 4,46 | - | |
| | | 4. Kopi | 5,8 | 5,82 | - | 5,84 | - | 5,86 | - | 5,88 | - | 5,9 | - | 5,92 | - | 5,92 | - | |
| | | 5. Cengkeh | 3,7 | 3,72 | - | 3,74 | - | 3,76 | - | 3,78 | - | 3,8 | - | 3,82 | - | 3,82 | - | |
| | | 6. Pala | 0,02 | 0,04 | - | 0,06 | - | 0,08 | - | 0,1 | - | 0,12 | - | 0,14 | - | 0,14 | - | |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Sapi | 40.324,00 | 40.524,00 | - | 40.724,00 | | 40.924,00 | | 41.124,00 | | 41.324,00 | | 41.524,00 | | 41.524,00 | | |
| | | 2. Kambing | 39.016,00 | 39.616,00 | - | 40.216,00 | | 40.816,00 | | 41.416,00 | | 42.016,00 | | 42.616,00 | | 42.616,00 | | |
| | | 3. Babi | 10.208,00 | 10.408,00 | - | 10.608,00 | | 10.808,00 | | 11.008,00 | | 11.208,00 | | 11.408,00 | | 11.408,00 | | |
| | | Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan | NA | 5 | 0 | 7 | 204,8 | 9 | 219,89 | 11 | 212,53 | 13 | 224,58 | 15 | 226,92 | 15 | 1.088,72 | |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | NA | 50 | 144,14 | 51,54 | 137,94 | 53,08 | 148,1 | 54,62 | 143,14 | 56,16 | 151,26 | 57,7 | 152,83 | 57,7 | 733,27 | |
| 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Areal pengendalian dan penaggulangan Bencana OPT | NA | 75,00% | 200,48 | 76,50% | 191,85 | 78,00% | 206 | 79,50% | 199,09 | 81,00% | 210,38 | 82,50% | 212,58 | 82,50% | 1.019,90 | |
| 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | | 78,00% | | 79,50% | | 81,00% | | 82,50% | | 82,50% | | |
| 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | a. Pertanian | NA | 62,5 | 0 | 65 | | 67,5 | | 70 | | 72,5 | | 75 | | 75 | | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. Perkebunan | NA | 55 | 0 | 57,5 | | 60 | | 62,5 | | 65 | | 67,5 | | 67,5 | | |
| | | c. Peternakan | NA | 45 | 0 | 47,5 | | 50 | | 52,5 | | 55 | | 57,5 | | 57,5 | | |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas | NA | 1-2% | 94,16 | 1-2% | 90,11 | 1-2% | 96,75 | 1-2% | 93,51 | 1-2% | 98,81 | 1-2% | 99,84 | 1-2% | 479,02 | |
| **3.30** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Tertib Usaha | NA | 12,84% | 0 | 14,18% | 0 | 15,52% | 0 | 16,86% | 0 | 18,20% | 0 | 19,54% | 0 | 19,54% | 0 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 11,50% | 12,84% | | 14,18% | | 15,52% | | 16,86% | | 18,20% | | 19,54% | | 19,54% | | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | 90,00% | 90,46% | 2.743,71 | 91,80% | 461,86 | 93,14% | 495,91 | 94,48% | 479,29 | 95,82% | 506,47 | 97,16% | 511,75 | 97,16% | 2.455,27 | |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 10,00% | 11,32% | 61,96 | 12,64% | 21,99 | 13,96% | 23,61 | 15,28% | 22,82 | 16,60% | 24,11 | 17,92% | 24,37 | 17,92% | 116,9 | |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | NA | 0,5 | 312,22 | 0,53 | 110,81 | 0,55 | 118,98 | 0,57 | 114,99 | 0,59 | 121,51 | 0,62 | 122,78 | 0,62 | 589,07 | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | NA | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | |
| | | Persentase penanganan pengaduan konsumen | NA | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | | |
| **3.31** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten | -0,36 | -0,01 | - | -0,01 | 96,3 | 0 | 103,4 | 0 | 99,93 | 0 | 105,6 | 0 | 106,7 | 0 | 511,92 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait. | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| **3.32** | **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.02 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan | 25,00% | 28,00% | 220 | 29,50% | 206,24 | 32,50% | 221,44 | 35,50% | 214,02 | 38,50% | 226,16 | 41,50% | 228,52 | 41,50% | 1.096,38 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Nilai rata- rata indeks perekembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang di revitalisasi | 25,00% | 25,50% | 0 | 25,75% | 0 | 26,25% | 0 | 26,75% | 0 | 27,25% | 0 | 27,75% | 0 | 27,75% | 0 | |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementrian yang di revitalisasi | 25,00% | 25,50% | 0 | 25,75% | 0 | 26,25% | 0 | 26,75% | 0 | 27,25% | 0 | 27,75% | 0 | 27,75% | 0 | |
| **4.01** | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 15.833,25 | C | 20.206,48 | CC | 21.696,01 | B | 20.969,08 | B | 22.158,07 | B | 22.389,10 | BB-A | 107.418,74 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 100,00% | 100,00% | 1.612,45 | 100,00% | 3.325,12 | 100,00% | 3.570,23 | 100,00% | 3.450,61 | 100,00% | 3.646,26 | 100,00% | 3.684,28 | 100,00% | 17.676,50 | |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100,00% | 100,00% | 894,62 | 100,00% | 2.046,23 | 100,00% | 2.197,06 | 100,00% | 2.123,45 | 100,00% | 2.243,86 | 100,00% | 2.267,25 | 100,00% | 10.877,85 | |
| **4.02** | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 9.365,63 | B | 10.428,21 | B | 11.196,92 | BB | 10.821,77 | BB | 11.435,39 | BB-A | 11.554,62 | BB-A | 55.436,90 | Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan | 100,00% | 100,00% | 5.016,44 | 100,00% | 5.585,58 | 100,00% | 5.997,32 | 100,00% | 5.796,38 | 100,00% | 6.125,05 | 100,00% | 6.188,91 | 100,00% | 29.693,25 | |
| 4.02.02 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Cakupan pelayanan kesejahteraan dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan | 100,00% | 100,00% | 957,5 | 100,00% | 1.066,13 | 100,00% | 1.144,72 | 100,00% | 1.106,37 | 100,00% | 1.169,10 | 100,00% | 1.181,29 | 100,00% | 5.667,62 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.01** | **Perencanaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.760,99 | B | 0 | B | 0 | BB | 0 | BB | 0 | BB-A | 0 | BB-A | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | 75,00% | 77,85% | 1.936,59 | 82,85% | 2.006,35 | 87,85% | 2.154,25 | 92,85% | 2.082,07 | 97,85% | 2.200,13 | 100,00% | 2.223,07 | 100,00% | 10.665,88 | |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |
| | | Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |
| | | Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |
| | | Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | 80,00% | 82,00% | 0 | 84,00% | 0 | 86,00% | 0 | 88,00% | 0 | 90,00% | 0 | 92,00% | 0 | 92,00% | 0 | |
| | | Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 75,00% | 77,00% | 0 | 79,00% | 0 | 81,00% | 0 | 83,00% | 0 | 85,00% | 0 | 87,00% | 0 | 87,00% | 0 | |
| | | Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan | 70,00% | 72,00% | 0 | 74,00% | 0 | 76,00% | 0 | 78,00% | 0 | 80,00% | 0 | 82,00% | 0 | 82,00% | 0 | |
| **5.02** | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Badan Pendapatan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.680,10 | B | 1.006,16 | B | 1.080,33 | BB | 1.044,13 | BB | 1.103,34 | BB-A | 1.114,84 | BB-A | 5.348,79 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD | 15,00% | 15,00% | 1.847,35 | 14,90% | 1.106,32 | 15,40% | 1.187,87 | 15,50% | 1.148,07 | 16,00% | 1.213,17 | 16,50% | 1.225,82 | 16,50% | 5.881,23 | |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase realisasi penerimaan pajak daerah | 115,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 5.124,14 | B | 3.276,15 | B | 3.517,65 | BB | 3.399,79 | BB | 3.592,57 | BB-A | 3.630,02 | BB-A | 17.416,18 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 100 | 100 | 2.046,60 | 100 | 1.308,50 | 100 | 1.404,96 | 100 | 1.357,89 | 100 | 1.434,88 | 100 | 1.449,84 | 100 | 6.956,07 | |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | 16,78 | 16,76 | 0 | 16,76 | | 16,74 | | 16,74 | | 16,72 | | 16,7 | | 16,68 | | |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) | 59,17 | 58,92 | 0 | 58,67 | | 58,42 | | 58,17 | | 57,92 | | 57,67 | | 57,67 | | |
| | | Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya | 3,99 | - | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | | Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik | NA | 85,00% | 1.060,07 | 87,50% | 677,76 | 90,00% | 727,72 | 92,50% | 703,34 | 95,00% | 743,22 | 97,50% | 750,97 | 97,50% | 3.603,01 | |
| **5.03** | **Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 1.133,08 | B | 1.137,45 | B | 1.221,30 | BB | 1.180,38 | BB | 1.247,31 | BB-A | 1.260,32 | BB-A | 6.046,77 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB | NA | 0,75 | 1.139,00 | 0,77 | 1.143,39 | 0,78 | 1.227,68 | 0,8 | 1.186,54 | 0,81 | 1.253,82 | 0,83 | 1.266,90 | 0,83 | 6.078,33 | |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 44,00% | 0,48 | 0 | 0,51 | 0 | 0,55 | 0 | 0,58 | 0 | 0,62 | 0 | 0,65 | 0 | 0,65 | 0 | |
| | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 3,08 | 8,73 | 0 | 14,38 | 0 | 20,03 | 0 | 25,68 | 0 | 31,33 | 0 | 36,98 | 0 | 36,98 | 0 | |
| | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 3,01 | 3,76 | 0 | 4,51 | 0 | 5,26 | 0 | 6,01 | 0 | 6,76 | 0 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0 | |
| **5.04** | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM | 100,00% | 100,00% | 64,4 | 100,00% | 64,65 | 100,00% | 69,41 | 100,00% | 67,09 | 100,00% | 70,89 | 100,00% | 71,63 | 100,00% | 343,67 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA | Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM | 62,34% | 64,79% | 0 | 67,24% | | 69,69% | | 72,14% | | 74,59% | | 77,04% | | 77,04% | | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM | NA | 36,00% | 0 | 38,50% | | 41,00% | | 43,50% | | 46,00% | | 48,50% | | 48,50% | | |
| **5.05** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan | 100% | 100% | 790 | 100% | 818,46 | 100% | 878,79 | 100% | 849,35 | 100% | 897,51 | 100% | 906,86 | 100% | 4.350,96 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **6.01** | **Inspektorat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 728,91 | B | 496,96 | B | 533,6 | BB | 515,72 | BB | 544,96 | BB-A | 550,64 | BB-A | 2.641,89 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase OPD yang memenuhi maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | 1.230,00 | Level 3 | 838,6 | Level 3 | 900,42 | Level 3 | 870,25 | Level 4 | 919,6 | Level 4 | 929,19 | Level 4 | 4.458,06 | |
| | | Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 2 | Level 2 | - | Level 2 | - | Level 2 | - | Level 2 | - | Level 3 | - | Level 3 | - | Level 3 | - | |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase OPD yang tertib administrasi Keuangan | 100,00% | 100,00% | 73,5 | 100,00% | 50,11 | 100,00% | 53,81 | 100,00% | 52 | 100,00% | 54,95 | 100,00% | 55,52 | 100,00% | 266,4 | |
| | **Unsur Kewilayahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01** | **Kecamatan Tojo** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 410,26 | C | 362,24 | CC | 388,94 | CC | 375,91 | CC | 397,22 | B | 401,36 | B | 1.925,67 | Kecamatan Tojo |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 136,45 | 75,00% | 120,48 | 77,00% | 129,36 | 78,00% | 125,02 | 80,00% | 132,11 | 82,00% | 133,49 | 82,00% | 640,47 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6549 | 0,6619 | 10 | 0,6689 | 8,83 | 0,6759 | 9,48 | 0,6829 | 9,16 | 0,6899 | 9,68 | 0,6969 | 9,78 | 0,6969 | 46,94 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 10 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 67,46 | 100,00% | 72,43 | 100,00% | 70 | 100,00% | 73,97 | 100,00% | 74,74 | 100,00% | 358,6 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 25 | 100,00% | 22,07 | 100,00% | 23,7 | 100,00% | 22,91 | 100,00% | 24,21 | 100,00% | 24,46 | 100,00% | 117,34 | |
| **7.01** | **Kecamatan Tojo Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 412,26 | C | 353,23 | CC | 379,27 | CC | 366,56 | CC | 387,35 | B | 391,39 | B | 1.877,81 | Kecamatan Tojo Barat |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 116,45 | 75,00% | 99,78 | 77,00% | 107,13 | 78,00% | 103,54 | 80,00% | 109,41 | 82,00% | 110,55 | 82,00% | 530,42 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6644 | 0,6714 | 20 | 0,6784 | 17,14 | 0,6854 | 18,4 | 0,6924 | 17,78 | 0,6994 | 18,79 | 0,7064 | 18,99 | 0,7064 | 91,1 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 65,46 | 100,00% | 70,29 | 100,00% | 67,93 | 100,00% | 71,78 | 100,00% | 72,53 | 100,00% | 347,99 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 25 | 100,00% | 21,42 | 100,00% | 23 | 100,00% | 22,23 | 100,00% | 23,49 | 100,00% | 23,73 | 100,00% | 113,87 | |
| **7.01** | **Kecamatan Ulubongka** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 412,26 | C | 284,01 | CC | 304,95 | CC | 294,73 | CC | 311,44 | B | 314,69 | B | 1.509,81 | Kecamatan Ulubongka |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 122,45 | 75,00% | 84,36 | 77,00% | 90,58 | 78,00% | 87,54 | 80,00% | 92,5 | 82,00% | 93,47 | 82,00% | 448,45 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5638 | 0,5658 | 20 | 0,5728 | 13,78 | 0,5798 | 14,79 | 0,5868 | 14,3 | 0,5938 | 15,11 | 0,6008 | 15,27 | 0,6008 | 73,25 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 52,63 | 100,00% | 56,51 | 100,00% | 54,62 | 100,00% | 57,72 | 100,00% | 58,32 | 100,00% | 279,8 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 24,11 | 100,00% | 25,89 | 100,00% | 25,02 | 100,00% | 26,44 | 100,00% | 26,72 | 100,00% | 128,18 | |
| **7.01** | **Kecamatan Ampana Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 578,26 | CC | 923,13 | CC | 991,18 | B | 957,97 | B | 1.012,29 | BB | 1.022,84 | BB | 4.907,40 | Kecamatan Ampana Kota |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | 68,73% | 82,50% | 252,45 | 85,00% | 403,01 | 87,50% | 432,72 | 90,00% | 418,22 | 92,50% | 441,93 | 95,00% | 446,54 | 95,00% | 2.142,42 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6873 | 0,6913 | 90 | 0,6953 | 143,68 | 0,6993 | 154,27 | 0,7033 | 149,1 | 0,7073 | 157,55 | 0,7113 | 159,19 | 0,7113 | 763,79 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 121,96 | 100,00% | 130,95 | 100,00% | 126,57 | 100,00% | 133,74 | 100,00% | 135,14 | 100,00% | 648,37 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 55 | 100,00% | 87,8 | 100,00% | 94,27 | 100,00% | 91,12 | 100,00% | 96,28 | 100,00% | 97,29 | 100,00% | 466,76 | |
| **7.01** | **Kecamatan Ampana Tete** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | CC | 416,26 | CC | 288,35 | CC | 309,61 | B | 299,24 | B | 316,2 | B | 319,5 | B | 1.532,91 | Kecamatan Ampana Tete |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 75,00% | 122,45 | 75,00% | 84,82 | 77,00% | 91,08 | 78,00% | 88,03 | 80,00% | 93,02 | 82,00% | 93,99 | 82,00% | 450,93 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6355 | 0,6435 | 20 | 0,6475 | 13,85 | 0,6555 | 14,88 | 0,6635 | 14,38 | 0,6715 | 15,19 | 0,6795 | 15,35 | 0,6795 | 73,65 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 52,92 | 100,00% | 56,83 | 100,00% | 54,92 | 100,00% | 58,04 | 100,00% | 58,64 | 100,00% | 281,35 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 24,25 | 100,00% | 26,03 | 100,00% | 25,16 | 100,00% | 26,59 | 100,00% | 26,86 | 100,00% | 128,89 | |
| **7.01** | **Kecamatan Ratolindo** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 608,26 | C | 257,17 | CC | 276,13 | CC | 266,87 | B | 282,01 | BB | 284,95 | BB | 1.367,12 | Kecamatan Ratolindo |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | 82,16 | 84,16 | 95 | 86,16 | 40,17 | 88,16 | 43,13 | 91 | 41,68 | 93 | 44,04 | 95 | 44,5 | 95 | 213,52 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,7008 | 0,7088 | 2.590,00 | 0,7168 | 1.095,03 | 0,7248 | 1.175,75 | 0,7328 | 1.136,36 | 0,7408 | 1.200,79 | 0,7488 | 1.213,31 | 0,7488 | 5.821,26 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 32,3 | 100,00% | 34,68 | 100,00% | 33,52 | 100,00% | 35,42 | 100,00% | 35,79 | 100,00% | 171,72 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 55 | 100,00% | 23,25 | 100,00% | 24,97 | 100,00% | 24,13 | 100,00% | 25,5 | 100,00% | 25,77 | 100,00% | 123,62 | |
| **7.01** | **Kecamatan Una-Una** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 411,26 | C | 405,15 | C | 435,01 | CC | 420,44 | CC | 444,28 | CC | 448,91 | CC | 2.153,79 | Kecamatan Una-Una |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 65,00% | 122,45 | 67,50% | 120,63 | 70,00% | 129,52 | 72,50% | 125,18 | 75,00% | 132,28 | 77,50% | 133,66 | 77,50% | 641,28 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,6149 | 0,6219 | 0 | 0,6289 | 0 | 0,6359 | 0 | 0,6429 | 0 | 0,6499 | 0 | 0,6569 | 0 | 0,6569 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | 2 | 2 | 20 | 2 | 19,7 | 3 | 21,16 | 3 | 20,45 | 4 | 21,61 | 4 | 21,83 | 4 | 104,74 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 75,26 | 100,00% | 80,81 | 100,00% | 78,11 | 100,00% | 82,53 | 100,00% | 83,39 | 100,00% | 400,11 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 34,48 | 100,00% | 37,02 | 100,00% | 35,78 | 100,00% | 37,81 | 100,00% | 38,2 | 100,00% | 183,3 | |
| **7.01** | **Kecamatan Togean** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 401,26 | C | 300,69 | C | 322,85 | CC | 312,03 | CC | 329,73 | CC | 333,16 | CC | 1.598,46 | Kecamatan Togean |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 65,00% | 122,45 | 67,50% | 91,76 | 70,00% | 98,52 | 72,50% | 95,22 | 75,00% | 100,62 | 77,50% | 101,67 | 77,50% | 487,79 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5603 | 0,5683 | 20 | 0,5763 | 14,99 | 0,5843 | 16,09 | 0,5923 | 15,55 | 0,6003 | 16,43 | 0,6083 | 16,61 | 0,6083 | 79,67 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 13 | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 57,25 | 100,00% | 61,47 | 100,00% | 59,41 | 100,00% | 62,78 | 100,00% | 63,43 | 100,00% | 304,35 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 26,23 | 100,00% | 28,16 | 100,00% | 27,22 | 100,00% | 28,76 | 100,00% | 29,06 | 100,00% | 139,43 | |
| **7.01** | **Kecamatan Walea Kepulauan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 401,26 | C | 330,29 | C | 354,64 | C | 342,76 | CC | 362,19 | CC | 365,97 | CC | 1.755,85 | Kecamatan Walea Kepulauan |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 65,00% | 102,45 | 67,50% | 84,33 | 70,00% | 90,55 | 72,50% | 87,51 | 75,00% | 92,48 | 77,50% | 93,44 | 77,50% | 448,3 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5532 | 0,5612 | 20 | 0,5692 | 16,46 | 0,5772 | 17,68 | 0,5852 | 17,08 | 0,5932 | 18,05 | 0,6012 | 18,24 | 0,6012 | 87,52 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 62,89 | 100,00% | 67,52 | 100,00% | 65,26 | 100,00% | 68,96 | 100,00% | 69,68 | 100,00% | 334,31 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 28,81 | 100,00% | 30,93 | 100,00% | 29,9 | 100,00% | 31,59 | 100,00% | 31,92 | 100,00% | 153,15 | |
| **7.01** | **Kecamatan Walea Besar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 401,26 | C | 258,47 | C | 277,53 | CC | 268,23 | CC | 283,44 | CC | 286,39 | CC | 1.374,06 | Kecamatan Walea Besar |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 67,00% | 102,45 | 69,50% | 65,99 | 72,00% | 70,86 | 74,50% | 68,48 | 77,00% | 72,37 | 79,50% | 73,12 | 79,50% | 350,83 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5706 | 0,5786 | 20 | 0,5866 | 12,88 | 0,5946 | 13,83 | 0,6026 | 13,37 | 0,6026 | 14,13 | 0,6026 | 14,27 | 0,6026 | 68,49 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 49,21 | 100,00% | 52,84 | 100,00% | 51,07 | 100,00% | 53,97 | 100,00% | 54,53 | 100,00% | 261,62 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 22,55 | 100,00% | 24,21 | 100,00% | 23,4 | 100,00% | 24,72 | 100,00% | 24,98 | 100,00% | 119,85 | |
| **7.01** | **Kecamatan Talatako** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 366,26 | C | 286,28 | C | 307,39 | CC | 297,09 | CC | 313,93 | CC | 317,2 | CC | 1.521,89 | Kecamatan Talatako |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 65,00% | 102,45 | 67,50% | 80,08 | 70,00% | 85,98 | 72,50% | 83,1 | 75,00% | 87,81 | 77,50% | 88,73 | 77,50% | 425,7 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5754 | 0,5762 | 20 | 0,5842 | 15,63 | 0,5922 | 16,79 | 0,6002 | 16,22 | 0,6082 | 17,14 | 0,6162 | 17,32 | 0,6162 | 83,1 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 6 | - | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 59,72 | 100,00% | 64,12 | 100,00% | 61,97 | 100,00% | 65,48 | 100,00% | 66,17 | 100,00% | 317,46 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 27,36 | 100,00% | 29,37 | 100,00% | 28,39 | 100,00% | 30 | 100,00% | 30,31 | 100,00% | 145,43 | |
| **7.01** | **Kecamatan Batudaka** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | NA | C | 386,26 | C | 337,93 | C | 362,84 | CC | 350,69 | CC | 370,57 | CC | 374,43 | CC | 1.796,46 | Kecamatan Batudaka |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | NA | 65,00% | 102,45 | 67,50% | 89,63 | 70,00% | 96,24 | 72,50% | 93,01 | 75,00% | 98,29 | 77,50% | 99,31 | 77,50% | 476,49 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IDM Kecamatan | 0,5567 | 0,5647 | 20 | 0,5727 | 17,5 | 0,5807 | 18,79 | 0,5887 | 18,16 | 0,5967 | 19,19 | 0,6047 | 19,39 | 0,6047 | 93,02 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Maju | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Status Desa Berkembang | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Status Desa Tertinggal | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Status Desa Sangat Tertinggal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 76,4 | 100,00% | 66,84 | 100,00% | 71,77 | 100,00% | 69,36 | 100,00% | 73,3 | 100,00% | 74,06 | 100,00% | 355,33 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100,00% | 100,00% | 35 | 100,00% | 30,62 | 100,00% | 32,88 | 100,00% | 31,78 | 100,00% | 33,58 | 100,00% | 33,93 | 100,00% | 162,78 | |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05** | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | CC | CC | 466,8 | B | 615,72 | B | 661,1 | BB | 638,95 | BB | 675,18 | BB-A | 682,22 | BB-A | 3.273,18 | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | 0 | 78,00% | 0 | 79,50% | 0 | 81,00% | 0 | 82,50% | 0 | 82,50% | 0 | |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara | NA | 75,00% | 0 | 76,50% | 0 | 78,00% | 0 | 79,50% | 0 | 81,00% | 0 | 82,50% | 0 | 82,50% | 0 | |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik. | 100% | 100% | 108,5 | 100% | 143,11 | 100% | 153,66 | 100% | 148,51 | 100% | 156,93 | 100% | 158,57 | 100% | 760,79 | |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 12 kecamatan. | NA | 10% | 0 | 13% | 0 | 15% | 0 | 18% | 0 | 20% | 0 | 23% | 0 | 23% | 0 | |

| KODE | Program / Keg. /Sub Keg. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Awal Tahun (2020) | Target | | | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | |
| | **TOTAL** | | | | **438.948,30** | | **371.999,78** | | **393.347,44** | | **398.273,11** | | **385.069,48** | | **406.665,84** | | | |

Sumber: Hasil Analisis dan FGD 2021



# BAB 8

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## 8.1 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Kinerja Daerah ini kemudian dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Selanjutnya dimuat dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 8.1**
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**
**Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026**

| Indikator | | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | **Angka Kemiskinan** | 16,39 | 16,60 | 16,60-16,00 | 16,00-15,10 | 15,10-14,10 | 14,10-13,40 | 13,40-9,80 | 13,40-9,80 |
| 2 | Garis Kemiskinan | 504.889 | 521.534 | 538.352 | 555.171 | 571.989 | 588.808 | 605.626 | 605.626 |
| 3 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | 3,27 | 3,25 | 3,23 | 3,19 | 3,16 | 3,13 | 3,10 | 3,10 |
| 4 | Indeks Keparahan Kemiskinan | 1,03 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| 5 | Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | NA | 70,00-72,5 | 72,50-75,00 | 75,00-77,50 | 77,50-80,00 | 80,00-82,50 | 82,50-85,00 | 82,50-85,00 |
| 6 | Pendapatan perkapita | 30,10 | 30,10 | 31,30 | 32,90 | 34,50 | 36,10 | 36,10-38,00 Juta | 36,10-38,00 Juta |
| 7 | Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) | 2,84 | 3,44 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
| 8 | Indeks Gini Rasio | 0,313 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 | 0,300-0,200 |
| 9 | Nilai Tukar Petani (NTP) | NA | 98-100 | 100-102 | 100-102 | 102-105 | 105-107 | 107-109 | 107-109 |
| 10 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | NA | 98-100 | 100-102 | 100-102 | 102-105 | 105-107 | 107-109 | 107-109 |
| 11 | **Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)** | NA | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
| 12 | Indeks kualitas Air (IKA) | NA | 0,62-0,59 | 0,59-0,54 | 0,53-0,45 | 0,44-0,38 | 0,37-0,32 | 0,31-0,27 | 0,31-0,27 |
| 13 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | NA | 85,00-86,00 | 87,00-88,00 | 88,00-89,00 | 89,00-90,00 | 90,00-91,00 | 91,00-92,00 | 91,00-92,00 |
| 14 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | NA | 80,00-81,00 | 81,00-82,00 | 82,00-83,00 | 83,00-84,00 | 84,00-85,00 | 85,00-86,00 | 85,00-86,00 |

| Indikator | | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 15 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | NA | 68,00-69,00 | 69,00-70,00 | 70,00-71,00 | 71,00-72-00 | 72,00-73,00 | 73,00-74,00 | 73,00-74,00 |
| 16 | Cakupan Pelayanan Persampahan | 61,45 | 62,95 | 64,45 | 65,95 | 67,45 | 68,95 | 70,45 | 70,45 |
| 17 | Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten | NA | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 40-45 |
| 18 | Indeks Resiko Bencana Daerah | 137,60 | 137,60 | 137,6-132,0 | 137,6-132,0 | 132,0-130 | 132,0-130 | 130-128,0 | 130-128,0 |
| 19 | Persentase Desa Tangguh Bencana | 7,46 | 7,46 | 7,46-10,0 | 10,0-12,5 | 12,5-15,00 | 15,00-17,25 | 17,25-200 | 17,25-200 |
| | | | | | | | | | |
| 20 | **Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah** | NA | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 55-60 |
| 21 | Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap | 21,91 | 21,91-22,00 | 22,00-24,00 | 24,00-26,00 | 26,00-28,00 | 28,00-30,00 | 30,00-35,00 | 30,00-35,00 |
| 22 | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun | NA | 20-22,65 | 22,65-24,00 | 24,00-26,65 | 26,65-29,00 | 29,00-31,65 | 31,65-33,45 | 31,65-33,45 |
| 23 | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan | 0,98 | 0,98-0,91 | 0,91-0,83 | 0,83-0,75 | 0,75-0,67 | 0,67-0,59 | 0,59-0,51 | 0,59-0,51 |
| 24 | Konsumsi listrik (Rasio Elektrifikasi) | 94,89 | 94,89-95,09 | 95,09-95,59 | 95,59-96,00 | 96,00-96,50 | 96,50-97,0 | 97,00-97,50 | 97,00-97,50 |
| 25 | Presentase Koneksi Internet Desa | 67,16 | 67,16-70,00 | 70,00-73,00 | 73,00-76,00 | 76,00-79,00 | 79,00-82,00 | 82,00-85,00 | 82,00-85,00 |
| 26 | Presentase Rumah Layak Huni | 75,55 | 75,55-77,05 | 77,05-78,55 | 78,55-80,05 | 80,05-81,55 | 81,55-83,05 | 83,05-84,55 | 83,05-84,55 |
| 27 | Presentase ketersedian air minum layak | 91,14 | 91,84-92,54 | 92,54-93,24 | 93,24-93,94 | 93,94-94,64 | 94,64-95,34 | 95,34-97,00 | 95,34-97,00 |
| | | | | | | | | | |
| 28 | **Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif** | 4,69 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 29 | Pertumbuhan Ekonomi | -3,21 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 30 | Realisasi Investasi daerah sektor Unggulan | NA | 10-20 Miliar | 20-30 Miliar | 30-40 Miliar | 40-60 Miliar | 60-80 Miliar | 60-80 Miliar | 60-80 Miliar |
| 31 | Nilai Kontribusi sektor Pertanian Dalam PDRB | 25,70 | 25,7-26,10 | 26,10-26,5 | 26,50-26,9 | 26,90-27,30 | 27-30-27,70 | 27-30 | 27-30 |
| 32 | Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB | 11,23 | 11,23-11,27 | 11,27-11,31 | 11,31-11,35 | 11,35-11,39 | 11,39-11,43 | 11,43-11,47 | 11,43-11,47 |
| 33 | Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata | 1,96 | 1,80-1,96 | 1,80-1,96 | 1,96-2,00 | 2,00-2,15 | 2,15-2,25 | 2,25-2,35 | 2,25-2,35 |

| | Indikator | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020 | Target | | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 34 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) | NA | 75-76,5 | 76,5-77,5 | 77,5-78,50 | 78,50-79,50 | 79,5-80,5 | 80,5-81,5 | 80,5-81,5 |
| | | | | | | | | | |
| 35 | **Indeks Pemangunan Manusia (IPM)** | 64,59 | 64,74 | 64,74-66,04 | 66,04-66,89 | 66,89-67,74 | 67,74-68,59 | 68,50-70 | 68,50-70 |
| 36 | Indesk Pendidikan | NA | 0,2-0,25 | 0,2-0,25 | 0,25-0,30 | 0,30-0,35 | 0,35-0,40 | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 |
| 37 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | 8,39 | 8,39-8,59 | 8,59-8,79 | 8,79-8,99 | 8,99-9,19 | 9,19-9,39 | 9,39-12,00 | 9,39-12,00 |
| 38 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 12,28 | 12,28-12,48 | 12,48-12,68 | 12,68-12,88 | 12,88-13,08 | 13,08-13,28 | 13,28-15,20 | 13,28-15,20 |
| 39 | Indeks Kesehatan | NA | 0,2-0,25 | 0,2-0,25 | 0,25-0,30 | 0,30-0,35 | 0,35-0,40 | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 |
| 40 | Usia Harapan Hidup (UHH) | 65,67 | 65,90 | 65,90-66,13 | 66,13-66,63 | 66,63-67,50 | 67,50-68,00 | 68,00-69,00 | 68,00-69,00 |
| 41 | Angka Stunting | 22,68 | 22,68-20,18 | 20,18-17,68 | 17,68-15,18 | 15,18-12,68 | 12,68-10,18 | 10,00-7,00 | 10,00-7,00 |
| 42 | Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat Provinsi | 0,00 | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 8-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| 43 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 91,22 | 91,92 | 92,62 | 93,32 | 94,02 | 94,72 | 94,22-96,70 | 94,22-96,70 |
| | | | | | | | | | |
| 44 | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** | NA | C | C | C | B | B | B | B |
| 45 | Indek Kepuasan Pelayanan Publik | NA | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 85-90 | 85-90 |
| 46 | Nilai SAKIP Daerah | CC | CC | B | B | BB | BB | BB-A | BB-A |
| 47 | Opini hasil pemeriksaan oleh BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 48 | Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una-Una | 0,6064 | 0,6154 | 0,6244 | 0,6334 | 0,6424 | 0,6514 | 0,650-0,7100 | 0,650-0,7100 |
| 49 | Persentase Status Desa Maju | 6,72 | 8,21 | 11,19 | 14,93 | 17,91 | 22,39 | 24,63 | 24,63 |
| | | | | | | | | | |

Sumber: Hasil Analisis dan FGD 2021

# Tabel 8.2
## Penetapan Indikator Kinerja Daerah
## Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
## Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **A** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB ADHK (%) | % | (3,21) | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 2 | Laju Inflasi (%) | % | 0,46 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 3 | PDRB per Kapita ADHB (Rp. Miliar) | (Rp Jutaan) | 34,10 | 30,1 | 32,1 | 34,1 | 36,1 | 38,1 | 38-40 Juta | 38-40 Juta |
| 4 | Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%) | % | 83,61 | 83,40 | 83,40-84,00 | 84,00-84,90 | 84,90-85,10 | 85,10-86,60 | 86,60-90,20 | 86,60-90,20 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 64,59 | 64,74 | 64,74-66,04 | 66,04-66,89 | 66,89-67,74 | 67,74-68,59 | 68,50-70 | 68,50-70 |
| 6 | Angka Melek Huruf (%) | % | 99,40 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 |
| 7 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 12,28 | 12,28-12,48 | 12,48-12,68 | 12,68-12,88 | 12,88-13,08 | 13,08-13,28 | 13,28-15,20 | 13,28-15,20 |
| 8 | Umur Harapan Hidup (tahun) | Tahun | 65,67 | 65,90 | 65,90-66,13 | 66,13-66,63 | 66,63-67,50 | 67,50-68,00 | 68,00-69,00 | 68,00-69,00 |
| 9 | Balita Gizi Kurang (%) | % | 52,21 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 10 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | % | 75,33 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
| 11 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | % | 2,84 | 3,44 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
| 12 | Rasio Penduduk Bekerja (%) | % | 97,16 | 96,56 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 97-98 |
| 13 | Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) | % | 4,57 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 14 | Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (%) | % | 73,19 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 15 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%) | % | 41,44 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 |
| 16 | Persentase PAD terhadap pendapatan (%) | % | 6,82 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 17 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 18 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) | % | 38,68 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 |
| 19 | Produksi sektor pertanian | | - | | | | | | | 0 |
| | *Padi (ku)* | Ku | 6.660,20 | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000 |
| | *Kelapa (ton)* | ton | 31.953,45 | 30000-40000 | 30000-40000 | 30000-40000 | 30000-40000 | 30000-40000 | 30000-40000 | 30000-40000 |
| | *Kakao (ton)* | ton | 5.200,00 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| | *Cengkeh (ton)* | ton | 1.490,50 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| | *Nilam (ton)* | ton | 41,00 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| | *Jagung (ton)* | ton | 84.808 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 |
| 20 | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) | % | 1,46 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 21 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) | % | 10,95 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 |
| 22 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) | % | 8,13 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
| 23 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) | % | 8,41 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| **B** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.Juta) | Rp.Juta | 19,45 | 19,84 | 20,44 | 21,05 | 21,65 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
| 2 | Nilai tukar petani (%) | % | - | 98-100 | 100-102 | 100-102 | 102-105 | 105-107 | 107-109 | 107-109 |
| 3 | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%) | % | - | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 4 | Persentase Luas Wilayah Produktif (%) | % | 61,65 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 5 | Panjang Jalan (Meter) | Meter | - | 1200-13000 | 1200-13000 | 1200-13000 | 1200-13000 | 1200-13000 | 1200-13000 | 1200-13000 |
| | *-Aspal* | Meter | - | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
| | *-Kerikil* | Meter | - | 450-500 | 450-500 | 450-500 | 450-500 | 450-500 | 450-500 | 450-500 |
| | *-Tanah* | Meter | - | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 |
| | *-Lainnya* | Meter | - | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 6 | Luas Wilayah Banjir (Km2) | Km2 | 4.720,88 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 |
| 7 | Luas Kawasan Industri (Ha) | Ha | 20.165,00 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| 8 | Luas Kawasan Industri Kecil dan Menengah (Ha) | Ha | 90,00 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| 9 | Luas Pemukiman Perkotaan (Ha) | Ha | 10.884,67 | 11000-12000 | 11000-12000 | 11000-12000 | 11000-12000 | 11000-12000 | 11000-12000 | 11000-12000 |
| 10 | Jumlah Koperasi (Unit) | Unit | 65,00 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 |
| 11 | Perbankan | | - | | | | | | | 0 |
| | *Kantor Cabang (unit)* | Unit | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | *Kantor Cabang Pembantu (unit)* | Unit | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | *Kantor Kas (unit)* | Unit | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | *Payment Point (unit)* | Unit | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | *ATM (unit)* | Unit | 11,00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Perhotelan | | - | | | | | | | 0 |
| | *Akomodasi (unit)* | Unit | 53,00 | 53-55 | 53-55 | 53-55 | 53-55 | 53-55 | 53-55 | 53-55 |
| | *Kamar (unit)* | Unit | 719,00 | 720-725 | 720-725 | 720-725 | 720-725 | 720-725 | 720-725 | 720-725 |
| | *Tempat Tidur (unit)* | Unit | 836,00 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 |
| 13 | Restoran/Rumah Makan (unit) | Unit | - | 145-150 | 145-150 | 145-150 | 145-150 | 145-150 | 145-150 | 145-150 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 14 | Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak (%) | % | 91,84 | 91,84-92,54 | 92,54-93,24 | 93,24-93,94 | 93,94-94,64 | 94,64-95,34 | 95,34-97,00 | 95,34-97,00 |
| 15 | Rumah Tangga Akses Listrik (%) | % | 94,89 | 94,89-95,09 | 95,09-95,59 | 95,59-96,00 | 96,00-96,50 | 96,50-97,0 | 97,00-97,50 | 97,00-97,50 |
| 16 | Angka kriminalitas yang tertangani (%) | % | 78,92 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| 17 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (%) | % | - | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 18 | Kualitas Tenaga Kerja berdasarkan tingkat pendidikan | | - | | | | | | | 0 |
| | *< SD/Sederajat (%)* | % | 47,00 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| | *SMP/Sederajat (%)* | % | 16,90 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| | *SMA/ke atas (%)* | % | 24,50 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| | *Perguruan Tinggi (%)* | % | 11,70 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| 19 | Rasio Ketergantungan (%) | % | 51,82 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| **C** | **PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| **C.1** | **Pendidikan** | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Murid TK/RA (orang) | Orang | 4.537,00 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *SD/MI/Paket A* | % | 107,91 | 100-101 | 100-101 | 100-101 | 100-101 | 100-101 | 100-101 | 100-101 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | 80,23 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | 88,62 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
| 3 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *SD/MI/Paket A* | % | 38,98 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | 19,52 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | 21,59 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| | *Diploma I/II/II* | % | 2,13 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | *Diploma IV/S1/S2/S3* | % | 5,60 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *SD/MI/Paket A* | % | 98,94 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | 70,91 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | 63,33 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *SD/MI/Paket A* | % | 99,37 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | % | 95,19 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | % | 71,58 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| 6 | Jumlah Sekolah(unit) | | - | | | | | | | 0 |
| | *TK/RA* | Unit | 126,00 | 126-130 | 126-130 | 126-130 | 126-130 | 126-130 | 126-130 | 126-130 |
| | *SD/MI/Paket A* | Unit | 192,00 | 192-195 | 192-195 | 192-195 | 192-195 | 192-195 | 192-195 | 192-195 |
| | *SMP/MTs/Paket B* | Unit | 65,00 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| | *SMA/SMK/MA/Paket C* | Unit | 34,00 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| 7 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10.000) | per 10.000 | 81,25 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| 8 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10.000) | per 10.000 | 22,53 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| 9 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000) | per 1000 | 84,90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| 10 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (per 1000) | per 1000 | 74,20 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
| **C.2** | **Kesehatan** | | - | | | | | | | |
| 1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | per 1000 | 95,06 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| 2 | Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 kelahiran | per 1000 | 904,94 | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3 | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | per 1000 | 98,86 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| 4 | Angka Kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup | per 1000 | 26,62 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 5 | Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita) | per 1000 | 17,93 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 6 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10000) | per 10000 | 4,16 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 7 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100000) | per 100000 | 1,30 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 8 | Rasio dokter per satuan penduduk (per 10000) | per 10000 | 1,59 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 9 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10000) | per 10000 | 1,59 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 10 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | % | 92,47 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
| 11 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | % | 75,33 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
| 12 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | UCI | 75,34 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
| 13 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%) | % | 38,32 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| 14 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) | % | 82,62 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| 15 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 10000 penduduk) | per 10000 penduduk | 24,74 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| 16 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | per 100.000 penduduk | 1,95 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 17 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%) | % | 61,15 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| 18 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 19 | Penderita diare yang ditangani (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Angka kejadian Malaria (per 100000) | per 100000 | 5,20 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 21 | Tingkat kematian akibat malaria | malaria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | tepat | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Cakupan puskesmas (%) | % | 133,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Cakupan pembantu puskesmas (%) | % | 34,25 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| 25 | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **C.3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | **-** | | | | | | | |
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) | % | 21,91 | 21,91-22,00 | 22,00-24,00 | 24,00-26,00 | 26,00-28,00 | 28,00-30,00 | 30,00-35,00 | 30,00-35,00 |
| 2 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (m) | m | 702,04 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
| 3 | Persentase rumah tinggal bersanitasi layak (%) | % | 56,40 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| 4 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | % | 38,00 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| 5 | Persentase penduduk berakses air minum (%) | % | 91,84 | 91,84-92,54 | 92,54-93,24 | 93,24-93,94 | 93,94-94,64 | 94,64-95,34 | 95,34-97,00 | 95,34-97,00 |
| 6 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000) | per 1000 | 2,34 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| **C.4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | - | | | | | | | |
| 1 | Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *-Beton* | % | 0,26 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 |
| | *-Genteng* | % | 1,66 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 |
| | *-Kayu/Sirap* | % | 0,42 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 | 0,0-0,1 |
| | *-Seng* | % | 85,73 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | *-Asbes* | % | 0,22 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| | *-Ijuk* | % | 11,62 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| | *-Bambu* | % | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *-Lainnya* | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *-Bukan Tanah* | % | 98,42 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 |
| | *-Tanah* | % | 1,58 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| 3 | Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *-Tembok* | % | 58,57 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| | *-Kayu* | % | 39,99 | 40-30 | 40-30 | 40-30 | 40-30 | 40-30 | 40-30 | 40-30 |
| | *-Bambu* | % | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *-Lainnya* | % | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Persentase Rumah Tangga menurut Pembuangan Akhir Tinja (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *-Tangki Septik* | % | 76,18 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
| | *-IPAL* | % | - | | | | | | | 0 |
| | *-Kolam/Sungai* | % | 16,56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | *-Lubang Tanah* | % | 5,24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | *-Pantai/Tanah Terbuka* | % | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *-Lainnya* | % | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C.5** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | **-** | | | | | | | |
| 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%) | % | 12,64 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) | % | 86,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Penegakan PERDA (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **C.6** | **Sosial** | | **-** | | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) | % | 32,00 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 2 | Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalaui KUBE (orang) | Kelompok | 30,00 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 3 | Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (orang) | Orang | 16,00 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 4 | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (orang) | Orang | 727,00 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| **D** | **LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | - | | | | | | | |
| D.1 | **Tenaga Kerja** | | - | | | | | | | |
| 1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) | % | 19,19 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| 2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%) | % | 63,64 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) | % | 31,84 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 4 | Keselamatan dan perlindungan (%) | % | 46,58 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%) | % | 46,58 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| D.2 | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | - | | | | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | % | 59,08 | 58-60 | 58-60 | 58-60 | 58-60 | 58-60 | 58-60 | 58-60 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%) | % | 4,00 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| 3 | Persentase Angkatan Kerja perempuan (%) | % | 40,36 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
| 4 | Persentase penduduk perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas yang status pekerjaan utama berusaha sendiri (%) | % | 27,38 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 26-27 |
| 5 | Persentase pencari kerja perempuan yang terdaftar (%) | % | 36,96 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 37-40 |
| 6 | Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian (%) | % | 35,38 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| 7 | Proporsi tenaga kerja perempuan di luar sektor pertanian (%) | % | 64,62 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| 8 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.3 | **Pangan** | | | | | | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama (kg) | Kg | 4.442,00 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| 2 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **D.4** | **Pertanahan** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat (m2) | M2 | 5,90 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah Negara (%) | % | 80,00 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 |
| **D.5** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| **D.6** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 87,80 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | % | 36,50 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala daerah | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6 | Cakupan penerbitan akta kelahiran (%) | % | 87,80 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
| **D.7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok) | Kelompok | 15,20 | 16-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| 2 | Persentase LSM aktif (%) | % | 6,80 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 3 | Persentase PKK aktif (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Posyandu aktif (%) | % | 77,50 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
| 5 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) | % | 94,90 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
| **D.8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 1,69 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 2 | Ratio Akseptor KB (%) | % | - | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
| 3 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%) | % | 30,50 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 |
| 4 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 6 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%) | % | 100,00 | 98-100 | 98-100 | 98-100 | 98-100 | 98-100 | 98-100 | 98-100 |
| **D.9** | **Perhubungan** | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Melalui Bandara/Pelabuhan (orang) | | - | | | | | | | 0 |
| | *Bandara Tanjung Api* | | - | | | | | | | 0 |
| | *-Datang* | orang | 2.874,00 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| | *-Berangkat* | orang | 173,00 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| | *Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong* | | - | | | | | | | 0 |
| | *-Datang* | orang | 58.236,00 | 59000-60000 | 59000-60000 | 59000-60000 | 59000-60000 | 59000-60000 | 59000-60000 | 59000-60000 |
| | *-Berangkat* | orang | 57.570,00 | 57000-58000 | 57000-58000 | 57000-58000 | 57000-58000 | 57000-58000 | 57000-58000 | 57000-58000 |
| 2 | Jumlah uji kir angkutan umum (unit) | Unit | 80,00 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
| 3 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (buah) | Buah | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Persentase layanan angkutan darat (%) | % | 1,90 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 5 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m) | Meter | 36,90 | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 37-38 |
| 6 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | 7,80 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 7 | Jumlah Barang Melalui Bandara/Pelabuhan (Ton) | | - | | | | | | | 0 |
| | *Bandara Tanjung Api* | | - | | | | | | | 0 |
| | *-Bongkar* | Ton | 927,00 | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 |
| | *-Muat* | Ton | 643,00 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| | *Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong* | | - | | | | | | | 0 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | *-Bongkar* | Ton | 5.646,00 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| | *-Muat* | Ton | 83.600,00 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 | 85000-100000 |
| **D.10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Wilayah Akses Layanan Internet dan Telepon Seluler (%) | | - | | | | | | | 0 |
| | *4G/LTE* | % | 0,68 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 |
| | *3G/H/H+/EVDO* | % | 0,12 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 |
| | *2,5G/E/GPRS* | % | 0,04 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 |
| | *Tidak ada* | % | 0,16 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 |
| 2 | Jumlah Kantor Pos | % | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **D.11** | **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah** | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif (Unit) | Unit | 65,00 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| **D.12** | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan) | Perusahaan | 26,00 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Miliar) | Rp.Miliar | 91,67 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
| 3 | Jumlah tenaga kerja yang bekerja (PMDN/PMA) (orang) | orang | 1.135,00 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 |
| **D.13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | Cakupan pembinaan olahraga (%) | % | 33,30 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| 3 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi(%) | % | 46,20 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |

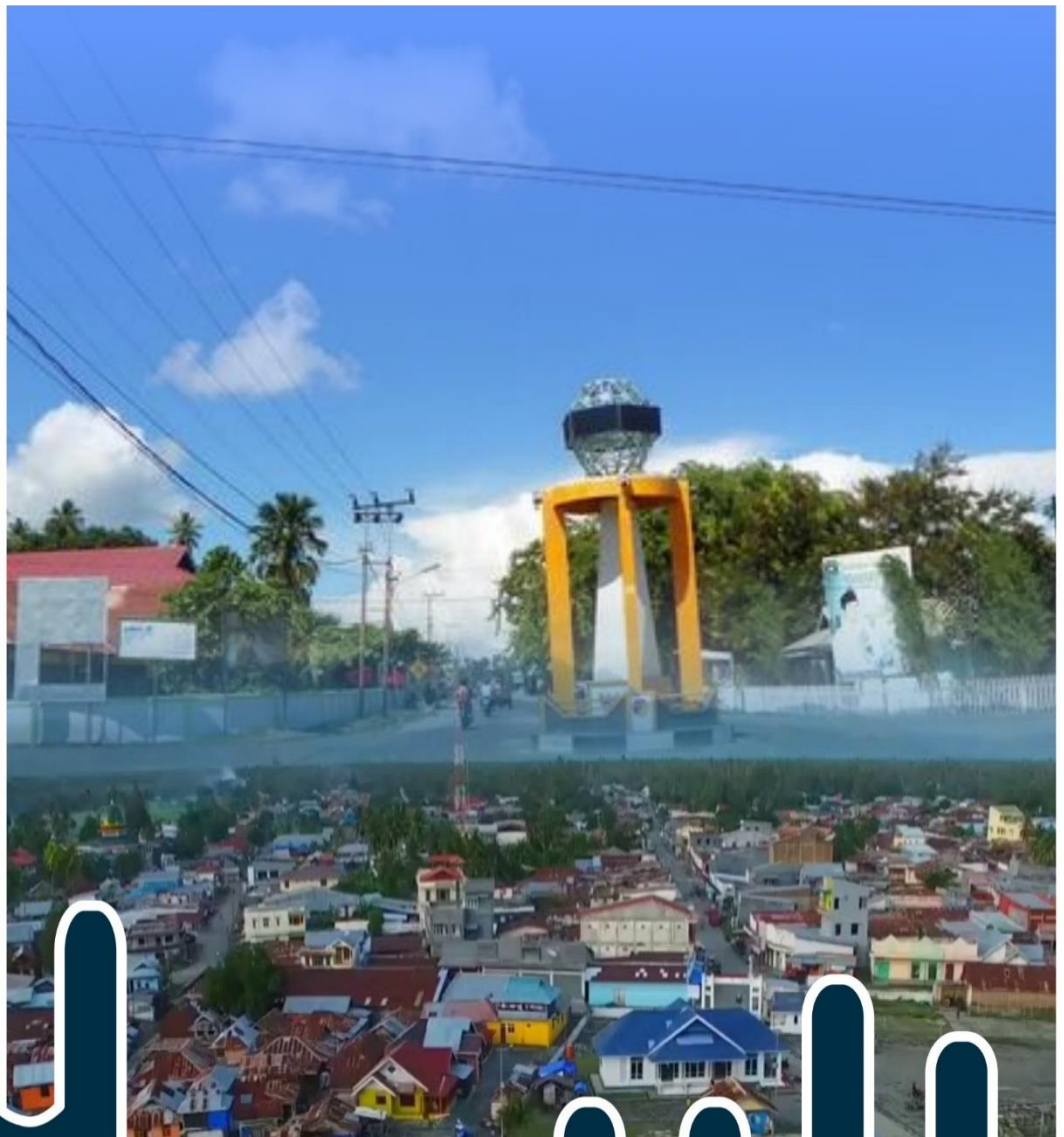
| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4 | Cakupan pembinaan atlet muda (%) | % | 12,50 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 |
| 5 | Jumlah atlet berprestasi (orang) | orang | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| **6** | Jumlah prestasi olahraga (buah) | Buah | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| **D.14** | **Statistik** | | **-** | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Buku ”kabupaten dalam angka” | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Buku ”PDRB” | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| **D.15** | **Persandian** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%) | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D.16** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | % | 78 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,77777778 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (buah) | Buah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (buah) | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **D.17** | **Perpustakaan** | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) | orang | 1.570,00 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Exp.) | Exp. | 4.654,00 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
| 3 | Rasio perpustakaan (unit) | Unit | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (orang) | orang | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **D.18** | **Kearsipan** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | % | - | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali) | kali | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| **E** | **LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| **E.1** | **Pariwisata** | | | | | | | | | |
| 1 | Capaian Kunjungan Wisata (%) | % | 126,77 | 100-110 | ` | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 |
| 2 | Jumlah Kunjungan wisatawan (orang) | orang | 7.606,00 | 13000-15000 | 13000-15000 | 13000-15000 | 13000-15000 | 13000-15000 | 13000-15000 | 13000-15000 |
| **E.2** | **Pertanian** | | | | | | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) | % | 38,68 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 |
| 4 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) | % | 42,37 | 42-43 | 42-43 | 42-43 | 42-43 | 42-43 | 42-43 | 42-43 |
| **E.3** | **Kehutanan** | | - | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) | % | 0,11 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 2 | Kerusakan Kawasan Hutan (%) | % | 20,38 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 |
| **E.4** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | 0 |
| 1 | Persentase rumah tangga pengguna listrik (%) | % | 94,89 | 94,89-95,09 | 95,09-95,59 | 95,59-96,00 | 96,00-96,50 | 96,50-97,0 | 97,00-97,50 | 97,00-97,50 |
| **E.5** | **Perdagangan** | | | | | | | | | |
| 1 | Ekspor Bersih Perdagangan (%) | % | 3,80 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| **E.6** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | |
| 1 | Produksi Perikanan (ton) | Ton | 225.765,18 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 2 | Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) | Kg/Kapita | 83,40 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| 3 | Cakupan Bina kelompok nelayan (%) | % | 3,30 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **F** | **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | |
| **F.1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Tersedia | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **F.2** | **Keuangan** | | | | | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase belanja pendidikan (20%) | Proporsi | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% |
| 3 | Persentase belanja kesehatan (10%) | Proposi | >10% | >10% | >10% | >10% | >10% | >10% | >10% | >10% |
| 4 | Penetapan APBD | Predikat | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| **F.3** | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 0,14 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan (%) | % | 1,74 | 1,7-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-13 | 10-13 |
| 3 | Jumlah Jabatan administrasi | Jumlah | 1.999,00 | 1.994,00 | 1.989,00 | 1.984,00 | 1.979,00 | 1.974,00 | 1.969,00 | 1969 |
| 4 | Jumlah pemangku jabatan fungsional | Jumlah | 2.287,00 | 2.290,00 | 2.293,00 | 2.296,00 | 2.299,00 | 2.302,00 | 2.305,00 | 2305 |

| No. | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **F.4** | **Pengawasan** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | % | 75,00 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| 2 | Jumlah temuan BPK | kasus | 65,00 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| **F.5** | **Sekretariat Dewan** | | **-** | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD | Tersedia | ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya ProgramProgram Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Tersedia | ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Tersedia | ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Hasil Analisis dan FGD 2021



# BAB 9

# PENUTUP

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

## 9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 merupakan panduan bagi Pemerintah Tojo Una-Una serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya pada Periode jabatan Bupati Wakil Bupati tahun 2021-2024 serta masa transisi RPJMD tahun 2025-2016;

2. Seluruh Perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA-PD) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program prioritas pembangunan dilengkapi dengan target kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;

3. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan selalu menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

4. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dengan Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una dengan Rencana Kerja SKPD;

5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tojo Una-Una wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis

Seluruh PD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;

6. Dalam pencapaian saran pembangunan dari Desa sampai Kabupaten maka RPJMD akan diharmonisasikan dengan Dokumen perencanaan Desa khususnya RPJM Desa agar terjadi sinergisitas pembangunan antara Kabupaten dan Desa melalui peran pemerintah Kecamatan, Bapelitbangda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 dimana Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 masih dalam tahap proses penyusunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program Prioritas ***Bupati H. Muhammad Lahay, SE.,MM dan Wakil Bupati Ilham Lawindu, SH*** Kabupaten Tojo Una-Una hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2022.

8. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023-2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 ini dengan memperhatikan memperhatikan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023-2024.

9. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui usulan pembiayaan dari APBD Provinsi, APBN Pusat, Maupun Program Prioritas Dana Desa, serta skema kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responbility* (CSR), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah maupun lembaga-lembaga Lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.

## 9.2 PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una periode berikutnya Tahun 2026–2031 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan

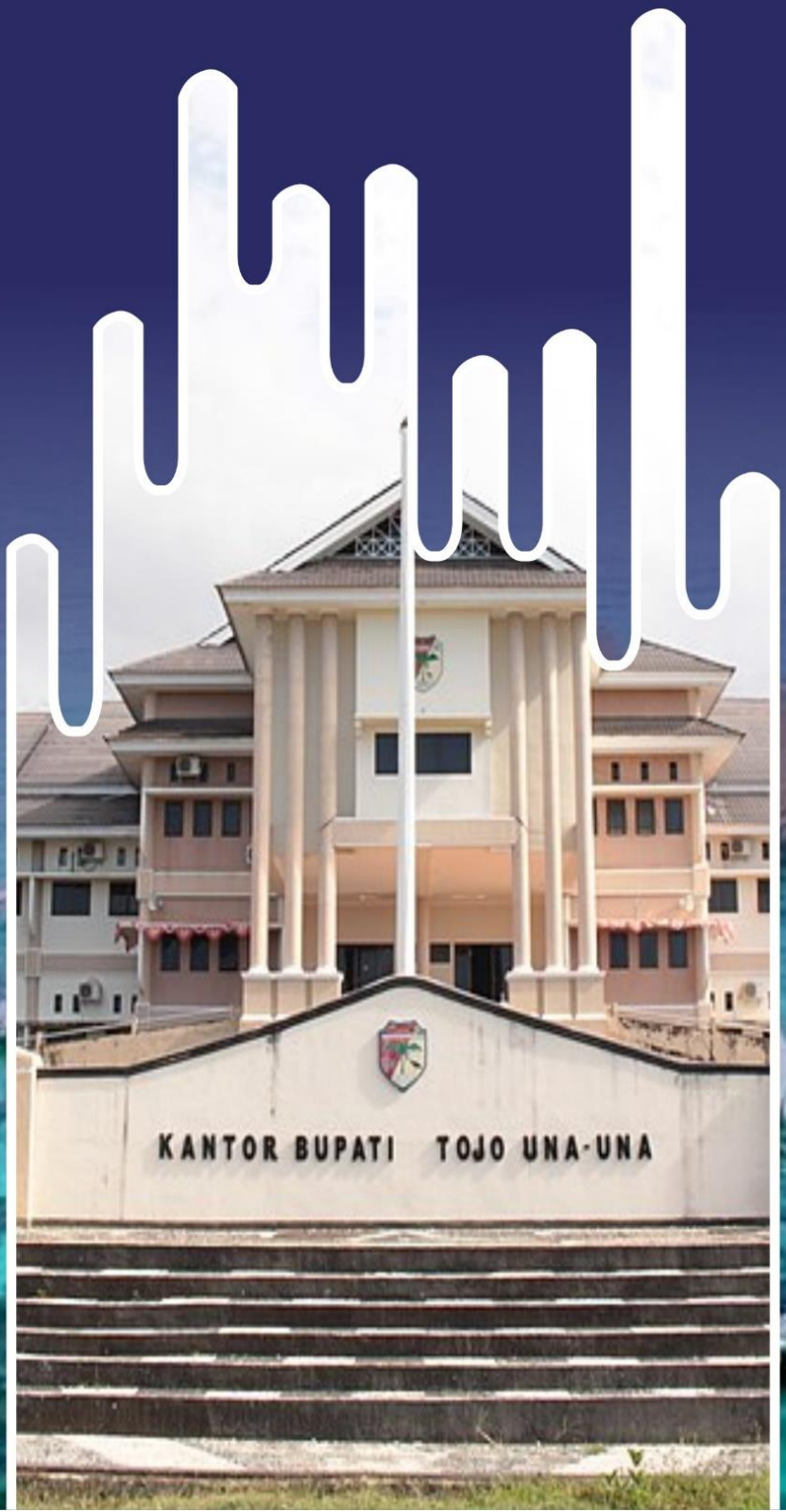
Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Periode selanjutnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dan tahun 2025. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una. Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan RKPD 2026 akan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025-2026. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 dan tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025-2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Tengah dan nasional dan aspek lainnya yang berdampak signifikan pada pembangunan daerah.

**Bupati Tojo Una-Una**,

***H. Muhammad Lahay, SE. MM***


KANTOR BUPATI TOJO UNA-UNA